

GREENPEACE



HITUNG MUNDUR TERAKHIR



**SEKARANG ATAU
TIDAK SAMA SEKALI
UNTUK MEREFORMASI
INDUSTRI KELAPA SAWIT**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2010, para anggota dari forum produk konsumen (*Consumer Goods Forum*) berjanji untuk membersihkan rantai pasok komoditas global pada tahun 2020.¹ Upaya mereka tidak diawali dengan awal yang baik, karena ambisinya terlalu terbatas dan upaya tersebut tidak diperkuat dengan baik. Namun pada bulan Desember 2013, ada perkembangan yang signifikan: pedagang minyak sawit terbesar dunia, Wilmar International, membuat komitmen 'tidak melakukan deforestasi, tidak mengkonversi gambut, tanpa mengeksploitasi manusia' (NDPE). CEO Wilmar Kuok Khoo Hong berjanji bahwa dalam waktu dua tahun perusahaan hanya akan memperdagangkan minyak sawit dari produsen yang bertanggung jawab yang telah melindungi lingkungan dan menghormati hak asasi manusia.²

Janji ini merupakan reaksi terhadap kritik bertahun-tahun terhadap pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia industri kelapa sawit, yang terus berlanjut meskipun telah terbentuk Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) satu dekade sebelumnya. Pedagang lainnya dan para pelanggan mereka mengikuti langkah ini, dan dalam waktu setahun sebagian besar pedagang minyak sawit Indonesia - dan merek-merek yang mereka pasok - telah menerbitkan kebijakan NDPE mereka sendiri. Kebijakan para pedagang tidak hanya mencakup perkebunan mereka sendiri, namun juga kelompok perkebunan pihak ketiga sebagian besar produsen minyak sawit mereka berasal.

Sejak akhir tahun 2014, semua persyaratan telah dikembangkan untuk menjadikan komitmen 'tanpa deforestasi' sebagai standar baru bagi industri minyak sawit. Mayoritas produsen minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia sekarang yang berkomitmen terhadap perlindungan hutan mencakup sebagian besar perusahaan; analisis terbaru menunjukkan bahwa pedagang yang memiliki kebijakan NDPE mengoperasikan 74% dari total kapasitas kilang di Indonesia dan Malaysia.³ Namun, deforestasi untuk pengembangan minyak sawit nyaris tidak menunjukkan tanda-tanda perlambatan - karena meskipun merek-merek dan para pemasok mereka memiliki kebijakan ini, mereka sama sekali gagal menerapkannya secara efektif.

Masalah-masalah yang dihadapi perusahaan ketika mengambil pasokan sumber komoditas berisiko tinggi seperti minyak sawit dipahami dengan baik. Ekspansi industri kelapa sawit di wilayah hutan hujan dan lahan gambut telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap masyarakat dan satwa liar Indonesia, serta iklim

'Banyak orang berpikir jika Anda mengalihdayakan rantai pasok Anda, Anda dapat mengalihkan tanggung jawab Anda. Saya tidak berpikir demikian. Kita harus berada di garis terdepan perubahan. Inilah sebabnya mengapa Unilever berkomitmen terhadap transparansi yang lebih besar dan terus bekerja dengan mitra-mitra kami untuk mendorong perubahan positif dalam industri minyak sawit.'⁶

Paul Polman, CEO, Unilever



25 Maret 2018,
PT Plasma Nufath Marind Papua (Moorim),
Papua, 7°53'5.837"S 140°0'20.454"E
©Ifansasti/Greenpeace



20 September 2015, Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan, 1°17'7.269"S 110°4'6.644"E ©Greenpeace

'Anda terbang di atas hutan hujan Indonesia, membakar dan membuka lahan untuk memproduksi minyak sawit dan mendengar begitu banyak tentangan dan perkataan 'bukankah itu buruk'. Namun, kita harus bertanggung jawab. Minyak sawit terdapat dalam begitu banyak produk yang kita makan [...] - kita tidak dapat menghindarinya. Cukup mudah untuk [menyalahkan] bangsa Indonesia, tetapi kita terus menerima hal ini; itu tergantung pada kita.'

Sir David Attenborough



25 Maret 2018, PT Plasma Nuffah Marind Papua (Moorim), Papua, 7°53'13.823"S 140°0'19.158"E ©Ifansasti/Greenpeace



18 Desember 2017, PT Pusaka Agro Lestari (Noble), Papua, 4°20'22.469"S 136°41'3.649"E ©Sukarno/Greenpeace

global kita. Namun, bertahun-tahun setelah pengumuman kebijakan NDPE mereka, merek-merek dan para pedagang masih jatuh di rintangan pertama karena gagal mengidentifikasi kelompok produsen dalam rantai pasok mereka dan memantau di seluruh operasi mereka. Dalam banyak kasus, perusahaan-perusahaan tersebut mengambil pasokan minyak sawit dari perkebunan yang telah berdiri lama sementara perusahaan yang sama menghancurkan hutan untuk membuka perkebunan baru di tempat lain. Meskipun demikian, perusahaan dengan merek-merek terkemuka dan para pedagang tidak menyediakan – dan tidak mengharuskan pemasok mereka untuk menyediakan – peta-peta konsesi yang dapat menunjukkan apakah kelompok produsen yang memasok mereka telah mematuhi kebijakan NDPE mereka atau masih terus membuka hutan. Tanpa informasi ini, mereka tidak memiliki cara untuk menjamin bahwa mereka tidak mengambil pasokan minyak sawit dari perusak hutan hujan.

Meskipun telah berjanji untuk membersihkan rantai pasok mereka pada tahun 2020, merek-merek tersebut serta para pemasok mereka masih terus mengambil minyak sawit dari produsen yang menghancurkan hutan hujan. Paruh kedua dari laporan ini mendokumentasikan tindakan deforestasi dan pelanggaran HAM yang meluas oleh 25 kelompok produsen minyak sawit, semua kecuali satu dari perusahaan tersebut telah memasok merek tersebut dengan minyak sawit dalam kurun 12 bulan terakhir. Di antara mereka, para produsen itu diketahui telah menghancurkan lebih dari 130.000ha hutan dan gambut sejak 2015, yang setara dengan area seluas dua kali negara Singapura⁴ – dan hal ini hanya merupakan perumpamaan yang digunakan dalam skala yang lebih kecil, karena luas kolektif total cadangan kepemilikan lahan mereka tidak diketahui. Dari total kerusakannya terdapat 40%–seluas 56,000 Ha terjadi di Papua, Indonesia yang menjadi tujuan terbaru dalam perang industri minyak sawit terhadap lingkungan hidup.

Sebagai pedagang minyak sawit terbesar di dunia – dan yang pertama mempublikasikan kebijakan NDPE – Wilmar International menanggung banyak kesalahan atas

pengrusakan hutan hujan Indonesia yang terus terjadi untuk pengembangan minyak sawit. Analisis Greenpeace menunjukkan bahwa Wilmar tidak hanya memperdagangkan minyak kelapa sawit dari produsen-produsen yang lebih merusak juga merupakan para pesaing mereka, seringkali juga menjadi rute utama produsen-produsen ini ke pasar. The Forest Trust (TFT) dan konsultan-konsultan lain yang mendukung perusahaan dalam pelaksanaan kebijakan NDPE mereka juga harus menjelaskan kegagalan mereka untuk meminta pertanggungjawaban klien.

Saat ini industri minyak sawit berada pada titik 'sekarang atau tidak sama sekali'. Ketika suhu global semakin meningkat dan populasi spesies yang terancam punah semakin berkurang, perusahaan akan berada di bawah tekanan yang semakin besar untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka bersih atau mereka mengenyahkan seluruh komoditas berisiko tinggi. Masa depan industri minyak sawit dan sektor lainnya bergantung pada penerapan mereka terhadap model perdagangan baru yang didasarkan pada transparansi radikal, verifikasi independen dan tidak ada toleransi untuk deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Wilmar harus memimpin dari depan. Mereka harus membuktikan mereka tidak lagi mengambil pasokan dari perusak hutan, dengan mewajibkan semua kelompok produsen dalam rantai pasoknya untuk mempublikasikan data lokasi pabrik mereka dan peta-peta konsesi untuk seluruh operasi mereka serta memutuskan hubungan dagang dengan semua yang menolak melakukannya. Wilmar harus sepenuhnya mengubah rantai pasoknya, sehingga pada tahun 2020 hanya mereka yang menjalin hubungan dagang dengan produsen yang seluruh operasinya telah diverifikasi secara independen sesuai dengan semua aspek kebijakan NDPE-nya – bahkan meskipun itu berarti mereka harus menjual lebih sedikit minyak sawit.

CEO Wilmar, Kuok Khoo Hong, berjanji di tahun 2013 untuk memasok pasar dengan minyak sawit bebas deforestasi. Dengan hanya tersisa kurang dari 500 hari menuju tahun 2020, hitung mundur akhir telah dimulai.



7 Mei 2013, PT Palma Satu (Duta Palma), Riau, 0°31'30.15"S 102°41'49.77"E ©Jufri/Greenpeace

DAFTAR ISI



RINGKASAN EKSEKUTIV	IV
BAGIAN 1: HITUNG TERAKHIR	
WAKTU SEMAKIN MENIPIS BAGI HUTAN HUJAN INDONESIA	2
KEBIJAKAN, JANJI DAN IKRAR — TAPI TANPA AKSI	7
PERDAGANGAN KOMODITAS DENGAN RISIKO YANG TINGGI	9
Wilmar International: Pedagang Pembangkit	12
BERSEMBUNYI DI DEPAN MATA: BAGAIMANA PRODUSEN MENGABURKAN KETERKAITAN MEREKA DENGAN DEFORESTASI	15
KEBOCORAN KILANG	19
KONSULTAN KEBERLANJUTAN — TEMAN ATAU MUSUH?	20
INDUSTRI KELAPA SAWIT HARUS BERTINDAK SEKARANG ATAU TIDAK ADA KESEMPATAN LAGI	24
SAATNYA BERTINDAK PARA	27
BAGIAN 2: STUDI KASAS	
PRODUSEN KOTOR DI PASAR GLOBAL	30
Anglo Eastern Plantations	32
Austindo Nusantara Jaya	36
Bumitama	40
Central Cipta Murdaya	48
Citra Borneo Indah	50
Djarum	54
DTK Opportunity	58
Fangiono	60
FELDA FGV	66
GAMA/Ganda	70
Genting	78
Hayel Saeed Anam	82
IJM Corporation	88
Indonusa	90
IOI	94
Korindo	98
Lembaga Tabung Haji	110
Noble Group	114
NPC Resources	120
POSCO / Deawoo	124
Rimbunan Hijau	128
Salim	132
Samling/Glenealy	138
Sungai Budi	142
Keluarga Tee	146
BAGIAN 3: MATERI AKHIR	
Lampiran dan Apendiks	150
Catatan Kaki	
Bagian 1: Hitung Terakhir	162
Bagian 2: Studi Kasus	164
Bagian 3: Lampiran	172
Bibliografi	174

15 September 2003,
Danau Pindaunde, Papua New Guinea
©Mauthe/Greenpeace

WAKTU SEMAKIN MENIPIS BAGI HUTAN HUJAN INDONESIA

Sektor perkebunan - kelapa sawit dan bubur kertas - merupakan pemicu tunggal terbesar penggundulan hutan di Indonesia dan Malaysia.⁹ Menurut angka-angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, sekitar 24 juta hektar (ha) hutan hujan negara ini dihancurkan antara tahun 1990 dan 2015⁹ - sebuah wilayah yang hampir seluas negara Inggris¹⁰ - dengan kehilangan 1,6 juta ha lebih antara tahun 2015 dan 2017.¹¹ Sekitar seperlima (19%) dari deforestasi Indonesia antara tahun 2015-2017 terjadi di konsesi kelapa sawit.¹²

Pengrusakan hutan hujan Indonesia adalah salah satu krisis global. Deforestasi dan pengrusakan lahan gambut adalah sumber utama emisi gas rumah kaca; pengrusakan hutan hujan telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi global terbesar, di samping Amerika Serikat dan Cina.

Pengembangan perkebunan merupakan akar penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia, di mana banyak kebakaran merupakan kegiatan disengaja untuk membersihkan lahan sebelum penanaman. Pada bulan Juli 2015, kebakaran hutan dan lahan gambut yang menghancurkan, meluas di banyak wilayah Sumatra, Kalimantan dan Papua menghentikan operasi penerbangan serta memaksa penutupan sekolah dan kantor di seluruh wilayah tersebut. Selama bulan September dan Oktober 2015, emisi gas rumah kaca (GRK) harian dari kebakaran hutan tersebut secara konsisten melampaui emisi GRK Amerika Serikat.¹³ Kebakaran-kebakaran ini juga menghasilkan kabut asap yang merugikan jutaan orang di Asia Tenggara: para peneliti di Universitas Harvard dan



4 Oktober 2007,
Sungai Kapuas, Kalimantan
©Behring/Greenpeace

Columbia memperkirakan, bahwa 100.000 orang mengalami kematian dini akibat penyakit pernapasan yang terkait dengan kabut asap tahun 2015.¹⁴ Bank Dunia menghitung biaya kerugian akibat bencana ini mencapai US\$ 16 miliar.¹⁵

Deforestasi untuk perkebunan bubur kertas dan kelapa sawit telah menghancurkan hutan-hutan dataran rendah di Sumatra dan Kalimantan, menghancurkan habitat penting untuk harimau, gajah, badak, orangutan dan spesies terancam punah lainnya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa hanya tersisa dua populasi kembang biak yang layak dari harimau Sumatra di alam liar.¹⁶ Jumlah orangutan Borneo mengalami penurunan lebih dari 50% antara tahun 1999 dan 2015, dengan tidak lebih dari 70.000–100.000 ekor yang tersisa.¹⁷ Pada tahun 2015–2017, lebih dari seperempat (28%) dari hilangnya habitat orangutan Borneo di hutan Indonesia terjadi di konsesi kelapa sawit.¹⁸ Lebih dari 69% habitat potensial untuk gajah Sumatra telah dihancurkan hanya dalam satu generasi.¹⁹ Badak Sumatera dikatakan dalam kondisi kritis,²⁰ dengan kurang dari 100 ekor yang tersisa di alam liar.²¹ Krisis di Indonesia berisiko kembali terjadi karena industri kelapa sawit meluas ke negara-negara dan wilayah-wilayah baru: menurut Lembaga konservasi dunia, International Union for Conservation of Nature (IUCN), kawasan yang belum dikembangkan dan cocok untuk produksi minyak sawit merupakan tempat tinggal bagi setengah dari mamalia terancam di dunia, dan hampir dua pertiga dari semua burung yang terancam.²²

Pelobi minyak sawit berbicara tentang kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Indonesia dan menyajikannya sebagai jalur hidup bagi petani kecil. Pada kenyataannya, manfaat ekonomi dari booming minyak sawit jatuh pada segelintir orang yang memang sudah kaya yang mengendalikan perusahaan-perusahaan perkebunan besar.²³ Bahkan inisiatif yang diharapkan membantu petani kecil, seperti pungutan ekspor pemerintah Indonesia, disalahgunakan untuk memberikan lebih banyak dukungan kepada para pemain terbesar di sektor ini.²⁴

Sebaliknya, banyak akibat yang telah ditanggung oleh pekerja dan masyarakat. Konflik sosial antara masyarakat setempat dan perusahaan perkebunan - termasuk yang banyak dimiliki oleh pedagang besar - tersebar luas, brutal dan tidak terselesaikan.²⁵ Organisasi non-pemerintah (LSM) dan serikat pekerja melaporkan bahwa bahkan perkebunan yang telah disertifikasi sebagai 'berkelanjutan' seringkali menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mempekerjakan anak dan menerapkan kerja paksa.²⁶ Pekerja di industri kelapa sawit secara rutin terpapar pestisida berbahaya, dibayar di bawah upah minimum dan dihalangi untuk membentuk serikat pekerja untuk mencari ganti rugi²⁷ - jauh dari gambar-gambar pekerja perkebunan dengan senyum di bibirnya yang mendominasi laporan keberlanjutan perusahaan.

Kegagalan industri kelapa sawit untuk mengatasi deforestasi dan praktik-praktik buruk lainnya menempatkan masa depan jangka panjang industri ini didalam keraguan. Opini publik di banyak pasar utama sudah berbalik menentang minyak sawit. Dalam jajak pendapat di seluruh dunia, responden secara konsisten menilai komoditas tersebut sebagai minyak nabati yang paling merusak



lingkungan,²⁸ meskipun minyak lain (seperti minyak kedelai) juga sama-sama bermasalah.²⁹ Uni Eropa (UE) telah mendebatkan penghapusan subsidi untuk bahan bakar nabati yang dibuat dari minyak sawit.³⁰ Pasar-pasar swalayan di Austria³¹ dan Inggris³² telah mulai menghapus minyak sawit secara bertahap dari produk merek mereka sendiri; peritel Eropa lainnya diperkirakan akan mengikutinya. Seruan kepada merek-merek tersebut untuk berhenti menggunakan minyak sawit hanya akan semakin keras bergaung sampai para pedagang dapat menunjukkan bahwa mereka hanya mengambil pasokan dari produsen yang bertanggung jawab yang mematuhi standar NDPE.

1 April 2018,
PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua,
6°26'48.948"S 140°14'20.087"E
©Ifansasti/Greenpeace

**BAGAIMANA KINERJA
PARA MEREK
TERNAMA UNTUK
IMPLEMENTASI NDPE**

	NDPE KEBIJAKAN	PEDAGANG/ PEMASOK	PABRIK/ PRODUSEN	100% BERSIH MINYAK SAWIT
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
FERRERO	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
HERSHEY'S	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
L'ORÉAL	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✗
	✓	✗	✗	✗
	✓	✓	✓	✗

KEBIJAKAN, JANJI DAN IKRAR — TAPI TANPA AKSI

Pada hari pertama KTT iklim di Cancun pada tahun 2010, *Consumer Goods Forum* mengakui bahwa deforestasi untuk komoditas pertanian merupakan kontributor utama krisis iklim global dan forum ini membuat komitmen tegas untuk menghilangkan kerusakan hutan hujan dari rantai pasok minyak sawit dan komoditas berisiko tinggi lainnya selambat-lambatnya pada tahun 2020.³³ Pada akhir tahun 2016, terdapat 447 perusahaan termasuk merek maupun pedagang, telah membuat komitmen publik untuk mengatasi deforestasi dalam rantai pasok mereka.³⁴ Beberapa perusahaan telah mengabdikan komitmen ini ke dalam kebijakan NDPE khusus komoditas yang memiliki tenggat waktu tahun 2020.

Pada awal tahun 2018, Greenpeace International menantang merek-merek terkemuka, yang masing-masing memiliki kebijakan NDPE khusus kelapa sawit, dengan mengungkap kegiatan pabrik-pabrik yang memproduksi minyak sawit mereka dan nama-nama kelompok-kelompok produsen yang mengendalikan pabrik-pabrik tersebut. Jika diungkapkan, informasi ini akan menunjukkan apakah merek-merek tersebut memiliki perusak hutan dalam rantai pasok mereka. Banyak yang menanggapi tantangan tersebut dengan positif; pada saat penulisan laporan ini, 17 merek telah mengungkapkan data-data ini. Dengan demikian, merek-merek ini telah memaksa beberapa pedagang kelapa sawit yang sebelumnya tidak transparan untuk memberitahukan kelompok-kelompok produsen dan pabrik kelapa sawit dalam rantai pasok mereka sendiri, yang membantu menetapkan sebuah dasar baru untuk transparansi yang diharapkan dapat dipertahankan oleh semua perusahaan.

Namun, pada saat yang sama, informasi rantai pasok yang diungkapkan oleh merek-merek dan pedagang menunjukkan bahwa hanya sedikit kemajuan yang dicapai untuk membersihkan perdagangan minyak sawit global. Setiap perusahaan yang telah membuka informasi rantai pasoknya untuk pengawasan publik telah mengambil pasokan dari produsen yang diketahui membuka hutan hujan, mengeksploitasi pekerja mereka dan/atau terlibat dalam sengketa lahan dengan masyarakat setempat.

Hal ini sudah tidak mengherankan lagi: seperti yang secara konsisten dinyatakan Greenpeace dan LSM lain, merek-merek tersebut telah gagal untuk mengambil tindakan sehubungan dengan penerapan kebijakan

NDPE mereka.³⁵ Sebaliknya, mereka telah mengalihkan banyak tanggung jawab kepada konsultan keberlanjutan mereka, seperti TFT dan juga kepada para pemasok mereka, termasuk pedagang komoditas global seperti Golden Agri-Resources (GAR), Musim Mas dan Wilmar. Banyak merek yang menghabiskan aktivitasnya lebih mengukur kemajuan dalam hal persentase pemasok mereka yang telah menerbitkan kebijakan NDPE, daripada dalam hal penerapan kebijakan tersebut.

Terdapat perbedaan besar antara memiliki kebijakan dan mengimplementasikannya. Seperti yang ditunjukkan Greenpeace dalam laporannya di bulan November 2017, *Still Cooking the Climate*,³⁶ para pedagang sebagian besar gagal membangun sistem yang berarti, baik secara individual maupun secara kolektif, untuk menegakkan komitmen NDPE mereka. Hal yang sama berlaku untuk para pelanggan mereka.³⁷ Analisis kami menunjukkan bahwa empat tahun setelah mereka membuat komitmen, para pedagang dan merek konsumen masih:

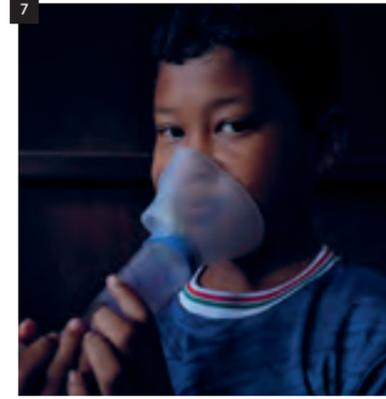
- gagal mewajibkan kelompok-kelompok produsen dalam rantai pasok mereka untuk mempublikasikan peta-peta konsesi dan mengungkapkan skala operasi mereka;
- gagal memantau secara proaktif seluruh rantai pasok mereka untuk mengidentifikasi semua kelompok produsen yang masih terlibat dalam deforestasi;
- gagal memastikan kelompok-kelompok produsen untuk menghentikan dan kemudian memperbaiki deforestasi mereka (dan perilaku tidak patuh lainnya) secara transparan dan terikat waktu;
- gagal mengecualikan kelompok-kelompok produsen yang tidak memenuhi tenggat waktu atau menolak untuk melakukan reformasi;
- gagal mendapatkan verifikasi independen bahwa semua kelompok produsen yang tersisa sepenuhnya patuh dengan standar NDPE di seluruh operasi mereka.

Sebagai akibat dari kegagalan kolektif ini, pasar global tetap terkontaminasi dengan minyak sawit dari beberapa kelompok produsen yang paling merusak di Asia Tenggara. Dengan kata lain, merek-merek tidak hanya ikut serta dalam penghancuran hutan hujan dan eksploitasi masyarakat adat, namun secara aktif turut mendanai perusahaan-perusahaan tersebut.

1 25 Juni 2005, hasil citra satelit MODIS
 2 23 Juni 2013, PT Rokan Adiraya, Riau, 1°10'8.4"N100°50'54.83"E @Ifansasti/
 Greenpeace 3 23 Juni 2013, PT Rokan Adiraya, Riau, 1°10'8.4"N100°50'54.85"E @Ifansasti/Greenpeace 4 31 Maret 2018, PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua, 6°26'9.25"S140°15'4.25"E @Ifansasti/

Greenpeace 5 23 Agustus 2018, Kubu Raya, Kalimantan @Hernawan/Greenpeace
 6 18 Juni 2013, Singapore @Natasya/
 Greenpeace 7 4 Juni 2014, Malaysia @Roslan/
 Greenpeace 8 24 Juni 2013, PT Bumi Langgeng Perdanatrada (Eagle High), Kalimantan, 2°46'28.799"S 111°50'30.7" @Greenpeace
 9 19 September 2017, Kalimantan @Sukarno/

Greenpeace 10 17 September 2013, PT Jatim Jaya Perkasa (GAMA), Riau, 1°55'55.41"N 100°49'33.19"E @Tambunan/Greenpeace



PERDAGANGAN KOMODITAS DENGAN RISIKO YANG TINGGI

Industri minyak sawit pada umumnya - dan merek-merek konsumen khususnya - terus memperlakukan aktivitas deforestasi sebagai pengecualian, bukan sebagai sebuah norma. Bertahun-tahun setelah mengadopsi kebijakan NDPE, merek dan pedagang masih tidak mampu memantau kelompok-kelompok produsen dalam rantai pasok mereka, sebagian dikarenakan kegagalan mereka untuk mengumpulkan peta-peta konsesi dan data-data lain yang diperlukan. Sebaliknya, para perusahaan ini bergantung pada LSM untuk mengidentifikasi deforestasi atau pelanggaran kebijakan lainnya dan mengajukan keluhan. Ketika LSM mengangkat kasus-kasus ketidakpatuhan oleh pemasok, merek dan pedagang memperlakukan mereka sebagai kasus terpisah yang layak mendapat 'keterlibatan' atau 'pemantauan'. Produsen yang tidak dikeluhkan dianggap telah mematuhi kebijakan NDPE, meskipun nyaris tidak ada alasan untuk memercayainya dan terdapat banyak bukti bahwa yang berlawananlah yang seringkali benar.

Dalam kondisi ini, prakarsa yang semestinya meningkatkan tata kelola dan transparansi di sektor ini seringkali kontraproduktif, karena mereka lebih banyak menghambat daripada mempercepat terjadinya sebuah perubahan. Publikasi peta-peta anggota RSPO yang telah lama ditunggu-tunggu³⁹ adalah salah satu contoh yang tepat di sini dalam teori, database pemetaan ini dapat menjadi alat yang tak ternilai, yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kepemilikan lahan masing-masing kelompok produsen dan deforestasi mana pun yang terjadi dalam konsesi mereka. Namun, RSPO telah memilih untuk merilis peta-peta ini dengan cara yang paling tidak bermanfaat, tanpa fungsi pencarian yang bekerja baik dan tanpa cara untuk melihat kepemilikan lengkap kelompok produsen. Data-data ini benar-benar tidak dapat digunakan, namun kelompok-kelompok produsen dan para pedagang menggunakannya untuk membenarkan penolakan mereka untuk mempublikasikan peta-peta itu sendiri dalam format yang dapat digunakan.



25 Agustus 2006, Riau
©Dithajohn/Greenpeace

'Greenpeace tampaknya mencari komitmen dengan menggunakan pendekatan Orwellian Big Brother, selalu waspada terhadap manajemen rantai pasok yang memiliki tindakan hukuman terhadap pemasok yang belum memenuhi standar sebagai metode utama mereka dalam membawa perubahan.'³⁸

Blog Golden Agri-Resources

Semua ini membuat merek dan pedagang masih mengambil pasokan minyak sawit dari kelompok-kelompok produsen yang menghancurkan hutan hujan, setelah bertahun-tahun mereka berjanji untuk menghentikannya. Paruh kedua laporan ini menampilkan 25 kelompok produsen minyak sawit yang diketahui telah melanggar kebijakan NDPE. Dalam banyak kasus, bukti-bukti bahwa kelompok-kelompok ini telah menghancurkan hutan hujan atau melanggar hak asasi manusia sudah berada domain publik: tercakup dalam laporan LSM atau pengaduan RSPO, didokumentasikan dalam artikel media atau dilaporkan oleh masyarakat yang terkena dampak langsung. Meskipun ini bukan daftar lengkap dari semua produsen minyak kelapa sawit yang tidak patuh – dan produsen-produsen yang tidak digambarkan di sini bukan berarti mereka dianggap patuh – produsen-produsen ini mewakili ancaman terbesar yang diketahui terhadap hutan hujan dan masyarakat setempat Indonesia.

Pada bulan November 2017, Greenpeace menunjukkan kepada beberapa pedagang bukti-bukti bahwa sejumlah kelompok produsen ini telah membuka hutan hujan, melanggar kebijakan NDPE mereka sendiri. Pada bulan Mei 2018, Greenpeace menulis kepada 18 merek dan 15 pedagang, meminta masing-masing untuk mengkonfirmasi apakah salah satu dari 25 kelompok dalam laporan ini berada dalam rantai pasoknya dan tindakan-tindakan yang mereka ambil sebagai tanggapan atas pelanggaran mereka yang terdokumentasi dengan baik. Tanggapan mereka, dan analisis kami sendiri terhadap data rantai pasok domain publik, menegaskan bahwa, kecuali satu produsen, semua produsen ini telah memasok minyak sawit ke pedagang-pedagang besar sepanjang tahun lalu, dan melalui mereka ke merek-merek global yang memiliki kebijakan NDPE.

Setelah kontak dengan Greenpeace, beberapa pedagang mulai mencatat kasus-kasus ini sebagai keluhan di situs web mereka dan mulai mencatat upaya-upaya mereka dalam

dialog, keterlibatan dan pemantauan. Tidak tampak ada upaya untuk menilai atau menyelidiki apakah kelompok-kelompok produsen ini membuka hutan hujan kecuali di konsesi spesifik yang diidentifikasi oleh Greenpeace. Merek dan pedagang juga tidak menyatakan kesimpulan yang jelas bahwa ada sesuatu yang secara fundamental rusak dalam prosedur implementasi NDPE mereka. Sebaliknya, mereka mengklaim bahwa sistem itu berfungsi baik, meskipun ada sejumlah kasus yang telah diangkat oleh Greenpeace, karena beberapa produsen telah setuju untuk menghentikan deforestasi lebih lanjut dan yang lainnya dikeluarkan dari rantai pasok mereka. CEO Kuok Khoo Hong, misalnya, menegaskan bahwa Wilmar "selalu mengikutsertakan pemasok yang tidak patuh" dan berada "di jalur yang benar".⁴⁰

Namun pendekatan reaktif ini, di mana merek dan pedagang bergantung pada LSM untuk memainkan peran sebagai 'polisi rantai pasok', mengobati gejala, bukan penyakitnya. Mengingat betapa banyak bukti yang

menentang produsen ini dalam domain publik, merek dan pedagang seharusnya tidak pernah membiarkan mereka masuk ke dalam rantai pasok mereka pada awalnya. Banyaknya kasus yang dirinci dalam laporan ini membuktikan bahwa pendekatan yang diambil oleh pedagang dan merek tidak sesuai dengan tujuannya.

Merek dan pedagang harus bertanggung jawab untuk menyaring produsen dalam rantai pasok mereka untuk memastikan mereka tidak berbisnis dengan kelompok yang menghancurkan hutan hujan. Mereka membutuhkan sistem pemantauan komprehensif milik mereka sendiri, yang didasarkan pada data lokasi pabrik-pabrik dan peta-peta konsesi para pemasok mereka, untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok produsen dalam rantai pasok mereka sepenuhnya mematuhi standar NDPE. Yang penting, informasi mengenai kepemilikan lahan dan operasi kelompok-kelompok produsen harus ditempatkan dalam domain publik agar setiap klaim dapat diverifikasi secara independen.

WILMAR INTERNATIONAL: PEDAGANG PEMBANGKANG

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAWA



Sejak 2007, laporan Greenpeace telah mengekspos Wilmar sebagai pemain kunci didalam sektor industri minyak sawit.

Wilmar International adalah pedagang minyak sawit terbesar di dunia, yang bertanggung jawab atas sekitar 40% perdagangan global.⁴¹ Perusahaan ini terdaftar di Bursa Singapura.⁴²

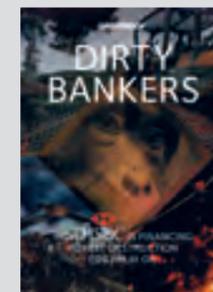
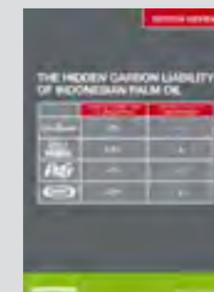
Wilmar telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2005.⁴³ Pada bulan Desember 2013, mereka menjadi yang pertama mengadopsi kebijakan NDPE yang berlaku baik untuk operasinya sendiri sebagai produsen maupun untuk para pemasoknya.⁴⁴ Wilmar adalah ketua bersama dari kelompok pengarah High Carbon Stock Approach (HCSA), meskipun kebijakan NDPE-nya belum secara eksplisit mengacu pada HCSA – yang merupakan persyaratan anggota sejak tahun 2015.⁴⁵ Wilmar belum menyediakan peta-peta batas konsesinya untuk publik dalam format yang dapat digunakan.

Wilmar didirikan oleh Kuok Khoo Hong dan Martua Sitorus; Sitorus juga merupakan CEO dari kelompok usaha Gama yang sangat merusak (qv).⁴⁶ Selain sejumlah besar tumpang tindih manajemen antara kedua kelompok, Wilmar memiliki sejarah menjual konsesi yang bermasalah kepada Gama ketika pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan yang serius terungkap dalam operasinya sendiri.⁴⁷ Pada Juli 2018, Sitorus dan saudara iparnya, Hendri Saksti (Kepala Negara Wilmar untuk Indonesia)⁴⁸ mengundurkan diri dari Wilmar menyusul publikasi laporan oleh Greenpeace mengenai deforestasi di konsesi-konsesi Gama.⁴⁹

Pada akhir tahun 2017, Wilmar memiliki total area tanam kelapa sawit seluas 239.935 Ha, yang sekitar 68% di antaranya berada di Indonesia, 24% di Malaysia dan 8% di Afrika. Perkebunan-perkebunan miliknya di Indonesia terletak di Sumatera dan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat,⁵⁰ dan beberapa berada di Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi.⁵¹ Wilmar juga memiliki perusahaan makanan Australia Goodman Fielder berpatungan dengan First Pacific,⁵² yang merupakan pemegang saham mayoritas Indofood,⁵³ bagian dari Salim Group (lihat studi kasus di bawah ini).

Meskipun Wilmar adalah pedagang pertama yang mengadopsi kebijakan NDPE, mereka belum membawa operasinya sendiri untuk sepenuhnya mematuhi kebijakan tersebut. Beberapa konsesi Wilmar memiliki konflik lahan yang belum terselesaikan yang melibatkan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat setempat. Perselisihan yang menyangkut PT Permata Hijau Pasaman 1, yang mengoperasikan konsesi-konsesi di Sumatera Barat, khususnya sudah berlangsung lama.⁵⁴ Demikian pula, PT Bumi Sawit Kencana II, yang berbasis di Kalimantan Tengah, dilaporkan telah berada di pusat sengketa tanah selama lebih dari satu dekade, dan melibatkan kekerasan berulang terhadap penduduk setempat.⁵⁵ Pada tanggal 19 Desember 2017, anggota Brimob menembak dan melukai dua petani di dalam konsesi, setelah masyarakat setempat mendatangi kantor perusahaan untuk berdemonstrasi tentang masalah tanah.⁵⁶

Wilmar juga menghadapi tuduhan serius mengenai eksploitasi pekerja. Pada bulan November 2016 Amnesty International melaporkan pelanggaran sistematis di perkebunan-perkebunan di Sumatra Utara milik PT Perkebunan Milano dan PT Daya Labuhan Indah, termasuk target kerja yang tidak realistis yang mengakibatkan beban kerja yang berlebihan dan mengakibatkan anak-anak karyawan diminta untuk membantu tugas-tugas berbahaya



di perkebunan.⁵⁷ Kegagalan untuk memenuhi target ini berujung pada sanksi keuangan, dan Amnesty International menyimpulkan bahwa beban kerja tambahan termasuk kerja paksa. Juga terjadi diskriminasi terhadap perempuan, yang tidak diberi kontrak tetapi hanya dipekerjakan sebagai buruh tidak tetap. Demikian pula, pada bulan April 2017, SOMO dan CNV International menyelidiki masalah tenaga kerja di konsesi PT Murini Sam Sam di Riau dan menemukan banyak pekerja tidak memiliki keamanan kerja, beserta bukti-bukti kemungkinan adanya kerja paksa.⁵⁸

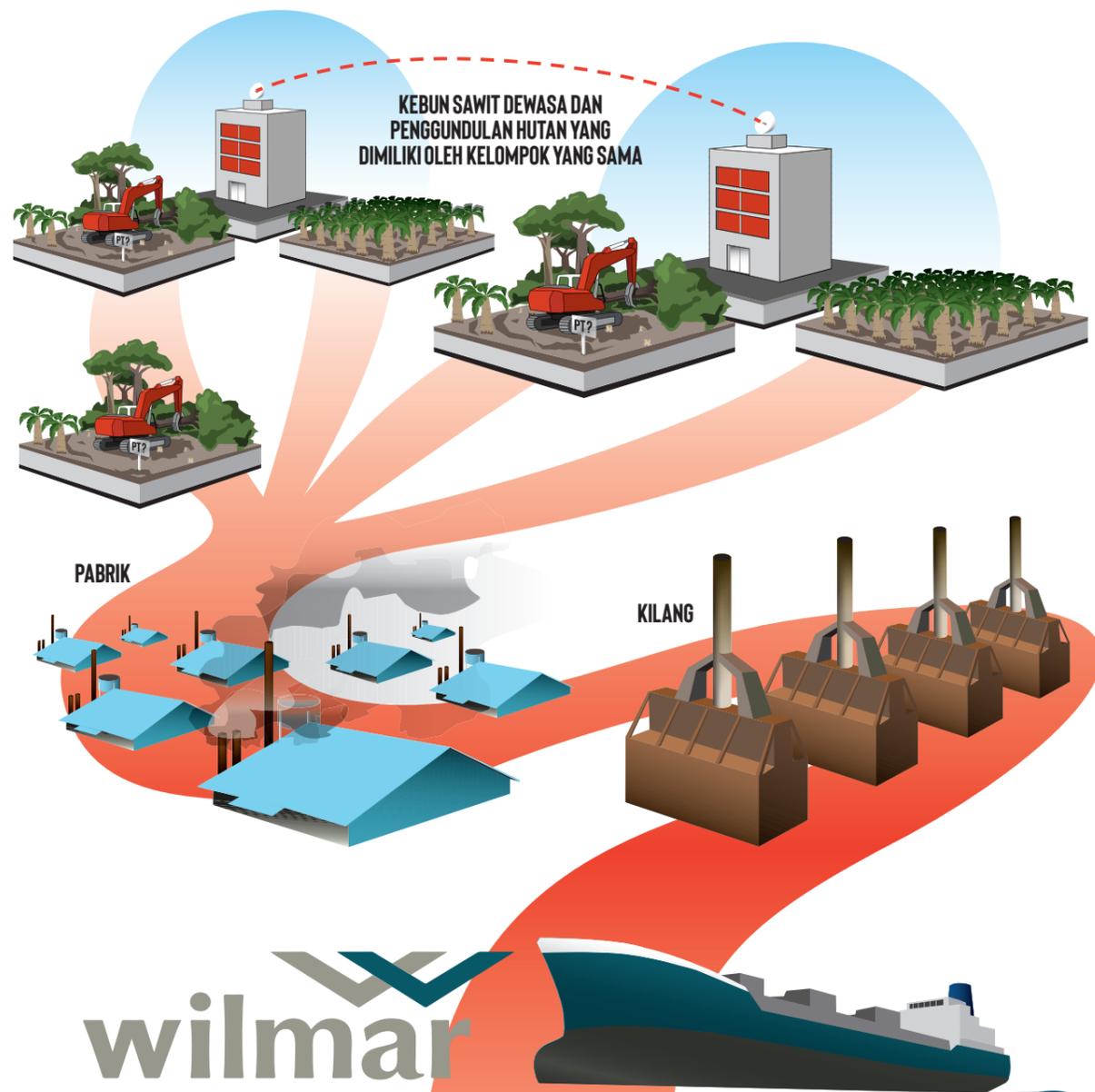
Sekitar 10%-20% dari pasokan minyak sawit Wilmar berasal dari konsesinya sendiri: 80% sisanya berasal dari pemasok pihak ketiga.⁵⁹ Kebijakan NDPE Wilmar secara eksplisit berlaku untuk kelompok-kelompok produsen ini; memang, Wilmar menyatakan bahwa para pemasok diharapkan untuk 'sepenuhnya mematuhi semua ketentuan kebijakan ini' paling lambat tanggal 31 Desember 2015.⁶⁰ Batas waktu itu telah terlewat, namun Wilmar masih tidak mampu memantau pemasoknya di semua operasi mereka untuk menentukan apakah mereka telah mematuhi kebijakannya atau masih menghancurkan hutan. Kelalaian ini khususnya menjadi masalah dalam kasus di mana konsesi pemasok berada di daerah perbatasan yang belum menjadi sumber pasokan Wilmar – persis di mana deforestasi paling mungkin terjadi.

Menanggapi penyelidikan Greenpeace mengenai Gama, CEO Kuok Khoo Hong mengakui bahwa Wilmar telah gagal mengidentifikasi luasan operasi Gama, bahwa 'seharusnya ada pengawasan yang lebih ketat pada proses verifikasi kepemilikan' dan Wilmar 'masih menunggu daftar spesifik perusahaan-perusahaan yang ada dalam Gama'.⁶¹ Dalam korespondensi sebelumnya, Wilmar hanya bisa mengeluh bahwa 'sangat sulit [untuk mengambil tindakan terhadap pemasok] ketika tidak ada informasi yang mendukung suatu tuduhan'⁶² – meskipun mereka bisa menemukan banyak bukti melalui pencarian sederhana di internet. Pada saat yang sama, pelacak keluhan Wilmar menunjukkan bahwa mereka mengetahui banyak dari kelompok-kelompok

produsen yang digambarkan dalam laporan ini bermasalah namun mereka hanya bertindak ketika disajikan bukti-bukti oleh Greenpeace.⁶³ Bahkan ketika masalah-masalah dalam konsesi-konsesi tertentu ditunjukkan kepada mereka, Wilmar tampaknya tidak mau melakukan penyelidikan di luar konsesi-konsesi tertentu itu – hampir seolah-olah mereka lebih memilih untuk tutup mata terhadap tingkatan pelanggaran para pemasoknya.

Akibat dari kegagalannya untuk secara memadai menyaring dan memantau pemasoknya di tingkat kelompok, Wilmar memasok pelanggannya dengan minyak sawit dari kelompok-kelompok produsen yang menghancurkan hutan hujan dan mengeksploitasi masyarakat setempat. Analisis rantai pasok menunjukkan bahwa Wilmar telah mengambil pasokan dari 18 dari 25 kelompok produsen yang digambarkan dalam laporan ini;⁶⁴ pengungkapan informasi dari pihak mereka sendiri mengungkapkan bahwa perdagangan dengan sebagian besar perusahaan-perusahaan ini terus berlanjut. Wilmar sering menjadi rute utama kelompok-kelompok produsen ini ke pasar, memasok minyak sawit mereka ke berbagai merek baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pedagang lain. Mengingat ukuran dan perannya yang sangat penting dalam industri minyak sawit, Wilmar terlalu besar – dan terlalu penting – untuk dibiarkan mengalami kegagalan dalam menerapkan komitmennya. Para pelanggannya, konsultan-konsultan keberlanjutan dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya harus meminta pertanggungjawabannya.

Langkah pertamanya adalah Wilmar harus membuktikan mereka tidak lagi mengambil pasokan dari perusak hutan, dengan mewajibkan semua kelompok produsen dalam rantai pasoknya untuk mempublikasikan data lokasi pabrik-pabrik dan peta-peta konsesi untuk seluruh operasi mereka dan memutuskan hubungan dengan semua yang menolak. Wilmar harus sepenuhnya mentransformasi rantai pasoknya, sehingga pada tahun 2020 hanya berdagang dengan produsen yang seluruh operasinya telah diverifikasi secara independen sesuai dengan semua aspek kebijakan NDPE – bahkan meskipun itu berarti mereka harus menjual lebih sedikit minyak sawit.



BERSEMBUNYI DI DEPAN MATA: BAGAIMANA PRODUSEN MENGABURKAN KETERKAITAN MEREKA DENGAN DEFORESTASI

Sebuah segmen besar dari industri perkebunan, terutama di Asia Tenggara, selalu dikendalikan oleh sistem konglomerasi yang kompleks dimiliki oleh perorangan dan keluarga. Kelompok dan pemiliknya menggunakan struktur ini karena sejumlah alasan, yang seringkali mencakup alasan-alasan kotor: untuk menghindari pajak, untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebakaran atau praktik ilegal lainnya, untuk menghindari undang-undang lain (misalnya yang menghalangi kelompok mengendalikan lebih dari 100.000 Ha tanah di Indonesia atau hukum yang menghalangi kepemilikan asing, lihat Lampiran 1) atau untuk menyembunyikan hubungan mereka dengan perusahaan anggota yang kegiatan merusak atau eksploitatifnya melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO⁶⁶ atau kebijakan NDPE mereka sendiri (atau kebijakan pelanggan mereka).

Merek-merek ternama dan para pedagang, bersama-sama pemerintah dan badan regulasi seperti RSPO, oleh karena itu harus melihat melampaui perkebunan tertentu yang memasok mereka kepada perorangan, keluarga atau kelompok perusahaan yang memiliki, mengendalikan atau mengelolanya.

Dalam banyak kasus, sebuah kelompok tidak memiliki perusahaan induk tunggal. Kelompok usaha ini mungkin sebagian besar terdiri dari perusahaan swasta, tidak terdaftar di bursa saham dan oleh karena itu tidak tunduk pada persyaratan transparansi keuangan dasar. Struktur kelompok yang dihasilkan seringkali rumit, tidak formal dan tidak jelas. Konsep suatu kelompok seperti yang digambarkan dalam profil dan studi-studi kasus dalam laporan ini mencerminkan kompleksitas ini, yang melampaui hubungan perusahaan induk-anak perusahaan secara formal, seperti dijelaskan dalam paragraf-paragraf berikut.

Perusahaan dengan kepemilikan bersama dapat menjadi bagian dari entitas perusahaan yang secara formal berbeda; perusahaan dapat dimiliki melalui struktur cangkang multilapis dari perusahaan induk; anggota keluarga yang berbeda dapat menjadi pemilik langsung atau pemilik paling atas dari perusahaan dalam kelompok tersebut; atau bagian-

bagian dari kelompok tersebut dapat didirikan di *offshore*, sehingga pemilik utama tidak dapat diketahui. Penggunaan 'calon' - orang yang nama perusahaannya terdaftar tetapi bertindak hanya sebagai penjaga - adalah pilihan lain untuk menyembunyikan pemilik manfaatnya yang mengendalikan perusahaan tersebut.

Namun, ada kriteria lain yang melampaui kepemilikan eksplisit yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam sektor minyak sawit harus dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama. Indikator-indikator dari tumpang tindih yang tersembunyi lainnya dalam kepemilikan sebenarnya meliputi:

- kontrol keuangan (misalnya ketika satu perusahaan dapat mewajibkan pihak lain untuk bertindak di bawah arahnya dikarenakan kontrak keuangan);
- kontrol manajerial (ketika orang yang sama, atau anggota keluarga mereka atau rekan yang dikenal, bertindak sebagai pegawai senior atau direktur dari perusahaan-perusahaan yang berbeda - bahkan meskipun perusahaan-perusahaan ini memiliki struktur-struktur perusahaan yang berbeda secara formal);
- kontrol operasi (misalnya ketika seorang karyawan perusahaan mengelola perkebunan perusahaan lain, atau ketika perusahaan-perusahaan yang berbeda berbagi kantor yang sama).

Jika kebijakan NDPE perusahaan efektif dalam mengubah industri ini, pedagang minyak sawit dan pelanggan mereka perlu mempunyai pandangan yang luas tentang apa yang dapat dibentuk dalam suatu kelompok usaha, termasuk berbagai jenis kontrol dan kaitan kepemilikan yang dijelaskan di atas, dan melakukan uji tuntas yang efektif untuk mengidentifikasi hubungan-hubungan itu.

Banyak merek dan pedagang masih terus menghindari tanggung jawab untuk menindak ketidakpatuhan ketika hal itu terjadi di luar rantai pasok langsung mereka. Hal ini menciptakan celah yang signifikan: Pelanggaran NDPE seperti deforestasi dan pengeringan lahan gambut terjadi selama tahap awal pembangunan perkebunan, ketika konsesi



IndoAgri
RSPO) Indonesia
secretariat Sdn. Bhd.
Indonesia
Complaints Coordinator
OPPUK, ILRF) and RSPO Complaints
27th January 2017 regarding the meeting
complaints (RAN, OPPUK, ILRF). We are
and setting certain conditions for the
our side will be myself as the Group
Head of Risk management, IndoAgri
attend this meeting. We are all senior
company to take any decisions during

‘Suatu kelompok perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha di sektor perkebunan yang berkaitan satu sama lain lewat hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.’⁶⁵

Peraturan Menteri Pertanian Indonesia tahun 2013

bersangkutan mungkin belum memproduksi minyak sawit sama sekali. Oleh karena itu, harus ada tekanan komersial terhadap semua perusahaan lain dalam kelompok tersebut jika ada peluang untuk menghentikan pembangunan yang merugikan lingkungan atau sosial.

Untungnya, konsep tanggung jawab tingkat kelompok semakin banyak diterima. Misalnya, peraturan tahun 2013 dari Kementerian Pertanian Indonesia yang mengatur izin perkebunan (IUP, lihat Lampiran 1) sebagian mengakui berbagai kemungkinan ini: ‘Suatu grup perusahaan adalah kumpulan orang atau badan usaha di sektor perkebunan terkait satu sama lain lewat hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan.’⁶⁷ Prinsip ini juga disorot dalam keputusan program dana pensiun global pemerintah Norwegia tahun 2015 (*Government Pension Fund Global/GPFG*) untuk menahan investasi di konglomerat Korea POSCO dan anak perusahaannya Daewoo setelah muncul bukti-bukti bahwa anak perusahaan kelapa sawit Daewoo PT Bio Inti Agrindo menebangi hutan primer di Indonesia:

GPFG mengikuti panduan dasar bahwa jika perusahaan induk adalah pemilik pengendali anak perusahaan, perusahaan induk juga harus dikeluarkan jika anak perusahaan melanggar pedoman. Sebagai pemilik pengendali, perusahaan induk memiliki pengaruh yang menentukan terhadap kegiatan anak perusahaan.⁶⁸

Di dalam sektor minyak sawit itu sendiri, RSPO sejak bulan Maret 2017 telah mewajibkan semua anggota untuk mendaftar di tingkat kelompok induk, meskipun RSPO tampak masih enggan memberlakukan persyaratan ini bahkan dalam kasus-kasus yang relatif mudah. Aturan keanggotaannya mendefinisikan kelompok induk tidak hanya dalam hal kepemilikan tetapi juga dalam hal manajemen atau kontrol operasional.⁶⁹ Selain itu, beberapa pedagang (seperti Wilmar⁷⁰) dan perusahaan konsumen telah mencantumkan prinsip tanggung jawab tingkat kelompok dalam kebijakan-kebijakan keberlanjutan mereka karena kebijakan-kebijakan ini berlaku untuk operasi pemasok mereka sendiri serta pemasok pihak ketiga.

Bahkan ada beberapa pengakuan tentang semakin luasnya tanggung jawab perusahaan dari perusahaan-perusahaan minyak sawit itu sendiri. Kebijakan keberlanjutan tahun 2015 Bumitama menyarankan direktur eksekutifnya untuk menerapkan kebijakan NDPE yang setara dengan kebijakannya sendiri ketika mereka sendiri berinvestasi di perusahaan-perusahaan minyak sawit⁷¹ (meskipun seperti yang ditunjukkan oleh studi-studi kasus kami, kelompok ini gagal menghormati kebijakannya sendiri).

Sebuah Peraturan Presiden Indonesia yang baru,⁷² yang berlaku sejak bulan Maret 2018, mewajibkan setiap perusahaan (yang didefinisikan sebagai ‘kelompok orang perorangan atau aset yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum atau tidak’)⁷³ untuk memberikan informasi kepada pemerintah tentang siapa pemilik manfaatnya.⁷⁴ Informasi ini akan dapat diakses oleh pihak ketiga di bawah undang-undang kebebasan informasi.⁷⁵ Merek dan pedagang harus menggunakan pengungkapan ini sebagai bagian dari uji tuntas mereka.

Pada akhirnya, mewajibkan produsen untuk mengungkapkan informasi tentang kepemilikan perusahaan dan struktur manajemen diperlukan untuk meningkatkan tata kelola, menerapkan kebijakan NDPE dan membatasi celah untuk tindakan korupsi dan kegiatan yang tidak dapat diterima lainnya. Ini harus mencakup pengungkapan siapa pemilik manfaatnya dan struktur informal dari keluarga atau kontrol manajerial. Merek dan pedagang harus memberlakukan kewajiban kontraktual pada kelompok produsen untuk mengungkapkan luasan dan lokasi operasi kelompok mereka, dan sanksi yang kuat - terutama pembatalan kontrak - apabila seorang produsen didapati menyembunyikan luasan sepenuhnya dari operasi-operasinya. Jika industri kelapa sawit serius dengan NDPE, maka para pemangku kepentingan harus dapat meminta pertanggungjawaban mereka; informasi yang diungkapkan kelompok produsen, termasuk lokasi pabrik dan peta konsesi, harus ditempatkan dalam domain publik, baik oleh produsen atau pelanggan mereka.

1 April 2013, Kalimantan ©Alejo Sabugo/
International Animal Rescue Indonesia
2 24 Februari 2014, PT Karya Makmur
Abadi Estate II (KLK), Kalimantan,
1°56'50.742"S 112°26'27.27"E
©Ifansasti/Greenpeace

3 4 Mei 2013, PT Tunggal Perkasa
Plantations (Astra Agro Lestari), Riau,
0°17'58.8"S 102°11'3.42"E ©Jufri/
Greenpeace 4 26 Oktober 2007, Riau
©Budhi/Greenpeace 5 15 Mei 2012, Riau
©Novis/Greenpeace 6 8 November 2008,

Kilang Wilmar, Riau ©Novis/Greenpeace
7 1 April 2018, Terminal Pengumpulan
Korindo, Papua, 6°39'3.252"S
140°24'51.27"E ©Ifansasti/Greenpeace
8 14 November 2008, Dumai, Riau ©Rante/
Greenpeace 9 ©Hamilton/Greenpeace



KEBOCORAN KILANG



Pengilangan minyak sawit telah digambarkan sebagai 'hambatan dalam rantai pasok', yaitu sejumlah kecil perusahaan yang menangani volume minyak sawit dalam jumlah besar.⁷⁶ Meskipun mayoritas kilang minyak sawit di Indonesia dan Malaysia dikendalikan oleh perusahaan yang memiliki kebijakan NDPE, lebih dari seperempatnya dioperasikan oleh perusahaan yang tidak membuat komitmen seperti itu.⁷⁷ Hal ini dikenal di dunia industri sebagai 'kebocoran' pasar, dan *Chain Reaction Research* memberikan definisi yang tepat, yaitu 'kegiatan apa pun dalam industri, produksi, perdagangan, dan/atau konsumsi minyak sawit, yang tidak tunduk pada persyaratan kebijakan NDPE mana pun.'⁷⁸

Chain Reaction Research telah mengidentifikasi 52 kilang non-NDPE⁷⁹ (lihat Lampiran 1 untuk daftar lengkapnya). Sebagian besar kapasitas pengilangan non-NDPE ini dikendalikan oleh segelintir kelompok produsen: BEST Group, Felda IFFCO, Hayel Saeed Anam Group (HSA), Incasi Raya, Intercontinental Specialty Fats/Nisshin Oil dan Tunas Baru Lampung⁸⁰ Sebagian dari kelompok-kelompok ini dapat dilihat profilnya di bagian kedua laporan ini.

Pengilangan yang tidak memiliki kebijakan NDPE merupakan tantangan yang signifikan terhadap upaya untuk membersihkan sektor ini, karena mereka menyediakan pasar bagi produsen yang telah dikeluarkan oleh pedagang lain. Hal ini memberi alasan bagi para pedagang yang memiliki kebijakan NDPE untuk terus mengambil pasokan dari kelompok produsen yang tidak patuh, dengan alasan palsu bahwa mereka perlu mempertahankan *leverage* (rasio antara jumlah jaminan dan dana yang dipinjam yang dialokasikan

untuk *trading*). Konsultan mengambil alur yang sama: TFT berpendapat bahwa mengeluarkan produsen adalah tindakan kontraproduktif karena 'pemasok yang di-suspend dapat terus menebangi hutan sambil tetap menjual ke perusahaan kilang lain yang tidak berkomitmen terhadap sumber yang bertanggung jawab'.⁸¹

Meskipun 'kebocoran' pasar telah didokumentasikan dengan baik, analisis rantai pasok menunjukkan bahwa merek dan pedagang yang memiliki kebijakan NDPE tetap menjadi pasar utama bagi kelompok produsen 'kebocoran' yang memiliki pengilangan. Wilmar melakukan perdagangan yang ekstensif dengan kilang-kilang di 'kebocoran' pasar, bahkan mereka menggunakan perusahaan-perusahaan itu sebagai alasan untuk tidak menerapkan kebijakan NDPE-nya sendiri dengan benar. Hal yang sama juga dilakukan banyak pedagang lain. Demikian pula, banyak merek menerima minyak sawit dari pengilangan di 'kebocoran' pasar, secara langsung atau melalui pedagang yang dipandang bertanggung jawab yang memiliki kebijakan NDPE.

Dalam praktiknya, tidak ada perbedaan antara perusahaan yang secara sadar berdagang dengan produsen kelapa sawit yang merusak hutan dan mereka yang melakukannya karena teledor/lalai. Bagaimanapun, perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan NDPE harus menutup celah kebocoran ini dengan mengeluarkan semua pengilang yang tidak memiliki kebijakan NDPE, dan hanya mengambil pasokan dari pedagang yang telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membuktikan bahwa produsen minyak sawit mereka merupakan perusahaan yang bersih.

KONSULTAN KEBERLANJUTAN — TEMAN ATAU MUSUH?

*'Kami bukan auditor. Kami juga tidak memberitahu perusahaan apa yang harus dilakukan. Kami membantu mereka mengembangkan tanggapan kebijakan untuk masalah-masalah yang menyangkut diri mereka. Kami membantu mereka untuk membuat kebijakan yang mereka senangi, dan kemudian pergi ke lapangan bersama mereka untuk membangun kapasitas mereka untuk melaksanakannya.'*⁸²

Scott Poynton, pendiri, TFT

Perusahaan selalu berpaling kepada konsultan keberlanjutan untuk membantu mereka menerapkan komitmen lingkungan hidup mereka. Organisasi-organisasi ini, yang seringkali disebut sebagai 'mitra pelaksana', mengklaim dapat mempercepat transformasi rantai pasok dan menawarkan merek dan pedagang skala ekonomi (*economies of scale*) dan peluang-peluang untuk berbagi solusi. Ada dua organisasi yang mendominasi sektor ini, yaitu TFT, yang mencantumkan hampir 100 anggota dan klien yang mencakup 13 komoditas dan semua tingkatan rantai pasok,⁸³ dan Proforest, yang tidak mencantumkan kliennya namun mengklaim beroperasi 'di seluruh rantai pasok dengan petani, manajer perkebunan dan hutan, pengolah dan pedagang, serta perusahaan barang konsumsi, investor dan pengecer'.⁸⁴

Bahwa perusahaan mencari keahlian dan dukungan dari luar adalah sesuatu yang bisa dipahami. Merek-merek dan pedagang besar tidak menjadi mahir dalam pengambilan pasokan yang bertanggung jawab hanya dalam semalam dan mereka memperoleh manfaat dari saran-saran dan pengalaman para ahli yang kredibel. Namun, seringkali tidak jelas apakah konsultan keberlanjutan disewa untuk membantu perusahaan melakukan perubahan atau untuk melindungi mereka dari kritik oleh LSM dan pemangku kepentingan lainnya. Kenyataannya memang, konsultan keberlanjutan semakin menghambat terwujudnya reformasi industri kelapa sawit, terutama dalam hal menjadikan sektor ini lebih transparan. Dalam beberapa kasus, mereka tampaknya lebih memprioritaskan pembelaan klien mereka dan kelayakan jangka panjang dari model bisnis mereka daripada reformasi yang diperlukan untuk melindungi

lingkungan hidup dan memenuhi komitmen 2020 klien mereka. Ini mungkin bagus untuk bisnis, namun merupakan bencana bagi hutan hujan.

Konsultan keberlanjutan bekerja di semua tingkatan rantai pasok, dari produsen, pedagang hingga merek. Ini diperlihatkan sebagai keuntungan, terutama bagi perusahaan yang berada di tingkat lebih tinggi dalam rantai pasok: merek-merek diberitahu bahwa mereka dapat mempercayai pedagang tempat mereka membeli karena mereka semua menyewa konsultan yang sama. Namun, produsen, pedagang, dan merek memiliki kepentingan yang berbeda dan seringkali bertentangan. Jika perusahaan mengalihdayakan pelaksanaan komitmen mereka, mereka pasti ingin mengetahui bahwa kepentingan mereka diprioritaskan di atas kepentingan pelanggan atau pemasok mereka – namun tidak jelas agenda siapakah yang dipromosikan oleh TFT dan konsultan keberlanjutan lainnya.

LSM mengadvokasi data, terutama lokasi pabrik dan peta konsesi, untuk disediakan bagi publik agar produsen dan pelanggan mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka dan klaim apa pun yang dilakukan perusahaan dapat diverifikasi. Sebaliknya, salah satu layanan yang diberikan oleh konsultan keberlanjutan adalah 'ruang aman' bagi perusahaan: mereka memeriksa rantai pasok mereka secara pribadi dan mengendalikan informasi apa yang akan diungkapkan. Seperti yang dikatakan TFT, layanannya bersifat 'pribadi dan independen, untuk memungkinkan perusahaan mengendalikan, memilih bagaimana mereka menggunakan informasi tersebut'. Yang menjadi masalah dari hal ini adalah pedagang memiliki dua daftar keluhan, yang satu bersifat publik dan yang lainnya



pribadi – yang berpotensi membuat pelanggan sama sekali tidak mengetahui tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh produsen dalam rantai pasok mereka.⁸⁵

Namun demikian, ketika ditanya oleh Greenpeace untuk mengkonfirmasi paparan mereka terhadap kelompok produsen bermasalah yang dibahas dalam laporan ini, banyak merek mengklaim informasi mengenai kelompok produsen dalam rantai pasokan mereka dipegang oleh konsultan keberlanjutan mereka. Beberapa merek mengklaim konsultan mereka hanya akan memberikan konfirmasi ya/tidak bila diberikan daftar kelompok produsen tertentu dan tidak akan memberikan merek dengan daftar lengkap. Dengan memblokir akses ke data dengan cara ini, konsultan keberlanjutan mencegah merek mengambil tindakan yang berarti untuk membersihkan rantai pasokan minyak kelapa sawit mereka – kebalikan dari bayaran apa yang harus dilakukan oleh konsultan keberlanjutan.

Dengan menahan akses ke data, tampaknya menjadi bagian dari strategi yang disengaja. Membela penolakan klien pedagang untuk beroperasi secara transparan dengan mengungkapkan produsen dan pabrik 'berisiko tinggi' dalam rantai pasokan mereka, TFT mengakui bahwa 'beberapa merek mungkin tergoda untuk ... mengambil dan memilih pabrik kelapa sawit mana yang diizinkan dalam rantai pasok mereka dengan tujuan mengecualikan yang dianggap berisiko' tetapi TFT menegaskan bahwa proses ini paling baik diserahkan kepada pedagang: '[a] jaminan terbaik bagi suatu merek adalah pemasok selaras dengan kebijakan mereka kemudian pemasok bersangkutan melaksanakan dan bertindak atas proses penentuan prioritas di seluruh rantai pasok globalnya sendiri'.⁸⁶

Greenpeace tidak setuju. Merek harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa minyak sawit yang mereka gunakan berasal hanya dari produsen yang bertanggung jawab yang memenuhi standar NDPE. Selanjutnya, merek harus bersikeras bahwa pedagang yang memasok mereka tidak berkontribusi pada 'kebocoran' pasar dengan terus membeli dari produsen yang merusak atau eksploitatif, bahkan jika produsen tersebut tidak berada dalam rantai pasokan dari merek tersebut. Konsultan keberlanjutan harus mempertahankan klien mereka untuk mencapai tujuan ini – paling lambat 2020 – dan mereka bersama kliennya harus beroperasi secara transparan sehingga setiap hasil yang diklaim dapat diverifikasi secara independen. Secara alami, ini memerlukan peta konsesi dan data rantai pasokan lainnya untuk dipublikasikan sehingga merek (dan pemangku kepentingan) dapat memantau kelompok produsen dan menentukan apakah mereka mematuhi standar NDPE.

Pada akhirnya, konsultan keberlanjutan tidak dapat memastikan bahwa klien mereka mewujudkan industri minyak sawit bebas deforestasi pada tahun 2020. Mereka juga tidak siap untuk bekerja dengan cara yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai. Sebaliknya, TFT dan konsultan keberlanjutan lainnya mempromosikan sebuah model yang dalam kenyataannya menghasilkan kemajuan bertahap melalui kerahasiaan dan pelaporan yang tidak terverifikasi (dan tidak dapat diverifikasi). Akibatnya, pasar internasional jauh lebih terbuka terhadap kelompok produsen bermasalah daripada perusahaan yang tahu atau bersedia mengungkapkan – seperti yang ditunjukkan oleh Greenpeace dalam analisis pedagang dan pengungkapan merek.



*'Publisitas pantas dipuji sebagai obat untuk penyakit sosial dan industri. Sinar matahari dikatakan sebagai disinfektan terbaik; cahaya listrik merupakan polisi yang paling efisien.'*⁸⁷

Louis Brandeis, *Other People's Money and How the Bankers Use It*

INDUSTRI KELAPA SAWIT HARUS BERTINDAK SEKARANG ATAU TIDAK ADA KESEMPATAN LAGI

*'[Jika perusahaan] mengganggu ekosistem karena perkebunan monokultur mereka, mereka harus dihentikan. Ini harus dihentikan. Kita tidak boleh membiarkan hutan hujan tropis kita lenyap karena perkebunan monokultur seperti kelapa sawit.'*⁸⁸

Presiden Republik Indonesia, Joko 'Jokowi' Widodo.



©International Animal Rescue Indonesia

2020 adalah titik nol untuk mengakhiri deforestasi. Pemerintah dan banyak perusahaan terbesar di dunia telah berjanji untuk memutuskan kaitan antara pengrusakan hutan dan komoditas pertanian pada tahun 2020. Para pemerintah dunia juga akan membuat komitmen iklim dan keanekaragaman hayati yang baru dan besar pada tahun 2020. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengadakan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) untuk menetapkan target untuk sepuluh tahun ke depan. Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-26 (COP UNFCCC), para pemimpin dunia diharapkan untuk memperkuat komitmen yang mereka buat di tahun 2015 di COP Paris.

Semakin mendekati tahun 2020, perusahaan dan pemerintah semakin berkeinginan kuat untuk mengklaim kemajuan dalam tujuan-tujuan sosial, lingkungan dan keanekaragaman hayati. Berfokus pada dekade berikutnya

tidak boleh dibiarkan mengubur kabar buruk bahwa, terdapat janji-janji yang tak terhitung jumlahnya, dan kenyataan sedikit sekali terjadi perubahan di tempat-tempat seperti Indonesia dalam dekade ini. Deforestasi dan penyakit-penyakit terkait lainnya hanya dapat dihentikan atau diperlambat apabila pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan bukan sekadar menandatangani perjanjian-perjanjian di KTT global. Yang bisa menjadi ukuran sebenarnya dari kemajuan hanyalah seberapa banyak hutan dunia yang dapat dilindungi.

Masalah sistemik yang digambarkan oleh banyak studi kasus dalam laporan ini tidak khusus hanya untuk sektor minyak sawit saja. Merek dan pedagang – dan sesungguhnya, pemerintah – terus gagal dalam komitmen mereka untuk mengakhiri deforestasi untuk komoditas lain, terutama bubur kertas dan kertas, daging sapi dan kedelai. Masih banyak lagi yang dapat dan harus dilakukan untuk

memastikan agar perusahaan tidak melarikan diri dari komitmen rantai pasok mereka.

Sudah saatnya untuk mengadakan percakapan yang jujur tentang perdagangan komoditas global dan bagaimana tanah yang kita miliki digunakan dan untuk menjawab kepentingan siapa. Ketika suhu global meningkat dan populasi spesies yang terancam punah semakin menurun, perusahaan akan berada di bawah tekanan yang semakin meningkat untuk membuktikan bahwa rantai pasok mereka bersih atau tidak menyertakan komoditas berisiko tinggi sama sekali. Masa depan industri minyak sawit dan sektor-sektor lainnya bergantung pada penerapan model perdagangan baru yang didasarkan pada transparansi yang radikal, verifikasi independen dan tidak ada toleransi untuk deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

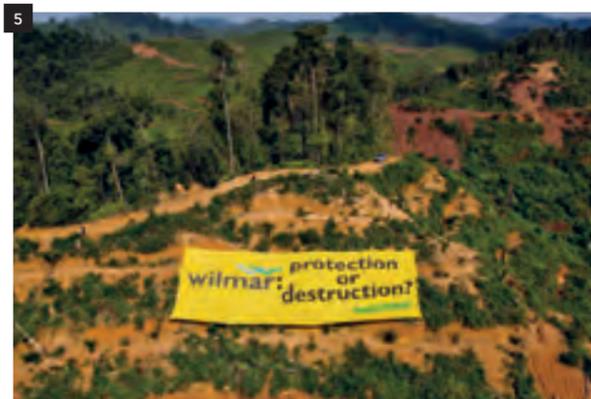
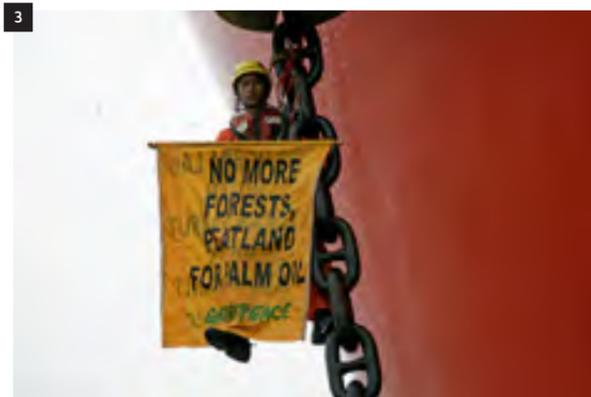
Sebagai pedagang minyak sawit terbesar di dunia, dan yang pertama membuat komitmen NDPE, Wilmar

harus mengambil tongkat kepemimpinan. Wilmar harus membuktikan bahwa mereka tidak lagi mengambil pasokan dari perusak hutan, dengan mewajibkan semua kelompok produsen dalam rantai pasoknya untuk mempublikasikan data lokasi-lokasi pabrik dan peta-peta konsesi untuk seluruh operasi mereka dan memutuskan hubungan dengan semua yang menolak. Wilmar harus sepenuhnya mentransformasi rantai pasoknya, sehingga pada tahun 2020 hanya berdagang dengan produsen yang seluruh operasinya telah diverifikasi secara independen sesuai dengan semua aspek kebijakan NDPE – bahkan meskipun itu berarti mereka harus menjual lebih sedikit minyak sawit.

CEO Wilmar, Kuok Khoon Hong, berjanji pada tahun 2013 untuk memasok pasar dengan minyak sawit bebas deforestasi. Dengan tahun 2020 kurang dari 500 hari lagi, ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mewujudkan janjinya.

1 12 November 2009, Riau ©Rante/Greenpeace
 2 14 November 2013, Kantor Wilmar, Jakarta
 ©Rante/Greenpeace 3 10 November 2008, Dumai,
 Riau ©Novis/Greenpeace

4 12 November 2009, Riau ©Rante/Greenpeace
 5 20 Oktober 2013, PT Agrindo Indah Persada
 (Wilmar), Riau, 1°53'53.501"S 102°4'31.301"E
 ©Hilton/Greenpeace



SAATNYA BERTINDAK PARA PERUSAHAAN HARUS:

ADOPSI STANDAR-STANDAR YANG LEBIH KUAT

- Mempublikasikan kebijakan NDPE yang kuat yang mewajibkan kepatuhan dengan *toolkit* Pendekatan HCS,⁸⁹ panduan penilaian NKT-HCSA yang terintegrasi⁹⁰ dan standar hak asasi manusia dan tenaga kerja yang kredibel.
- Mengadopsi dan memberlakukan tanggal penghentian konversi paling lambat tanggal 31 Desember 2015.⁹¹
- Mempublikasikan protokol keterlibatan untuk menangani produsen yang tidak patuh, termasuk pembatasan perdagangan dan penangguhan serta tindakan-tindakan penting berbatas waktu yang harus dipenuhi oleh produsen yang tidak patuh untuk pencabutan penangguhan.

HENTIKAN MASALAH

- Mempublikasikan dan menerapkan rencana untuk memastikan rantai pasok minyak sawit yang bersih pada tahun 2020, dengan semua produsen diverifikasi secara independen sesuai dengan standar NDPE⁹² di seluruh operasi mereka.
- Memantau produsen dalam rantai pasok mereka di tingkat kelompok untuk mengidentifikasi deforestasi dan pelanggaran kebijakan lainnya.
- Melaporkan produsen yang tidak patuh kepada pemasok berkaitan, dan mewajibkan mereka menyelesaikan setiap kasus sesuai dengan protokol keterlibatan merek atau tidak berhubungan dengan produsen terkait sama sekali.
- Mendukung dan mendanai prakarsa-prakarsa konservasi dan restorasi hutan, serta pengakuan hak-hak dan dukungan mata pencaharian bagi masyarakat setempat.

MEMVERIFIKASI HASIL

- Mewajibkan verifikasi independen terhadap produsen yang tidak patuh untuk memastikan mereka mematuhi standar NDPE di seluruh operasinya, termasuk memulihkan semua area yang dibuka sejak tanggal penghentian konversi yang ditentukan oleh merek.
- Pada tahun 2020, mewajibkan pedagang dan pemasok lain untuk memberikan verifikasi independen bahwa semua kelompok produsen dalam rantai pasok mereka mematuhi standar NDPE.

BERSIKAP TRANSPARAN

- Mempublikasikan dan memelihara daftar lengkap semua pabrik dan kelompok produsen yang minyak sawitnya memasuki rantai pasok mereka di tahun sebelumnya.
- Mengungkapkan setiap tahunnya persentase minyak sawit mereka yang berasal dari kelompok produsen yang seluruh operasinya telah diverifikasi secara independen sesuai dengan standar NDPE.
- Pada akhir tahun 2018, mewajibkan pemasok untuk memublikasikan peta-peta semua konsesi yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok produsen dalam rantai pasok mereka.
- Mempublikasikan dan memelihara daftar semua produsen yang tidak patuh dalam rantai pasok mereka, termasuk tindakan terikat waktu yang harus dilakukan untuk membereskan ketidakpatuhannya.
- Melaporkan setiap tahunnya hasil-hasil dari inisiatif-inisiatif mereka untuk mewujudkan konservasi dan restorasi hutan dan untuk mendukung hak-hak dan mata pencaharian masyarakat.

PARA PEDAGANG YANG TERSINGKAP OLEH KELOMPOK PRODUSEN KOTOR

	AAK	AAL	APICAL	BUNGE (BUNGE LODERS CROKLAAN 2017)	CARGILL	GAR	MUSIMAS	OLAM	SIME DARBY	WILMAR
ANGLO-EASTERN PLANTATIONS	×		×	×	×	×	×	×	×	×
AUSTINDO NUSANTARA JAYA				×	×			×		
BUMITAMA (LIM HARIYANTO FAMILY)	×		×	×	×	×	×	×	×	×
CENTRAL CIPTA MURDAYA	×			×	×		×	×		×
CITRA BORNEO INDAH				×				×		
DJARUM	×			×	×	×		×		×
DTK OPPORTUNITY			×	×	×	×	×	×		×
FANGIONO FAMILY / FIRST RESOURCES	×			×	×		×	×		×
FELDA/FGV	×		×	×	×	×	×	×	×	×
GAMA (FORMERLY GANDA)	×		×	×	×	×	×	×	×	×
GENTING	×			×	×		×	×	×	×
HAYEL SAEED ANAM GROUP	×									
IJM CORPORATION	×			×	×			×	×	×
IOI GROUP	×			×	×	×		×	×	×
INDONUSA			×		×					×
KORINDO				×				×		
LEMBAGA TABUNG HAJI	×			×	×	×	×	×	×	×
NOBLE										
NPC RESOURCES	×			×	×			×	×	×
POSCO (POSCO DAEWOO CORPORATION)										
RIMBUNAN HIJAU	×			×	×			×	×	×
SALIM	×			×	×	×	×	×		
SAMLING / GLENEALY PLANTATIONS	×			×	×			×	×	×
SUNGAI BUDI GROUP	×			×	×	×	×	×	×	×
TEE FAMILY / PROSPER	×			×	×		×	×	×	×

STUDI KASUS

PRODUSEN KOTOR DI PASAR GLOBAL

ANGLO-EASTERN PLANTATIONS

1 PT Kahayan Agro Plantation

AUSTINDO NUSANTARA JAYA

2A PT Permata Putera Mandiri

2B PT Putera Manunggal Perkasa

BUMITAMA

3A PT Gunajaya Harapan Lestari

3B PT Hatiprima Agro

3C PT Damai Agro Sejahtera

CENTRAL CIPTA MURDAYA

4 PT Hardaya Inti Plantations

CITRA BORNEO INDAH

5 PT Sawit Mandiri Lestari

DJARUM

6 PT Gemilang Sawit Kencana

DTK OPPORTUNITY

7 PT Lahan Agro Inti Ketapang

FANGIONO FAMILY

8A PT Agrindo Green Lestari

8B PT Citra Agro Abadi

FELDA - FELDA GLOBAL VENTURES (FGV)

9 PT Temila Agro Abadi

GAMA (FORMERLY GANDA)

10A PT Graha Agro Nusantara

10B PT Agriprima Cipta Persada

10C PT Agrinusa Persada Mulia

GENTING

11 PT Permata Sawit Mandiri

HAYEL SAEED ANAM GROUP

12 PT Megakarya Jaya Raya

IJM GROUP

13 PT Prima Bahagia Permai

INDONUSA

14 PT Internusa Jaya Sejahtera

KORINDO

15A PT Berkat Cipta Abadi

15B PT Dongin Prabhawa

15C PT Gelora Mandiri Membangun

15D PT Papua Agro Lestari

15E PT Tunas Sawa Erma Blok A

LEMBAGA TABUNG HAJI

16 PT Persada Kencana Prima

NOBLE

17A PT Henrison Inti Persada

17B PT Pusaka Agro Lestari

NPC RESOURCES

18 PT Sumber Alam Selaras

POSCO (POSCO DAEWOO CORP)

19 PT Bio Inti Agrindo Blok II

RIMBUNAN HIJAU

20A Eastern Eden - Malaysia

20B Gilford - PNG

SALIM

21A PT Duta Rendra Mulya

21B PT Sawit Khatulistiwa Lestari

21C PT Rimbum Sawit Papua

21D PT Subur Karunia Raya

SAMLING

22A PT Tunas Borneo Plantations

22B Ome Ome Project

SUNGAI BUDI GROUP

23A PT Samora Usaha Jaya

23B PT Solusi Jaya Perkasa

TEE FAMILY (PROSPER)

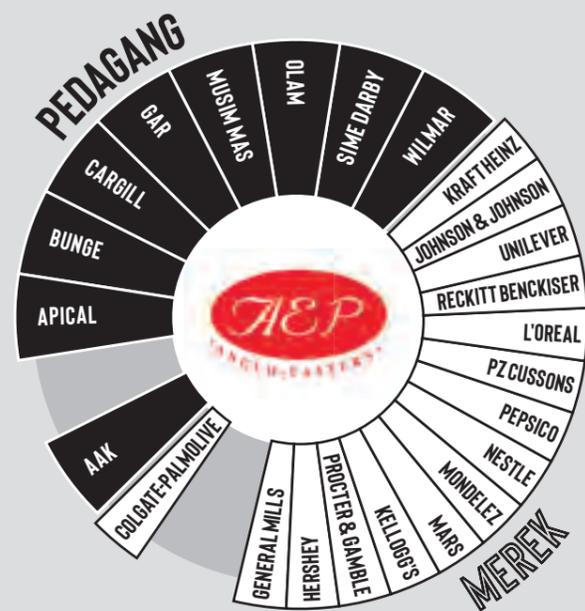
24 Prosper PNG



ANGLO-EASTERN PLANTATIONS

9 November 2017,
PT Kahayan Agro Plantation
(Anglo-Eastern), Kalimantan,
0°55' 8.525"S 113°22' 16.631"E
©Aidenvironment

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



Perkebunan Anglo-Eastern memiliki struktur kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan formal. Direktur eksekutifnya adalah John Lim Ewe Chuan.¹

Anglo-Eastern bukan merupakan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan public NDPE. Grup ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Laporan tahunan 2016 Anglo-Eastern mencantumkan total landbank kelapa sawit seluas 128.099 Ha, dengan 3.696 Ha di antaranya berada di Malaysia dan sisanya di Indonesia, di Sumatra, Kepulauan Bangka-Belitung, dan Kalimantan Tengah. 62.466 Ha konsesinya di Indonesia telah ditanami kelapa sawit.²

TANGGAPAN KELOMPOK

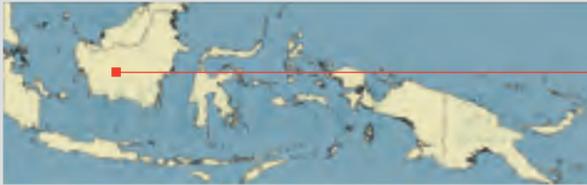
Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok.

TANGGAPAN PASAR

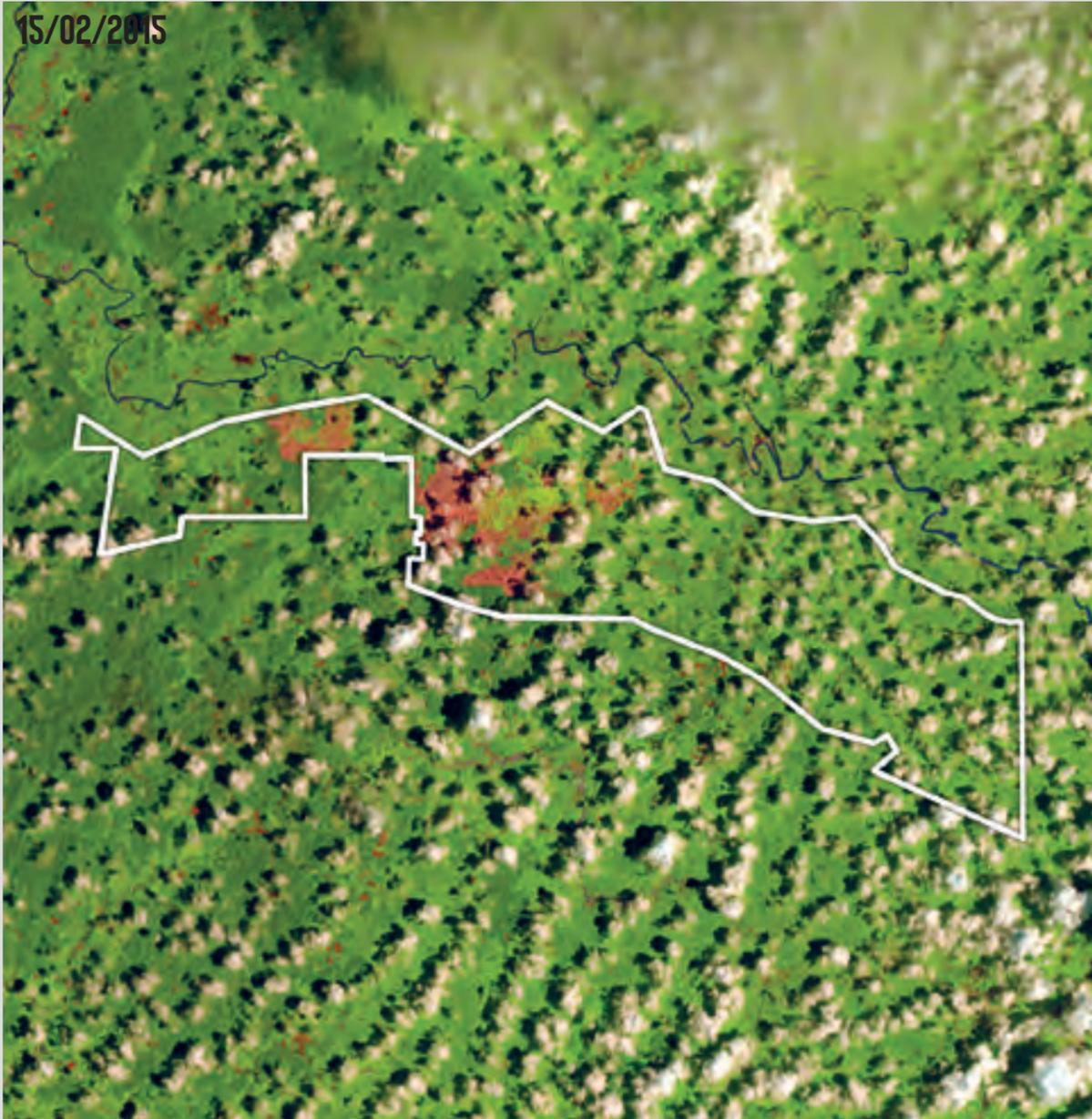
Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasoknya.

KONSESI:
PT KAHAYAN
AGRO PLANTATION
(PT KAP), KABUPATEN
GUNUNG MAS,
KALIMANTAN TENGAH

BUKAAN: 2,653ha



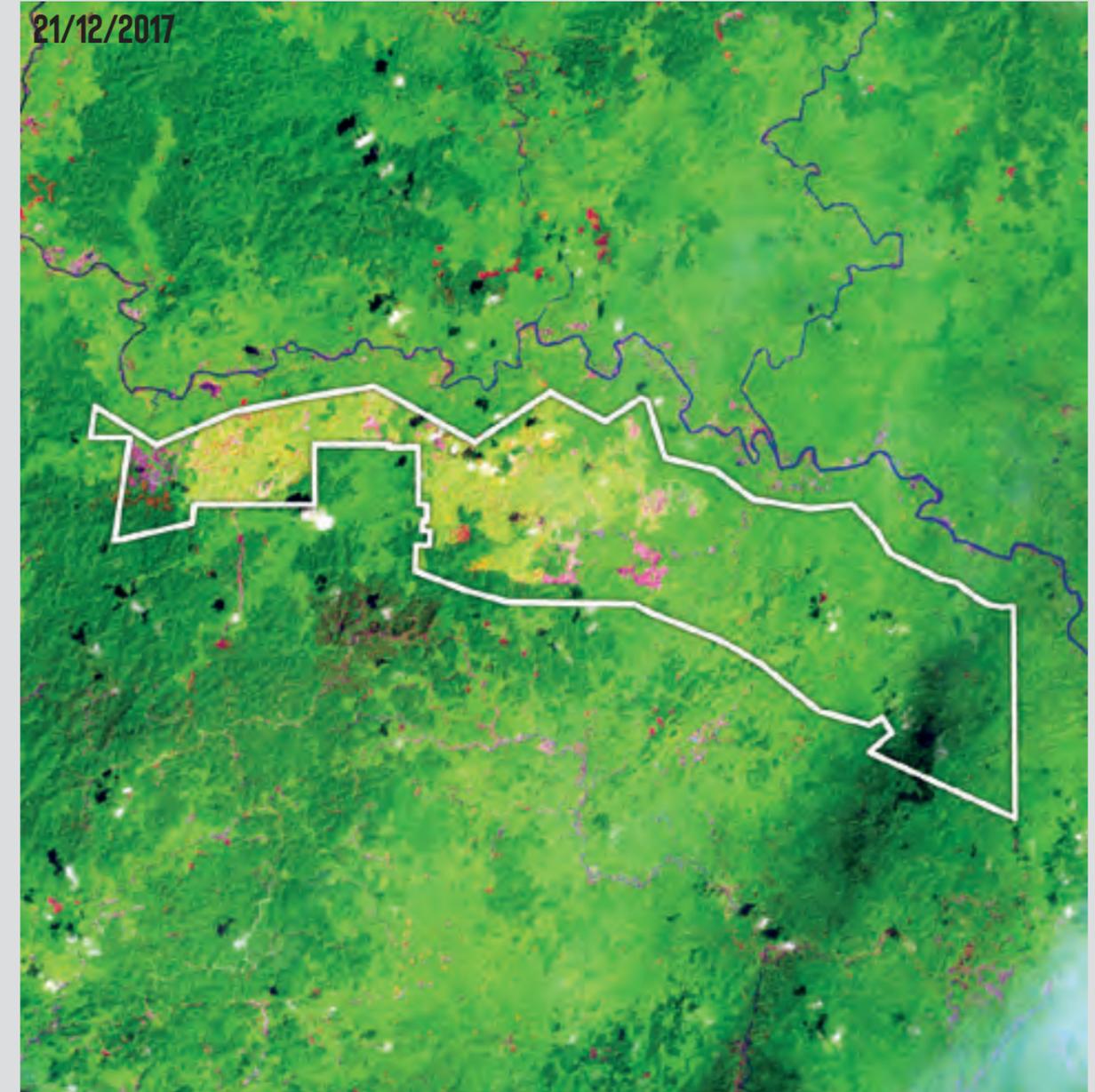
0 2 4 6 8 KM
 0 2 4 M
 Scale 1:400,000



Antara tanggal 15 Februari 2015 dan 21 Desember 2017, PT KAP membuka hutan sekunder seluas sekitar 2.650 Ha. Sebagian di antaranya merupakan habitat orangutan.

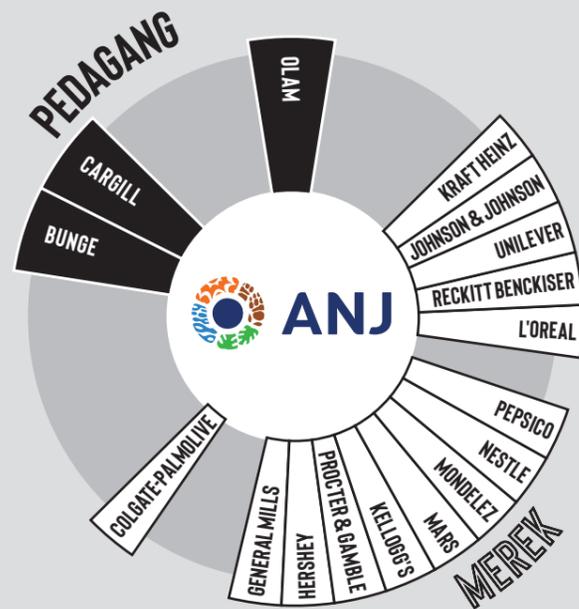
Batas konsesi berdasarkan surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara SK. 534/MENHUT-IT/2012.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



AUSTINDO NUSANTARA JAYA

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) adalah perusahaan milik keluarga dan memiliki struktur kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan formal. Grup ini mayoritas dimiliki oleh keluarga Tahija, termasuk George Santosa Tahija dan Sjakon George Tahija' yang duduk sebagai komisaris. George Santosa Tahija adalah anggota dewan penasihat The Nature Conservancy (Cabang Indonesia).²

ANJ adalah anggota RSPO. Perusahaan ini memiliki kebijakan keberlanjutan, tetapi kebijakannya kurang memadai dalam ruang lingkup dan substansi serta tidak mencakup komitmen untuk menghindari deforestasi.³ Grup usaha ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Laporan tahunan 2016 ANJ mencantumkan total landbank kelapa sawit seluas 157.681 Ha, di mana 49.539 Ha di antaranya telah ditanami. Delapan konsesinya berada di provinsi Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka-Belitung, dan Papua Barat. ANJ juga mengelola hutan

sagu seluas 40.000 Ha di lahan gambut di sebelah selatan konsesi kelapa sawitnya di Provinsi Papua Barat.⁴

Menyusul tekanan dari beberapa LSM, ANJ pada bulan Agustus 2016 mengumumkan bahwa mereka menghentikan sementara pembangunan dalam konsesinya yang di Papua.⁵ Surat dari perusahaan tersebut ke Greenpeace Asia Tenggara pada bulan Oktober 2016 mengklaim bahwa pembukaan lahan dihentikan pada bulan Maret 2015⁶. Namun, dilanjutkan kembali pada paruh kedua tahun 2017 (lihat studi kasus di bawah).

Laporan tahunan 2016 ANJ menyatakan bahwa mereka telah melakukan serangkaian penilaian nilai konservasi tinggi (NKT) dan stok karbon tinggi (SKT) dan meninjau ulang pendekatan mereka dalam berurusan dengan masyarakat setempat.⁷ Hingga saat ini, dokumentasi baru sesuai dengan Prosedur Penanaman Baru (NPP) belum dipublikasikan di situs web RSPO untuk keperluan konsultasi pemangku kepentingan,⁸ meskipun ANJ mengakui dalam laporan tahunan yang sama bahwa penilaian NKT aslinya telah gagal mengidentifikasi area-area hutan primer, dan adanya survei pemerintah yang mengindikasikan keberadaan gambut di dalam konsesinya.⁹

Pada akhir tahun 2017, sebuah koalisi LSM meminta Sekretariat RSPO untuk mengajukan pengaduan terhadap ANJ, mengutip bukti-bukti yang terdapat dalam studi-studi kasus di bawah ini.¹⁰ Sekretariat RSPO melakukan sebuah penyelidikan awal, termasuk sebuah 'tinjauan visual' untuk mendeteksi pembukaan hutan primer dan lahan gambut di dalam konsesi perusahaan dengan menggunakan peta-peta moratorium indikatif pemerintah Indonesia.¹¹ Tidak jelas mengapa Sekretariat RSPO memutuskan untuk menggunakan peta-peta ini, yang hanya mencatat hutan primer dan lahan gambut yang terletak di luar konsesi yang ada pada saat moratorium diberlakukan. Karena dua izin lokasi ANJ di Provinsi Papua Barat diterbitkan sebelum tanggal itu, area konsesi-konsesi ini selalu dikecualikan dari peta-peta moratorium tersebut. Sebaliknya, peta-peta tutupan lahan resmi KLHK yang ada sebelum penggundulan hutan dilakukan oleh ANJ menunjukkan area hutan primer yang luas di dalam konsesi, termasuk di area-area yang telah digunduli ANJ sejak mereka melanjutkan kembali pembukaan lahan pada tahun 2017 dan 2018.

Pada bulan Maret 2018, Sekretariat RSPO menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apa pun terhadap ANJ.¹²



Detail PT PPM, Agustus 2018
Sumber gambar satelit: Planet Labs Inc.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada tanggal 12 September, ANJ membalas dengan menyatakan bahwa 'tidak ada kewajiban untuk menyediakan informasi kepada Greenpeace tetapi jika Greenpeace melakukan bentuk publikasi tentang informasi yang tidak benar dari grup ini atau melakukan kegiatan publikasi yang meminta untuk melakukan boikot atau pengekangan perdagangan lainnya terhadap Grup kami maka kami berhak untuk meminta Greenpeace bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Secara khusus, mengenai pemukulan yang dilakukan Brimob oleh seorang pria lokal, ANJ menyatakan bahwa 'penyelidikan independennya menyimpulkan [...] bahwa serangan dan kegiatan rawat inap yang dilaporkan tidak terjadi'. ANJ gagal menyediakan peta konsesi atau data lain yang diminta.

TANGGAPAN PASAR

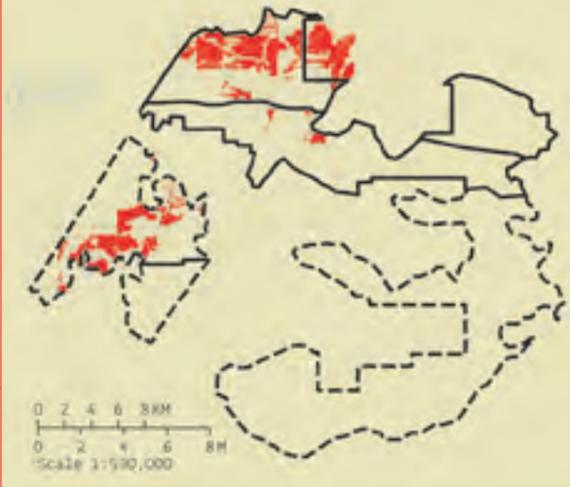
Bunge, Mars dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasoknya.

KONSESI:

PT PERMATA PUTERA MANDIRI (PT PPM) & PT PUTERA MANUNGGAL PERKASA (PT PMP), PROVINSI PAPUA BARAT

BUKAAN:

□ PT PPM: 1,300ha, □ PT PMP: 2,707ha



Catatan: Konseksi berdekatan yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pusaka Agro Makmur telah bergabung dengan induk perusahaannya PT Austindo Nusantara Jaya Tbk dan sekarang disebut sebagai PT ANJT. Pembukaan lahan belum dimulai dalam konseksi ini. Penilaian NKT yang telah dilakukan di konseksi ini dinilai 'tidak memuaskan' oleh HCV Resource Network pada bulan Oktober 2017.¹⁴

Pembukaan hutan di PT PPM dan PT PMP dimulai pada akhir tahun 2013 atau awal tahun 2014, dan citra satelit menunjukkan terjadinya deforestasi yang luas pada tahun 2015.¹⁵

Antara tanggal 3 Januari 2015 dan 16 Maret 2018, PT PPM membuka hutan seluas 1.300 Ha, termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional KLHK tahun 2015.

Antara tanggal 3 Januari 2015 dan 20 Maret 2018, PT PMP membuka hutan seluas 2.700 Ha, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

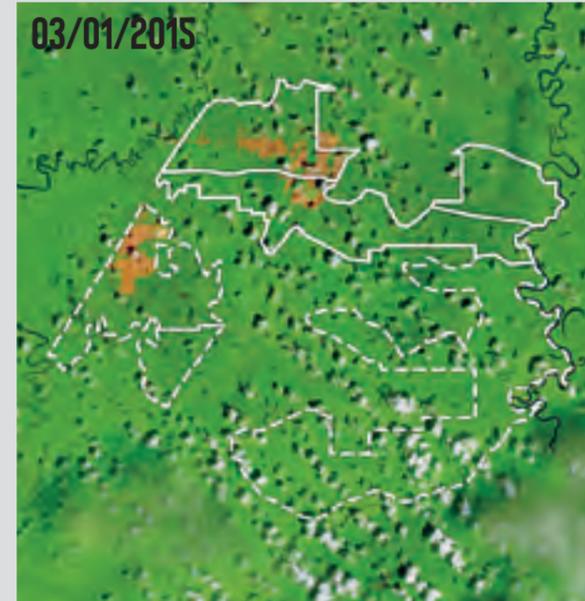
Pada bulan November 2017, ANJ mengatakan kepada situs web awasMIFEE bahwa mereka berniat mengembangkan area seluas 23.000 Ha dari konseksi mereka dalam lima tahun ke depan¹⁶ - tidak jelas berapa banyak dari area ini adalah hutan atau lahan gambut.

Kedua konseksi tersebut memiliki hubungan yang bermasalah dengan masyarakat adat setempat, yang menuduh ANJ telah membuka lahan tanpa mendapatkan izin atau memberi kompensasi, dan kerja itu telah menyebabkan kerusakan pada daerah aliran sungai, mengeringnya sumber-sumber air, kerusakan tempat-tempat suci dan hilangnya mata pencaharian.¹⁷ Klaim-klaim ini berujung pada penangkapan dan pemenjaraan warga setempat yang berdemonstrasi menentang perkebunan¹⁸ dan gugatan hukum terhadap

perusahaan oleh satu komunitas adat telah dilakukan, meskipun gugatan ini dibatalkan karena kegagalan untuk menghadirkan para pihak, tanpa menilai kepantasan dari kasus yang ada.¹⁹ Tingkat konflik menunjukkan bahwa ANJ tidak memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) untuk kegiatannya dari masyarakat setempat sebelum memulai pembukaan lahan.

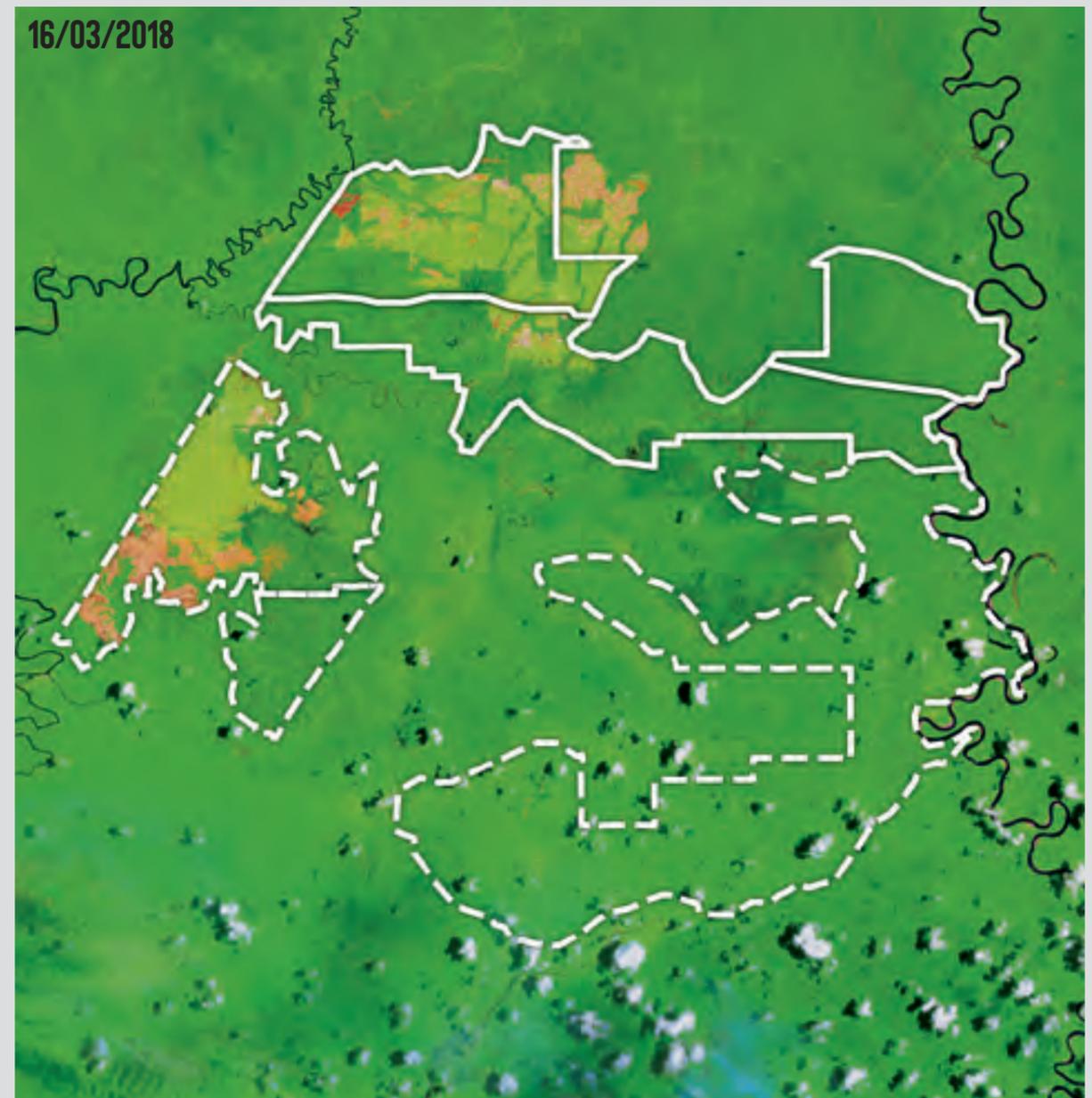
Pada bulan September 2017, selagi PT PPM melanjutkan pembukaan lahan dekat desa Puragi, para pemilik adat tanah tersebut, yang telah lama mempermasalahkan legitimasi klaim PT PPM telah mengakuisisi tanah mereka, mulai melakukan pemblokiran yang ditujukan untuk menghentikan kerja tersebut sampai sengketa tersebut dapat diselesaikan menggunakan hukum adat. Mereka mengklaim bahwa ANJ tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengadakan pertemuan pengambilan keputusan dengan masyarakat untuk mencapai kesepakatan tentang status tanah dan kompensasi untuk sumber mata pencaharian yang hilang.²⁰

ANJ terus mengandalkan aparat Brimob sebagai penjaga konsesinya. Penduduk setempat menuduh telah terjadi beberapa peristiwa ancaman dan kekerasan oleh para penjaga Brimob ini terhadap mereka yang melakukan protes pada bulan Oktober dan November 2017, termasuk peristiwa di mana seorang laki-laki dipukuli dengan popor senapan oleh tiga orang penjaga, yang membutuhkan perawatan di rumah sakit.²¹ Perusahaan kemudian membuat catatan resmi yang menyatakan bahwa mereka akan membayar biaya perawatan dan denda sebesar 50 juta rupiah (US\$ 3.700) atas pemukulan tersebut, meskipun beberapa minggu kemudian dilaporkan bahwa uang ini belum dibayarkan seperti yang dijanjikan.²²



Batas konseksi berdasarkan peta HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia, yang sesuai dengan NPP RSPO.¹³

Sumber gambar satelit: Landsat 8 courtesy of the U.S. Geological Survey.



BUMITAMA USAHA PATUNGAN ANTARA KELUARGA LIM HARIYANTO DAN IOI

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: BUMITAMA GUNAJAYA AGRO (BGA) DAN BUMITAMA SAWIT LESTARI (BSL), KEDUANYA DIMILIKI OLEH BUMITAMA AGRI LTD (BAL)

Bumitama¹ memiliki struktur kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan formal. Perusahaan ini merupakan usaha patungan antara Harita Group, yang dikendalikan oleh keluarga Lim Hariyanto, dan konglomerat Malaysia IOI Group. Pada bulan Maret 2018, mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga Lim Hariyanto (52%),² dengan IOI memiliki 32% saham³ yang berasal dari tahun 2007.⁴ CEO IOI Dato 'Lee Yeow Chor⁵ duduk di dewan direksi BAL dan di dewan-dewan masing-masing perusahaan Bumitama.⁶

Induk perusahaan dari kelompok tersebut, BAL, terdaftar di Singapura dan juga terdaftar di Bursa Singapura.⁷ Dari tahun 2012 dan seterusnya, BGA dan BSL 90% dimiliki oleh BAL.⁸ Keluarga Lim Hariyanto sejak dahulu mengendalikan (dan Bumitama telah lama memiliki manajemen operasional atas) sejumlah konsesi kelapa sawit di luar struktur formal kelompok usaha BAL⁹ yang kemudian diteruskan ke dalam kepemilikan Bumitama.¹⁰ Berdasarkan bukti-bukti yang diuraikan di bawah, Bumitama dan kelompok usaha minyak sawit keluarga Lim Hariyanto yang terpisah lainnya harus dilihat sebagai satu kelompok baik sekarang maupun di masa lalu.

Bumitama telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2013, meskipun salah satu dari dua anak perusahaannya, BGA, telah bergabung pada tahun 2007.¹¹ Kelompok ini mengadopsi kebijakan NDPE pada tahun 2015.¹² Bumitama tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Hingga akhir tahun 2017, Bumitama mencantumkan investasi di 32 anak perusahaan perkebunan¹³ dengan total landbank seluas sekitar 233.000 Ha yang tersebar di Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, 78% diantaranya telah ditanami. Kelompok ini juga mengoperasikan 14 pabrik minyak sawit mentah dengan total kapasitas pemrosesan sebesar 5,49 juta ton tandan buah segar (TBS) per tahun.¹⁴



PENGEMBANGAN LUAS TANPA IZIN HUKUM

Pada tanggal 12 April 2012, BAL meluncurkan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Singapura.¹⁵ Dokumen Prospektus IPO-nya mengklaim bahwa perusahaan memiliki dan/atau menguasai ... 191.948 hektar lahan,¹⁶ meskipun mengakui bahwa hampir 80% dari landbank-nya adalah 'tanah yang haknya... belum diberikan kepada pemegang lahan'¹⁷ dan bahwa lebih dari 60% total lahannya terdiri dari tanah di mana bahkan izin awal untuk mendapatkan hak atas tanah dari pemilik tanah saat ini (Ijin Prinsip atau Ijin Lokasi) telah kadaluarsa.¹⁸

Hukum Indonesia melarang pengembangan lahan tanpa izin-izin ini dan izin-izin lainnya (lihat Lampiran 1). Namun demikian, prospektus IPO-nya menyatakan bahwa total 119.162 hektar lahan yang diklaim dimiliki atau dikuasai oleh Bumitama telah ditanami.¹⁹ Diluar area yang tidak dicantumkan hanya kira-kira 44.500 Ha yang menjadi haknya,²⁰ Bumitama tampaknya secara tersirat mengakui tanggung jawab atas area seluas paling tidak 74.000 Ha yang telah ditanami secara ilegal atau tidak sah.

Analisis profil akta perusahaan menunjukkan Bumitama menyelesaikan situasi yang tidak nyaman ini melalui skema yang rumit dan dibuat-buat untuk mengaburkan kendali sebenarnya dari sejumlah area konsesi dan pekebunan yang entah tidak memiliki izin atau yang pernah memiliki izin namun izinnya sudah dicabut. Skema ini juga dirancang untuk menyesatkan RSPO sehingga menutup proses pengaduan terkait Bumitama. 'Pencucian konsesi' ini dicapai dengan mengalihkan kepemilikan di atas kertas dari konsesi-konsesi bersangkutan dari anggota keluarga Lim Hariyanto atau Bumitama ke perusahaan-perusahaan yang tampaknya tidak terkait yang dalam kenyataannya didirikan oleh sejumlah orang yang terkait erat dengan usaha keluarga ini. Kelompok ini kemudian mengakuisisi kembali perusahaan-perusahaan konsesi tersebut dengan harga murah begitu izin-izin yang diperlukan telah didapat dan semua pengaduan ditutup.²¹ Pengaturan seperti ini memungkinkan Bumitama lepas dari pembukaan lahan dalam konsesi-

konsesi tersebut, meskipun dalam kasus-kasus tertentu misalnya di PT Golden Youth Plantation Indonesia dan PT Gunajaya Harapan Lestari (dibahas di bawah), Bumitama terus melakukan pembukaan lahan dan mengelola perkebunan-perkebunan tidak legal ini meskipun dia bukan pemilik legalnya, dan memperdagangkan TBS dan minyak sawit yang dihasilkan. Selain menjadikan posisi konsesi menjadi legal terkait hukum Indonesia dan RSPO, skema ini memungkinkan Bumitama lepas dari borok ilegalitas dan pelanggaran aturan RSPO di masa lalu. Bumitama kemudian bergabung dengan Panel Pengaduan RSPO,²² yang memberi mereka tempat yang baik untuk menghalangi penyelidikan dan keluhan lebih lanjut tentang operasinya.

Sebagaimana dibahas di bawah, dua laki-laki – Djoni Rusmin dan Tommy Santoso – berada di jantung skema ini. Bumitama terus-menerus menyangkal kaitan apapun dengan Rusmin dan Santoso dalam pengumuman-pengumuman yang mereka keluarkan tentang akuisisi perusahaannya: pengumuman-pengumuman ini menyatakan bahwa kedua orang tersebut adalah 'pihak ketiga',²³ bahwa mereka adalah 'orang-orang yang tidak berkaitan dengan Kelompok ini'²⁴ atau bahwa 'tak satupun direktur atau pemegang saham pengendali [Bumitama Agri Ltd.] memiliki kepentingan baik langsung maupun tak langsung dalam Akuisisi tersebut'.²⁵ Ketika Greenpeace menantang Bumitama mengenai hubungannya dengan kedua orang tersebut di awal tahun 2017, pihak perusahaan mengklaim bahwa hubungan mereka bersifat kebetulan: 'Tommy Santoso dan Djoni Rusmin adalah pengembang kelapa sawit dan sebelumnya adalah pemegang saham PT LMS, yang menjual perusahaan tersebut kepada Bumitama karena kesulitan keuangan. Secara kebetulan mereka merupakan pemegang saham PT DAS'.²⁶ Namun, sedikitnya ada sepuluh perusahaan perkebunan telah dialihkan lewat tangan Rusmin dan Santoso sebelum dibeli oleh Bumitama – hampir sepertiga dari ke-32 perkebunan yang diumumkan Bumitama dalam Laporan Tahunan 2017-nya.



10 Desember 2016,
PT Damai Agro Sejahtera (Bumitama),
1°35'10.001"S 110°19'30"E
©Irmawan/Greenpeace

TANGGAPAN KELOMPOK

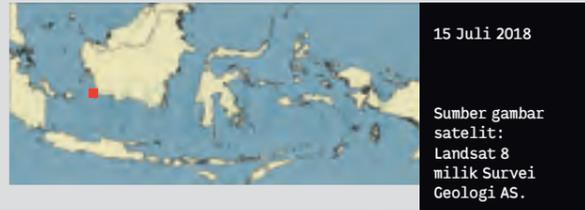
Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada tanggal 7 September, Bumitama menjawab, dengan menyatakan bahwa sementara 'Bumitama membantah klaim bahwa akuisisi [perusahaan perkebunan] tersebut akan menjadi bagian dari skema yang dirancang untuk memungkinkan Bumitama untuk mengatur ilegalitas, memungkinkan pembukaan lahan, menyatukan RSPO atau menipu investor kami, 'akan merefleksikan metode akuisisi perusahaan ini, dan ... meninjau dan memperbaiki prosedur kami melalui Komite Investasi.' Grup ini gagal menyediakan peta konsesi untuk operasinya.

Pada 12 September, Dato 'Lee Yeow Chor, CEO IOI dan direktur non-eksekutif Bumitama, menjawab dengan mengakui bahwa IOI akan memiliki tanggung jawab untuk 'malpraktek sebesar apa pun oleh Bumitama 'dan bahwa secara pribadi ia memiliki' tugas pengawasan 'untuk memastikan 'Bahwa perusahaan mematuhi hukum negara dan komitmen yang dijabarkan dalam Kebijakan Keberlanjutan perusahaan'. Dia menekankan bahwa IOI bersedia 'untuk memberikan tekanan pada manajemen Bumitama sebagai pemegang saham substansial' dan akan 'menyambut setiap saran dari Greenpeace atau LSM lain tentang bagaimana melakukan lebih banyak tekanan'.

TANGGAPAN PASAR

Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasoknya.

KONSESI: PT GUNAJAYA HARAPAN LESTARI (PT GHL), KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT



PT GHL adalah nama konsesi di Pulau Bawal di lepas pantai Kalimantan Barat. Perusahaan ini didirikan pada bulan Februari 2007 oleh keluarga Lim Hariyanto.²⁷ Perusahaan ini selalu berbagi alamat terdaftar di Jakarta yang sama dengan kantor BAL di Indonesia.²⁸

Dari tanggal 1 Januari 2011 hingga tanggal 31 Juli 2014, Bumitama menerima kuasa pengelolaan operasional formal dari konsesi tersebut, berdasarkan Perjanjian Kerjasama GHL.²⁹ Hasil analisis pemetaan menunjukkan terjadinya pembukaan lahan dan pengembangan perkebunan yang signifikan antara tahun 2010 dan 2013 baik di dalam maupun di luar batas konsesi, meskipun konsesi ini belum memiliki semua izin hukumnya. PT GHL akhirnya memperoleh izin usaha perkebunan (IUP; lihat Annex 1) pada tanggal 11 September 2013.³⁰ Lima tahun setelah izin lokasi mula-muladan setelah sebagian besar pengembangan dituntaskan. Menurut peraturan Menteri, area konsesi yang ada harus dikembalikan karena ijin lokasi berakhir setelah tiga tahun dan hanya bisa diperpanjang dalam waktu satu tahun.³¹

Menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama GHL, Bumitama memiliki hak untuk membeli konsesi tersebut dari keluarga Lim Hariyanto. Namun, Bumitama

mengumumkan pada bulan Juli 2014 bahwa pihaknya tidak akan menggunakan opsi ini dan tidak akan terus mengelola konsesi tersebut, yang mengutip peraturan Indonesia yang membatasi perusahaan asing memiliki tanah di pulau-pulau kecil.³²

Kemudian pada September 2014, PT GHL dijual kepada PT. Selaras Hijau Sentosa, merupakan sebuah perusahaan yang didirikan oleh Bumitama—dengan kaitan kepemilikan oleh Rusmin dan Santoso. Perkebunan tersebut kemudian di beli kembali oleh perusahaan yang dimiliki oleh anggota dari Keluarga Lim Hariyanto di bulan Juni 2015.³³ Dari Mei 2012 sampai dengan November 2015, PT. GHL berada dalam kontrol manajemen dari pasangan lain yang tetap mempunyai keterhubungan dengan Keluarga Lim Hariyanto³⁴, dimana manajemen menjembatani periode kepemilikan dari keluarga Lim Hariyanto, Rusmin/Santoso dan keuntungan perusahaan kepada kepentingan keluarga Lim Hariyanto.

Perkebunan PT.GHL dimiliki oleh Bumitama dari portofolionya diketahui pada Januari 2016.³⁵ Diakhir proses pengambilalihan di 2016, Bumitama mengklaim terdapat 2,982 Ha telah di kelola³⁶. Tidak ada aktivitas HCV didalam domain publik.

KONSESI: PT HATIPRIMA AGRO³⁷ (PT HPA), KALIMANTAN TENGAH



PT HPA merupakan konsesi seluas 4.800 Ha di Kalimantan Tengah. CEO IOI saat ini Dato' Lee Yeow Chor menjabat sebagai Komisaris PT HPA ketika Bumitama mengambil alih kepemilikan perusahaan dari keluarga Lim Hariyanto pada tanggal 28 Januari 2008,³⁸ dan dia terus menjabat posisi tersebut hingga tanggal 22 Maret 2012,³⁹ sebuah periode di mana perusahaan terlibat dalam penggundulan hutan secara ilegal yang substansial.

Pada bulan Maret 2008, Kementerian Kehutanan mencabut Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara untuk PT HPA karena kegagalannya untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan dari masyarakat serta hak guna usaha (HGU; lihat Lampiran 1) atas area hutan yang dilepaskan tersebut.⁴⁰ Meskipun ada perintah menteri untuk menghentikan semua kegiatan dan memindahkan peralatannya,⁴¹ perusahaan terus membuka lahan dan mengembangkan konsesinya selama periode tahun 2010–2012.⁴² Kemudian, pada bulan April dan Juni 2012, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dicabut oleh pihak berwenang setempat.⁴³

Pengembangan ilegal yang dilakukan HPA menyebabkan LSM Sawit Watch mengajukan pengaduan ke RSPO.⁴⁴ Pada bulan Desember 2012 RSPO memerintahkan Bumitama untuk menghentikan semua pekerjaan di konsesi tersebut sampai pengaduan ini diselesaikan.⁴⁵ Perusahaan menentang semua pencabutan izin tersebut, tetapi Mahkamah Agung Indonesia akhirnya menguatkan pencabutan tersebut pada bulan Desember 2013,⁴⁶ yang menjadikan Bumitama tidak memiliki klaim lebih lanjut atas tanah atau perkebunan tersebut.

Pada tanggal 15 November 2013, tepat sebelum Mahkamah Agung mengumumkan putusannya, Rusmin dan Santoso mendirikan perusahaan perkebunan baru, PT Langgeng Makmur Sejahtera (PT LMS).⁴⁷ Pada bulan Agustus 2014 Bumitama mengumumkan mereka kalah dalam kasus tersebut dan mengancam akan menuntut bupati.⁴⁸ Di bulan yang sama, PT LMS mengajukan permohonan kepada bupati yang sama untuk izin lokasi yang mencakup area yang sama dengan PT HPA. Hingga akhir 2014, PT LMS telah memperoleh izin lokasi⁴⁹ dan izin usaha perkebunan.⁵⁰

Pada bulan Januari 2015 Bumitama mengumumkan bahwa mereka akan menjual aset PT HPA, termasuk aset tak bergerak yang tercakup dalam penanaman kelapa sawit, kepada PT LMS

dengan imbalan pembayaran sekitar Rp 400 miliar (US \$ 32 juta).⁵¹ Tak lama kemudian, Bumitama berhasil mengajukan permohonan agar pengaduan RSPO terhadapnya ditutup dengan alasan bahwa mereka tidak lagi mengendalikan konsesi tersebut.⁵²

Dengan ditutupnya pengaduan tersebut, Bumitama membeli kembali perkebunan yang sama pada tahun berikutnya: pada bulan Juni 2016 Bumitama mengumumkan telah membeli 95% PT LMS dengan harga hanya Rp 250 juta (sekitar US\$ 18.500)⁵³, tidak sampai seperseribu dari harga yang disetujui PT LMS untuk membayar Bumitama di tahun sebelumnya. Ini merupakan harga yang luar biasa menguntungkan mengingat usaha ini kini telah memiliki izin lokasi dan izin usaha perkebunan perusahaan yang sah. Bumitama kemudian mengakui bahwa uang pembelian tersebut tidak pernah mengalir dari PT LMS ke Bumitama selama kurang lebih 18 bulan kepemilikan boneka konsesi tersebut oleh Rusmin dan Santoso.⁵⁴ Bumitama menghapus seluruh informasi terkait kepemilikan Bumitama dan Lim Hariyanto sebelumnya atas perkebunan tersebut lewat PT HPA dalam seluruh pengumuman tentang akuisisi tersebut kepada Bursa Saham Singapura. Bumitama akhirnya memperoleh sertifikat HGU untuk konsesi tersebut pada bulan Januari 2017.⁵⁵

Bumitama juga tampaknya terus mengelola perkebunan tersebut selama periode kepemilikan boneka oleh Rusmin dan Santoso tersebut.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa transaksi antara PT LMS dan Bumitama adalah pengaturan terencana untuk memastikan penutupan pengaduan RSPO, membatasi dampak negatif terhadap nilai saham publik Bumitama dan memungkinkan Rusmin dan Santoso untuk mendapatkan izin baru untuk melegalkan kendali Bumitama terhadap area yang telah dikembangkan secara ilegal.

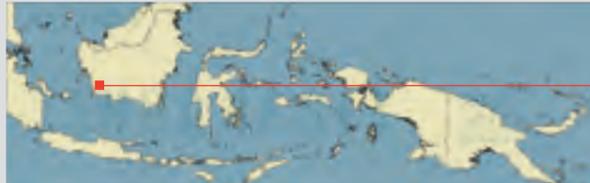
Menyusul permintaan dari Sawit Watch, Greenpeace, dan Environmental Investigation Agency, Panel Pengaduan RSPO kemudian memutuskan untuk membuka kembali pengaduan terhadap PT HPA pada tanggal 21 November 2017.⁵⁷ Pada bulan Mei 2018 panel pengaduan meminta Sekretariat RSPO untuk menunjuk seorang pakar pihak ketiga untuk melakukan sebuah tinjauan independen terhadap izin-izin terkait PT HPA.⁵⁸

Bumitama mengakui bahwa 'pengembangan HPA belum sesuai dengan NPP RSPO' dan akan ada sanksi RSPO terhadap PT LMS.⁵⁹

KONSESI: PT DAMAI AGRO SEJAHTERA (PT DAS), KALIMANTAN BARAT

Batas konsesi berdasarkan
AMDAL BUPATI KETAPANG No.27
/ PEM / 2016.

Sumber gambar satelit:
Landsat 8 milik Survei
Geologi AS.



BUKAAN: 1,442ha



PT DAS didirikan oleh Rusmin dan Santoso pada tanggal 15 November 2013, pada hari yang sama mereka mendirikan PT LMS.⁶⁰

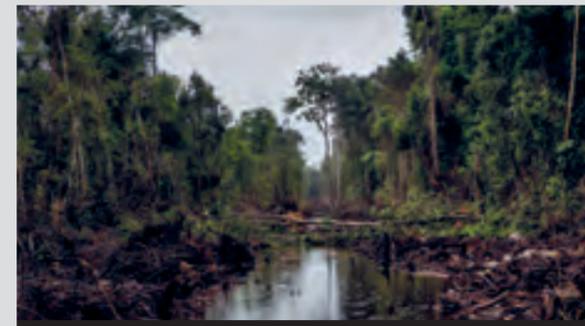
Pada bulan Januari 2016 PT DAS diberikan izin lokasi yang mencakup sekitar 9.400 hektar⁶¹, yang mencakup lebih dari 1.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan oleh PT Golden Youth Plantation (PT GYP), yang dimiliki oleh keluarga Lim Hariyanto.⁶² Sama halnya dengan kasus-kasus lain yang dijelaskan di sini, perkebunan itu ilegal karena PT GYP telah gagal memperoleh izin-izin yang diperlukan.

Antara bulan Juli 2015 dan tanggal 10 April 2018, terjadi penggundulan 1.450 Ha lahan dalam area yang kemudian akan menjadi konsesi PT DAS, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah. Sebagian besar dari penggundulan ini terjadi tahun 2016. Bukti-bukti lapangan menunjukkan bahwa Bumitama tetap secara informal bertanggung jawab atas pengelolaan area ini bahkan setelah pernyataan publik di tahun 2014 yang menyatakan mereka secara resmi mengakhiri keterlibatan mereka.⁶³ Investigasi lapangan Greenpeace menemukan bahwa persemaian yang melayani PT DAS terletak di dalam konsesi kelapa sawit yang dimiliki oleh Bumitama. Bukti-bukti lain dari keterlibatan jangka panjang Bumitama termasuk tonggak pembatas, pos keamanan dan papan nama perusahaan di area tersebut, yang semuanya membawa nama BGA (yaitu Bumitama).⁶⁴

Pada tanggal 20 Desember 2016, hanya empat bulan setelah Rusmin dan Santoso akhirnya memperoleh izin usaha perkebunan untuk PT DAS, Bumitama mengumumkan bahwa mereka telah membeli konsesi tersebut.⁶⁵ Dalam rilis berita yang dikeluarkan enam bulan kemudian, mereka mengklaim bahwa alasan untuk akuisisi tersebut karena penggundulan hutan oleh perusahaan berdampak terhadap upaya Bumitama untuk membangun koridor orangutan di konsesi berdekatan.⁶⁶

Dalam pengumuman pembelinya atas PT DAS, Bumitama tidak menyebutkan keluarga Lim Hariyanto dan sejarah jangka panjang Bumitama dengan area tersebut. Bumitama tidak mengakui bahwa mereka sebelumnya secara resmi mengelola perkebunan ilegal PT GYP, atau bahwa mereka telah memproses dan memperdagangkan TBS dari perkebunan ilegal itu selama periode manajemen formal dan setelahnya. Rusmin dan Santoso kembali digambarkan sebagai 'tidak terkait' dengan Bumitama dan keluarga Lim Hariyanto,⁶⁷ meskipun ini bukan satu-satunya konsesi yang telah diperdagangkan di antara mereka.

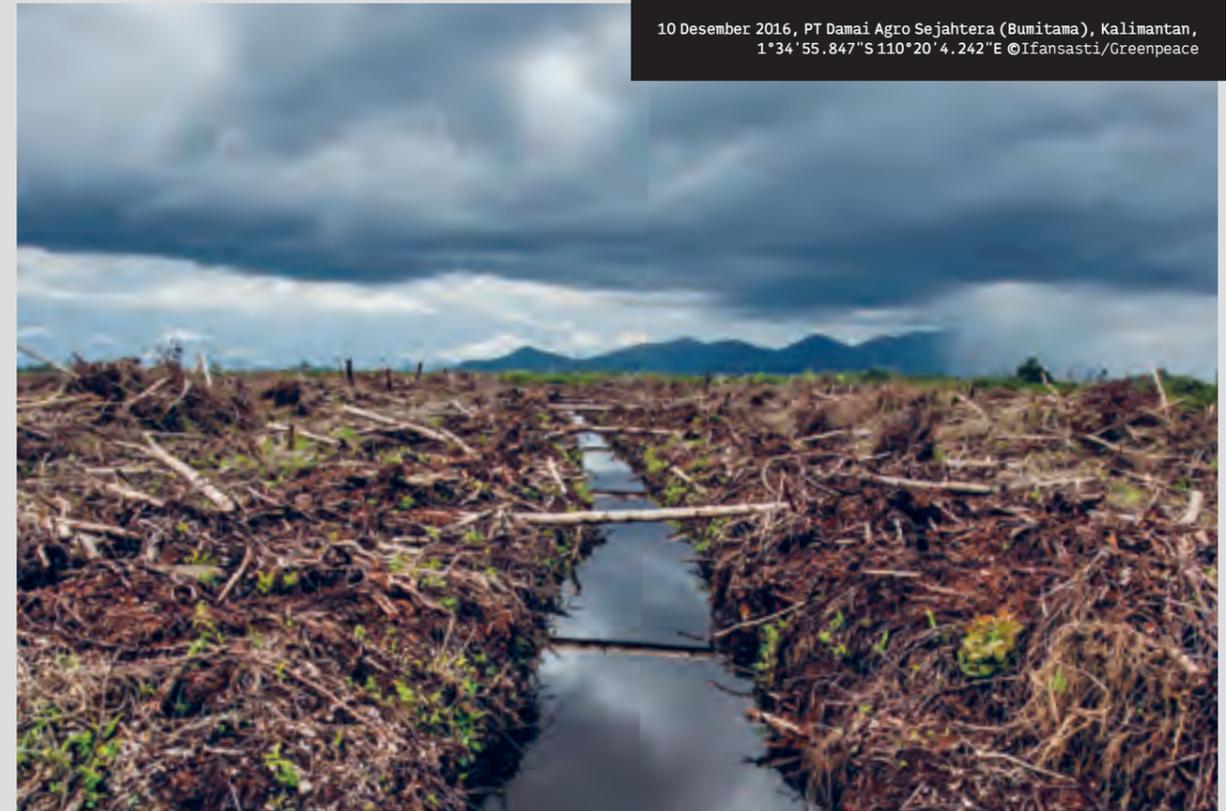
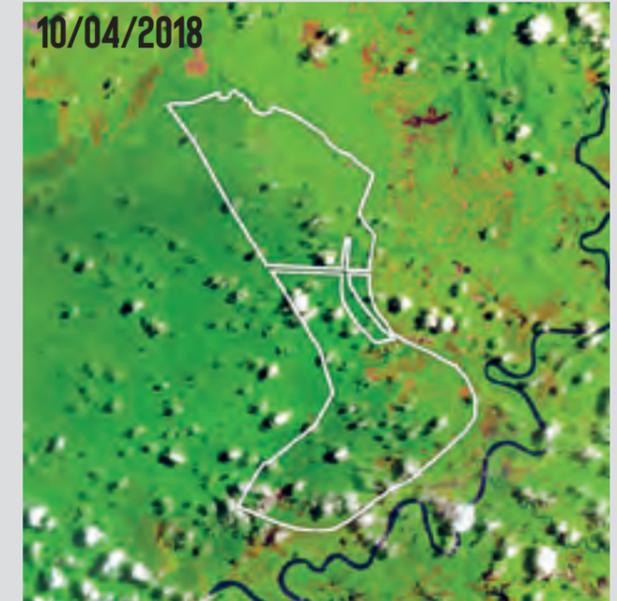
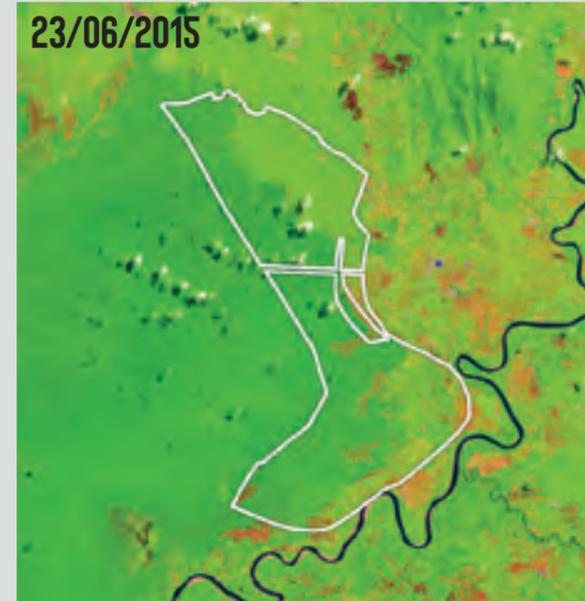
Jumlah total yang dibayarkan oleh BSL (90%) dan perusahaan Lim Hariyanto PT KMS (10%) untuk konsesi PT DAS seluas 9.436 Ha hanya Rp 250 juta (sekitar US\$ 18.500)⁶⁸ - jumlah pembelian yang sama rendah yang dibayarkan Bumitama kepada Rusmin dan Santoso untuk PT LMS.



11 Desember 2016, PT Dama Agro Sejahtera (Bumitama), Kalimantan, 1°30'27.774"S 110°15'46.121"E ©Ifansasti/Greenpeace



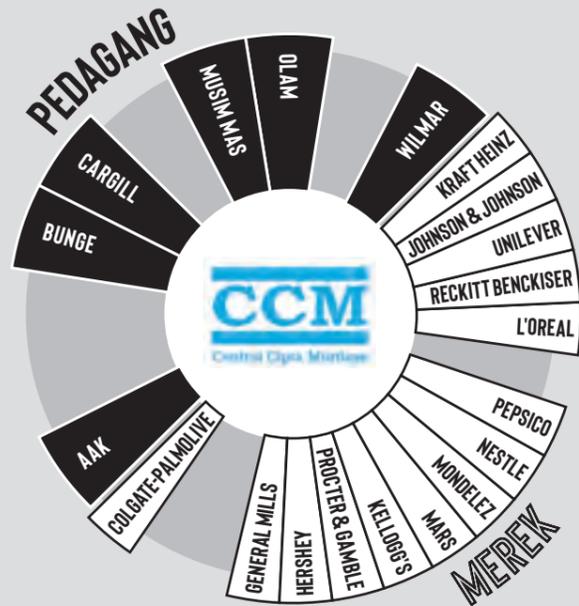
11 Desember 2016, PT Ladang Sawit Mas (Bumitama), Kalimantan, 1°32'20.856"S 110°18'58.122"E ©Ifansasti/Greenpeace



10 Desember 2016, PT Dama Agro Sejahtera (Bumitama), Kalimantan, 1°34'55.847"S 110°20'4.242"E ©Ifansasti/Greenpeace

CENTRAL CIPTA MURDAYA (KELUARGA MURDAYA)

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: HARDAYA PLANTATIONS GROUP

Ini adalah grup usaha keluarga di mana perusahaan-perusahaan yang secara formal terpisah yang dimiliki oleh anggota keluarga yang sama berbagi kontrol operasional atau manajerial.

Dikenal secara informal sebagai Hardaya Plantations Group (HPG), grup ini dimiliki oleh keluarga Murdaya, termasuk Siti Hartati Murdaya (CEO dan salah satu pendiri), Murdaya Widyawimarta Poo (salah satu pendiri, suaminya) dan putra-putra mereka Karuna Murdaya (direktur dan kepala operasi minyak sawit di provinsi Papua dan Sulawesi) dan Prajna Murdaya.¹ Pada bulan Februari 2013, Siti Hartati Murdaya dijatuhi hukuman 32 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 150 juta (setara US\$ 15.000) karena menyuap mantan bupati Buol, Sulawesi Tengah, untuk mendapatkan izin untuk konsesi kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP; lihat di bawah) di Sulawesi.²

Baik Central Cipta Murdaya (CCM) maupun Hardaya Plantations Group (HPG) bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan publik NDPE. Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Aidenvironment telah mengidentifikasi sekitar 145.000 Hasetidaknya di lima konsesi HPG, di mana 82.600 Ha di antaranya berada di provinsi Papua (berdasarkan izin lokasi) dan sisanya di Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah.³

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

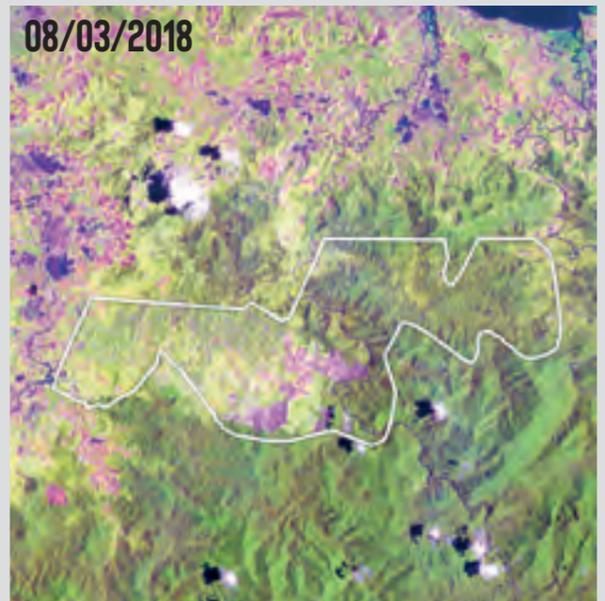
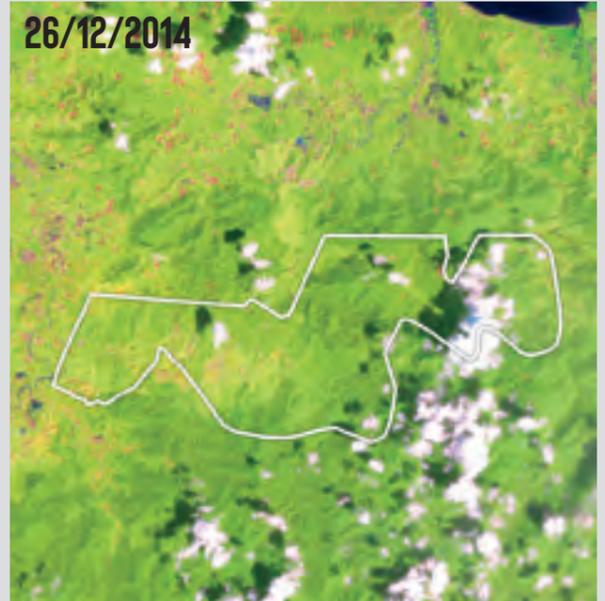
Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI: PT HARDAYA INTI PLANTATIONS (PT HIP), KABUPATEN BUOL, SULAWESI TENGAH

BUKAAN: 434ha



Antara tanggal 26 Desember 2014 dan 8 Maret 2018, PT HIP membuka 434 Ha hutan, termasuk hutan primer berdasarkan peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK.

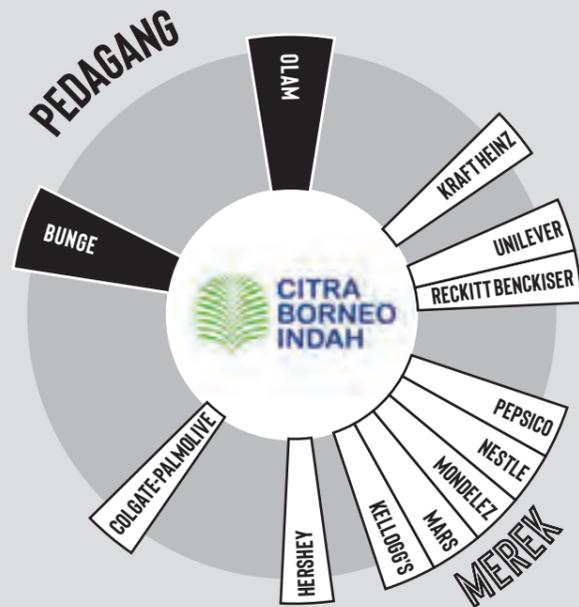


Batas konsesi berdasarkan peta HGU dari pemerintah setempat.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

CITRA BORNEO INDAH TERKAIT KEPEMILIKAN ABDUL RASYID

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: PT SAWIT SUMBERMAS SARANA DAN LAINNYA

Kelompok usaha Citra Borneo Indah memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal, yang mencakup PT Citra Borneo Indah dan anak-anak perusahaannya, termasuk anak perusahaan perkebunan utamanya PT Sawit Sumbermas Sarana (PT SSMS) dan anak-anak perusahaannya.¹ Citra Borneo Indah dikendalikan oleh taipan Abdul Rasyid, yang digambarkan sebagai 'mantan gembong pembalak liar';² sepupu laki-laki Rasyid Sugianto Sabran yang menjadi gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2016,³ dan pada bulan Mei 2017, ipar perempuan Rasyid, Nurhidayah, terpilih sebagai Bupati Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah.⁴

Citra Borneo Indah bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE. Anak perusahaannya, PT SSMS adalah anggota RSPO (dan karenanya keanggotaan kelompok Citra Borneo Indah telah melanggar peraturan RSPO tentang keanggotaan kelompok⁵) dan baru-baru ini menerbitkan kebijakan NDPE.⁶ Tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini menyediakan peta bata-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Penyampaian Komunikasi Tahunan Kemajuan (ACOP) aktivitas PT SSMS tahun 2016 kepada RPSO melaporkan total landbank seluas 62.339 Ha, dengan 44.513 Ha di antaranya telah ditanami.⁷ Namun, dalam laporan tahunan 2016 perusahaan mengklaim total landbank seluas 96.040 Ha dan area yang telah ditanami seluas 70.125 Ha.⁸ Data dalam laporan tahunan ini sangat sesuai dengan analisis pemetaan Greenpeace, yang menunjukkan bahwa PT SSMS memangkas landbank-nya saat melapor ke RSPO. Semua perkebunan berlokasi di Kalimantan Tengah.

Pada bulan Desember 2015, PT SSMS menjual dua konsesinya, termasuk PT Sawit Mandiri Lestari (PT SML; lihat studi kasus di bawah),⁹ yang berarti konsesi tersebut tidak lagi tunduk pada Prinsip dan Kriteria RSPO. Pada saat itu, masih ada pengaduan RSPO terhadap PT SML yang menanti keputusan, yang diprakarsai oleh LSM Environmental Investigation Agency dan JPIK Kalteng.¹⁰ PT SML saat ini 60% sahamnya dimiliki oleh Rinawati¹¹, yang tampaknya terkait Citra Borneo Indah¹². Untuk 40% saham PT SML lainnya dimiliki oleh Hamidi Mukhar Said (Hamdhani), anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia¹³ dan sekutu politik dari keponakan laki-laki Abdul Rasyid, Gubernur Sugianto Sabran. Direktur yang disebutkan dalam profil

akta perusahaan untuk PT SML juga merupakan direktur komersial PT SSMS (Ramzi Sastra) dan alamat PT SML sama dengan alamat perusahaan-perusahaan perkebunan PT SSMS lainnya.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa keluarga Rasyid masih memiliki kendali atas operasi PT SML.

Pada bulan Januari 2018 PT SSMS mengklaim bahwa 'TFT telah menerima SSMS sebagai anggota penanam kelapa sawit terbaru mereka'.¹⁵ Tiga bulan kemudian, perusahaan lain dalam kelompok Citra Borneo Indah (PT BSG; lihat studi kasus di bawah) dituduh melakukan deforestasi dan pengembangan lahan gambut.¹⁶

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

Bunge, Mars dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI: PT BORNEO SAWIT GEMILANG (PT BSG), KALIMANTAN BARAT

Pada bulan April 2018, Forest Hints, situs berita setengah resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia,¹⁷ menuduh anak perusahaan Citra Borneo Indah PT BSG¹⁸ melakukan deforestasi dan pengembangan lahan gambut.¹⁹ Menurut Forest Hints, PT BSG mulai membuka lahan dan mengembangkan konsesinya pada bulan Desember 2017.

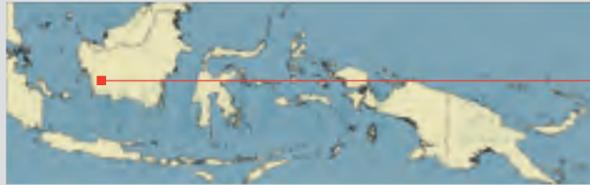
Forest Hints merilis foto-foto, yang tampaknya diambil pada tanggal 20 April 2018, yang menunjukkan ekskavator tengah membuka hutan dan sebuah jaringan kanal yang luas yang tampaknya tengah mengeringkan lahan gambut untuk persiapan penanaman. Forest Hints mengklaim bahwa area tersebut merupakan bagian dari zona perlindungan lahan gambut dan telah diidentifikasi untuk tujuan restorasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).²⁰ Pengembangan seperti itu akan melanggar hukum Indonesia dan kebijakan NDPE perusahaan, termasuk komitmen keberlanjutan yang dibuat oleh sister company PT BSG PT SSMS pada bulan September 2017.²¹

Pada bulan Mei 2018, PT SSMS mengakui menjadi bagian dari kelompok yang sama seperti halnya PT BSG, dan membenarkan bahwa karena 'komitmen keberlanjutan SSMS mencerminkan komitmen-komitmen induk perusahaan kami', PT BSG (dan lewat kesimpulan, semua perusahaan dalam kelompok Citra Borneo Indah lainnya) harus dinilai dengan standar yang sama.²²

PT SSMS juga mengklaim telah melakukan investigasi lapangan yang menetapkan bahwa tidak hanya 'dugaan pengembangan' dilakukan oleh PT BSG namun juga bahwa pengembangan tersebut 'terjadi di luar [area] izin BSG'.²³ Jika benar, ini akan merupakan pelanggaran lebih lanjut terhadap hukum Indonesia.

PT SSMS mengklaim bahwa PT BSG telah membuka area tersebut 'atas permintaan masyarakat setempat',²⁴ sebuah fakta yang diperdebatkan oleh Forest Hints, yang menuduh telah diberitahu oleh karyawan perusahaan bahwa izin itu adalah 'untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit baru untuk PT BSG'.²⁵

KONSESI:
**PT SAWIT MANDIRI
 LESTARI (PT SML),
 KABUPATEN LAMANDAU,
 KALIMANTAN TENGAH**



Antara tanggal 10 Maret 2015 dan 14 Februari 2018, PT SML membuka 6.243 Ha merupakan hutan sekunder. Hutan yang dibuka ini adalah habitat orangutan.



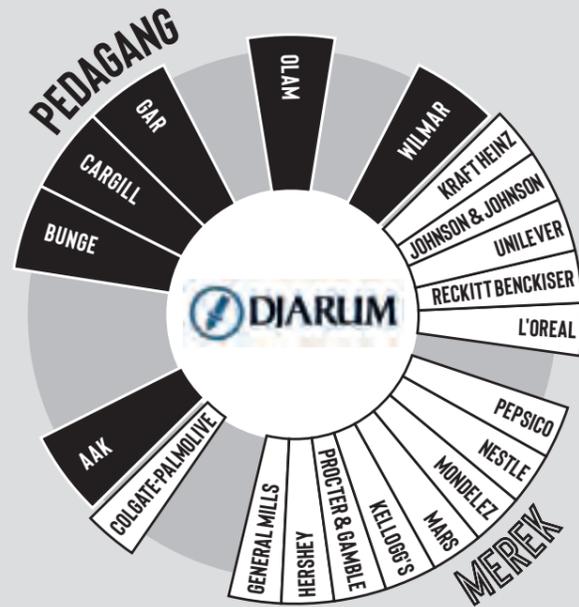
Batas konsesi berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara 1/1/PKH/PMDN/2015 dan NPP RSP0.²⁶

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



20 Mei 2016,
 PT Sawit Mandiri Lestari (Citra Borneo Indah), Kalimantan,
 1°54'26.52"S 111°13'51.41"E
 ©Aidenvironment

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



Januari 2016, PT Gemilang Sawit Kencana (Djarum), Kalimantan, 0°12'56.53"N 109°42'11.91"E @Aidenvironment

PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: PT HARTONO PLANTATIONS INDONESIA, JUGA DIKENAL SEBAGAI HPI AGRO

Djarum adalah perusahaan milik keluarga dan tampaknya memiliki struktur kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan formal. Grup ini dimiliki oleh dua bersaudara Robert Budi Hartono (CEO) dan Michael Hartono merupakan orang terkaya di Indonesia pada tahun 2016.¹ Djarum paling dikenal sebagai produsen rokok kretek tetapi juga bergerak di bidang perbankan dan bidang lainnya, termasuk bank terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan total aset, Bank Central Asia (BCA).²

Baik Djarum maupun HPI Agro bukanlah anggota RSPO, dan grup tersebut tidak memiliki kebijakan publik NDPE. Grup ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Aidenvironment telah mengidentifikasi sebuah landbank kelapa sawit seluas lebih dari 100.000 Ha yang terkait grup tersebut, semuanya terletak di Kalimantan Barat, di mana sebagian besar berada di Kabupaten Landak.³

Di bulan Agustus 2018, laporan dari sebuah koalisi LSM Indonesia mengungkapkan bahwa dua konsesi bubur kayu di Kalimantan Timur yang dimiliki keluarga Hartono telah membuka sekitar 32.000 Ha lahan sejak tahun 2013

(9.500 Ha sejak tahun 2016).⁴ Pembukaan lahan tersebut dilaporkan untuk memasok sebuah pabrik bubur kertas baru di provinsi tersebut.⁵

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada tanggal 12 September 2018, Djarum/HPI Agro telah memberi tanggapan, menyebutkan bahwa tidak melakukan pembukaan pada lahan gambut dengan menggunakan acuan data kawasan gambut yang dilindungi oleh Pemerintah, walaupun tidak menyangkal adanya kegiatan

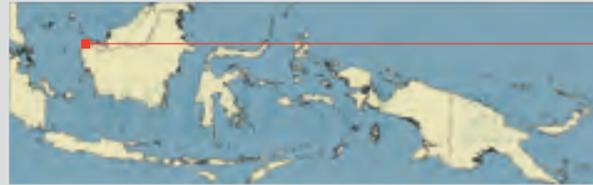
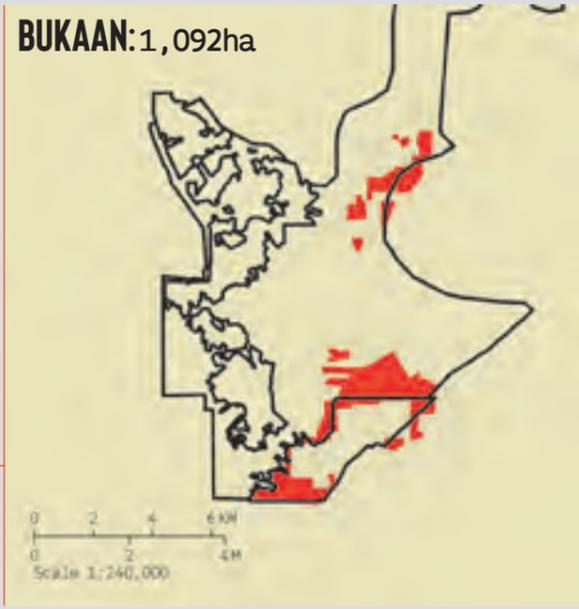
pembukaan di lahan gambut. Secara umum, merujuk kepada pelanggaran komitmen NDPE, 'tahun ini perusahaan telah berkomitmen NDPE untuk diterapkan di kebijakan keberlanjutan perusahaan. Namun, kami menyadari bahwa proses penyesuaian dari kebijakan NDPE kedalam kebijakan perusahaan membutuhkan waktu dan proses.' Grup ini gagal menyediakan peta konsesi bagi operasinya.

TANGGAPAN PASAR

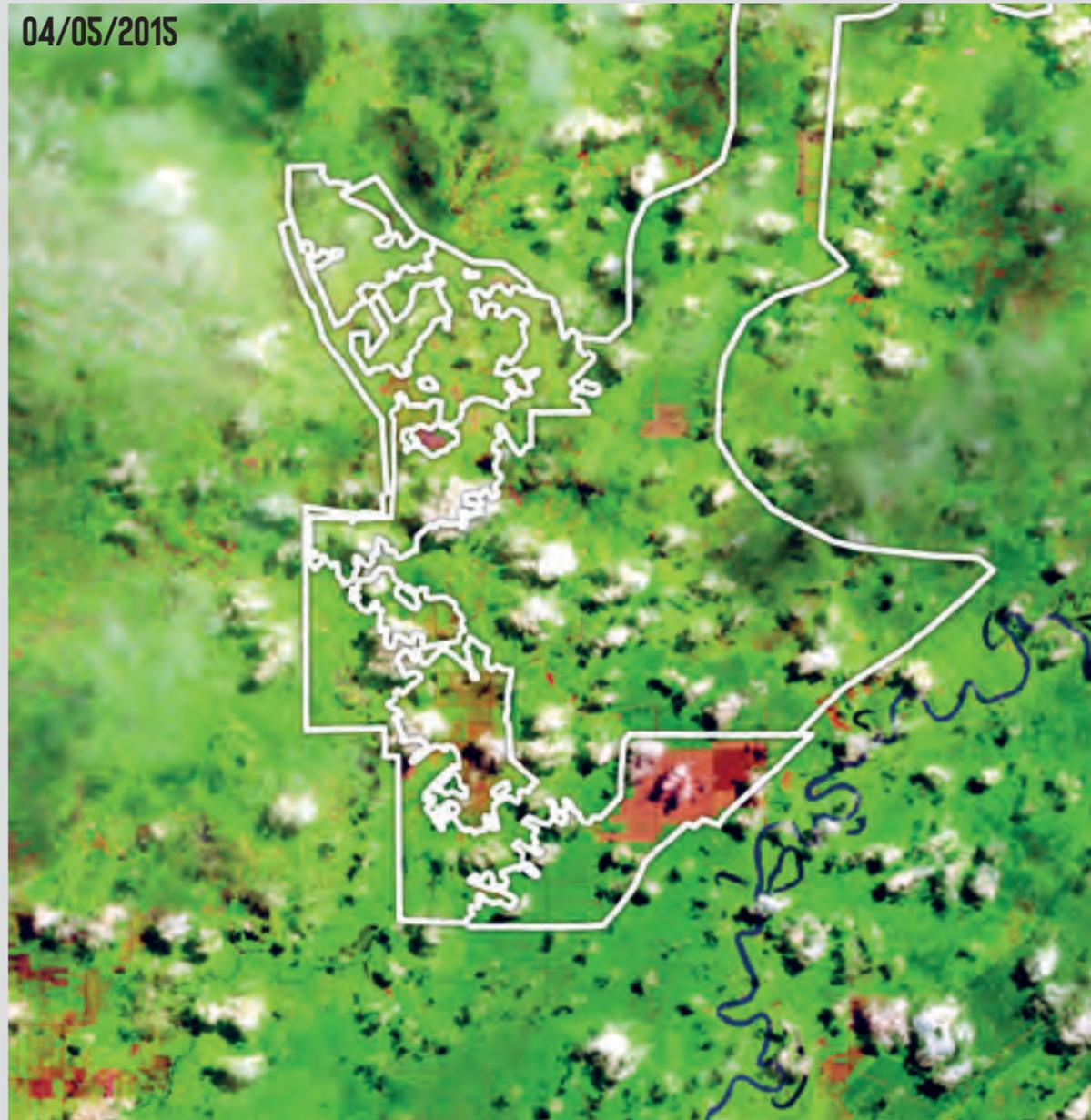
Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
PT GEMILANG SAWIT
KENCANA (PT GSK),
KABUPATEN LANDAK,
KALIMANTAN BARAT

BUKAAN: 1,092ha



04/05/2015

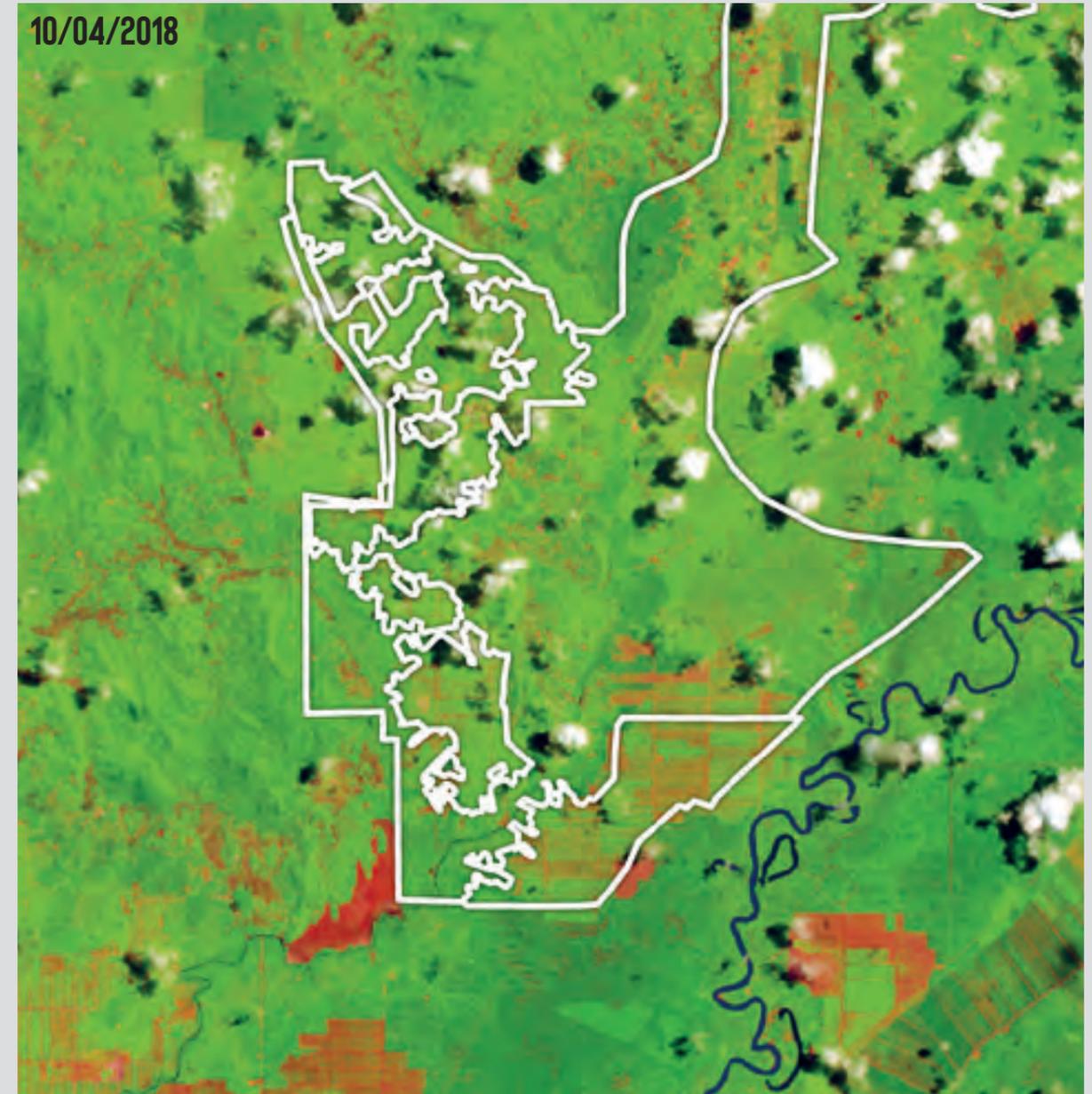


Antara tanggal 4 Mei 2015 dan 10 April 2018, PT GSK membuka 1.100 Ha hutan lahan gambut, termasuk yang berada dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

Batas konsesi berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dan Kementerian Kehutanan⁶ serta analisis pola pembukaan lahan.

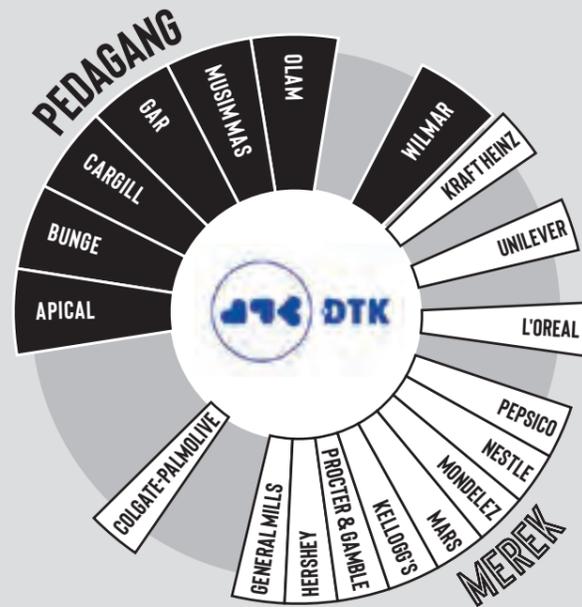
Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

10/04/2018



DTK OPPORTUNITY

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



DTK adalah grup usaha formal dengan hubungan kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan biasa. Namun, kepemilikan dan kontrol utamanya dikaburkan lewat pendaftaran di British Virgin Islands.¹ Sebagian konsesinya pada awalnya merupakan bagian dari grup RGE, yang juga mencakup raksasa bubur kertas APRIL. Sebagian perkebunannya dioperasikan atau dikelola oleh Acapalm.²

Pada tahun 2014, presiden/direktur konsesinya DTK PT Archipelago Timur Abadi (PT ATA) dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar (sekitar US\$ 170.000) oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya karena PT ATA telah mengembangkan perkebunannya tanpa izin usaha perkebunan (IUP; lihat Annex 1).³

DTK bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan public NDPE. Kelompok ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Aidenvironment telah mengidentifikasi sebuah landbank seluas 133.000 Ha di 11 konsesi milik DTK di Papua dan Kalimantan, dengan sekitar 65.000 Ha di antaranya telah ditanami.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada 12 September, DTK Opportunity menjawab, menyatakan bahwa 'kami masih dalam tahap bayi di area keberlanjutan' dan 'di dalam beberapa bulan terakhir, kami mengambil keputusan bisnis untuk menjual PT LAIK. Ini bukan lagi bagian dari DTK'. Lebih lanjut, mereka mengklaim telah menghentikan izinnya sendiri dalam konsesi itu pada Oktober 2017, setelah pertemuan dengan Aidenvironment. Grup gagal menyediakan peta konsesi untuk operasinya.

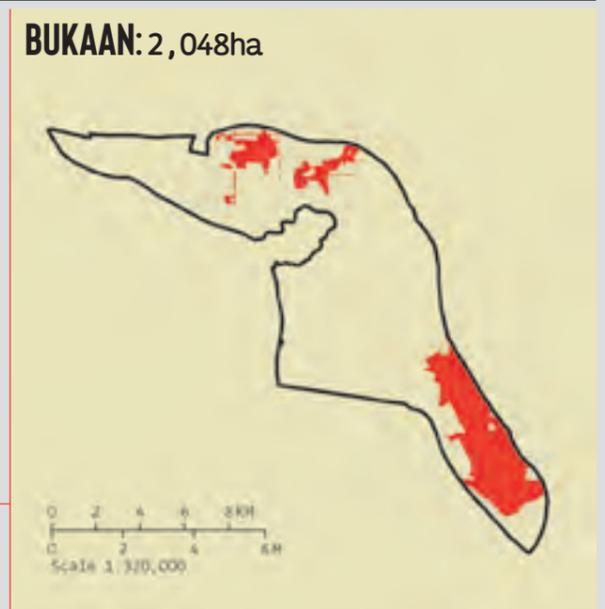
TANGGAPAN PASAR

Mars dan Nestlé memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

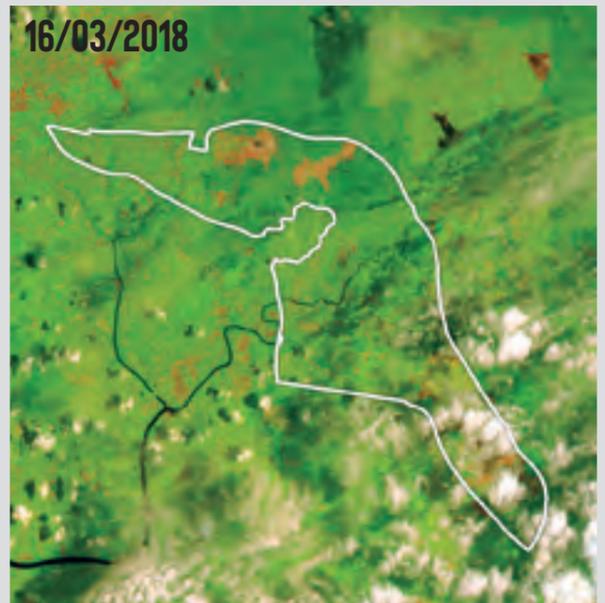
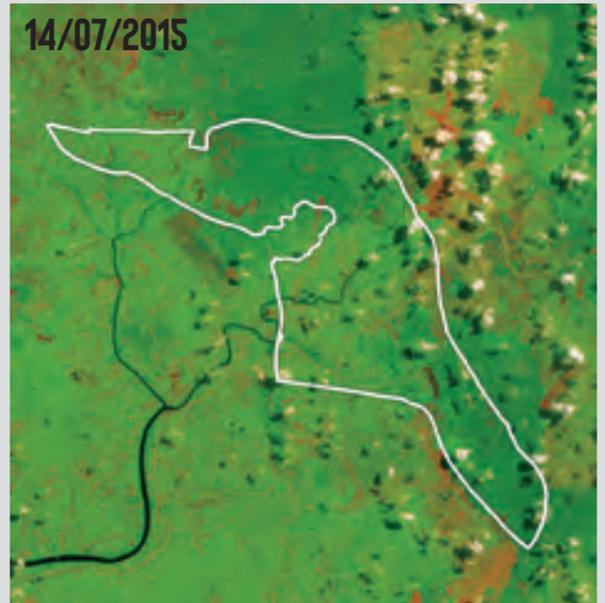
KONSESI:

PT LAHAN AGRO INTI KETAPANG (PT LAIK), KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

BUKAAN: 2,048ha



Antara tanggal 14 Juli 2015 dan 16 Maret 2018, PT LAIK membuka sekitar 2.050 Ha hutan, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah. Meskipun ada perintah untuk menghentikannya oleh Apical pada bulan Januari 2017, perusahaan terus membuka lahan di tahun 2017.⁵ Sebagian dari hutan yang dibuka ini adalah habitat orangutan.



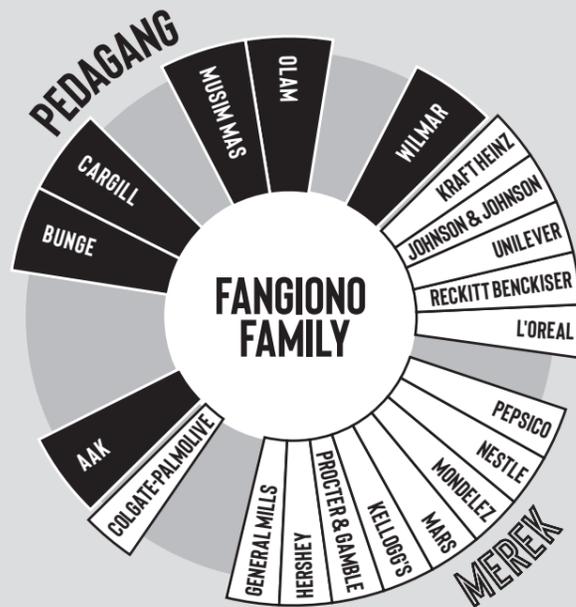
Batas konsesi berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan peta NPP untuk konsesi berdekatan milik grup perusahaan lain, PT Musim Mas.⁴

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KELUARGA FANGIONO



HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: FIRST RESOURCES, PT FANGIONO AGRO PLANTATION DAN CILIANDRY ANKY ABADI GROUP

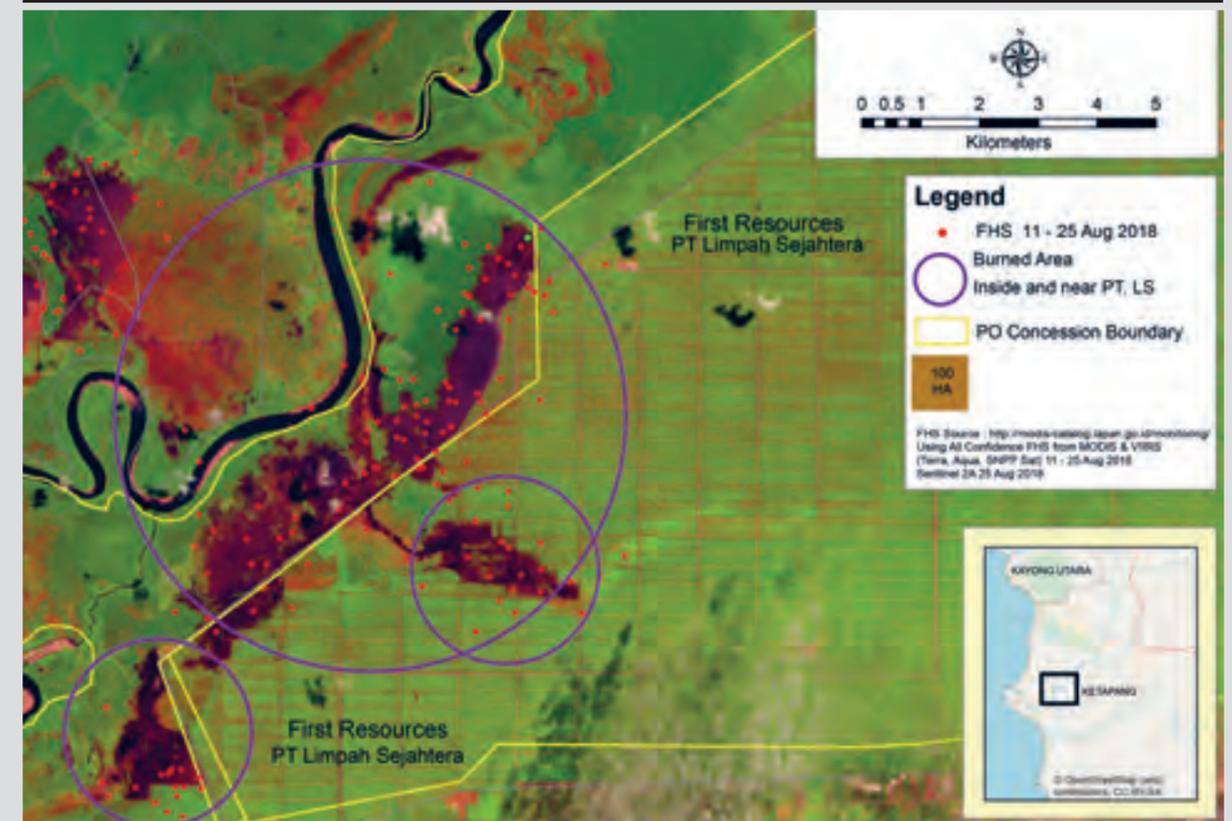
Martias Fangiono (Martias)¹ adalah salah satu pemain besar dalam bisnis kayu Indonesia selama dan setelah era Suharto. Dia juga pendiri perusahaan penebangan dan kelapa sawit PT Surya Dumai Industri (PT SDI), yang saat ini tidak aktif.

Anak-anak dari perkawinan pertama dan kedua Martias mengendalikan sejumlah perusahaan-perusahaan yang ditampilkan seolah-olah merupakan perusahaan terpisah. Namun, tinjauan terhadap profil registri perusahaan menonjolkan banyaknya hubungan antar perusahaan-perusahaan ini, termasuk alamat yang sama dan tumpang tindih manajemen. Gambar seluruhnya dikaburkan oleh penolakan pejabat pemerintah Indonesia yang tidak biasa untuk membuka profil registri perusahaan dari beberapa perusahaan yang dikendalikan oleh anggota keluarga ini. Dengan tidak adanya

penyungkapan informasi penuh dan berdasarkan bukti-bukti tentang adanya hubungan yang erat, merek-merek dan pedagang perlu mengganggap First Resources dan perusahaan-perusahaan lain yang dikendalikan anggota keluarga besar Fangiono ini sebagai sebuah kelompok usaha untuk keperluan kepatuhan terhadap kebijakan NDPE, kecuali dan sampai perusahaan-perusahaan produsen ini mampu menunjukkan secara memuaskan bahwa mereka masing-masing beroperasi secara independent antara satu dengan yang lainnya.

First Resources merupakan anak perusahaan (spin-off) dari Surya Dumai. CEO-nya saat ini adalah putra Martias dari pernikahan pertamanya, Ciliandra Fangiono. Martias sendiri tidak memiliki fungsi resmi dalam First Resources.² Pada bulan Maret 2018, 70% First Resources dimiliki oleh kepercayaan diskresioner yang mungkin terkait dengan keluarga Fangiono.³ Dalam pernyataannya tanggal 12 Juli 2018, First Resources menyatakan bahwa Ciliandra Fangiono dan saudara-saudaranya adalah pemegang saham pengendali First Resources.⁴

Bisnis minyak sawit lainnya dari keluarga ini mencakup grup Ciliandry Anky Abadi (CAA) dan PT Fangiono Agro Plantation (PT FAP). Pada bulan Juni 2018, kelompok CAA dimiliki oleh istri kedua Martias, Silvia Caroline, dan dua orang yang diduga adalah anak-anaknya, Ciliandry Fangiono (perhatikan namanya nyaris sama dengan Ciliandra) dan Wiras Anky Fangiono.⁵ PT FAP 95% dimiliki oleh Prinsep Management Ltd, sebuah trust yang berbasis di British Virgin Islands, dan 5% oleh PT Fangiono Perkasa Sejati (PT FPS), sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Wirastuty dan Ciliandrew Fangiono (saudara Ciliandra)⁶



dan Matthew Fangiono (diyakini adalah keponakan laki-laki Ciliandra),⁷ yang juga merupakan salah satu induk perusahaan dari PT SDI.⁸ Dalam prospektus 2007-nya untuk Bursa Singapura, First Resources mengaitkan 94% kepemilikan di PT FAP kepada Irawaty, mantan istri Martias dan ibu Ciliandra.⁹ Bukti-bukti untuk berbagai usaha minyak sawit yang merupakan grup keluarga tunggal diuraikan dalam kotak berikut:

Pada bulan Desember 2007, Martias dijatuhi hukuman penjara 18 bulan setelah dinyatakan bersalah telah berkolaborasi dengan Gubernur Kalimantan Timur (antara lain) dalam penipuan penebangan liar dalam periode tahun 1999-2002.¹⁰

First Resources adalah anggota RSPO, tetapi PT FAP dan kelompok CAA bukan anggota. First Resources mengadopsi kebijakan NDPE pada bulan Juli 2015; ini berlaku untuk 'rekanan' dan pemasok pihak ketiga.¹¹ Kelompok CAA tidak memiliki kebijakan NDPE. PT FAP, menurut First Resources, telah sepakat untuk mematuhi kebijakan HCS First Resources sebagai pemasok.¹² Tak satu pun dari perusahaan-perusahaan ini menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

First Resources melaporkan 208.691 Ha lahan yang telah ditanami di Indonesia, yang terletak di Riau dan Kalimantan Timur dan Barat.¹³ Pemetaan Greenpeace menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki total landbank seluas 234.000 Ha.

Aidenvironment telah mengidentifikasi sebuah landbank seluas lebih dari 128.000 Ha yang dimiliki oleh kelompok CAA - kebanyakan di Kalimantan Tengah tetapi ada satu konsesi di Riau - dengan luas lahan yang telah

ditanami sekitar 20.000 Ha. PT FAP memiliki landbank sedikitnya 140.000 Ha di Kalimantan, di mana lebih dari 80.000 Ha di antaranya telah ditanami. Ditambah dengan bisnis Sulaidy seluas 65.000 Ha, ini berarti total luas lahan yang dimiliki oleh keluarga Fangiono dan bisnis-bisnis terkait mungkin mencapai 540.000 - 565.000 Ha.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

AAK, Bunge, Mars, Nestlé, Unilever dan Wilmar memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



BUKTI-BUKTI KAITAN ANTARA BERBAGAI USAHA MINYAK SAWIT KELUARGA FANGIONO

First Resources telah menekankan bahwa baik Ciliandra Fangiono maupun saudara-saudaranya yang merupakan pemegang saham pengendali di First Resources tidak memiliki saham di PT CAA, induk perusahaan dari grup CAA.¹⁴ First Resources juga telah menyatakan bahwa 'FAP Agri bukan anak perusahaan atau perusahaan yang berkaitan dengan First Resources'.¹⁵ Namun, tinjauan profil akta perusahaan menyoroti banyak kaitan antara First Resources, kelompok CAA, PT FAP, dan anak-anak perusahaan mereka. Dalam hal keluarga Fangiono itu sendiri, lintas kepemilikan atau manajemen senior antara kepentingan bisnis keturunan Irawaty dan keturunan Silvia Caroline yang terbatas pada hubungan dengan Martias. Kecocokan utama yang dapat diidentifikasi adalah melalui infrastruktur (gedung perkantoran yang sama) dan peran yang dimainkan oleh segelintir kolega bisnis jangka panjang Martias dalam mendukung Fangiono-Fangiono muda dalam membangun dan mengelola kerajaan bisnis mereka.

WISMA 77 SEBAGAI TEMPAT KLIRING

Dalam dokumen prospektus 2007 untuk First Resources (lihat di atas) menyatakan bahwa kantor terdaftar anak induk perusahaan utamanya PT Ciliandra Perkasa adalah 'Wisma 77, Lantai 7, Jl Letjend S. Parman Kav. 77, Slipi, Jakarta 11410, Indonesia'.¹⁶ Alamat ini telah dikonfirmasi oleh laman Facebook¹⁷ perusahaan saat ini dan situs media sosial lainnya, meskipun sumber lain menunjukkan alamatnya sekarang adalah di APL Tower (lihat di bawah).

Profil akta perusahaan menunjukkan bahwa banyak perusahaan lain yang berkaitan dengan kedua alamat terdaftar keluarga Fangiono tersebut, termasuk:

- PT CAA dari tanggal 1 Juli 2008 hingga tanggal 15 Maret 2016, di samping berbagai perusahaan perkebunan miliknya di waktu yang berbeda
- PT FAP dari tanggal 4 November 2008 hingga setidaknya tanggal 16 November 2017 (tanggal yang tertera untuk profil akta perusahaan yang paling baru diperoleh) dan beberapa perusahaan perkebunan dan perusahaan pemegang sahamnya:
 - PT Borneo Bhakti Sejahtera (perusahaan perkebunan milik PT FAP dari tanggal 28 Mei 2008 hingga setidaknya tanggal 11 Januari 2017
 - PT Bumi Khatulistiwa Kencana (pemegang saham PT FAP baru-baru ini yang masih memegang saham di perusahaan perkebunan PT FAP yaitu PT Riau Agung Karya Abadi) setidaknya dari tanggal 9 September 2015 hingga saat ini, menurut profil akta perusahaan PT RAKA

- PT Tirta Madu Sawit Jaya (perusahaan perkebunan milik PT FAP) dari tanggal 11 April 2008 hingga setidaknya akhir tahun 2016, serta PT Karangjuang Hijau Lestari, perusahaan yang bertindak sebagai pemegang saham mayoritas PT TMSJ di periode yang sama
- PT Citra Palma Pertiwi (perusahaan perkebunan yang menjadi bagian dari klaster Sulaidy - lihat di bawah) dari tanggal 14 Juni 2012 hingga setidaknya tanggal 17 November 2016
- PT SDI dari tanggal 27 Juni 2008 hingga tanggal 17 Juni 2016, di samping induk perusahaannya saat itu PT Fangiono Jayaperkasa dan PT FPS, menurut profil akta perusahaan PT SDI.¹⁸ Lantai 7 Wisma 77 juga diberikan sebagai alamat tempat tinggal Ciliandry Fangiono saat ia menjadi pemegang saham PT Citra Palma Pertiwi dari tanggal 14 Juni 2012 hingga tanggal 28 Agustus 2014.

APL TOWER SEBAGAI TEMPAT KLIRING

Dalam dokumen Komunikasi Tahunan Kemajuan aktivitas 2011-2012 ke RSPO oleh First Resources menyediakan alamat kontakannya yaitu APL Tower - Central Park, Lantai 28, Podomoro City, Jl Letjend S. Parman Kv 28, Grogol-Petamburan, Jakarta Barat 11470, Jakarta.¹⁹ Alamat yang sama ini adalah alamat kontak yang tercantum di situs web First Resources.²⁰

Profil akta perusahaan menunjukkan bahwa usaha First Resources dan keluarga Fangiono lainnya terdaftar di alamat tersebut, termasuk (menurut beberapa profil) induk perusahaan keluarga PT FPS, mantan pemilik bersama PT SDI dan pemilik bersama PT FAP saat ini.

KLASTER SULAILY

Lantai 28 APL Tower juga merupakan alamat terdaftar dari induk perusahaan, PT Persada Prima Agro Mandiri (PT PPAM), yang sampai tanggal 25 Juni 2018 memiliki usaha patungan dengan First Resources namun tampak dari luar tidak terkait dengan keluarga Fangiono, serta alamat enam perusahaan perkebunan²¹ yang dimiliki oleh usaha patungan tersebut, PT Setia Agrindo Jaya; pada tanggal itu, First Resources mengumumkan bahwa salah satu anak perusahaan tidak langsungnya kini memegang 99,61% saham.²² Langkah ini dilakukan empat hari setelah publikasi laporan Chain Reaction Research mengenai ancaman yang muncul terhadap upaya-upaya NDPE oleh apa yang disebut sebagai 'perusahaan bayangan',²³ yang berisikan keluarga Fangiono .

Bersama dengan seorang rekannya, pemegang saham pengendali usaha patungan ini terungkap lewat profil akta perusahaan adalah seorang bernama Sulaidy,²⁴ yang telah dikaitkan dengan banyak usaha keluarga Fangiono baik sebagai manajer senior dan pemegang saham (termasuk memiliki 5% saham PT FAP dari yayasannya hingga bulan Juli 2010, ketika sahamnya diambil alih oleh PT Fangionoperkasa Sejati). Profil akta perusahaan dari tahun 2016 dan 2017 mengungkapkan Sulaidy sebagai pemegang saham pengendali dari setidaknya lima perusahaan lain tanpa pemegang saham atau manajerial saat ini terhubung ke keluarga Fangiono. Yang paling penting di antara perusahaan-perusahaan ini adalah PT Bangka Bumi Lestari (PT BBL), yang merupakan induk perusahaan dari empat perusahaan sisanya, yaitu:

- PT Borneo Citra Persada Abadi
- PT Citra Palma Pertiwi (PT CPP)
- PT Palmdale Agroasia Lestari
- PT Setia Agro Abadi (PT SAA)

Konsesi perusahaan-perusahaan ini diperkirakan mencapai sekitar 65.710 Ha. Meskipun alamat terdaftar untuk PT CPP adalah Wisma 77, Lantai 7 (lihat di atas), alamat terbaru yang diketahui untuk PT BBL dan PT SAA adalah APL Tower, Lantai 28-29. Perusahaan-perusahaan ini juga sejak dahulu berbagi hubungan manajemen atau pemegang saham dengan orang-orang yang berkaitan dengan usaha keluarga Fangiono dan dibahas di bawah ini. Pembelian First Resources atas saham PT PPAM di PT Setia Agrindo Jaya mungkin telah dirancang untuk mengaburkan tautan keluarga ke perusahaan-perusahaan ini.

LINTAS MANAJEMEN

Menurut profil akta perusahaan, manajer senior atau pemegang saham saat ini atau baru-baru ini dari PT CAA dan anak-anak perusahaannya juga terkait dengan kepentingan bisnis anak-anak Martias melalui pernikahan pertamanya, PT FAP dan First Resources - dalam hal First Resource terutama melalui Sulaidy, mitra usaha patungan First Resources. Orang-orang yang terlibat termasuk:

- Ciliandry Fangiono
- Citra Gunawan
- Edward Utomo
- Lau Cong Kiong
- Martias

Ciliandry Fangiono, pemegang saham PT.CAA saat ini, memegang kepemilikan saham minoritas di perusahaan perkebunan Sulaidy PT CPP hingga tanggal 28 Agustus 2014.

Citra Gunawan sejak dahulu memainkan sebuah peran manajemen dalam PT CAA; dia merupakan Komisaris saat ini di anak perusahaan kelompok CAA PT Agrindo Green Lestari. Dia adalah Direktur Pelaksana asli PT FAP dan sejak dahulu menjabat posisi manajemen senior di perusahaan PT FAP PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Bulungan Hijau Perkasa dan PT Tirta Madu Sawit Jaya. Hubungannya dengan First Resources termasuk posisi manajemen sejak lama di perusahaan perkebunan Sulaidy PT CPP dan PT SAA. Beliau dulunya merupakan Presiden Direktur PT SDI, perusahaan PT Martias yang tampaknya sudah tidak

aktif (yang menjadi cikal bakal First Resources) sampai setidaknya tanggal 12 Januari 2017 (tanggal pengambilan profil akta perusahaan terbaru).

Edward Utomo sejak dahulu menduduki posisi manajemen senior di PT CAA dan PT Agrindo Green Lestari, serta di dalam perusahaan PT FAP yaitu PT Setia Agro Utama. Hubungannya dengan First Resources termasuk posisi manajemen sejak lama di perusahaan perkebunan Sulaidy PT CPP dan PT SAA.

Lau Cong Kiong selama beberapa tahun hingga tahun 2011 adalah pemilik saham minoritas di anak perusahaan kelompok CAA PT Citra Agro Abadi dan juga memainkan peran manajemen senior dalam perusahaan itu serta anak perusahaan kelompok CAA PT Heroes Green Energy. Dia ini adalah Komisaris Utama asli PT FAP dan sejak dahulu menduduki posisi manajemen senior di anak-anak perusahaannya termasuk PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Bulungan Hijau Perkasa, PT Setia Agro Utama dan PT Tirta Madu Sawit Jaya. Hubungannya dengan First Resources termasuk menjabat sebagai Komisaris saat ini di anak perusahaan First Resources, PT Ciliandra Perkasa.²⁵ Dia juga terkait lewat peran manajemen senior sejak lama di perusahaan Sulaidy PT BBL, PT Borneo Citra Persada Abadi, PT PPAM dan PT SAA.

Martias telah secara langsung terkait sebagai pemegang saham sementara waktu di berbagai perusahaan di berbagai lintas usaha keluarga Fangiono, termasuk PT SDI; anak perusahaan PT FAP PT Borneo Bhakti Sejahtera, PT Bulungan Hijau Perkasa dan PT Tirta Madu Sawit Jaya serta bekas induk perusahaan PT Tirta Madu Sawit Jaya PT Karangjuang Hijau Lestari; dan PT CAA bersama dengan anak perusahaannya PT Citra Agro Abadi.

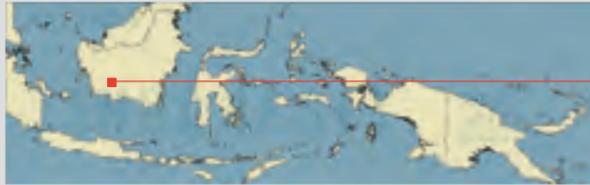
PROFIL AKTA PERUSAHAAN YANG DIBLOKIR — HAMBATAN LAIN TERHADAP TRANSPARANSI

Pejabat pemerintah telah menghalangi Greenpeace dalam upayanya mengkonfirmasi hubungan saat ini antara First Resources dan usaha keluarga Fangiono lainnya. Sekumpulan profil akta perusahaan untuk perusahaan terkait Sulaidy telah diblokir oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan para pejabatnya menolak untuk mengungkapkan apakah tindakan pemblokiran ini atas permintaan pemegang saham atau karena penyelidikan pemerintah. Meskipun informasi tersebut biasanya tersedia untuk umum setelah pembayaran sejumlah biaya, para staf mengklaim bahwa lembaga tersebut khawatir Greenpeace mungkin 'menyalahgunakan' informasi tersebut. Penyangkalan terhadap akses ke profil akta dan penolakan untuk menjelaskan mengapa mereka diblokir telah menghalangi upaya Greenpeace dan pemangku kepentingan lainnya untuk melacak kepemilikan manfaat utama baik di dalam maupun di seluruh perusahaan-perusahaan. Profil akta perusahaan yang diblokir termasuk untuk:

- PT Bangka Bumi Lestari
- PT Borneo Bhakti Sejahtera
- PT Borneo Citra Persada Abadi
- PT Citra Palma Pertiwi
- PT Marsam Citra Adiperkasa
- PT Setia Agro Abadi
- PT Setia Agro Utama

KONSESI:
**PT AGRINDO GREEN
 LESTARI (PT AGL) DAN
 PT CITRA AGRO ABADI,
 KABUPATEN PULANG
 PISAU, KALIMANTAN
 TENGAH**

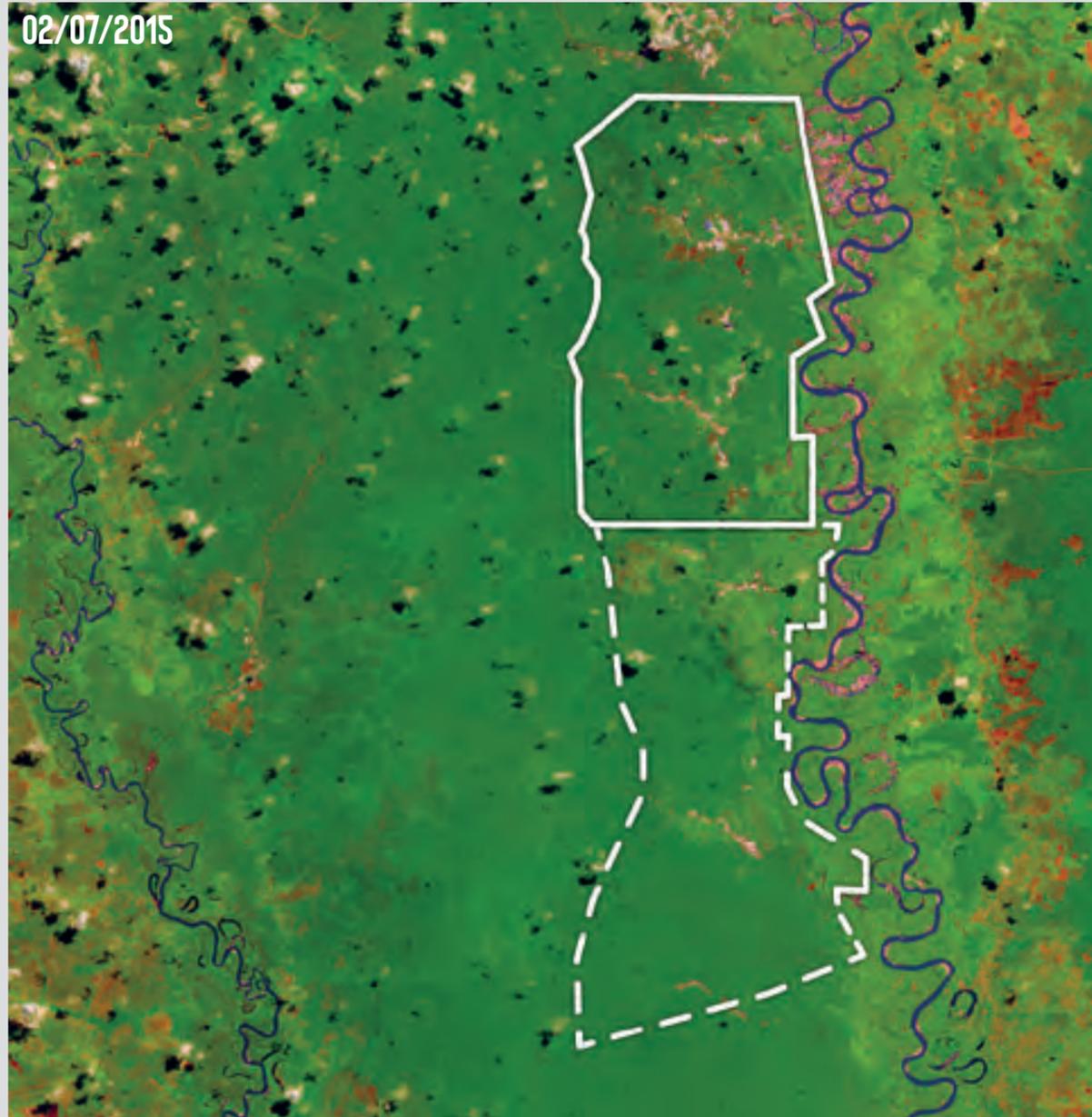
BUKAAN:
 PT AGL : □ 3,542ha
 PT CAA : □ 653ha



0 2 4 6 KM
 0 2 4 6 MI
 Scale 1:400,000



02/07/2015

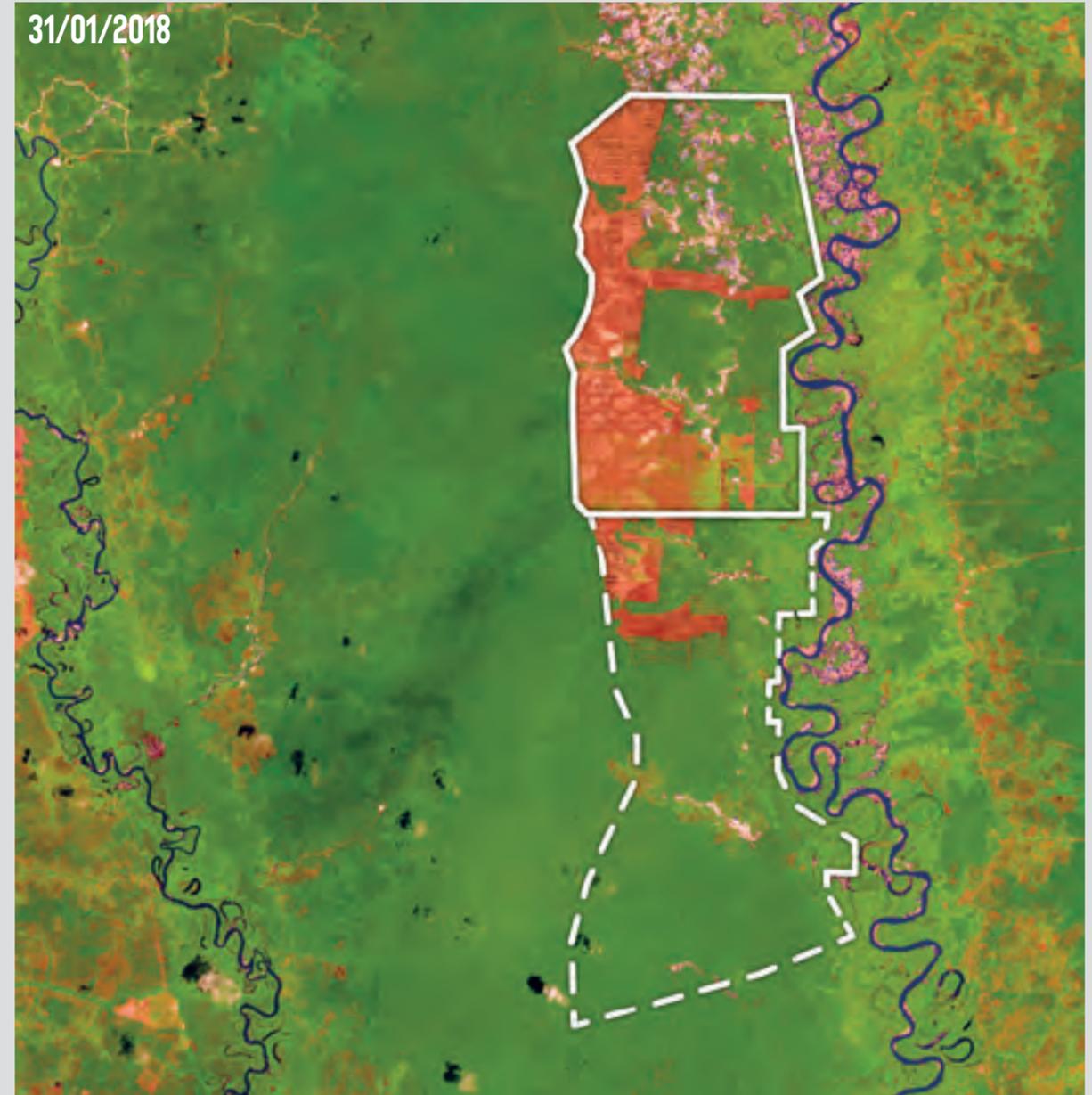


Antara tanggal 2 Juli 2015 dan 31 Januari 2018, anak perusahaan grup CAA PT AGL membuka 3.550 Ha merupakan hutan sekunder. Pada bulan September 2017, anak perusahaan kelompok CAA lainnya, PT Citra Agro Abadi - dengan konsesi yang terletak di selatan konsesi PT AGL - juga melakukan pembukaan lahan. Antara tanggal 2 Juli 2015 dan 31 Januari 2018, sekitar 650 Ha hutan sekunder termasuk habitat orangutan dan hutan lahan gambut yang potensial telah dibuka. Izin luas berlanjut hingga 2018.

Batas konsesi berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara SK.586/MENHUT-II/2014.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

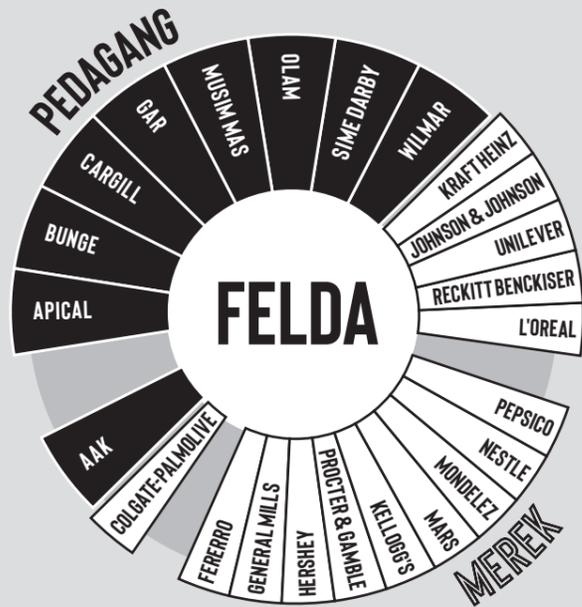
31/01/2018



FELDA/ FELDA GLOBAL VENTURES (FGV)



HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



FELDA adalah Badan Pengembangan Tanah Federal milik pemerintah Malaysia. FGV, yang sebelumnya adalah cabang komersial dari FELDA, sekarang adalah perusahaan publik, sebagian sahamnya dimiliki oleh FELDA.¹

FELDA dan FGV adalah anggota RSPO. FGV mengumumkan kebijakan NDPE pada tahun 2016.² Grup usaha ini memegang posisi berpengaruh di RSPO, termasuk di dewan gubernur³ dan satuan tugas yang tugasnya meninjau kembali Prinsip dan Kriteria RSPO.⁴ Grup ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Menurut laporan tahunan 2016, FGV memiliki total landbank seluas 440.662 Ha, 418.044 Ha berada di

Malaysia dan 22.578 Ha di Indonesia⁵ (6.712 Ha telah ditanami)⁶. Grup ini juga menguasai 42.000 Ha di Indonesia di bawah usaha patungan dengan Lembaga Tabung Haji (lihat studi kasus di bawah) yang disebut Trurich Resources Sdn Bhd.⁷ Konsesi di Indonesia yang sepenuhnya mereka miliki berada di Kalimantan Barat.⁸

Pelanggaran terhadap hak pekerja yang meluas telah terdokumentasi dalam operasi FGV di Malaysia, termasuk pekerja harus membayar biaya perekrutan dan paspor mereka ditahan oleh perusahaan.⁹ Menyusul laporan media¹⁰ dan keluhan RSPO, FGV menarik 58 pabriknya dari skema sertifikasi RSPO pada Mei 2016.¹¹

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada 13 September, FGV menjawab, menyatakan bahwa FGV dan Felda adalah dua perusahaan yang berbeda. Ia mengklaim bahwa untuk membuat peta-peta konsesi publiknya di Malaysia akan melanggar hukum Malaysia, tetapi peta konsesi Indonesia telah diserahkan kepada RSPO untuk pandangan publik. "Tidak ada pelanggaran hak-hak pekerja telah didokumentasikan atau dilaporkan dalam konsesi FGV. FGV tidak lagi mempraktekkan penyimpanan paspor pekerja tamu asing. "Terkait dengan PT TAA, perusahaan mengklaim bahwa tidak ada pembangunan yang telah dilakukan sejak April 2017; sebagai konsekuensinya, 4.000 keluarga yang telah menyambut 'prospek menarik pembangunan ekonomi [...] masih menunggu kesempatan untuk mengangkat mereka keluar dari kemiskinan, dan untuk memberi mereka kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik.' Ini diklaim telah sepenuhnya dilaksanakan rencana restorasi lahan gambut yang diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

TANGGAPAN PASAR

Apical, Ferrero dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



April 2017, PT Temila Agro Abadi (Felda), Kalimantan, 0°3'51.45"N; 109°38'43.17"E ©Aidenviroment

KONSESI:

**PT TEMILA AGRO
ABADI (PT TAA),
KALIMANTAN BARAT**



Antara tanggal 4 Mei 2015 dan 10 April 2018, PT TAA membuka sekitar 1.170 Ha hutan, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah, dan mengembangkan lahan gambut tidak berhutan yang luas. Pemetaan oleh Aidenvironment menunjukkan bahwa ada sedikitnya 1.900 Ha hutan dan lahan gambut yang terdampak selama periode ini. Lebih dari setengah area ini – 1.035 Ha – telah dibuka setelah FGV mempublikasikan kebijakan NDPE-nya di bulan Agustus 2016.

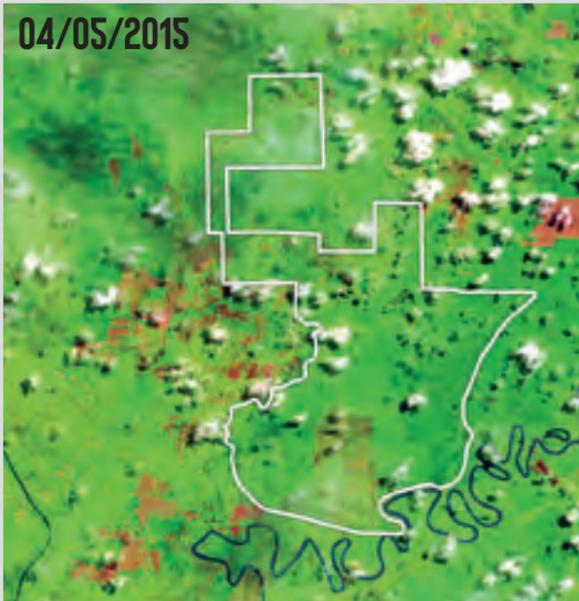
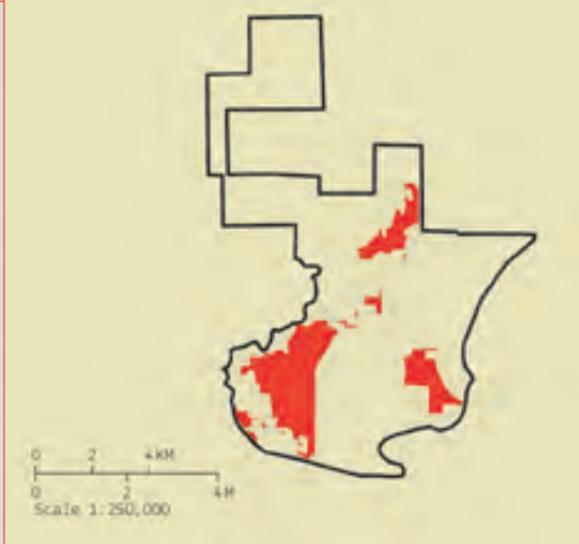
FGV tidak menyangkal tanggung jawab atas pembukaan lahan di PT TAA. Sebaliknya, mereka pertamanya mengklaim bahwa pembukaan lahan tersebut telah mematuhi kebijakan keberlanjutannya dengan alasan bahwa pihaknya telah ‘mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan dari pihak berwenang terkait di Indonesia’ dan ‘telah mematuhi Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO pada tahun 2010’.¹³

Selanjutnya, perusahaan tersebut mengutip penilaian independen yang dikatakannya tidak menemukan ‘deforestasi hutan alam’ karena ‘hutan alam telah hancur seluruhnya oleh kebakaran hutan besar-besaran pada tahun 1980-an dan pada tahun 1997, dan juga oleh operasi penebangan yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penebangan dan oleh masyarakat setempat’.¹⁴

Rekaman dari pesawat tanpa awak (drone) yang diperoleh oleh Aidenvironment pada bulan April 2017 menunjukkan adanya area hutan yang dibukai baru-baru ini di PT TAA yang terkotak-kotak lintasan kanal-kanal drainase dan sepenuhnya dikelilingi oleh hutan alam.

Pada bulan Agustus 2017, FGV mengumumkan bahwa mereka akan memulihkan semua area lahan gambut yang dikembangkan sejak bulan Agustus 2016 (ketika mereka menerbitkan kebijakan minyak sawit berkelanjutan yang mencakup komitmen untuk mengakhiri pembangunan lahan gambut¹⁵).¹⁶ Namun, perusahaan masih belum melakukan publikasi rencana kerja dengan batas waktu yang jelas untuk memenuhi komitmennya.

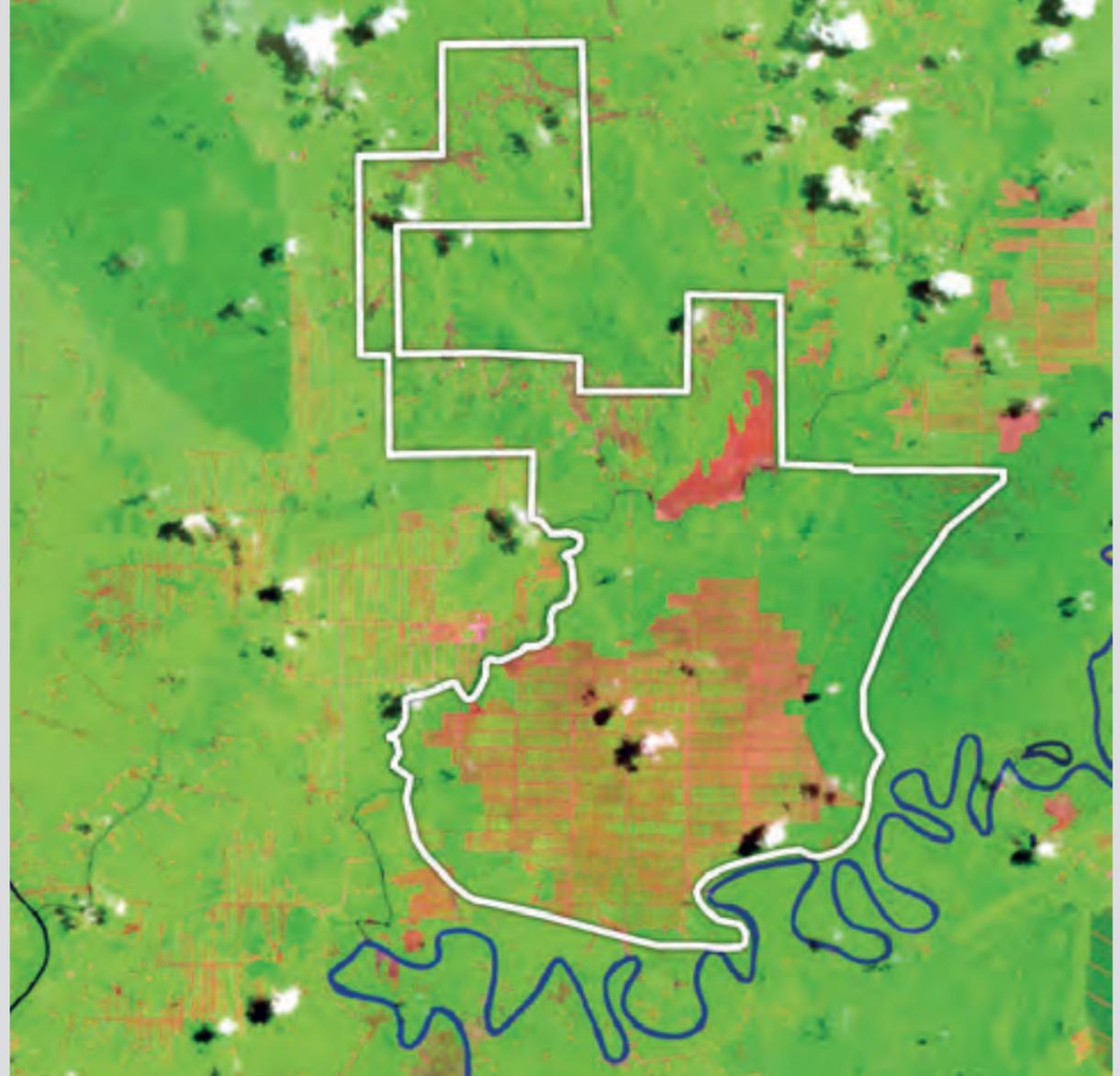
BUKAAN : 1,173ha



Batas konsesi berdasarkan NPP RSPO.¹²

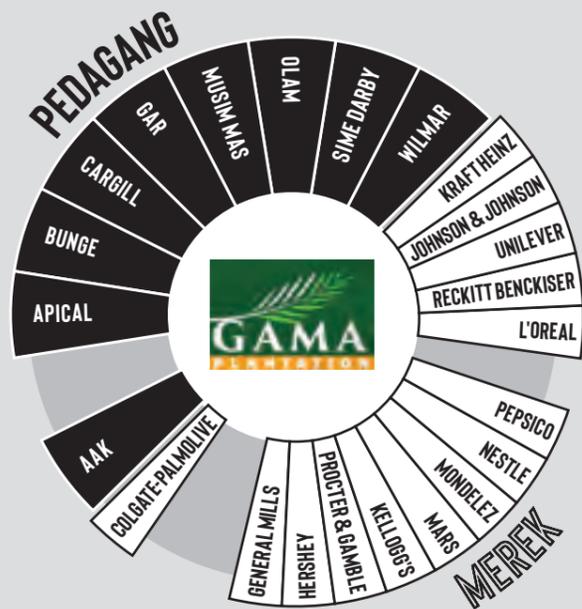
Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

10/04/2018



GAMA PLANTATION (TERKAIT WILMAR INTERNATIONAL)

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



NAMA LAIN KELOMPOK INI: AMS GROUP, AMS GANDA GROUP, GANDA GROUP

Ini adalah grup usaha keluarga di mana perusahaan-perusahaan yang secara formal terpisah yang dimiliki oleh anggota keluarga yang sama berbagi kontrol operasional atau manajerial.

Gama Plantation adalah sekumpulan operasi perusahaan minyak sawit yang dimiliki atau dikelola oleh dua bersaudara, Martua Sitorus dan Ganda, dan anggota-anggota keluarga mereka, termasuk saudara ipar mereka Hendri Saksti dan putra-putranya Ganda Darwin dan Andy Indigo.

Sitorus, Ganda, Saksti dan Darwin Indigo semuanya terkait erat dengan Wilmar. Sitorus adalah salah satu pendiri Wilmar dan menjabat sebagai anggota dewan sampai dia mengundurkan diri pada bulan Juli 2018;¹ dia juga merupakan mitra Wilmar CEO Kuok Khoon Hong dalam sejumlah besar transaksi properti.² Ganda membantu mendirikan dan mengelola kilang yang kemudian menjadi bagian dari Wilmar.³ Saksti adalah Country Head Wilmar untuk Indonesia⁴ hingga bulan Juli 2018, ketika dia juga mengundurkan diri,⁵ sementara Darwin Indigo adalah Deputy Country Head Wilmar untuk Indonesia.⁶

Baik Sitorus maupun Saksti mengundurkan diri dari Wilmar tak lama setelah publikasi laporan oleh Greenpeace mengenai penggundulan hutan di konsesi Gama⁷ yang juga menyoroti sejarah Wilmar menjual konsesi bermasalah kepada Gama ketika pelanggaran hak asasi manusia atau lingkungan yang serius terungkap dalam operasinya mereka.⁸

Analisis Greenpeace terhadap profil akta perusahaan mengidentifikasi hampir 40 perusahaan perkebunan, kontraktor atau pabrik sebagai bagian dari Gama.⁹ Dalam korespondensi dengan Greenpeace pada bulan Juni 2018, eksekutif Gama Andy Indigo mengakui 23 perusahaan yang terkait dengan kelompok keluarga tersebut;¹⁰ ia tidak mengakui sejumlah perusahaan – termasuk PT Agrinusa Persada Mulia (PT APM) dan PT Agriprima Cipta Persada (PT ACP), yang profilnya dapat dilihat di bawah – yang saat ini berada di bawah manajemennya sendiri.

Laporan Greenpeace bulan Juni 2018, *Rogue Trader*, menyediakan lebih banyak informasi tentang Gama, termasuk sejarahnya, struktur perusahaan dan kaitan antara Gama dan Wilmar.¹¹

Gama bukan anggota RSPO. S & G Biofuel Pte Ltd, perusahaan patungan antara Gama dan Samsung C&T Corporation,¹² telah menjadi anggota RSPO sejak bulan Agustus 2017.¹³ Gama tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.



22 Agustus 2018, PT Sumatera Unggul Makmur (GAMA), Kalimantan, 0°10'54.011"S 109°20'10.091"E ©Hernawan/Greenpeace



23 Agustus 2018, PT Sumatera Unggul Makmur (GAMA), Kalimantan, 0°10'54.011"S 109°20'10.091"E ©Hernawan/Greenpeace



19 Desember 2017, PT Agrinusa Persada Mulia (GAMA), Papua, 7°30'33.978"S 140°46'23.615"E ©Sukarno/Greenpeace

Gama tidak memiliki kebijakan publik NDPE. Pada bulan Juni 2018, grup itu berjanji untuk memberlakukan moratorium pengembangan di 22 konsesi.¹⁴ Khususnya, konsesi-konsesi yang dicakup oleh moratorium merupakan tiga perempat dari total landbank Gama yang teridentifikasi (sekitar 280.000 Ha), namun hanya memiliki 11.000 Ha hutan. Sebaliknya, konsesi-konsesi yang dikecualikan dari moratorium mencapai sekitar 100.000 Ha dan memiliki hampir 30.000 Ha hutan. Dengan kata lain, grup itu berkomitmen untuk mengakhiri deforestasi – namun utamanya hanya di konsesi-konsesi yang nyaris atau tidak memiliki hutan untuk dibuka.

Pada tanggal 10 Agustus 2018, GAMA mengumumkan bahwa mereka akan memperpanjang moratorium bulan Juni mereka yang mencakup 25 wilayah konsesi.¹⁵ Namun, masuknya dua wilayah konsesi di Papua (lihat di bawah) saat itu 'tengah ditinjau': 'Dua

investasi di Papua, di PT Agrinusa Persada Mulia dan PT Agriprima Cipta Persada, berada di bawah Perjanjian Jual Beli Bersyarat (CSPA) dengan pihak ketiga sejak tanggal 31 Maret 2017 [...]. Mengingat komitmen kami baru-baru ini, kami akan berusaha membujuk pembeli untuk segera menghentikan kegiatan pembukaan lahan dan mematuhi kebijakan NDPE.¹⁶

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

AAK, Apical, Johnson & Johnson, Mars, Procter & Gamble, Unilever dan Wilmar memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
PT GRAHA AGRO NUSANTARA (PT GAN), KABUPATEN KUBU RAYA, KALIMANTAN BARAT

BUKAAN:
 2,217ha



PT GAN telah membuka lahan di Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat setidaknya sejak tahun 2013. Sejak tahun 2014 perusahaan ini telah membuka lebih dari 7.000 Ha hutan dan lahan gambut.

Hingga bulan Desember 2016, PT GAN secara penuh dimiliki oleh Andy Indigo dan Jacqueline Sitorus melalui PT GSU; PT GAN saat ini merupakan anak perusahaan dari salah satu induk perusahaan lepas pantai Gama, Capital Ocean Ventures Ltd.¹⁸

Konsesi PT GAN tumpang tindih dengan sekitar 4.500 Ha habitat orangutan. Meskipun sebagian dari habitat ini masih ada, sebagian besar hutan-hutan ini telah digunduli dan blok-blok perkebunan telah ditandai untuk dibuka di area-area lainnya yang tersisa (lihat di bawah). Pada bulan September 2015, pekerja perkebunan di dalam konsesi PT GAN melaporkan menemukan bayi orangutan yang terpisah dari induknya – induknya sendiri tidak ditemukan.¹⁹

Antara tanggal 4 Mei 2015 dan 10 April 2018 PT GAN membuka sekitar 2.220 Ha hutan, termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK dan hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah. Antara bulan Januari dan September

2017, blok-blok perkebunan telah ditandai di lebih dari 1.200 hektar hutan lahan gambut untuk persiapan pembukaan lahan. Foto udara dari bulan Maret 2018 mengkonfirmasi bahwa parit-parit telah digali di hutan lahan gambut.²⁰

Blok-blok perkebunan baru ini berada di area yang dikeluarkan dari Kawasan Hutan oleh mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 29 September 2014, di hari terakhirnya sebagai menteri. Pada hari yang sama ia menandatangani seluruh lembar surat yang melepaskan Kawasan Hutan Negara untuk pembangunan kepada berbagai perusahaan perkebunan; banyak dari surat-surat ini bermasalah dan beberapa di antaranya melanggar peraturan menteri itu sendiri.²¹

Pemerintah Indonesia dilaporkan tengah mengambil tindakan hukum terhadap PT GAN atas pengembangan di lahan gambut,²² menurut ForestHints, yang secara luas dianggap sebagai ‘juru bicara setengah-resmi’ dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia.²³

PT GAN baru-baru ini membuka pabrik kelapa sawit baru di dalam konsesinya.²⁴ Belum diketahui siapa yang akan memasoknya.



3 Desember 2015, PT Graha Agro Nusantara (GAMA), Kalimantan, 0°12'18.698"S 109°40'32.66"E ©Ifansasti/Greenpeace

04/05/2015



10/04/2018



Batas konsesi berdasarkan peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) bulan Maret 2014 dari pemerintah kabupaten Kubu Raya dan informasi dari sumber-sumber setempat;¹⁷

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



13 September 2015, Kalimantan: Seekor bayi orang-utan diselamatkan dari lokasi perkebunan kelapa sawit PT Graha Agro Nusantara (GAMA) dikarenakan kebakaran hutan dan gambut yang meluas. ©Nanda/Greenpeace

KONSESI:
**PT AGRIPRIMA CIPTA
 PERSADA (PT ACP),
 PROVINSI PAPUA,
 KABUPATEN MERAUKE**

BUKAAN: 3,600ha



19 Desember 2017, PT Agriprima Cipta Persada (GAMA), Papua, 7°31'3.618"S 140°30'36.264"E ©Sukarno/Greenpeace



18 Januari 2014, PT Agriprima Cipta Persada (GAMA), Papua, 7°24'30.821" S 140°30'41.652"E ©Ifansasti/Greenpeace



Batas konsesi berdasarkan Izin Lokasi, SK No. 42, tgl 22-02-2010.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

PT ACP tampaknya sedari awal telah ditakdirkan untuk menjadi perusahaan Wilmar. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Juni 2008 oleh dua orang yang pada waktu itu adalah manajer dari anak perusahaan Wilmar PT Wilmar Cahaya Indonesia.²⁵ Selanjutnya, pada bulan April 2009, para eksekutif Wilmar dan Gubernur Provinsi Jambi dilaporkan menandatangani nota kesepahaman untuk membangun sebuah dermaga di kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang akan dioperasikan oleh PT ACP.²⁶

Tidak sampai satu tahun kemudian, rencana jelas berubah: perusahaan itu memperoleh izin lokasi di Merauke,²⁷ dan empat bulan kemudian saham mayoritas di PT ACP dialihkan ke Fullest Holdings Ltd.²⁸ Ganda sementara menjabat sebagai Komisaris PT ACP pada bulan Juni 2010.²⁹

PT ACP kini beroperasi sebagai anak perusahaan dari induk perusahaan Gama PT PPM, yang dimiliki oleh empat perusahaan lepas pantai yang berbeda, termasuk Fullest Holdings Ltd, dan dikelola oleh Andy Indigo.³⁰

Antara tanggal 3 Desember 2015 dan 28 Juli 2018, PT ACP membuka 3.600 Ha hutan,³¹ termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 20165 KLHK. Pada bulan Juli 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memberikan izin untuk melepaskan sebagian dari konsesinya yang masih berada di dalam Kawasan Hutan.³² Hingga bulan Oktober 2017, PT ACP telah mulai membuat blok-blok perkebunan baru di daerah itu. Pembukaan hutan terus berlanjut di tahun 2018.³³

Konsesi tersebut, yang terletak di daerah Muting distrik Merauke di bagian selatan Provinsi Papua, terletak

dekat dengan jalan Trans-Papua yang membentang sepanjang perbatasan dengan Papua Nugini, sebuah wilayah yang sarat dengan keberadaan militer. Konsesi ini terletak di dalam tanah leluhur suku Marind. Konflik tanah antara PT ACP dan marga Mahuze Besar dilaporkan tengah berlangsung,³⁴ dengan klaim bahwa perusahaan belum memperoleh persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari seluruh marga atas pembukaan hutannya. PT ACP dilaporkan mengklaim telah memperoleh persetujuan untuk pengembangan tanah marga yang dimiliki secara kolektif berdasarkan tanda tangan satu orang, yang telah meninggal;³⁵ sementara area hutan yang signifikan milik marga tersebut telah dibuka.

Pada tahun 2015, marga tersebut mulai memancang papan pemberitahuan untuk menandakan bahwa mereka telah menempatkan tanah tersebut di bawah sasi, suatu bentuk larangan hukum adat. Meskipun demikian, perusahaan dilaporkan terus membuka lahan, membuang papan-papan pemberitahuan.³⁶ Pada tahun 2016, seorang perwakilan dari militer mengunjungi pemimpin marga, yang menentang perkebunan, untuk memberitahukan kepadanya bahwa koperasi militer telah mengambil alih kontrak untuk pembukaan lahan.³⁷ Namun, marga tersebut menolak untuk mundur, dan sampai bulan September 2017 belum ada kesepakatan yang dicapai.³⁸

Dalam pernyataan yang dirilis GAMA pada tanggal 10 Agustus 2018, PT ACP adalah salah satu konsesi yang dikecualikan dari moratorium deforestasi dan komitmen NDPE kelompok tersebut.³⁹

KONSESI:
**PT AGRINUSA PERSADA
 MULIA (PT APM),
 PROVINSI PAPUA,
 DISTRIK MERAUKE**

BUKAAN: 3,291ha



Sejarah kepemilikan PT APM hampir sama dengan PT ACP. Perusahaan ini didirikan pada hari yang sama di tahun 2008 oleh dua manajer Wilmar yang sama.⁴⁰ Ganda juga menjabat sebagai Komisaris selama beberapa minggu yang sama pada bulan Juni 2010. Seperti PT ACP, PT APM saat ini merupakan anak perusahaan dari PT PPM, yang dikelola oleh Andy Indigo dan dikendalikan oleh Gama melalui sebuah jaringan perusahaan lepas pantai.⁴¹

Antara tanggal 3 Desember 2015 dan 28 Juli 2018, PT APM membuka sekitar 3.290 Ha hutan. Pembukaan hutan berlanjut pada tahun 2018 Pembukaan hutan berlanjut pada tahun 2018.⁴²

Konsesi PT APM terletak di tanah suku Yei, dan terdapat indikasi yang jelas bahwa perusahaan tidak terlibat dalam proses FPIC yang bertanggung jawab dengan masyarakat ini. Beberapa marga memiliki tanah di desa Bupul; ketika perusahaan mendekati mereka, beberapa marga menyetujui pendirian konsesi sementara beberapa lainnya menolak tawaran perusahaan.⁴³ Perusahaan dilaporkan terus menekan anggota-anggota marga terakhir ini untuk membubuhkan tanda tangan yang dapat digunakan untuk mengklaim bahwa persetujuan telah diberikan, tanpa

memperoleh persetujuan dari seluruh anggota marga tersebut. Dalam kasus marga Mandaljai, perusahaan dilaporkan memperoleh tanda tangan saudara laki-laki ketua marga, yang menentang pembangunan. Dalam kasus lain, seorang pemimpin marga dilaporkan telah mengalami tekanan untuk menandatangani surat oleh dua petugas polisi yang menghampirinya ketika dia sedang menghadiri misa di hari Minggu.⁴⁴

Tindakan-tindakan semacam itu tidak jujur dan tidak terbuka dan tidak menghormati hak marga untuk memutuskan secara kolektif apakah akan menerima atau menolak tawaran perusahaan. Tindakan-tindakan tersebut juga ilegal menurut UU Otonomi Khusus Papua (UU21/2001) menyatakan bahwa setiap keputusan tentang tanah adat harus dibuat oleh dewan pengambilan keputusan (musyawarah), sebagai pengakuan atas fakta bahwa hak ulayat adalah milik marga, sesuai dengan hukum adat di daerah tersebut, bukan milik perorangan.⁴⁵

Dalam pernyataan yang dirilis GAMA pada tanggal 10 Agustus 2018, PT APM adalah salah satu konsesi yang dikeluarkan dari moratorium deforestasi dan komitmen NDPE kelompok tersebut.⁴⁶



31 Maret 2018, PT Agrinusa Persada Mulia (GAMA), Papua, 7°32'31.655"S 140°47'52.596"E ©Ifansasti/Greenpeace



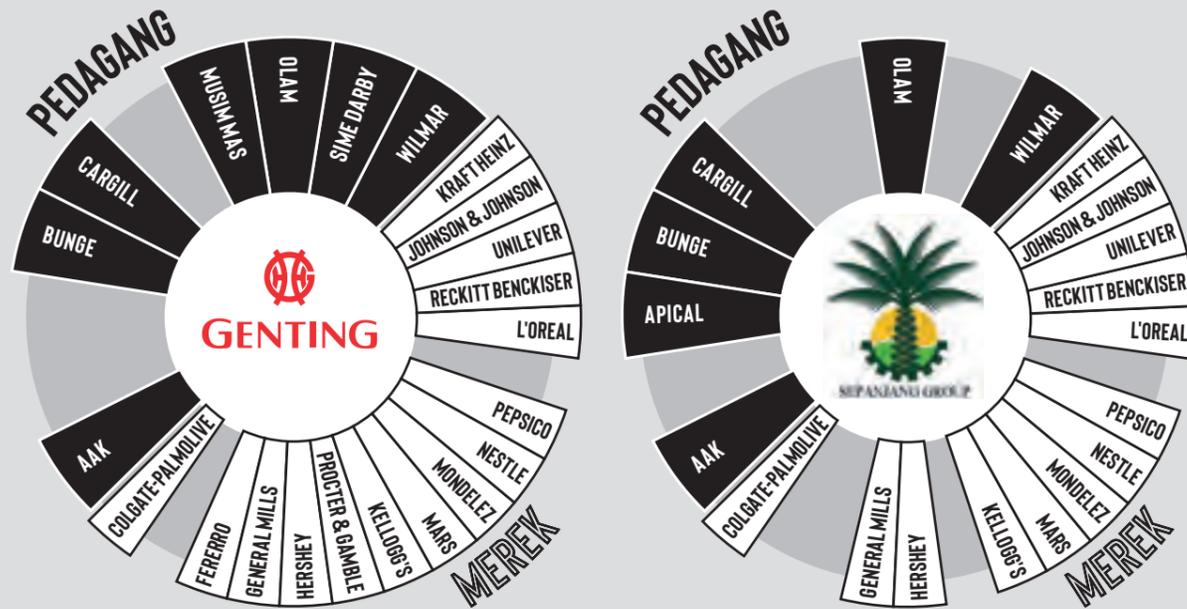
Batas konsesi berdasarkan Izin Lokasi, SK No. 4, tanggal 13-01-2010.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



31 Maret 2018, PT Agrinusa Persada Mulia (GAMA), Papua, 7°33'23.35"S 140°46'43.78"E ©Ifansasti/Greenpeace

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: GENTING PLANTATIONS BERHAD

Genting Group memiliki struktur kepemilikan induk perusahaan-anak perusahaan formal, ditambah hubungan operasional atau manajerial informal dengan perkebunan-perkebunan lain.

Genting Group merupakan perusahaan induk dari Genting Berhad dan Genting Berhad merupakan anak perusahaan Genting Berhad Plantations dan terdaftar di Bursa Malaysia.¹ Tan Sri Lim Kok Thay merupakan Direktur Utama (Chief Executive) dari Genting Group dan Genting Plantations.² Selain kelapa sawit, grup ini juga bergerak di bidang properti, rekreasi, energi, dan bioteknologi.³

Genting Plantation adalah anggota RSPO.⁴ Grup ini tidak memiliki kebijakan publik NDPE dan tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Laporan tahunan Genting Plantations pada tahun 2017 mencatat total landbank sebanyak 247.655 hektar, di mana 183.027 Ha di antaranya berada di Indonesia (100.122 Ha di antaranya telah ditanami), di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, dengan sisanya berada di Malaysia.⁵ Landbank ini sedikit lebih rendah dari 259.714 Ha (dengan 194.850 Ha berada di Indonesia⁶) yang tercantum dalam ACOP RSPO terbaru grup tersebut.⁷ Laporan tahunan mencantumkan 11



pabrik, empat di antaranya berada di Indonesia.⁸ Sebuah perkebunan kelapa sawit di provinsi Papua, PT Varita Majutama, yang memiliki area konsesi seluas 55.782 Ha (berdasarkan data pelepasan Kawasan hutan), tidak dimasukkan dalam angka-angka ini. Perusahaan ini menjadi anak perusahaan tidak langsung dari Genting Berhad pada bulan Juli 2014,⁹ namun belum dimasukkan dalam divisi perkebunan Genting Plantations Berhad.

Genting adalah subjek pengaduan aktif RSPO yang menuduh Genting telah melakukan pembunuhan orangutan di salah satu perkebunannya pada tahun 2017¹⁰ dan pembangunan perkebunan ilegal di hutan produksi oleh tiga anak perusahaannya.¹¹

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

Apical, Ferrero dan Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
PT PERMATA SAWIT MANDIRI (PT PSM), KABUPATEN KETAPANG, KALIMANTAN BARAT



PT PSM memperoleh izin lokasi seluas 17.022 Ha pada bulan Desember 2012. Penilaian NKT dan dampak sosial dan lingkungan dilakukan pada bulan November 2013. NPP telah diserahkan ke RSPO pada bulan Mei 2014.¹³ Pada saat itu PT PSM adalah anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Genting Plantation.

Pada bulan September 2014, Greenomics Indonesia melaporkan terjadinya deforestasi yang luas di konsesi berdekatan milik Genting PT Citra Sawit Cemerlang (PT CSC), dan mempertanyakan apakah hutan hujan dan habitat orangutan di PT PSM akan dilindungi.¹⁴ Wilmar, yang mengambil pasokan dari Genting pada saat itu, melaporkan pada bulan Maret 2015 bahwa 'Genting telah berkomitmen untuk tidak melakukan pengembangan di area SKT seperti yang direkomendasikan oleh penilai SKT mereka'.¹⁵ Komitmen ini tampaknya berlaku baik untuk PT CSC maupun PT PSM. Laporan Greenomics berikutnya menunjukkan bahwa deforestasi di PT CSC terus berlanjut selama tahun 2015.¹⁶

Genting tidak melanjutkan pengembangan PT PSM. Namun, alih-alih melindungi hutan, Genting mengumumkan pada bulan Januari 2017 bahwa mereka setuju untuk menjual 70% sahamnya kepada Sepanjang Group, mitra usaha patungannya. Saham Genting di PT PSM akan dialihkan ke PT Suryaborneo Mandiri, yang digambarkan Genting "sepenuhnya dimiliki oleh Sepanjang Group".¹⁷

Pada bulan September 2017 kepemilikan PT PSM dialihkan ke PT Mulia Agro Investama, perusahaan yang tidak dimiliki secara formal oleh Genting atau Sepanjang Group.¹⁸ Namun, profil akta perusahaan

menunjukkan bahwa PT PSM terus dikelola oleh orang-orang yang berkaitan dengan Genting atau Sepanjang Group:

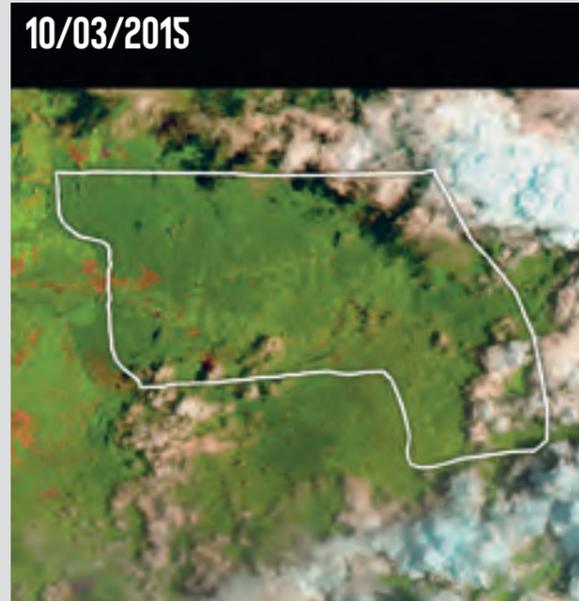
Direktur PT PSM saat ini, Albert Ruslim, telah menjabat posisi itu sejak tahun 2008, selama periode ketika PT PSM 70% dimiliki oleh Genting dan 30% dimiliki oleh Sepanjang Group.¹⁹

Pemilik mayoritas saat ini, Kurni Samsudin, adalah direktur dari anak perusahaan Sepanjang Group PT Bintang Harapan Desa dari tahun 2006 - 2016.²⁰

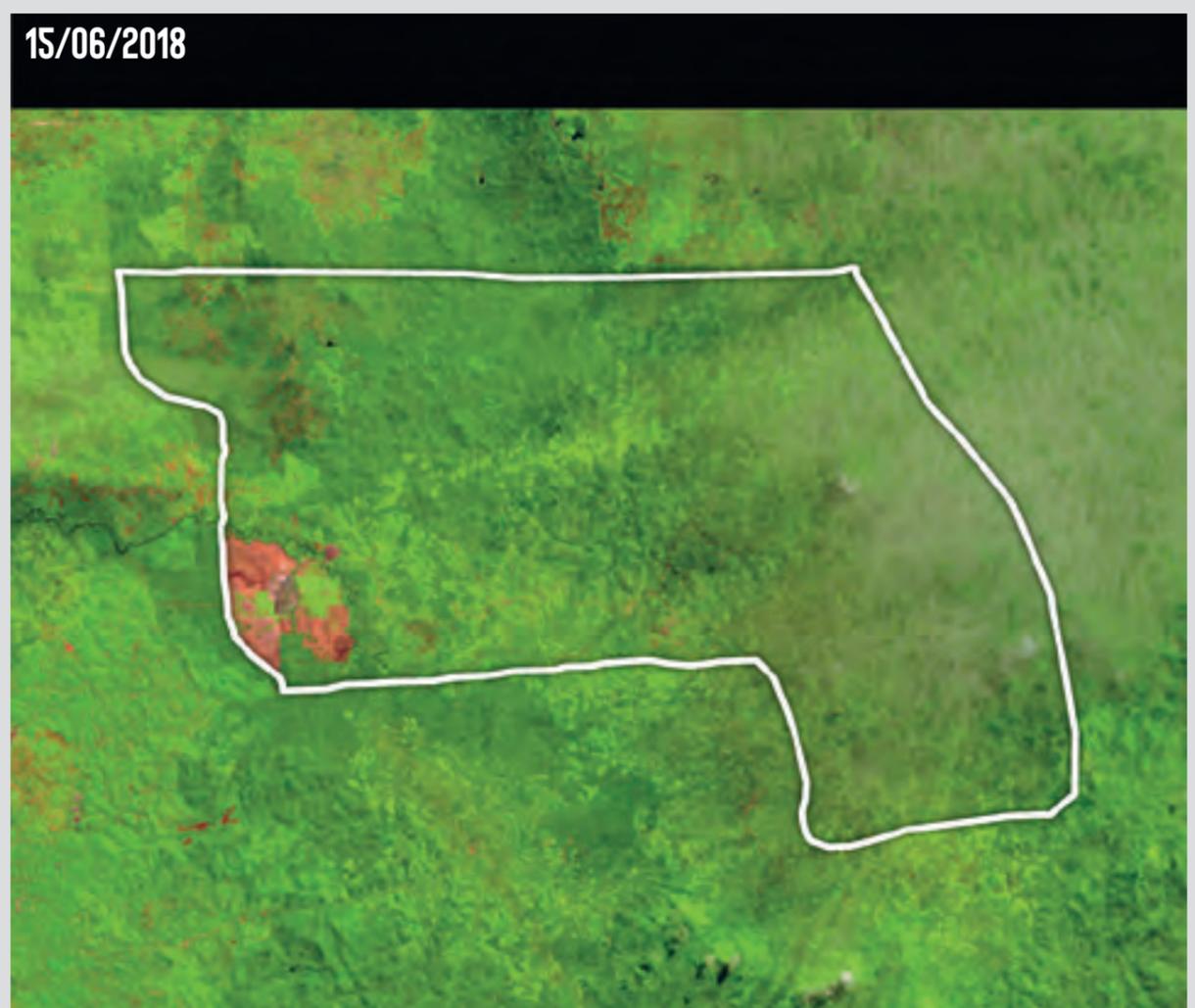
Komisaris saat ini, Andy Laurencius, merupakan Wakil Komisaris Eksekutif antara bulan Maret 2015 dan bulan September 2017, selama periode ketika PT PSM 70% dimiliki oleh Genting dan 30% dimiliki oleh Sepanjang Group.

Hubungan-hubungan ini menunjukkan bahwa Genting atau Sepanjang Group dapat terus melakukan kontrol manajemen atau memengaruhi pada konsesi tersebut. Yang mana pun juga, keputusan Genting untuk menjual PT PSM berujung langsung pada kerusakan hutan yang cukup besar di dalam konsesi tersebut - hutan yang seharusnya dilindungi Genting, sebagai pemilik mayoritas konsesi. Persetujuan diam-diam dari Wilmar dan pedagang lain yang terus mengambil pasokan dari Genting setelah perusahaan ini menjual PT PSM juga menyoroiti keterlibatan mereka dalam deforestasi yang dilanjutkannya.

Antara tanggal 10 Maret 2015 dan 15 Juni 2018, PT PSM membuka hampir 500 Ha hutan di sisi selatan konsesi. Selain itu, perusahaan melakukan penebangan hutan yang ekstensif di sekitar 600 Ha di sisi utara. Kedua area ini sebagian besar adalah habitat orangutan.²¹ Hingga bulan Mei 2018, sekitar 9.300 Ha hutan masih ada dalam konsesi.



Batas konsesi berdasarkan NPP RSPO.¹² Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



HAYEL SAEED ANAM GROUP

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: PACIFIC INTER-LINK DAN BERBAGAI OPERASI HILIR LAINNYA

Hayel Saeed Anam Group (HSA) adalah konglomerat sektor swasta asal Yaman, yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya yaitu Hayel Saeed Anam. CEO HSA saat ini adalah Abdul Gabbar Hayel Saeed.¹ Direktur Pelaksana dari perusahaan minyak sawit utama HSA Pacific Inter-Link Sdn Bhd (PIL) adalah Fouad Hayel Saeed Anam,² yang juga anggota dewan HSA dan direktur regional untuk Malaysia dan Indonesia.³

HSA adalah pedagang dan pengolah minyak sawit besar yang memiliki tiga kilang dan sejumlah pabrik oleokimia yang berlokasi di Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Operasi minyak sawit hilir kelompok usaha ini terdiri dari perusahaan-perusahaan berikut: PIL, Pacific Oils & Fats Industries Sdn Bhd (PACOIL), PT Pacific Indopalm Industries, PT Pacific Palmindo Industri, PT. Pacific Medan Industri, PT Pacific Indomas dan PT Oleochem & Soap



1 April 2018, PT Tulen Jayamas Perusahaan kayu yang berada didalam PT Kartika Cipta Pratama (HSA), Papua, 6°22'49.025"S 140°18'48.047"E ©Ifansasti/Greenpeace

Industri.⁴ Pemilik mayoritas perusahaan-perusahaan ini adalah Commodities House Investment Ltd di Kepulauan Cayman.⁵ Lima perusahaan pertama adalah anggota RSPO, tetapi dua lainnya tidak; tidak satu pun dari lima perusahaan anggota RSPO ini melaporkan operasi pengembangan kelapa sawit. Bahwa beberapa perusahaan dari kelompok usaha ini menjadi anggota RSPO (dan dua lainnya tidak menjadi anggota RSPO) menunjukkan bahwa kelompok usaha ini telah melanggar aturan RSPO yang mengharuskan keanggotaan tingkat grup.⁶

Perdagangan minyak sawit dan pemasaran produk minyak sawit ditangani oleh PIL,⁷ anak perusahaan HSA, yang sering kali paling gambling terlihat dari seluruh anak perusahaan HSA yang berkaitan dengan kelapa sawit.

Hingga bulan Juli 2018, tidak satu pun dari operasi minyak sawit HSA memiliki kebijakan NDPE publik. Pada bulan Juli 2018, PIL menerbitkan 'Sustainability Charter' di situs webnya, yang mengikat perusahaan ke sebuah rantai

pasok NDPE dan meluncurkan dasbor keberlanjutan pada akhir kuartal ketiga tahun 2018.⁸

Karena kelompok tersebut menyangkal mengendalikan konsesi kelapa sawit mana pun, tidaklah mengherankan jika kelompok ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya bagi umum dalam format yang dapat digunakan.

Hingga bulan Juni 2018 keluarga Hayel Saeed memiliki kontrol manajemen (lihat di bawah) atas empat konsesi dengan total landbank seluas 154.527 Ha, yang membentuk sebagian dari pengembangan kelapa sawit yang dikenal sebagai Proyek Tanah Merah di Distrik Boven Digoel di Provinsi Papua di Indonesia (lihat studi kasus di bawah).⁹ Perusahaan-perusahaan perkebunan yang mengoperasikan konsesi-konsesi ini adalah (dan tetap) PT Megakarya Jaya Raya (PT MJR), PT Kartika Cipta Pratama (PT KCP), PT Graha Kencana Mulia (PT GKM) dan PT Energi Samudera Kencana (PT ESK). Area konsesi mencakup 80% hutan primer pada tahun 2013, menurut peta Kementerian Kehutanan.

Pada akhir bulan April 2018, Greenpeace merilis rekaman gambar (footage) pembukaan lahan yang luas di dua wilayah konsesi, yang dioperasikan oleh PT MJR dan PT KCP.¹⁰ HSA dan PIL kemudian mengambil langkah-langkah untuk menyangkal dan menghapus bukti-bukti keterlibatan kelompok usaha ini.

Belum lama ini pada tanggal 5 Juni 2018, HSA mengklaim di situs webnya bahwa mereka 'baru-baru ini telah mengakuisisi 160.000 hektar lahan Indonesia' untuk budidaya kelapa sawit.¹¹ Halaman terkait telah dihapus pada tanggal 6 Juni 2018 – pada hari yang sama ketika HSA merilis pernyataan berikut:

"HSA Group ingin mengklarifikasi bahwa – terlepas dari laporan-laporan belakangan ini – kelompok usaha ini tidak berinvestasi dalam konsesi kelapa sawit mana pun di Indonesia, atau di tempat lain. Meskipun HSA Group sebelumnya telah mempertimbangkan investasi tersebut, organisasi memutuskan untuk tidak melanjutkannya"

setelah kajian uji tuntas menunjukkan tidak ada alasan bisnis yang jelas untuk melakukannya.”¹²

Pernyataan serupa dibuat dalam surel ke Asia Times, tertanggal 13 Juni 2018, dari konsultan Humas Burson Marsteller, yang tampaknya telah dikontrak oleh HSA dan/atau PIL.¹³

Sebuah pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2018 di situs web PIL yang baru mengalami perubahan memberikan penyangkalan yang lebih lengkap:¹⁴

“Sebagai organisasi yang telah lama menempatkan keberlanjutan di jantung usahanya, PIL menanggapi tuduhan keterlibatan yang salah informasi baru-baru ini dalam deforestasi konsesi di Papua Indonesia dengan sangat serius. PIL ingin mengklarifikasi bahwa laporan-laporan ini tidak benar. Baik PIL maupun HSA tidak memiliki atau mengoperasikan perkebunan kelapa sawit di Papua, atau di belahan dunia lainnya. Keluarga HSA memang pernah berniat untuk berinvestasi di sektor kelapa sawit hulu Indonesia – yang diiklankan terlalu dini di situs webnya – namun telah membatalkan semua rencana tersebut pada pertengahan tahun 2017 setelah studi uji tuntas menunjukkan tidak ada alasan bisnis yang jelas untuk melakukannya. Kebingungan yang muncul tentang masalah ini merupakan ketidaksengajaan.”

Pernyataan-pernyataan ini secara eksplisit mengklaim bahwa PIL/HSA tidak pernah berinvestasi di perkebunan.

Profil registri untuk keempat perusahaan perkebunan ini menunjukkan bahwa mulai tahun 2014, saat penanaman dimulai, hingga perubahan besar dilakukan pada tanggal 31 Mei 2018, anggota keluarga Hayel Saeed, dan direktur-direktur lain dari PIL dan perusahaan hilir kelapa sawit lainnya,¹⁵ saat itu adalah direktur atau komisaris dari keempat perusahaan perkebunan ini. Fouad Hayel Saeed Anam, yang masih menjabat sebagai Direktur Utama PIL, saat itu adalah Komisaris Utama dari keempat perusahaan tersebut. Salah Ahmed Hayel Saeed, direktur dari PIL dan perusahaan-perusahaan operasi minyak sawit HSA Indonesia, PT Pacific Palmindo Industri, PT Pacific Indopalm Industries, PT. Pacific Medan Industri dan PT Pacific Indomas, saat itu adalah Presiden Direktur PT KCP dan PT GKM dan komisaris PT. ESK.¹⁶

Perubahan menyeluruh terhadap dewan dari keempat perusahaan perkebunan tersebut disetujui oleh notaris pada tanggal 31 Mei 2018 dan dipublikasikan pada tanggal 5 Juni,¹⁷ sehari sebelum penyangkalan keterlibatan kelompok dikeluarkan. Semua anggota keluarga Hayel Saeed yang dapat diidentifikasi dikeluarkan dari dewan. Namun, struktur kepemilikan saham tidak berubah, dengan 80% saham dipegang oleh perusahaan-perusahaan lepas pantai berbasis di UEA (Uni Emirate Arab) dan 20% saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan induk di Indonesia. Alamat terdaftar perusahaan-perusahaan perkebunan ini juga tidak berubah: misalnya, PT ESK dan PT KCP masih terdaftar di kantor PIL Jakarta (Menara Kadin Lantai 17). Arvind Johar – saat ini terdaftar sebagai kontak untuk kantor PIL di Indonesia oleh METCO¹⁸ (perusahaan HSA lainnya) dan sebelumnya sebagai perwakilan anak perusahaan PIL¹⁹ untuk RSPO – tetap pada posisinya sebagai Direktur Utama (president director) PT MJR, posisi

yang telah ia jabat sejak tahun 2013, dan telah ditunjuk untuk posisi yang sama di PT ESK.²⁰

Pada tanggal 3 Agustus 2012, PIL menandatangani perjanjian usaha patungan untuk sebuah kompleks kayu terpadu di Boven Digoel, untuk dioperasikan di bawah nama PT Tulen Jayamas Timber Industries.²¹ Pembangunan saat ini sedang berjalan, sebagaimana didokumentasikan oleh investigasi lapangan Greenpeace pada bulan April 2018. Sekitar 40% saham perusahaan induk Malaysia, Tulen Jayamas Sdn Bhd, dikuasai oleh Malindo Investments Ltd, sebuah perusahaan yang terdaftar di UAE yang diyakini terkait dengan HSA/PIL. Perusahaan yang sama juga memiliki 80% saham PT KCP – yang merupakan perusahaan perkebunan yang mengoperasikan konsesi tempat pembangunan tengah berlangsung. Salah Ahmed Hayel Saeed, Fouad Hayel Saeed Anam dan Arvind Johar ketiganya adalah direktur Tulen Jayamas Sdn Bhd, di samping posisi mereka di anak perusahaan mereka di Indonesia (yang ditegaskan kembali oleh profil registri perusahaan terbaru tertanggal 28 April 2018).

Meskipun pemilik manfaat utama dari Malindo Investments Ltd dan perusahaan-perusahaan lain yang terdaftar di UAE tetap ditutupi, bukti-bukti menunjukkan bahwa keluarga tersebut tetap mengendalikan keempat konsesi Tanah Merah, meskipun HSA dan PIL mengklaim tidak pernah menanam investasi apa pun dalam konsesi-konsesi ini.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Pada tanggal 12 September, Arup Pal dari Pacific Inter-Link menjawab atas nama Hayel Saeed Anam Group yang menyangkal bahwa HSA Group atau PIL memiliki atau mengoperasikan empat konsesi Tanah Merah dan karena itu ‘tidak dalam posisi untuk mengomentari struktur kepemilikan mereka’.

Mengenai pendaftaran beberapa perusahaan perkebunan di kantor PIL di Jakarta, ia menyatakan bahwa ‘ketika PIL telah mempertimbangkan investasi, itu memungkinkan organisasi untuk mendaftar secara lokal menggunakan alamat kami. Setelah keputusan untuk tidak berinvestasi, pendaftaran ini seharusnya ditransfer ke alamat lain. Kami menjadi sadar akan hal ini dan tim hukum kami sedang mempertimbangkan untuk memperbaiki situasi ini menjadi sebuah prioritas.’

Ia mengakui bahwa beberapa anggota keluarga dan eksekutif sebelumnya ‘memiliki keterlibatan sebelumnya’ dengan konsesi Papua dan fasilitas pemrosesan kayu terkait ‘karena kepentingan pribadi yang berbeda dari peran mereka dalam bisnis PIL’ tetapi dinyatakan bahwa ‘[a]ll para eksekutif ini secara resmi mundur dari posisi ini ‘dan’ Arvind Johar meninggalkan organisasi PIL beberapa tahun yang lalu, dan tidak lagi mewakili PIL pada pekerjaan atau tugas apa pun.’

Greenpeace mengambil sikap berdasarkan temuan-temuan dari laporan ini.

TANGGAPAN PASAR

Nestlé dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



31 Maret 2018, PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua, 6°26'9.246"S 140°15'4.254"E ©Ifansasti/Greenpeace



1 April 2018, PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua, 6°25'17.64"S 140°14'7.542"E ©Ifansasti/Greenpeace

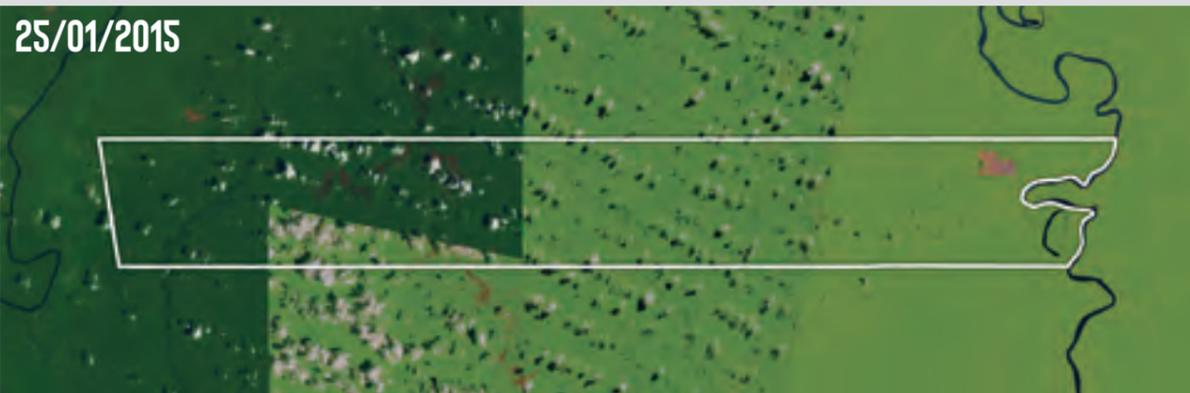
KONSESI:
PT MEGAKARYA
JAYA RAYA (PT MJR),
PROVINSI PAPUA,
DISTRIK BOVEN DIGOEL



BUKAAN: 4,500ha



25/01/2015



24/01/2018



Batas konsesi berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara, Sk.127/MENHUT-11/2012

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

PT MJR adalah salah satu dari keempat konsesi terkait HSA di Proyek Tanah Merah.²² Antara bulan Mei 2015 dan tanggal 6 Februari 2018 PT MJR membuka 4,500 Ha hutan, termasuk didalamnya hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK dan termasuk didalamnya hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah. Pembukaan baru-baru ini juga terjadi di konsesi berdekatan PT Kartika Cipta Pratama.



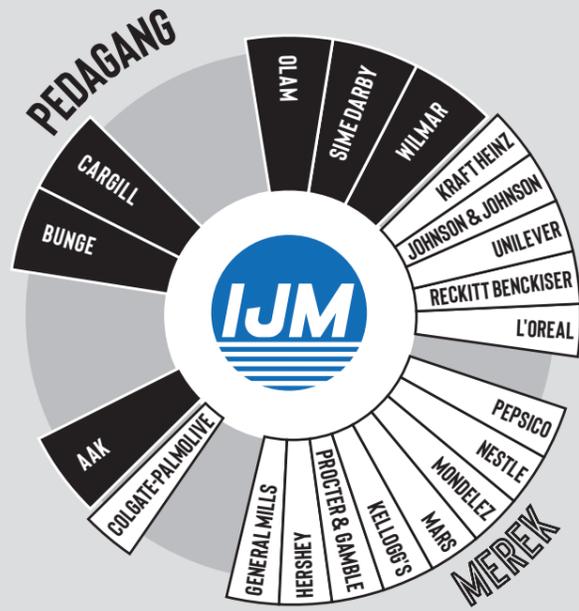
31 Maret 2018, PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua, 6°26'29.819"S 140°14'13.247"E ©Ifansasti/Greenpeace



31 Maret 2018, PT Megakarya Jaya Raya (HSA), Papua, 6°25'41.406"S 140°15'14.652"E ©Ifansasti/Greenpeace

IJM CORPORATION

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAWA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: IJM PLANTATIONS BHD

IJM Plantations memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. CEO-nya saat ini adalah Joseph Tek Choon Yee.¹

IJM Plantations adalah anggota RSPO sampai mereka mengundurkan diri pada bulan Februari 2016.² Grup ini tidak memiliki kebijakan publik NDPE dan tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan. IJM Corporation adalah satu dari empat perusahaan yang dikeluarkan dari Dana Pensiun Global Pemerintah Norwegia pada bulan Agustus 2015 karena terkait deforestasi.³

Laporan tahunan 2017 grup ini mencantumkan 60.570 Ha area tertanam; sekitar 60% di antaranya berada di Indonesia (Kalimantan dan Sumatra) dan sisanya di Sabah, Malaysia.⁴ Laporan itu menyatakan bahwa 'tidak ada lagi landbank untuk ekspansi' di Malaysia dan bahwa sisa landbank-nya di Indonesia, sekitar 3.000 Ha, akan ditanami dalam dua tahun ke depan karena telah memenuhi syarat.⁵

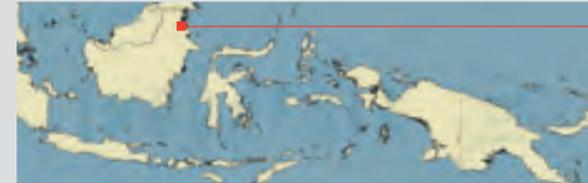
TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada 10 September 2018, IJM Group menjawab, mengakui deforestasi yang teridentifikasi. Mereka mengklaim bahwa dua pelanggan - IOI dan Wilmar - mempertanyakannya tentang izin dari belakang versi draf laporan ini dan bahwa itu kemudian berkomitmen untuk 'tidak melakukan deforestasi, tidak ada penanaman gambut dan tidak ada pembakaran terbuka'. Mereka mengklaim telah menghentikan semua pembukaan lahan di wilayah studi kasus, saat melakukan penilaian bersama dengan Wilmar untuk mengidentifikasi tindakan korektif yang diperlukan. Grup gagal menyediakan peta konsesi untuk operasinya.

TANGGAPAN PASAR

Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

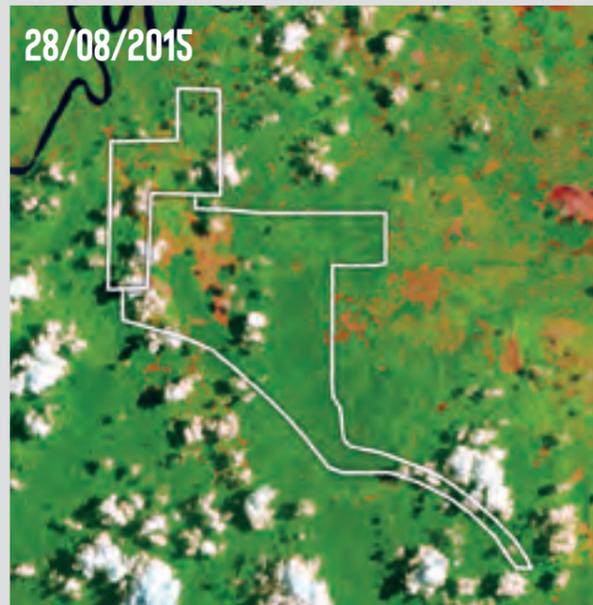
KONSESI: PT PRIMA BAHAGIA PERMAI (PT PBP), KABUPATEN BULUNGAN, KALIMANTAN UTARA



BUKAAN:
302ha



Antara tanggal 28 Agustus 2015 dan 19 Juli 2018 PT PBP membuka sekitar 300 Ha lahan, yang sebagian besar merupakan hutan sekunder.



Batas konsesi berdasarkan peta HGU dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



Indonusa Group adalah perusahaan milik keluarga dan memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan formal. Kelompok ini dikendalikan oleh Rosna Tjuatja dan keluarga.¹ Tjuatja juga bergerak di bidang layanan keuangan melalui PT Profindo International Securities² dan properti melalui PT Suryasakti Bumipersada.³

Indonusa bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE publik. Kelompok ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Indonusa adalah kelompok minyak sawit kecil yang memiliki setidaknya dua konsesi di Sumatera (di Jambi dikelola oleh PT Indonusa Agromulia dan di Sumatera Selatan dikelola oleh PT Hamita Utama Karsa),⁴ satu konsesi seluas 18.590 Ha di Merauke, Papua (PT Internusa Jaya Sejahtera), dan satu konsesi di Sorong

Selatan, Provinsi Papua Barat, yang belum memperoleh seluruh izin yang diperlukan.⁵

Pada tahun 2012 Indonusa dilaporkan membeli perusahaan perkebunan ketiganya di Sumatera, PT Sawit Mas Perkasa di Jambi,⁶ yang pemilik sebelumnya telah membuka lahan untuk mengekstraksi kayunya namun tidak menanam kelapa sawit.⁷ Masih belum dikonfirmasi apakah lahan ini kemudian ditanami oleh Indonusa Group. Kemungkinan ada konsesi-konsesi lain yang dikendalikan oleh kelompok tersebut, karena situs webnya mengklaim bahwa mereka melakukan ekspansi di Sumatera, Kalimantan dan Papua.⁸

Pada suatu waktu, Indonusa pernah memiliki dua konsesi lain di Provinsi Papua Barat - PT Persada Utama Agromulia dan PT Anugerah Sakti Internusa. Namun, saham-saham di perusahaan-perusahaan ini dialih tangankan pada bulan April 2014 kepada orang lain yang diketahui tidak memiliki hubungan dengan Indonusa Group atau Rosna Tjuatja.⁹

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada 13 September, setelah berakhirnya jangka waktu untuk berkomentar kemudian Indonusa menjawab, mengklaim bahwa kelompok tersebut telah 'menerapkan kebijakan dan Prosedur Operasi Standar (SOP) terkait Kebijakan NDPE'. Ini diklaim memiliki semua izin yang diperlukan untuk PT Indonusa Agromulia, PT Hamita Utama Karsa dan PT Internusa Jaya Sejahtera tetapi tidak memberikan referensi untuk mereka. Ini menjelaskan bahwa 'pembelian PT Sawit Mas Perkasa pada tahun 2012 oleh Indonusa Group telah dinyatakan batal demi hukum'. Akhirnya, menyatakan bahwa 'Kegiatan Pembersihan Tanah oleh PT IJS adalah [...] Hutan Sekunder'. Grup gagal menyediakan peta konsesi untuk operasinya..

TANGGAPAN PASAR

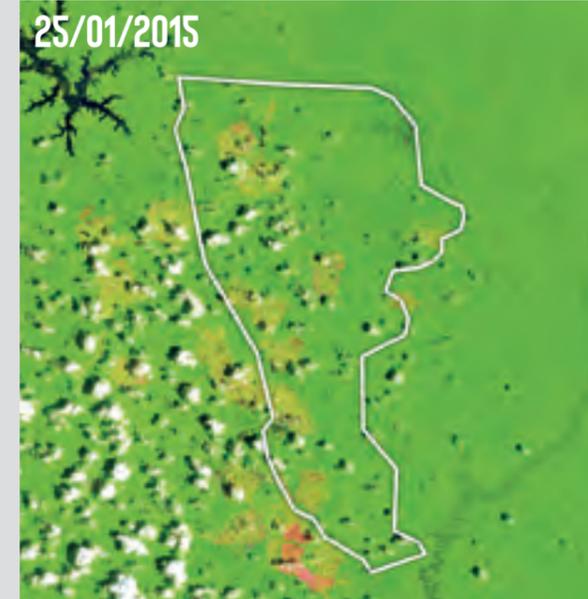
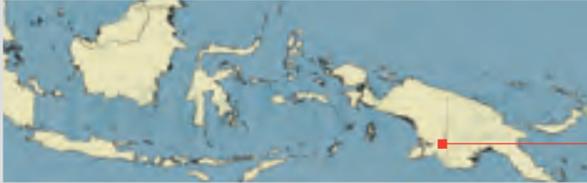
Mars, Nestlé, PZ Cussons, Reckitt Benckiser, Unilever dan Wilmar memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



1 April 2018, PT Internusa Jaya Sejahtera (Indonusa), Papua, 7°14'16.145"S 140°42'39.293"E ©Ifansasti/Greenpeace

KONSESI:
**PT INTERNUSA
 JAYA SEJAHTERA
 (PT IJS), PAPUA,
 KABUPATEN MERAUKE**

BUKAAN: 5,172ha



Antara tanggal 25 Januari 2015 dan 28 Juli 2018 PT IJS membuka sekitar 5.170 Ha hutan, termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK. Perusahaan masih belum memperoleh Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara definitif.

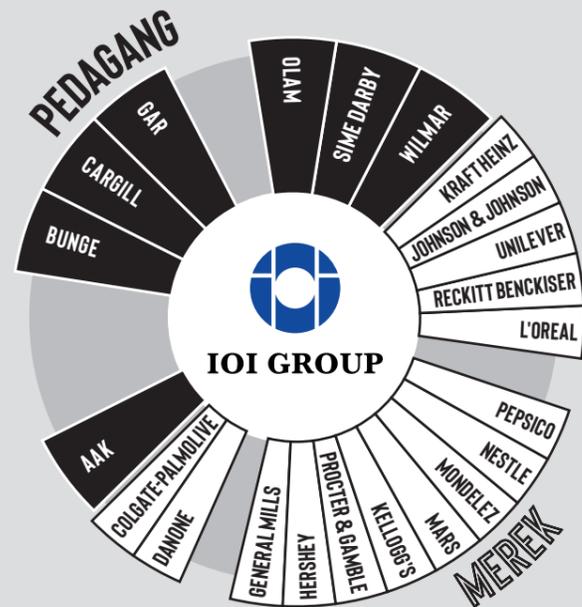
Batas konsesi berdasarkan Izin Lokasi yang ditandatangani tanggal 1 Juli 2013.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



1 April 2018, PT Internusa Jaya Sejahtera (Indonusa), Papua, 7°14'26.544"S 140°42'34.212"E ©Ifansasti/Greenpeace

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



IOI Group (kadang juga disebut sebagai IOI Corporation Berhad¹⁾ merupakan grup usaha formal dengan kepemilikan induk-anak perusahaan. IOI merupakan salah satu pemilik Bumitama (lihat studi kasus di atas),² dan dengan demikian kedua grup ini harus dianggap berkaitan dalam hal tanggung jawab. CEO IOI Dato' Lee Yeow Chor juga merupakan direktur non-eksekutif Bumitama Agri Ltd.³

IOI telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2004.⁴ IOI memiliki kebijakan keberlanjutan termasuk komitmen NDPE.⁵ IOI belum menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Menurut situs webnya, IOI memiliki 90 perkebunan

kelapa sawit dengan total landbank mencapai 217.917 Ha, di mana 179.271 Ha di antaranya telah ditanami. Dari total kepemilikannya, 64% berlokasi di Borneo Malaysia, 24% di Semenanjung Malaysia dan 12% di Indonesia. Lima perusahaan perkebunannya di Indonesia dimiliki bersama dengan Bumitama, yang memiliki 28% saham di induk perusahaan mereka PT Sawit Nabati Agro.⁶ Lebih dari setengah landbank-nya Indonesia (21.062 Ha dari 39.477 Ha) sejauh ini telah dibuka untuk penanaman.⁷

Beberapa konsesi bersama milik IOI dan Bumitama di Kalimantan Barat telah menjadi bahan pengaduan berulang dari Greenpeace dan organisasi-organisasi lain atas

penanaman ilegal di luar batas konsesi dan pelanggaran lain terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO, seperti pembukaan lahan gambut dan hutan NKT termasuk habitat orangutan.⁸ Konsesi Pelita milik IOI di Sarawak juga terlibat dalam pengaduan yang telah berlangsung lama atas pelanggaran hak masyarakat atas tanah (lihat studi kasus di bawah).

Hingga saat ini IOI Group termasuk divisi minyak dagang IOI Loders Croklaan. Namun, pada bulan Maret 2018, pedagang komoditas yang berbasis di AS, Bunge, menyelesaikan pembelian saham mayoritas di Loders Croklaan, yang kini digabungkan dengan divisi minyak sawitnya sendiri.⁹ IOI Group mempertahankan kepemilikan atas tiga kilang di Malaysia.¹⁰

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada 12 September, IOI menjawab, dengan mengakui bahwa kasus Pelita 'terlalu lama untuk diselesaikan, menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat yang terkena dampak'. IOI menyatakan bahwa mereka menerbitkan peta konsesi Indonesia di dasbor minyak sawit pada bulan Desember 2016; 'Kami dilarang mempublikasikan [peta perkebunan kami di Malaysia] di bawah Undang-undang Rahasia Resmi di Malaysia'.



16 April 2016, PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI), Kalimantan, 2°55'55.686"S 110°44'41.496"E ©Vaughn/Greenpeace

KONSESI: IOI-PELITA PLANTATIONS SDN BHD, SARAWAK



Pada tahun 2006, IOI mengakuisisi 70% saham di perusahaan perkebunan kelapa sawit patungan Rinwood-Pelita, mengubah namanya menjadi IOI-Pelita Plantations Sdn Bhd.¹¹ Mitra asli dengan kepemilikan terkecil dalam usaha patungan tersebut, yang mempertahankan 30% sahamnya, adalah Otoritas Pengembangan dan Pengawasan Lahan pemerintah Sarawak (Land Custody and Development Authority/ LCDA), sebuah badan yang secara khusus dibentuk untuk mempromosikan pengembangan komersial di tanah adat.¹²

Sejarah konflik ini telah banyak didokumentasikan oleh Forest Peoples Program. Pada tahun 1996–97, Rinwood-Pelita memperoleh sewa guna lahan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di atas lahan seluas 7.840 Ha (yang kemudian meningkat menjadi 9.040 Ha) dan mulai membuka lahan dan menanam kembali perkebunannya, tanpa menyertakan proses PADIATAPA yang benar. Masyarakat desa mencoba menentang namun diabaikan oleh perusahaan dan pejabat atau diintimidasi oleh karyawan perusahaan.¹³ Pada tahun 1997 masyarakat menuntut para mitra usaha patungan dan pemerintah negara bagian ke pengadilan, berupaya mendapatkan pengakuan dan penegakan hak atas tanah adat mereka. Setelah lewat dari 12 tahun, Pengadilan Tinggi akhirnya mencapai keputusan pada tanggal 25 Maret 2010, yang menegaskan hak adat masyarakat dan memutuskan bahwa sewa guna lahan perusahaan tidak sah dan perusahaan harus membayar ganti rugi kepada masyarakat.¹⁴

Sementara itu, meskipun demikian, IOI telah mengambil alih saham Rinwood di perusahaan tersebut dan ekspansi perkebunan terus berlanjut. Kompensasi dibayarkan namun hanya menanggung nilai tanaman yang hancur dan perbaikan lahan, bukan nilai tanah itu sendiri, sementara IOI-Pelita tampaknya menekan masyarakat desa untuk tidak mencoba merebut kembali tanah mereka dan tidak menyelesaikan klaim yang muncul akibat pembukaan lahan oleh pemilik sebelumnya, meskipun masyarakat berulang kali meminta mereka untuk dilibatkan.¹⁵

Menyadari bahwa Prinsip dan Kriteria RSPO mengharuskan IOI untuk menyelesaikan konflik lahan

sebelum kepemilikannya dapat disertifikasi, perwakilan masyarakat dan LSM pendamping membawa masalah ini ke RSPO pada tahun 2008,¹⁶ dengan sebuah keluhan lebih lanjut diajukan pada bulan Maret 2010.¹⁷ Hal ini menyebabkan RSPO di bulan Maret 2011 menangguhkan sertifikasi masa depan operasi IOI dan meminta perusahaan untuk mengajukan resolusi yang dapat diterima.¹⁸

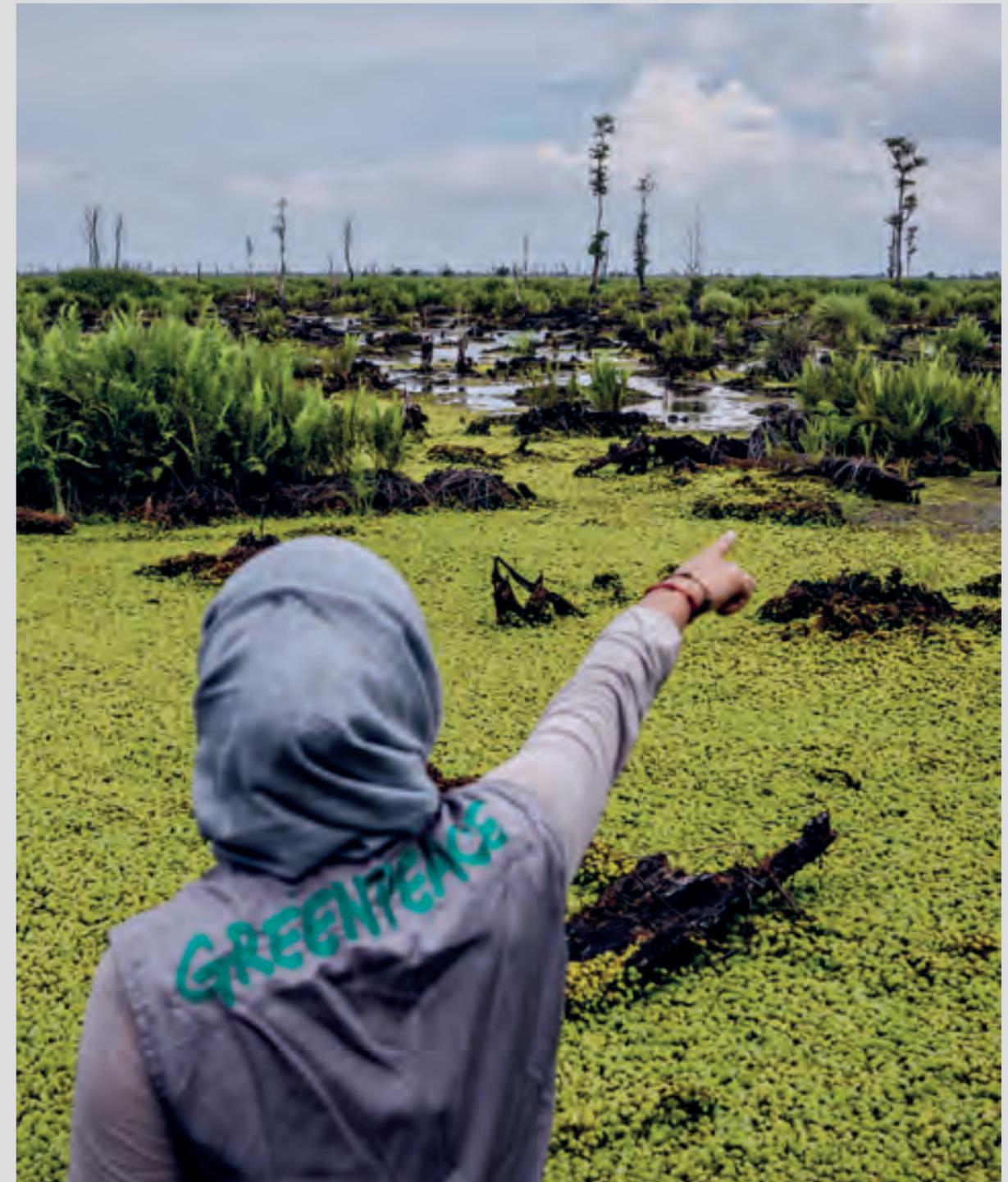
This failed to manifest, and following the success of IOI's appeal of the High Court judgment in 2013, in February 2014 the company told the RSPO that it was unwilling to comply with FPIC standards because the courts had not recognised the community's claim to the land. Mediation efforts continued through 2016, with the case transferred back to the RSPO Complaints Panel in January 2017.

Hal ini gagal terwujud, dan menyusul keberhasilan banding IOI terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada tahun 2013,¹⁹ pada bulan Februari 2014 perusahaan memberi tahu RSPO bahwa mereka tidak mau mematuhi standar PADIATAPA karena pengadilan belum mengakui klaim masyarakat atas tanah tersebut.²⁰ Upaya mediasi berlanjut hingga tahun 2016, dengan kasus ini dikirim kembali ke Panel Pengaduan RSPO pada bulan Januari 2017.²¹

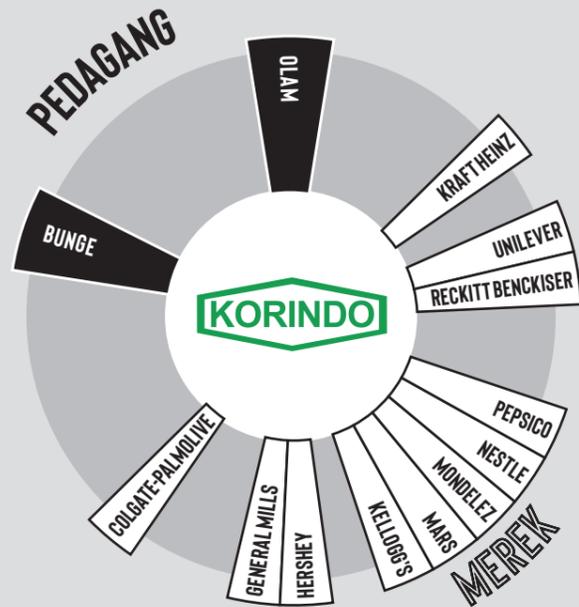
Pada bulan Desember 2017, IOI tiba-tiba mengumumkan niatnya untuk melepas 70% sahamnya di IOI-Pelita kepada pihak ketiga yang bukan anggota RSPO. Penjualan semacam itu akan membuat keberhasilan penyelesaian konflik tanah menjadi tidak mungkin. Namun, setelah kritik keras dari LSM dan pemangku kepentingan lainnya perusahaan menyatakan bahwa telah menjadi 'jelas bagi IOI bahwa divestasi tidak mungkin dan tidak akan berlanjut'.²²

Pada bulan Januari 2018, IOI menegaskan kembali 'komitmennya untuk menyelesaikan sengketa dengan masyarakat setempat'.²³ Meskipun rencana resolusi tengah dilakukan dan IOI mengklaim bahwa 'hubungan antara IOI dan masyarakat telah membaik secara signifikan',²⁴ pada saat penulisan sengketa tersebut masih belum terselesaikan.

16 April 2016
PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI), Kalimantan,
2°55'13.4"S 110°43'40.2"E
©Ifansasti/Greenpeace



HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREC TERNAMA



Korindo¹ adalah perusahaan swasta yang dikendalikan oleh keluarga Seung dari Korea Selatan. Perusahaan ini sangat sedikit mempublikasikan informasi tentang keuangan atau kepemilikan perusahaan.

Korindo bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE publik yang mencakup operasi kelapa sawit dan kehutanannya. Perusahaan ini belum menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Korindo memegang delapan konsesi kelapa sawit, tujuh di provinsi Papua dan satu di Maluku Utara, dengan total area seluas 159.600 Ha. Analisis pemetaan menunjukkan bahwa dua dari konsesi-konsesi ini telah dikembangkan secara penuh, empat lainnya masih dalam pengembangan dan dua lainnya masih belum dikembangkan.

Investigasi yang dilakukan oleh Aidenvironment pada tahun 2016 mendapati bahwa Korindo telah membuka lebih dari 50.000 Ha hutan di seluruh konsesi kelapa sawitnya, di

mana 30.000 Ha di antaranya telah dibuka sejak tahun 2013, termasuk 11.700 Ha yang digolongkan sebagai hutan primer menurut peta resmi Kementerian Kehutanan Indonesia.² Sekitar 8.711 Ha dibuka di lima konsesi antara tahun 2015 dan 2017, yang 1.992 Ha di antaranya dipetakan sebagai hutan primer. Analisis yang dilakukan Aidenvironment mengidentifikasi keberadaan 894 titik api di konsesi Korindo antara tahun 2013 dan 2015, yang menunjukkan bahwa Korindo dengan sengaja menggunakan api dalam proses pembukaan lahannya.³

Menyusul tekanan dari para pelanggan, anak perusahaan Korindo, PT Tunas Sawa Erma (PT TSE) pada bulan Agustus 2016 mengumumkan moratorium pembangunan selama tiga bulan seraya mereka menetapkan sebuah kebijakan NDPE yang komprehensif dan melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan.⁴ Anak perusahaan Korindo PT Papua Agro Lestari (PT PAL; lihat studi kasus) dan PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM)

mengumumkan moratorium-moratorium selanjutnya pada bulan Desember 2016, yang konon dilakukan untuk memuluskan penyelesaian studi HCS dan NKT pada konsesi-konsesi mereka. Tidak sampai dua bulan kemudian moratorium PT PAL telah dilanggar, dengan pembukaan lebih dari 1.000 Ha lahan.⁵

Korindo kemudian mengklaim telah memberlakukan kembali moratorium di PT PAL,⁶ dan pada tahun 2017 menyerahkan lima penilaian NKT ke HCV Resource Network.⁷ Namun, komitmennya terhadap NDPE dipertanyakan. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2017, Korindo mengadakan acara-acara penting bersama para pimpinan pemerintah Papua setempat di Jakarta⁸ dan di Merauke, Papua,⁹ di mana mereka mengklaim mereka perlu membuka lebih banyak hutan untuk memenuhi komitmennya kepada masyarakat setempat. Tindakan-tindakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai niat kelompok tersebut untuk menghentikan deforestasi dalam jangka panjang.

TANGGAPAN KELOMPOK

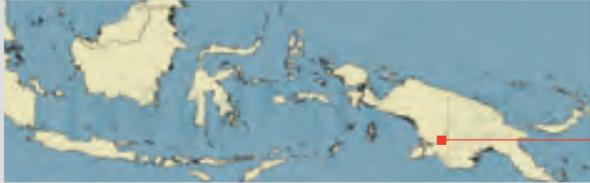
Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

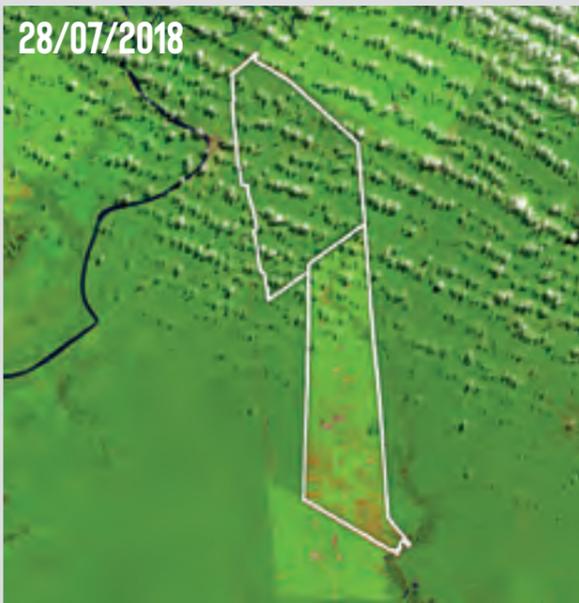
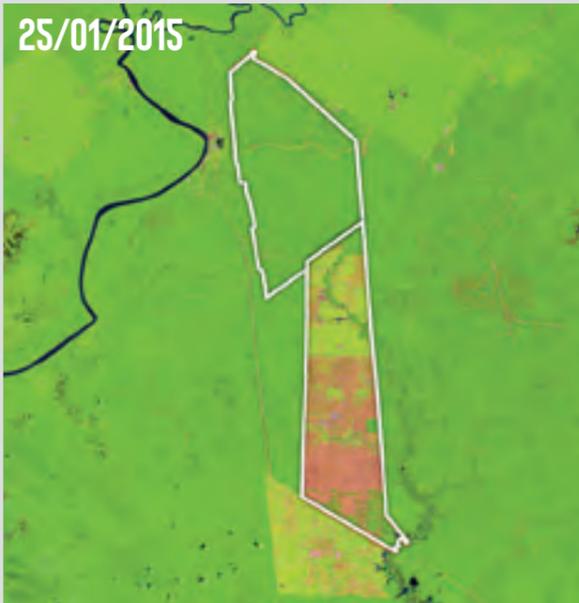
Bunge, Colgate-Palmolive, Hershey, Mars, Nestlé, Reckitt Benckiser and Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
**PT BERKAT
CITRA ABADI**

BUKAAN:
128ha



Sejak tanggal 29 Januari 2016, PT Berkat Cipta Abadi hanya membuka sedikit lahan hutan.



Batas konsesi berdasarkan peta dari Perkebunan Kalimantan Timur (2012).

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



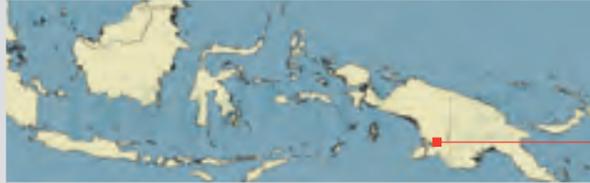
1 April 2018,
PT Berkat Cipta Abadi (Korindo), Papua,
6°51'34.823"S 140°30'29.334"E
©Ifansasti/Greenpeace



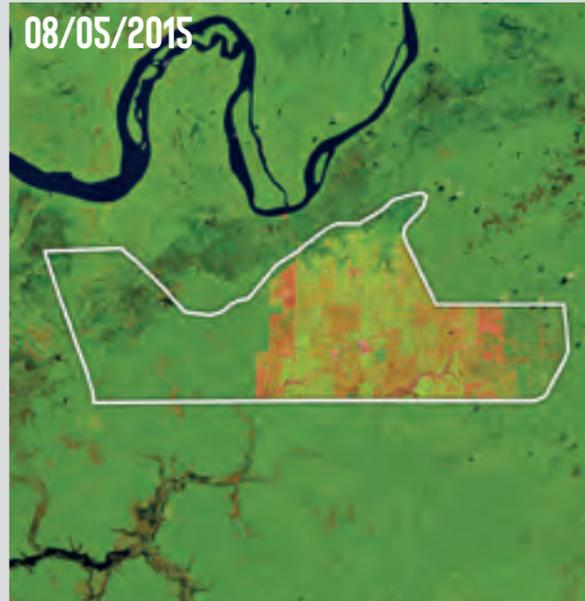
26 Maret 2013,
PT Berkat Cipta Abadi (Korindo), Papua,
6°48'33.599"S 140°30'14.58"E
©Rante/Greenpeace

KONSESI:
PT DONGIN PRABHAWA

BUKAAN:
1,451ha



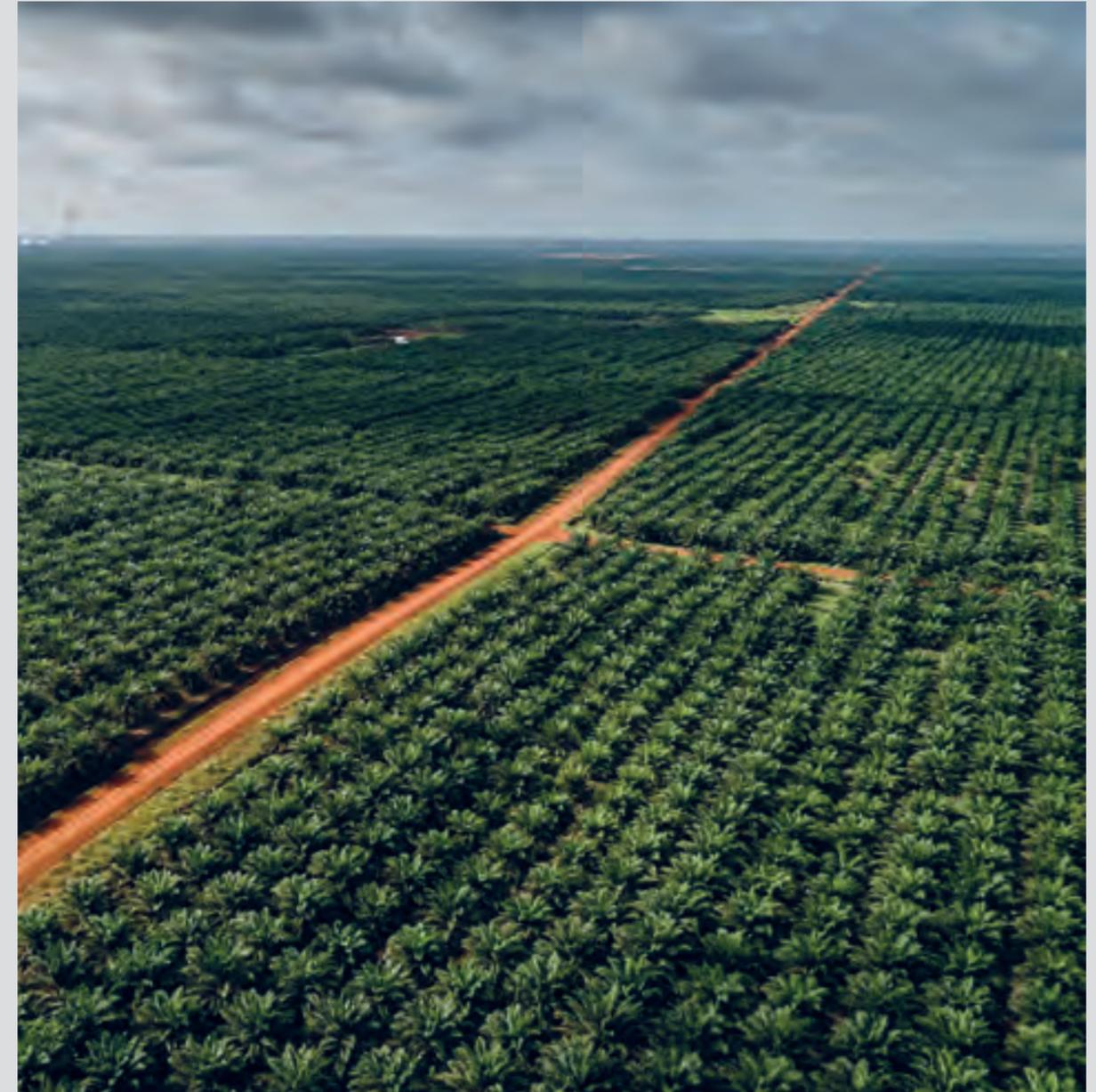
Sejak tanggal 8 Mei 2015, PT Dongin Prabhawa telah membuka sekitar 1.450 Ha hutan, termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK.



Batas konsesi berdasarkan BPN online 2017 Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 623 / Menhut-II / 2009 tanggal 05 Oktober 2009.

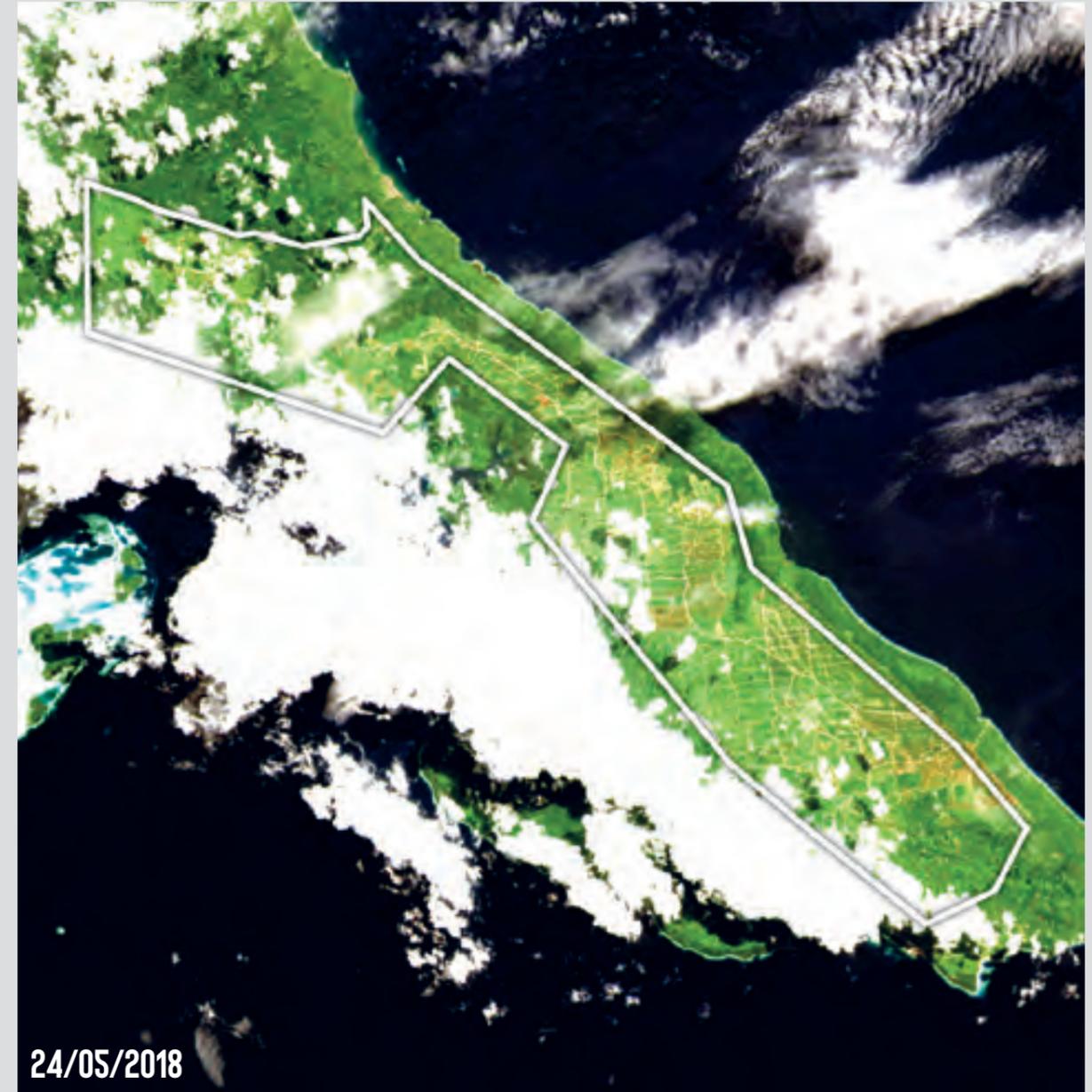
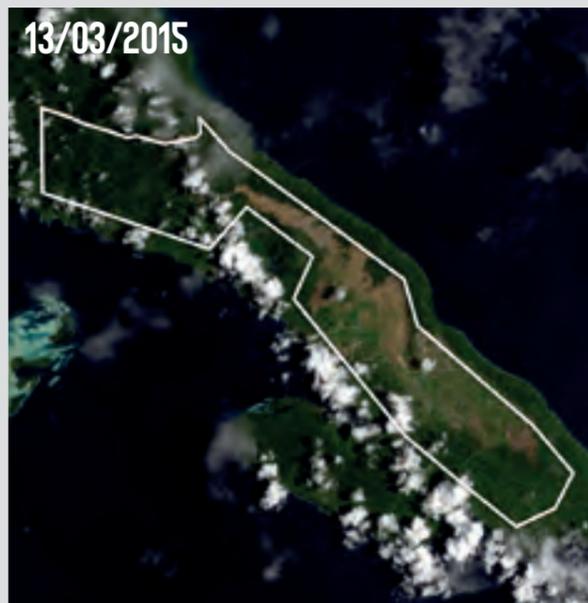
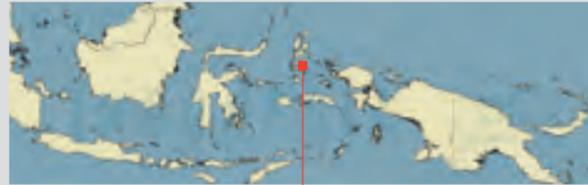
Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

29 Maret 2018,
PT Dongin Prabhawai (Korindo), Papua,
7°20'56.135"S 139°42'2.76"E
@Ifansasti/Greenpeace



KONSESI:
**PT GELORA
MANDIRI
MEMBANGUN**

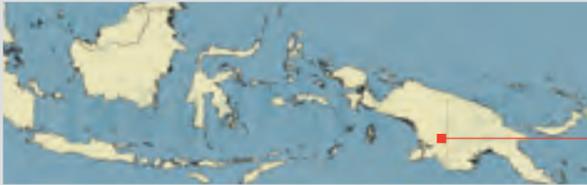
Sejak tanggal 13 Maret 2015, PT Gelora Mandiri Membangun telah membuka sekitar 1.635 Ha hutan.



Batas konsesi berdasarkan KLHK,
2013 SK. 266 / MENHUT-II / 2008.

Sumber gambar satelit:
Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KONSESI:
PT PAPUA AGRO LESTARI (PT PAL), PROVINSI PAPUA, DISTRIK BOVEN DIGOEL DAN KONSESI-KONSESI LAINNYA



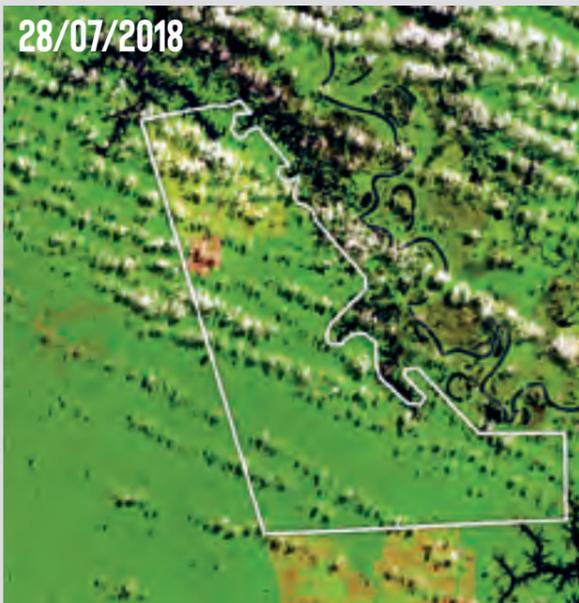
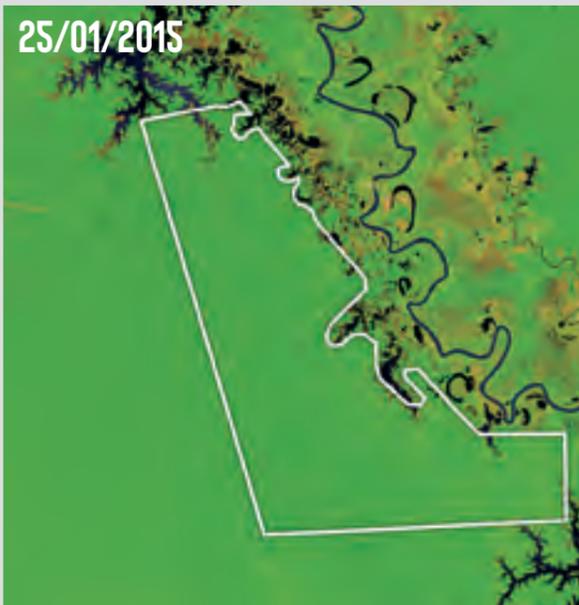
BUKAAN:
 5,190ha



Menurut peta tutupan lahan resmi KLHK, area konsesi PT PAL hampir seluruhnya ditutupi oleh hutan primer pada tahun 2013.¹⁰ Antara tanggal 25 Januari 2015 dan 28 Juli 2018, PT PAL membuka sekitar 5.190 Ha hutan, termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan .

Pada bulan Agustus 2016, Aidenvironment mempublikasikan sebuah penyelidikan terhadap deforestasi di PT PAL dan konsesi-konsesi Korindo lainnya.¹¹ Di bawah tekanan dari pelanggan yang akibat penyingkapan ini, PT PAL mengumumkan moratorium pembukaan lahan baru pada bulan Desember 2016¹² - yang secara tersirat mengakui bahwa deforestasi tengah berlangsung. Perusahaan tersebut terus melanggar dan - ketika ditantang - memberlakukan kembali moratorium ini silih berganti secara cepat.¹³

Analisis pemetaan menunjukkan adanya korelasi yang kuat antara pembukaan hutan dan keberadaan titik api di PT PAL, yang menunjukkan dengan jelas bahwa penggunaan api secara sengaja untuk membuka lahan sebelum penanaman. Selama tahun 2013 dan tahun 2014, sebelum pembukaan lahan tersebut, tidak tercatat adanya titik api di dalam konsesi. Namun, sebanyak 221 titik api tercatat antara bulan Agustus dan bulan November 2015 - yang sebagian besar berada di bagian barat laut area konsesi yang baru dibuka. Pada bulan September 2016, Korindo dengan keras menyangkal penggunaan api yang disengaja untuk pembukaan lahan kepada Greenpeace, sebagaimana perusahaan mengklaim telah mempraktikkan NDPE dalam kurun waktu ketika konsesi PT PAL tengah digunduli.¹⁴



Batas konsesi berdasarkan BPN online 2017 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 552 / Menhut -II / 2012, tanggal 4 Oktober 2012.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



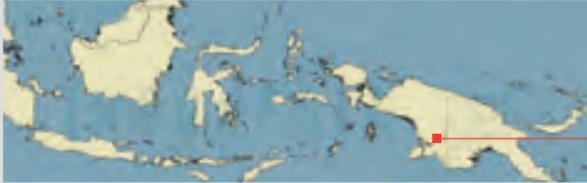
1 April 2018, PT Papua Agro Abadi (Korindo), Papua, 6°48'54.167"S 140°46'40.812"E ©Ifansasti/Greenpeace



1 April 2018, PT Inocin Abadi (Korindo), Papua, 6°52'0.018"S 140°42'20.861"E ©Ifansasti/Greenpeace

KONSESI:
**PT TUNAS
SAWA ERMA**

BUKAAN:
2,816ha



Sejak tanggal 25 Januari 2015, PT Tunas Sawa Erma telah membuka 2.815 Ha di Blok A, termasuk lahan gambut potensial dan hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK.



Batas konsesi berdasarkan MoEF online 171 / KPT. S-II / 98.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



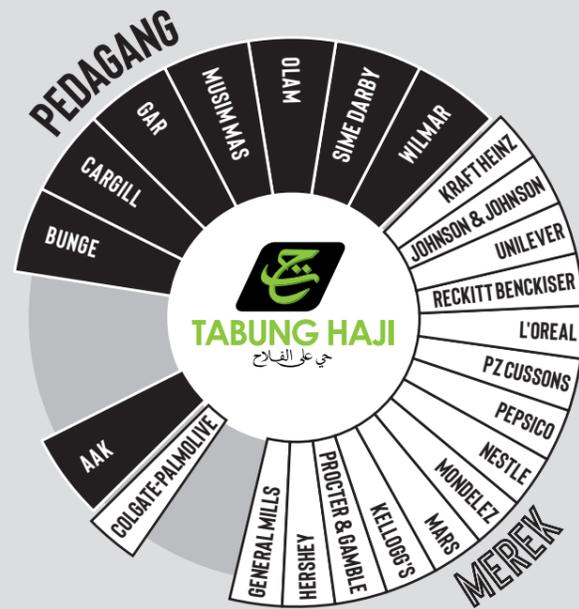
31 Maret 2018, PT Tunas Sawa Erma (Korindo), Papua, 6°39'7.998"S 140°14'47.249"E ©Ifansasti/Greenpeace

19 Desember 2017, PT Tunas Sawa Erma (Korindo), Papua, 6°38'53.765"S 140°16'33.671"E ©Sukarno/Greenpeace



LEMBAGA TABUNG HAJI

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAWA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: TH PLANTATIONS BHD

Lembaga Tabung Haji dikelola atas nama pemerintah Malaysia; lembaga ini adalah tabungan nasional/badan investasi yang mendanai kegiatan ziarah bagi Muslim Malaysia.¹ TH Plantations mencakup usaha-usaha perkebunan kelapa sawit grup ini.²

TH Plantations bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan publik NDPE. Grup ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.



21 Maret 2016, PT Persada Kencana Prima (Lembaga Tabung Haji), Kalimantan, 3°42'05.85"N 117°04'24.47"E ©Aidenvironment

TH Plantations memiliki landbank seluas 100.986 Ha, sebagian besar berada di Malaysia, dengan 60.350 Ha di antaranya telah ditanami³. Satu konsesi seluas 8.800 Ha berada di Kalimantan Utara, Indonesia.⁴

Lembaga Tabung Haji juga memiliki 50% saham di PT Synergy Oil Nusantara (PT SON), sebuah usaha pengilangan dengan kapasitas terpasang dilaporkan sebesar 1 juta ton.⁵ PT SON adalah anggota RSPO,⁶ namun beroperasi tanpa kebijakan NDPE dan karenanya merupakan bagian dari kebocoran pasar. PT SON dilaporkan terus membeli dari PT Austindo Nusantara Jaya dan PT Sawit Sumbermas

Sarana setelah hubungan bisnis mereka ditanggihkan oleh pedagang lain karena penggundulan hutan.

PT SON adalah perusahaan patungan antara Lembaga Tabung Haji dan FELDA sampai yang terakhir menjual kepemilikannya pada bulan Mei 2018;⁷ identitas pembeli tidak diketahui.

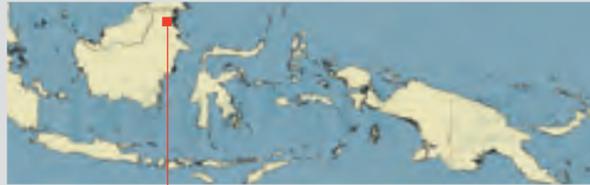
TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

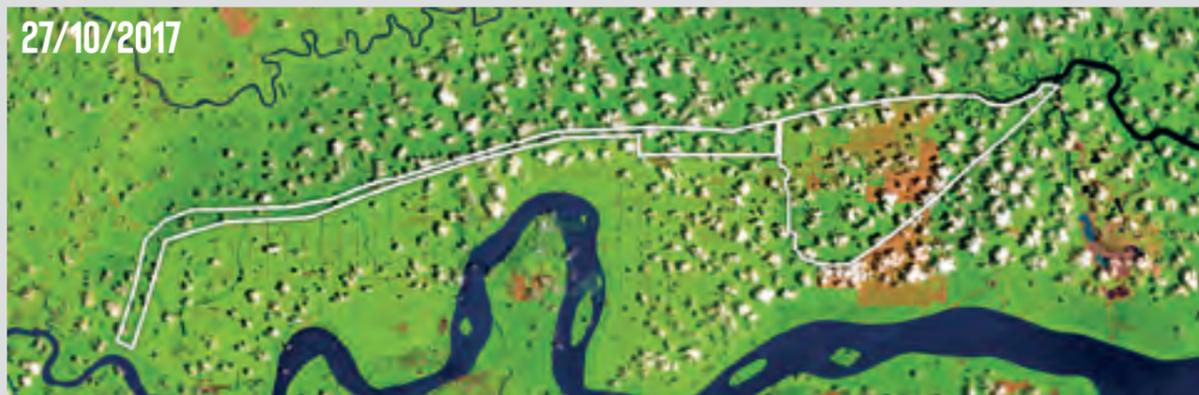
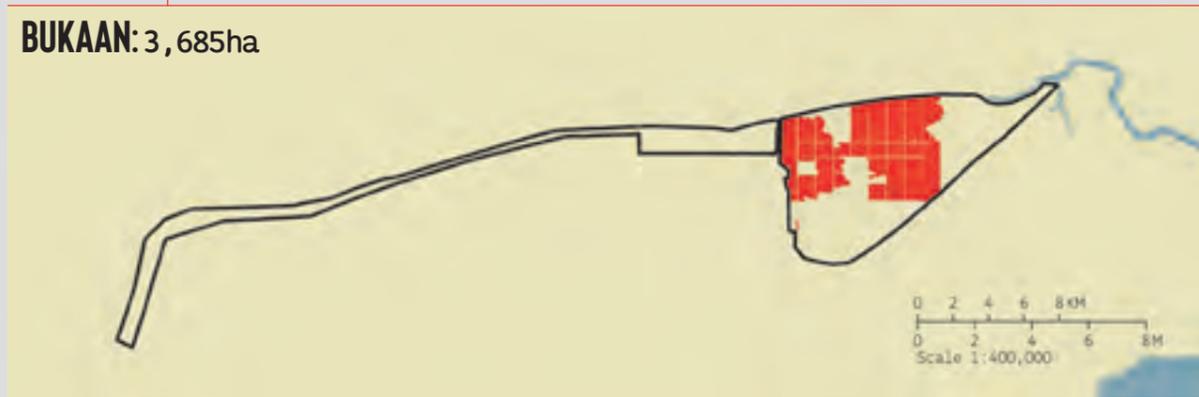
Bunge, Mars and Reckitt Benckiser memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
**PT PERSADA KENCANA
 PRIMA (PT PKP),
 KALIMANTAN UTARA**



Hampir seluruh konsesi ini terletak di lahan gambut, yang banyak di antaranya adalah gambut dalam. PT PKP mulai membuka hutan pada awal tahun 2015. Antara tanggal 29 November 2014 dan 27 Oktober 2017, PT PKP membuka 3.685 Ha, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

BUKAAN: 3,685ha



21 Maret 2016, PT Persada Kencana Prima
 (Lembaga Tabung Haji), Kalimantan,
 3°42'06.29"N 117°03'52.33"E
 ©Aidenvironment

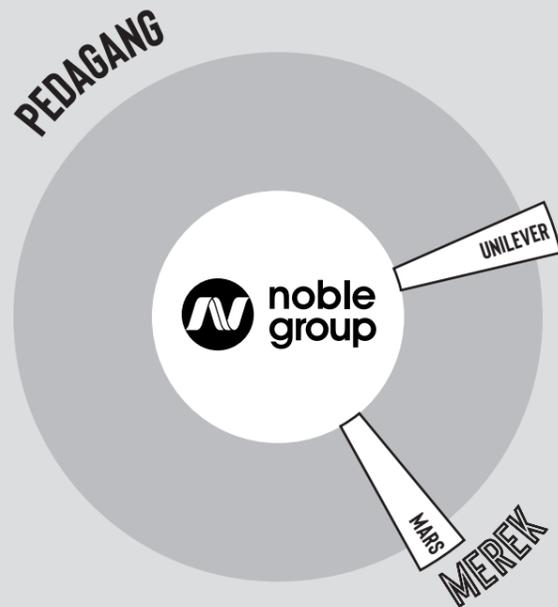


Batas konsesi berdasarkan informasi dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (2012).

Sumber gambar satelit:
 Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

NOBLE PLANTATIONS

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



Noble Group memiliki struktur kepemilikan induk-anak perusahaan perusahaan formal. Noble Plantations merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Noble Group,¹ yang terdaftar di bursa saham Singapore.² Pemegang saham terbesar Noble Group, sebesar 18,31%, adalah Noble Holdings Limited,³ yang sepenuhnya dimiliki oleh sebuah discretionary trust (Pengelolaan Dana Tersendiri/TDT) yang penerima manfaatnya mencakup anak-anak pendiri grup, Richard Elman (meskipun bukan Elman sendiri).⁴ Berbagai lembaga termasuk China Investment Corporation dan Abu Dhabi Financial Group LLC juga merupakan pemegang saham yang besar.⁵

Noble Plantations Pte Ltd telah menjadi anggota RSPO sejak tahun 2011.⁶ Pada bulan Oktober 2017, mereka menerbitkan 'dokumen informasi Keberlanjutan' yang disamakan sebagai kebijakan NDPE, menggunakan kata-kata kunci tanpa komitmen mutlak untuk tidak melakukan deforestasi atau pengembangan gambut berdasarkan penilaian lapangan yang terpercaya.⁷ Namun, mengingat tindakan perusahaan dalam konsesi-konsesi kelapa sawitnya (lihat studi kasus di bawah), dokumen ini tidak memiliki kredibilitas baik di sisi lingkungan maupun sosial.

Noble Plantations mencakup dua perusahaan perkebunan yang memiliki konsesi di provinsi Papua dan Papua Barat, dengan total area tidak mencapai 71.000 Ha. Menurut penyerahan dokumen ACOP 2016-nya kepada RSPO, perusahaan telah menanam atau mengembangkan 16.539 Ha lahan pada tanggal ini.⁸ Noble Plantations belum menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Noble Group sebelumnya memasukkan sebuah divisi perdagangan pertanian, Noble Agri, yang operasi perkebunan kelapa sawitnya merupakan bagian dari operasi kelompok ini. Namun, ketika di tahun 2014 perusahaan tersebut menjual 51% sahamnya di Noble Agri kepada perusahaan milik negara China Cofco⁹ (yang akan diikuti pada tahun 2016 dengan penjualan 49% saham sisanya kepada anak perusahaan Cofco¹⁰), usaha perkebunannya dikecualikan dari penjualan. Sebaliknya, Noble Group menerbitkan sebuah surat promes yang mengatur bahwa hasil bersih dari penjualan kedua perusahaan perkebunannya akan disetorkan ke Noble Agri – yang kini bernama Cofco Agri Limited (CAL) Group – begitu ada pembeli, dan bisnis sawitnya kini dikatakan 'diklasifikasikan sebagai unit yang akan dijual'.¹¹ Meskipun Noble Group mengklaim telah mengadakan pembicaraan dengan pembeli potensial sekitar akhir tahun 2014,¹² klaim ini diulang-ulang

18 Desember 2017,
PT Pusaka Agro Lestari (Noble), Papua,
4°20'22.469"S 136°41'3.642"E
©Sukarno/Greenpeace



setiap akhir tahun selama tiga tahun setelahnya,¹³ yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut tidak memiliki prospek komersial yang menarik. Hal ini tidak mengherankan mengingat kontroversi yang melibatkan keduanya (lihat studi kasus) dan dampaknya terhadap kredibilitas Noble – beberapa investor institusional sebenarnya telah tertunda penanaman investasinya dalam kelompok ini secara keseluruhan karena kekurangan-kekurangan dalam operasi minyak sawitnya.¹⁴

TANGGAPAN KELOMPOK

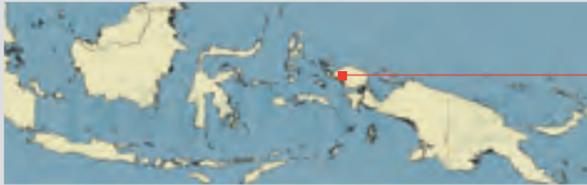
Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada tanggal 12 September, Noble menjawab, menyatakan bahwa 'kami sedang dalam proses sengketa RSPO yang aktif dan karena itu kami dilarang melakukan diskusi bilateral dengan pihak lain mana pun'. Berkenaan dengan 'dokumen informasi Keberlanjutan', menyatakan bahwa 'tidak ada perkebunan milik Noble yang ditanam di lahan gambut dan kami tidak memiliki keinginan atau niat untuk melakukannya', tanpa

menyikapi apakah pembukaan lahan gambut telah terjadi Di PT HIP, perusahaan mengklaim bahwa itu telah 'berhasil menunjukkan ketidaksahihan tuntutan klan lokal' yang dibuat pada tahun 2015, dengan alasan bahwa mereka telah menerima kompensasi di masa lalu .. Ia menyatakan bahwa pihaknya telah 'melakukan banyak upaya untuk mengatasi kekhawatiran mereka dan menerapkan sejumlah manfaat tambahan', termasuk dukungan pendidikan, perumahan dan perawatan kesehatan. Di PT PAL, perusahaan menegaskan kembali bahwa mereka tidak dapat berkomentar tentang apakah mereka telah menebangi hutan primer karena Proses Pengaduan RSPO. Mereka menawarkan untuk membagi peta konsesi dengan Greenpeace setelah dirilis dari kendala Proses Pengaduan RSPO 'dengan dasar bahwa informasi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam domain publik'.

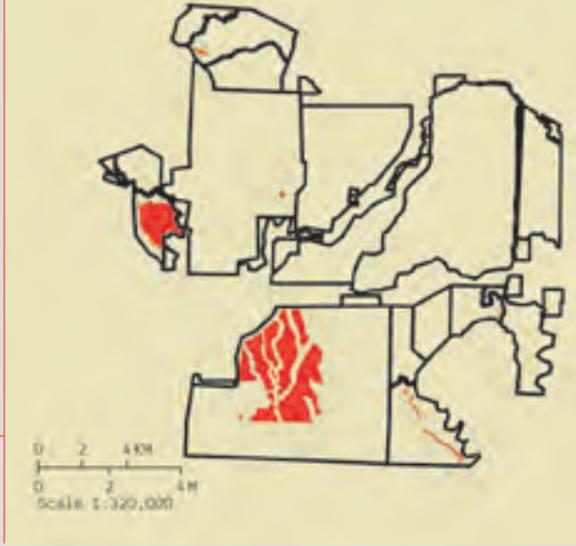
TANGGAPAN PASAR

Mars, Nestlé dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
**PT HENRISON INTI
 PERSADA (PT HIP),
 PAPUA BARAT,
 DISTRIK SORONG**



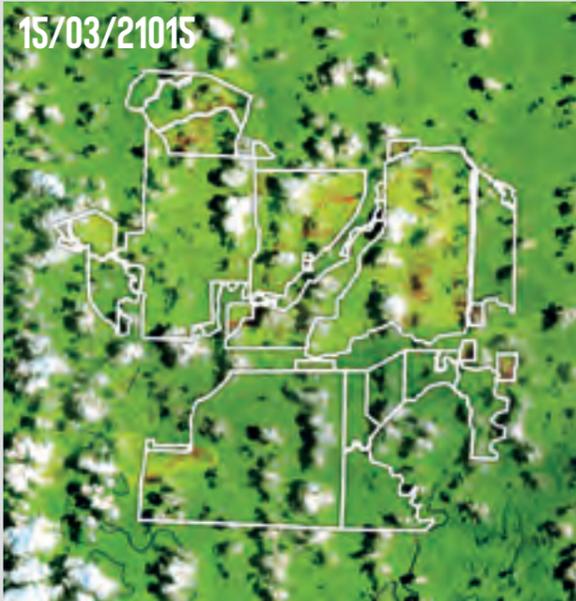
BUKAAN: 1,334ha



PT HIP, yang mayoritas sahamnya diakuisisi Noble pada tahun 2010,¹⁵ mengoperasikan konsesi kelapa sawit seluas 32.546 Ha dan pabrik kelapa sawit.¹⁶ Penentangan masyarakat atas konsesi berawal pada tahun 2006, ketika para pimpinan marga melepaskan tanah adat kepada PT HIP, dengan masyarakat yang diduga mengalami tekanan untuk menyepakati perjanjian eksploitatif yang menawarkan kompensasi minimal.¹⁷

Kedatangan Noble di tempat kejadian nyaris tidak membawa perbaikan. Menurut sebuah kesaksian yang diberikan pada tahun 2014, lebih dari empat tahun setelah Noble mengambil alih konsesi, masyarakat masih belum menerima manfaat dalam bentuk barang yang telah dijanjikan oleh PT HIP, termasuk bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, perumahan baru dan air bersih – bahkan, menurut laporan, akses ke air bersih memburuk, karena perusahaan telah mencemari sungai-sungai setempat.¹⁸ Setahun kemudian, pada bulan September 2015, perwakilan dari sembilan marga menyatakan bahwa PT HIP belum memperoleh persetujuan mereka untuk mengambil alih tanah dan bahwa mereka tengah berupaya mendapatkan kompensasi dari perusahaan.¹⁹

Antara tahun 15 Maret 2015 dan 19 Februari 2017, PT HIP membuka 1.335 Ha hutan.



Batas konsesi berdasarkan Noble Group 2016 SK. 409 / MENHUT-II.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



18 Mei 2011, PT Henrison Inti Persada (Noble), Papua ©EIA



18 Mei 2011, PT Henrison Inti Persada (Noble), Papua ©EIA

KONSESI:
**PT PUSAKA AGRO
 LESTARI (PT PAL),
 PROVINSI PAPUA,
 DISTRIK MIMIKA**



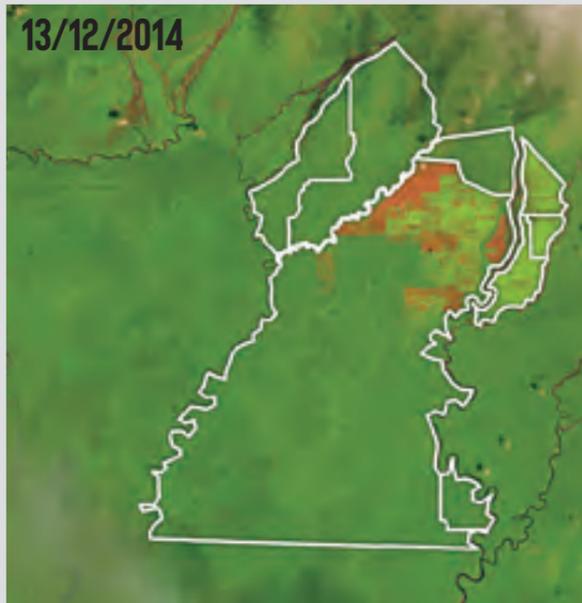
BUKAAN:
 4,628ha



Pada tahun 2011, Noble mengakuisisi 90% saham PT PAL,²⁰ beserta konsesi kelapa sawit seluas 38.159 Ha yang mulai dibuka pada tahun 2013.²¹ Menurut peta Kementerian Kehutanan, sekitar 27.000 Ha - 70% dari total area konsesi - adalah hutan primer pada tahun 2011. Sekitar dua pertiga dari konsesi PT PAL diklasifikasikan pada 2013 sebagai Lanskap Hutan Utuh, yang berarti bahwa kawasan tersebut memiliki nilai khusus untuk konservasi sebagai kawasan hutan yang tidak terpisahkan.²² Area dengan luas serupa terletak di atas lahan gambut dengan berbagai kedalaman.²³

Menurut analisis citra satelit oleh Aidenvironment, sebagian besar dari hutan sekunder dalam konsesi PT PAL ini telah dibuka antara tahun 2011 dan 2014; pada tahun 2016, perusahaan juga telah membuka area yang luas dari hutan primer. Antara tanggal 13 Desember 2014 dan 27 Maret 2018, PT PAL membuka 4.639 Ha hutan, di mana lebih dari setengahnya dipetakan oleh KLHK sebagai hutan primer; per tahun 2017, 23.000 Ha lahan yang dipetakan sebagai hutan primer masih ada di konsesi. Pada bulan Juli 2017, HSBC memicu investigasi RSPO terhadap pembukaan hutan primer di konsesi PT PAL; bulan berikutnya RSPO menyarankan perusahaan untuk menghentikan seluruh pengembangan konsesi lebih lanjut sambil menunggu hasil penilaian panel pengaduan RSPO. Pada saat penulisan, masih dinantikan hasil suatu investigasi independen.²⁴

Pembukaan hutan oleh PT PAL juga membawa implikasi serius bagi masyarakat setempat. Pada bulan Oktober 2014 banjir parah yang terjadi di desa Miyoko dan Aikawapuka, yang berada di wilayah hilir PT PAL,²⁵ disebut masyarakat setempat diakibatkan oleh deforestasi di sana.²⁶ Bupati setempat menanggapi peristiwa ini dengan mencabut izin operasi perusahaan,²⁷ namun pihak perusahaan mengajukan keberatan dengan dukungan Direktur Jenderal Perkebunan di Kementerian Pertanian²⁸ dan berhasil mengupayakan pembatalan keputusan tersebut²⁹ (meskipun kemudian mengakui bahwa perkebunannya telah membawa dampak negatif di sepanjang aliran sungai dan mengusulkan reboisasi untuk memitigasi masalah tersebut).³⁰



Batas konsesi berdasarkan HGU Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 / HGU / BPN / 2011 Surat Keputusan IUP Provinsi Papua No 143/2008, 30 Des 2008.

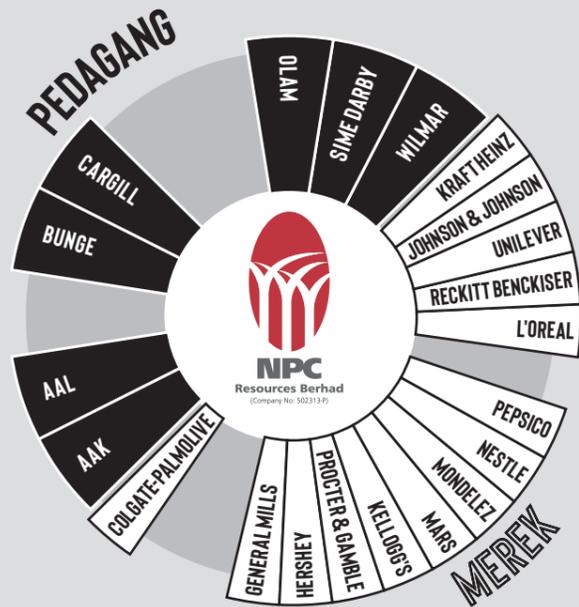
Sumber gambar satelit:
 Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



18 Desember 2017,
 PT Pusaka Agro Lestari (Noble), Papua,
 4°20'47.616"S 136°40'0.096"E
 ©Sukarno/Greenpeace

NPC RESOURCES

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



Struktur grup NPC Resources tidak jelas – tampaknya mereka memiliki kepemilikan konsesi secara formal bersama dengan kontrol manajerial atas konsesi-konsesi berikut. Pemilik terbesar NPC Resources adalah Loo Pang Kee dan Wong Siew Ying.¹

NPC Resources bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan publik NDPE. Grup ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Situs web grup ini mencantumkan 11.669 Ha 'lahan perkebunan' di Malaysia dan 46.564 Ha di Indonesia (Kalimantan Timur), di mana 18.296 Ha di antaranya telah ditanami.² Penelitian Aidenvironment telah mengidentifikasi konsesi yang dikelola dan dimiliki sebagian oleh NPC Resources yang mencakup area seluas 78.900 Ha di Kalimantan Timur.³

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

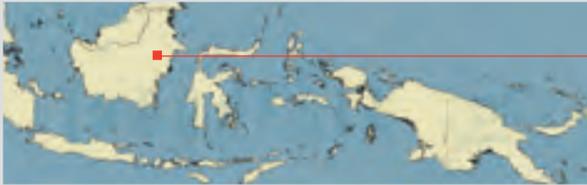
Bunge dan Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



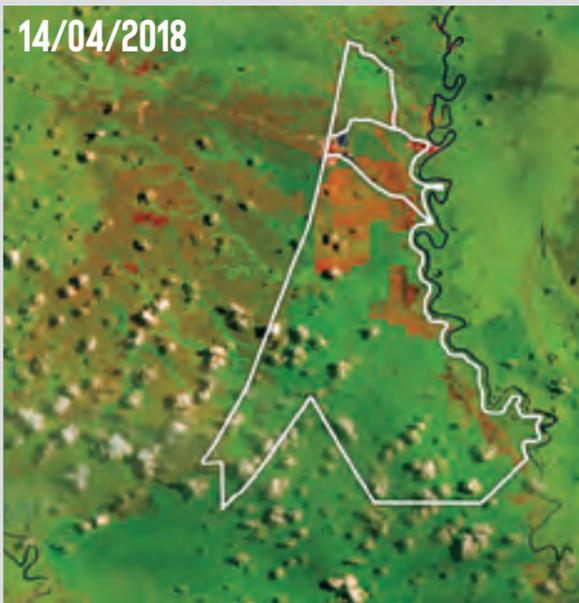
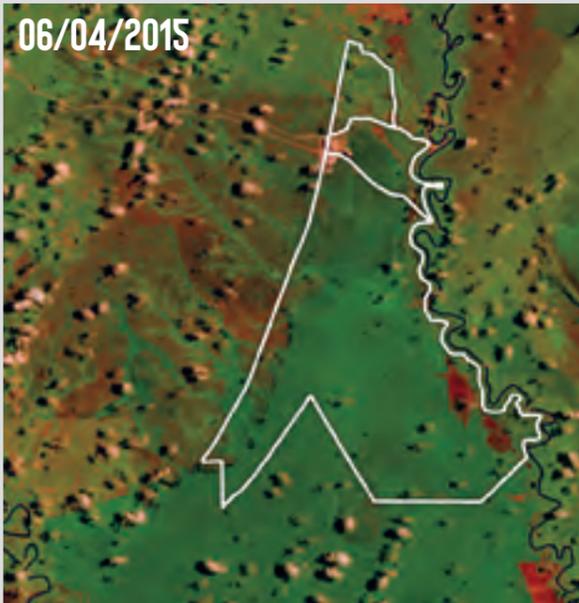
22 Agustus 2017
PT Sumber Alam Selaras (NPC), Kalimantan,
0°10'57.162"N 116°38'42.132"E
© Aidenvironment

KONSESI:
**PT SUMBER
 ALAM SELARAS
 (PT SAS), KABUPATEN
 KUTAI TIMUR,
 KALIMANTAN TIMUR**

BUKAAN:
 3,577ha



PT SAS dikelola (bukan dimiliki) oleh NPC Resources.
 NPC Resources membuka sekitar 3.580 Ha hutan di
 konsesi PT SAS antara tanggal 6 April 2015 dan 14 April
 2018, termasuk habitat orangutan dan hutan lahan gambut
 yang terletak dalam zona perlindungan gambut pemerintah.



Batas konsesi berdasarkan
 peta HCU dari Badan Pertanahan
 Nasional Indonesia (BPN) dan
 pemerintah daerah.

Sumber gambar satelit:
 Landsat 8 milik Survei
 Geologi AS.



6 Maret 2016,
 PT Sumber Alam Selaras (NPC), Kalimantan,
 0°13'1.64"N; 116°37'16.52"E
 © Aidenviroment



6 Maret 2016,
 PT Sumber Alam Selaras (NPC), Kalimantan,
 0°13'10.72"N; 116°37'23.90"E
 © Aidenviroment

POSCO (POSCO DAEWOO CORPORATION)

PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: PT BIO INTI AGRINDO

POSCO adalah perusahaan multinasional Korea Selatan yang bergerak di bidang produksi baja, migas dan pertambangan, serta minyak sawit. Yang menjabat sebagai CEO POSCO Daewoo Corporation saat ini adalah Young-Sang Kim.¹

PT BIA masuk anggota RSPO pada bulan Juli 2018.² Mereka tidak memiliki kebijakan NDPE publik. Kelompok usaha ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Kelompok usaha ini memegang satu konsesi di Papua, seluas 36.401 Ha.³ Minyak sawit dari konsesi ini sekarang diyakini telah dan terus memasuki pasar.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada 13 September, POSCO menjawab, menyatakan bahwa 'PT BIA akan mempublikasikan peta termasuk batas-batas konsesi dan lokasi pabrik dalam format digital melalui situs webnya'. Ia menambahkan bahwa pembukaan lahan telah dihentikan sementara sejak Oktober 2017 'sampai penilaian yang tepat dan perencanaan penggunaan lahan diselesaikan', sebagai bagian dari mana ia sedang 'mengeksplorasi mekanisme yang kredibel, termasuk RSPO's Remediation and Compensation Plan', dan sedang dalam 'proses keterlibatan dengan mitra bereputasi yang berpengalaman dalam implementasi NDPE.' Ia mengklaim kebakaran pada tahun 2015 dihasilkan dari 'pembakaran praktek oleh pihak ketiga', dan bahwa 'Dinas Kehutanan Kabupaten Merauke ... membuat kesimpulan bahwa insiden itu adalah kecelakaan'. Ia menambahkan bahwa PT BIA tidak memiliki kebijakan pembakaran dan peralatan pemadam kebakaran dan personel.

TANGGAPAN PASAR

Nestlé dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.



18 Desember 2017,
PT Bio Inti Agrindo (POSCO), Papua,
6°59'5.628"S 140°53'25.35"E
© Sukarno/Greenpeace

KONSESI:
PT BIO INTI
AGRINDO (PT BIA),
PROVINSI PAPUA,
DISTRIK MERAUKE

BUKAAN:
 15,385ha



0 2 4 6 8 KM
 Scale 1:480,000



PT BIA membuka sekitar 15.385 Ha hutan antara tanggal 25 Januari 2015 dan 28 Juli 2018, hampir sepertiga di antaranya adalah hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK.

Analisis satelit oleh Aidenvironment mengungkapkan keberadaan 158 titik api di blok timur konsesi pada bulan September dan Oktober 2015, yang terkonsentrasi di area yang digunduli awal tahun itu.⁴ Analisis yang diterbitkan oleh situs web awasMIFEE menunjukkan pola yang sama di tahun-tahun sebelumnya.⁵ Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan mungkin secara sistematis menggunakan api selama proses pembukaan lahannya.

Batas konsesi berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara, referensi SK.572/MENHUT-II/2009.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



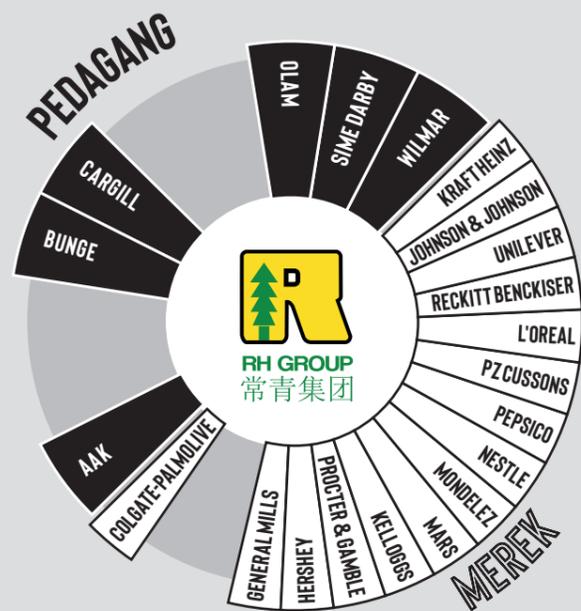
18 Desember 2017,
 PT Bio Inti Agrindo (POSCO), Papua,
 7°1'57.786"S 140°54'14.742"E
 © Sukarno/Greenpeace



18 Desember 2017,
 PT Bio Inti Agrindo (POSCO), Papua,
 7°1'57.786"S 140°54'14.742"E
 © Sukarno/Greenpeace

RIMBUNAN HIJAU

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: RIMBUNAN SAWIT BHD, JAYA TIASA HOLDINGS BHD, SUBUR TIASA HOLDINGS BHD, MAFRICA CORPORATION SDN BHD AND GILFORD LTD

Rimbunan Hijau adalah kelompok usaha milik keluarga, yang dimiliki oleh keluarga Tiong. Yang menjabat sebagai CEO adalah Tiong Hiew King. Konsesi yang diketahui tampaknya memiliki struktur kepemilikan formal. Awalnya merupakan perusahaan penebangan kayu, Rimbunan Hijau kini juga bergerak di bidang minyak sawit, media, bubur kertas dan usaha lainnya.¹

Rimbunan Hijau bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE publik. Kelompok usaha ini tidak

menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Rimbunan Hijau adalah perusahaan minyak sawit terbesar di Sarawak, Malaysia, dengan landbank diperkirakan sedikitnya mencapai 220.000 Ha di negara bagian tersebut. Konsesi-konsesi minyak sawit dipegang melalui berbagai perusahaan. Jaya Tiasa Holdings Bhd memiliki landbank seluas 83.483 Ha di Malaysia, dengan 69.652 Ha di antaranya sudah ditanami per bulan Juni 2017.² Rimbunan Sawit Bhd menguasai 92.312 Ha, di mana 55.110 Ha di antaranya telah ditanam per tanggal 31 Desember 2016.³ Subur Tiasa Holdings Bhd memiliki landbank seluas 28.743 Ha, di mana 11.080 Ha di antaranya telah ditanami per tanggal 31 Juli 2016.⁴ Ketiga perusahaan di atas terdaftar di Bursa Malaysia, tetapi tidak banyak data tersedia mengenai perusahaan keempat yang tidak terdaftar, yaitu Mafrica Corporation Sdn Bhd.⁵ Aidenvironment telah mengidentifikasi sebuah landbank kelapa sawit seluas setidaknya 20.000 Ha untuk Mafrica.⁶

Di Papua Nugini, anak perusahaan Rimbunan Hijau Gilford Ltd memiliki area konsesi seluas 42.000 Ha, di mana 31.000 Ha di antaranya dialokasikan untuk pengembangan kelapa sawit.⁷

Antara bulan Juni 2016 dan Juli 2017, pedagang/pengilangan yang membeli dari pabrik minyak sawit Rimbunan Hijau di Sarawak termasuk Wilmar, Cargill dan IOI (yang terakhir melalui Wilmar, Cargill dan kilang minyak sawit BLD Plantation).⁸

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI: EASTERN EDEN ESTATE (EEE), SARAWAK, MALAYSIA

BUKAAN: 923ha



EEE dimiliki oleh Jaya Tiasa. Citra satelit belum lengkap, namun menunjukkan bahwa antara tanggal 30 Juni 2016 dan 22 Juni 2018 perusahaan tersebut membuka lebih dari 1.480 Ha hutan termasuk lahan gambut potensial dalam konsesi EEE.

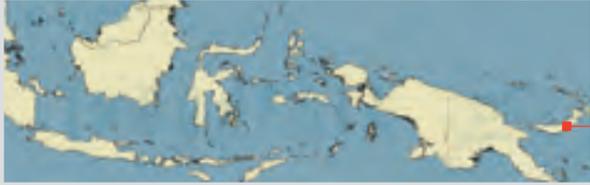
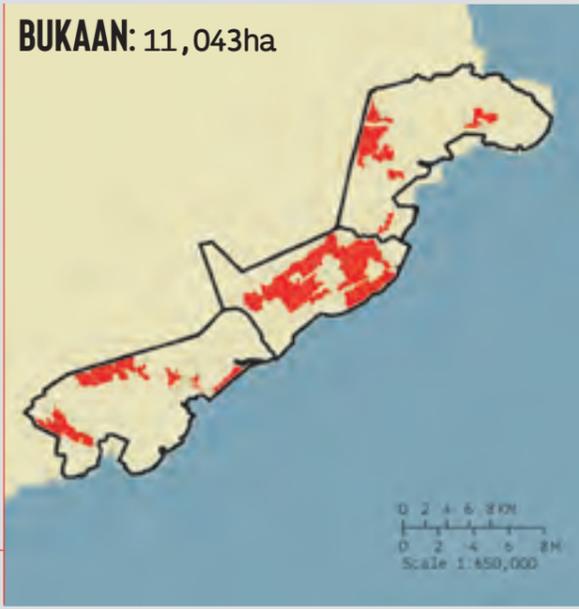


Batas konsesi berdasarkan peta dari penilaian dampak lingkungan, yang diperoleh dari perpustakaan Dewan Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup Sarawak (NREB).¹⁰

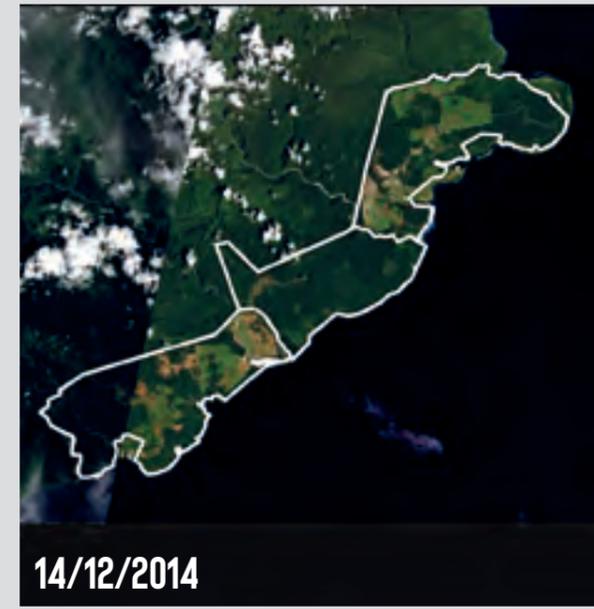
Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KONSESI:
GILFORD LTD,
PAPUA NUGINI,
PROVINSI EAST
NEW BRITAIN

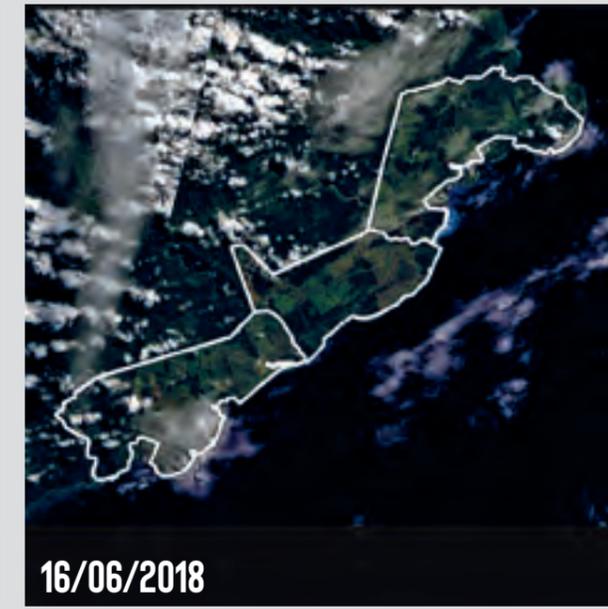
BUKAAN: 11,043ha



Antara tanggal 14 Desember 2014 dan 16 Juni 2018 Gilford Ltd membuka sekitar 11.040 Ha hutan.



14/12/2014



16/06/2018

Batas konsesi berdasarkan Special Agriculture Business Lease (SABL), seperti yang dijelaskan dalam laporan Global Witness 'Stained trade'.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

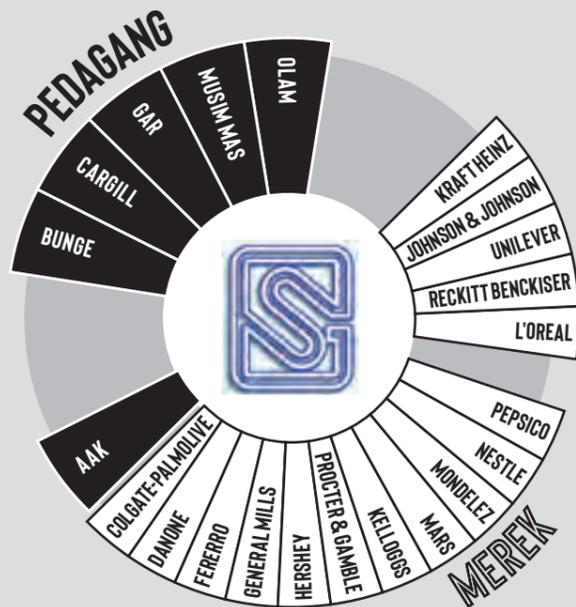


2016, Gilford Ltd (Rimbunan Hijau), Pomio, Papua New Guinea



2016, Gilford Ltd (Rimbunan Hijau), Pomio, Papua New Guinea ©Alessio Bariviera

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: INDOFOOD (TERMASUK INDOAGRI DAN BISNIS HILIR LAINNYA) DAN KEPENTINGAN USAHA PERKEBUNAN LAINNYA YANG DIPEGANG SECARA TERPISAH OLEH ANTHONI SALIM ATAU REKAN-REKANNYA. INI TERMASUK SEJUMLAH PERUSAHAAN YANG DISEBUT SECARA KOLEKTIF SEBAGAI INDO GUNTA GROUP.

Salim Group memiliki struktur informal yang kompleks, dengan segmen formal bersama berbagai segmen informal yang terhubung dengan operasional, manajerial dan mungkin keuangan kelompok.

Per tanggal 31 Desember 2017, Anthoni Salim memegang 44,35% saham First Pacific Company Ltd yang terdaftar di Hong Kong.¹ Per tanggal 20 Maret 2018, First Pacific memegang 50,1% kepemilikan di Indofood dan 62,8% kepemilikan di Indofood Agri Resources Ltd (IndoAgri).²

Anak perusahaan IndoAgri, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), yang mencakup seluruh konsesi kelapa sawitnya di Indonesia, adalah anggota RSPO, begitu juga dengan anak perusahaan SIMP, PT PP London Sumatra (Lonsum). IndoAgri memiliki kebijakan NDPE parsial yang ruang lingkup dan substansi tidak memadai.³ Perusahaan minyak sawit lain yang terkait dengan Salim bukan anggota RSPO dan tidak memiliki kebijakan NDPE publik. Tidak ada perusahaan Salim yang menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Dalam ACOP 2016 yang diserahkan ke RSPO, SIMP mengklaim memiliki total landbank seluas 364.195 Ha, termasuk 56.715 Ha di antaranya di bawah skema petani plasma.⁴ IndoAgri melaporkan total area tertanam seluas 300.387 Ha pada tanggal 31 Desember 2017, yang cocok dengan area yang tercantum dalam laporan tahunan SIMP.⁵

Anthoni Salim juga memiliki saham di bisnis kelapa sawit yang bukan bagian dari Indofood. Sebagai contoh, ia menguasai 50,5% kepemilikan PT Duta Rendra Mulya (PT DRM; lihat studi kasus), yang memiliki izin lokasi untuk lahan seluas 7.400 Ha di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.⁶

Selain usaha-usaha ini, perusahaan rekanan Anthoni Salim yang aktif bergerak di berbagai sektor termasuk properti, transportasi dan makanan melakukan transaksi dengan total US\$ 148 juta pada tahun 2017 dengan bisnis perkebunan dari kelompok Indofood.⁷

Profil registri perusahaan mengungkapkan setidaknya terdapat 25 perusahaan perkebunan yang memiliki konsesi di provinsi Kalimantan dan Papua,



27 Juli 2018, PT Bintuni Agro Prima Perkasa (Salim), Papua

termasuk PT DRM, yang satu sama lain sebagian besar memiliki direktur dan komisaris yang sama.⁸ Selain saham mayoritasnya di PT DRM, Anthoni Salim tidak memiliki saham kepemilikan di perusahaan-perusahaan ini;⁹ namun, memiliki pengaruh yang jelas terhadap orang-orang dari perusahaan-perusahaan ini melalui rekanannya, sebagaimana diuraikan dalam laporan Greenpeace International 2017 'Dirty Bankers'.¹⁰

Pada bulan Agustus 2015, iklan lowongan kerja disebar untuk posisi di provinsi Kalimantan Barat dan Papua Barat, yang mengacu pada kelompok Indo Gunta (atau Indogunta);¹¹ iklan tersebut muncul di atas kertas dengan kop PT Gunta Samba, salah satu anak perusahaan IndoAgri/SIMP.¹² Indo Gunta Group kini tampaknya menjadi nama operasional kelompok Salim untuk 25 perusahaan perkebunan non-IndoAgri yang disebutkan di atas, di mana banyak dari perusahaan-perusahaan ini teramati menggunakan nama tersebut (misalnya pada staf profil LinkedIn atau pada papan nama di lokasi perkebunan). Bukti-bukti kaitan kelompok ini termasuk berkantor di gedung yang sama dengan PT Gunta Samba dan perusahaan induknya PT Mega Citra Perdana: iklan lowongan kerja tahun 2017 pada kertas berkop Indo Gunta yang dipasang di situs web Universitas Lampung memberikan alamatnya sebagai Kompleks Perkantoran Duta Merlin B/22, Jalan Gajah Mada 3-5, Gambir, Jakarta Pusat,¹³ yang merupakan

alamat terdaftar untuk PT Gunta Samba¹⁴ dan tercantum dalam laporan tahunan SIMP 2013, 2014 dan 2015 sebagai alamat PT Mega Citra Perdana.¹⁵ Ini juga merupakan alamat terdaftar dari PT Gunta Samba Jaya,¹⁶ salah satu dari 25 perusahaan perkebunan Indo Gunta yang terhubung dengan Anthoni Salim melalui rekanannya.

Melalui analisis citra satelit, tampak penggundulan hutan terjadi baru-baru ini di konsesi PT Anekareksa Internasional, PT Bintuni Agro Prima Perkasa, PT Duta Rendra Mulya, PT Rimbun Sawit Papua, PT Sawit Berkas Sejahtera, PT Sawit Khatulistiwa Lestari dan PT Subur Karunia Raya. Lihat struktur grup di bawah ini untuk kaitan perusahaan-perusahaan ini dengan Salim dan rekan-rekannya.

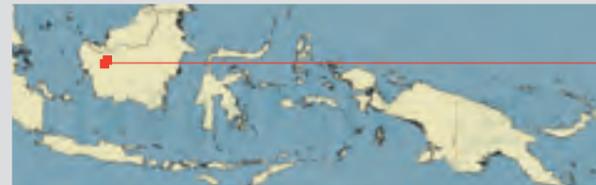
TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

AAK, Bunge, Danone, Ferrero, General Mills, Hershey, Johnson & Johnson, Mars, Mondelez, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Sime Darby dan Unilever memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

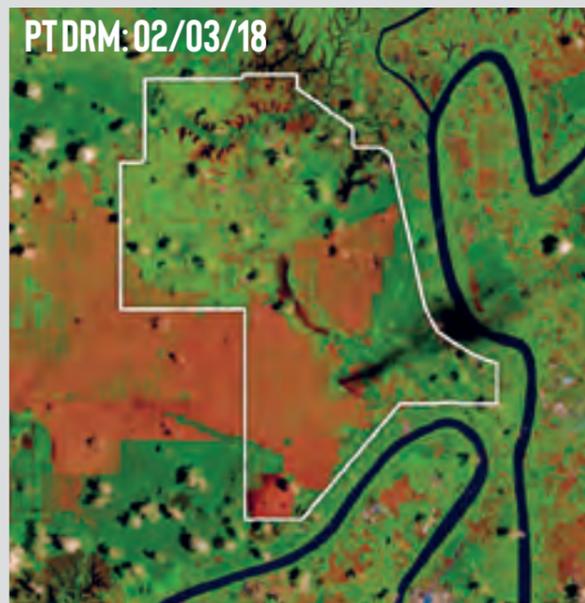
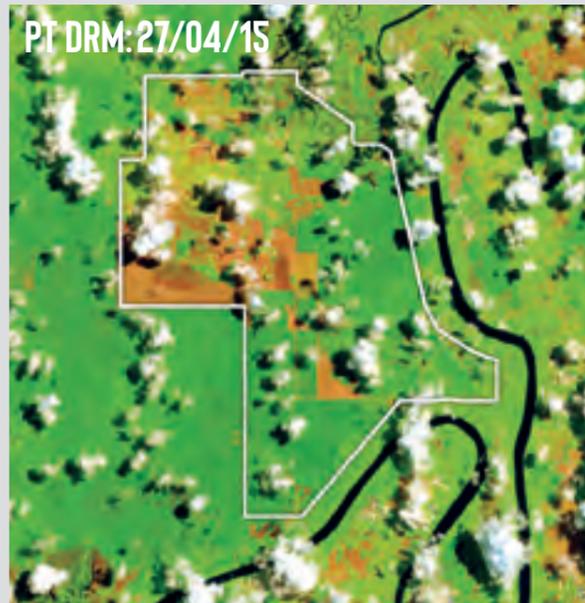
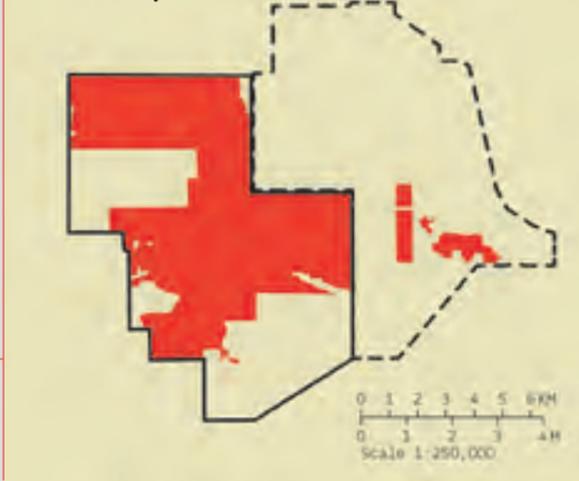
KONSESI:
PT DUTA RENDRA MULYA (PT DRM) DAN PT SAWIT KHATULISTIWA LESTARI, KALIMANTAN BARAT, KABUPATEN SINTANG



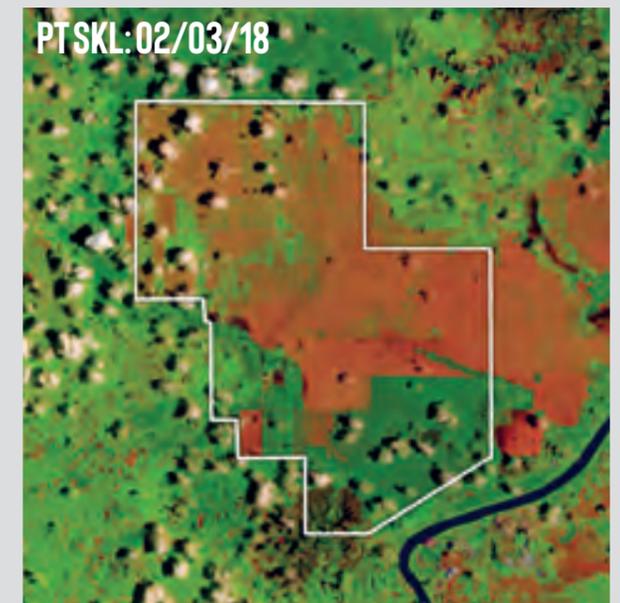
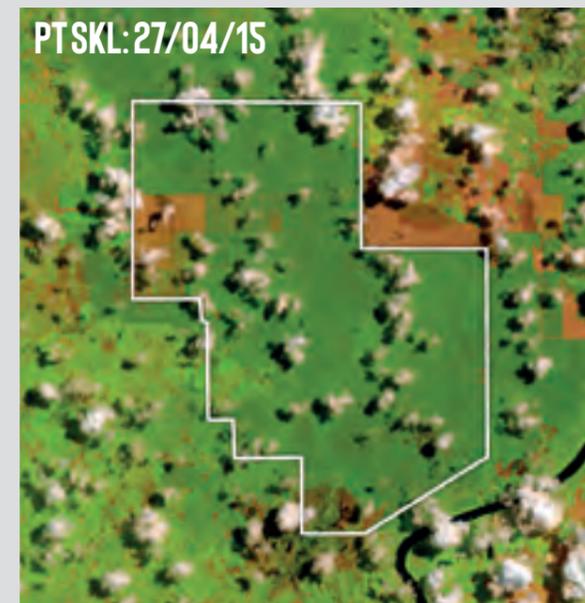
Antara tanggal 27 April 2015 dan 2 Maret 2018, PT DRM membuka sekitar 1.720 Ha hutan, yang sebagian besar terletak di lahan gambut, dan mencakup hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

Di periode yang sama, PT SKL membuka 5.315 Ha hutan, juga mencakup hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

BUKAAN:
 PT DRM: 1,720ha
 PT SKL : 5,314ha



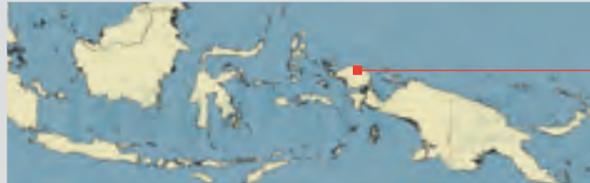
3 November 2017, PT Duta Rendra Mulya (Salim), Kalimantan, 0°14' 57.15"N 111°34' 54.16"E © Aidenvironment



Batas konsesi berdasarkan Izin Lokasi tahun 2014.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KONSESI:
PT BINTUNI AGRO PRIMA PERKASA (PT BAPP),
PROVINSI PAPUA BARAT,
DISTRIK TAMBRAUW
DAN KONSESI-KONSESI LAINNYA DI PAPUA



Grup Salim memperluas operasinya dengan cepat di provinsi Papua dan Papua Barat, menggunakan perusahaan yang diyakini sebagai bagian dari IndoGunta Group. Tiga dari perusahaan-perusahaan ini [PT Rimbun Sawit Papua (PT RSP), PT Subur Karunia Raya dan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (PT BAPP)] telah mulai membuka hutan di konsesi masing-masing, termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai unit hidrologis lahan gambut, yang pembukaannya berarti melanggar regulasi gambut Pemerintah Indonesia tahun 2016.¹⁷

Antara tanggal 13 September 2014 dan 20 Juni 2018, PT BAPP membuka hampir 100 Ha hutan.

Antara tanggal 3 Januari 2015 dan 16 Maret 2018, PT SKR membuka sekitar 800 Ha hutan.

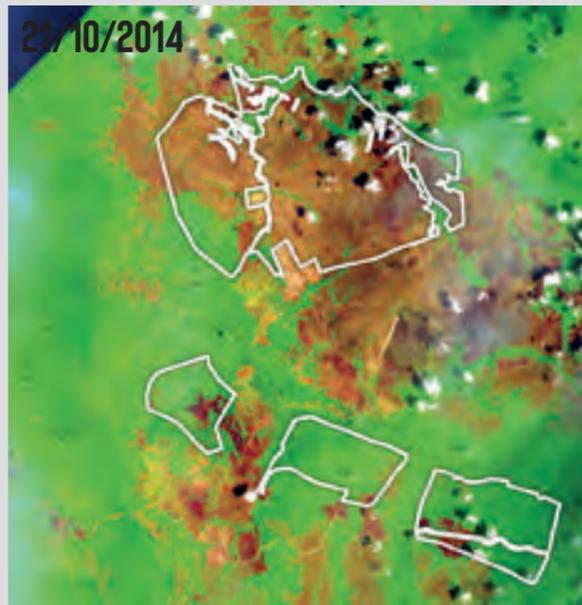
Antara tanggal 31 Oktober 2014 dan 29 Juli 2018, PT RSP membuka lebih dari 2.650 Ha hutan, termasuk hutan lahan gambut dalam zona perlindungan gambut pemerintah dan termasuk hutan primer menurut peta tutupan lahan nasional 2015 KLHK.

Tiga perusahaan lain (PT Menara Wasior, PT Tunas Agung Sejahtera dan PT Permata Nusa Mandiri) diyakini telah memperoleh semua izin utama yang diperlukan untuk pembukaan lahan di konsesi masing-masing, dan setidaknya empat perusahaan terkait Salim lainnya¹⁸ telah diberikan izin lokasi di Papua sejak tahun 2013.

Namun, dalam kasus PT BAPP, bukanlah kelapa sawit yang menjadi tujuan pembukaannya, tetapi jagung.

Concession boundary based on BPN online 2017 SK 873/ Menhut-11/2014.

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



27 Juli 2018, PT Bintuni Agro Prima Perkasa (Salim), Papua

Perusahaan memperoleh Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara dari Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada tanggal 29 September 2014, di hari terakhir masa jabatannya sebagai menteri. Pada hari yang sama ia menandatangani seluruh surat yang memberi izin pelepasan Kawasan Hutan Negara untuk pembangunan oleh berbagai perusahaan perkebunan; banyak dari surat-surat ini bermasalah dan beberapa di antaranya melanggar peraturan menteri itu sendiri.¹⁹ Tujuan yang dinyatakan dari surat pelepasan Kawasan hutan tersebut adalah untuk memungkinkan pengembangan perkebunan kelapa sawit; namun mungkin karena penentangan terhadap minyak sawit dari masyarakat Mpur di Lembah Kebar, perusahaan tersebut sebaliknya mengajukan permohonan kepada Bupati Kabupaten Tambrauw untuk izin lokasi bagi budidaya tanaman pangan (kedelai, kacang tanah dan jagung) di tanah yang sama, yang dikeluarkan pada bulan September 2015,²⁰ di hari yang sama dengan penerbitan izin usaha.²¹ Penerbitan ketiga dokumen itu sangat tidak teratur: Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara seharusnya tidak dapat diterbitkan sebelum perusahaan memiliki izin usaha,²² yang juga tidak dapat diterbitkan sebelum analisis dampak lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dan disetujui.²³ Kenyataannya proses AMDAL masih belum selesai meskipun pembukaan lahan dan penanaman telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Ini adalah masalah serius di Lembah Kebar, yang merupakan ekosistem campuran unik dari hutan dan padang rumput yang berbatasan dengan kawasan hutan lindung, dan terletak di kawasan hulu sistem sungai utama.

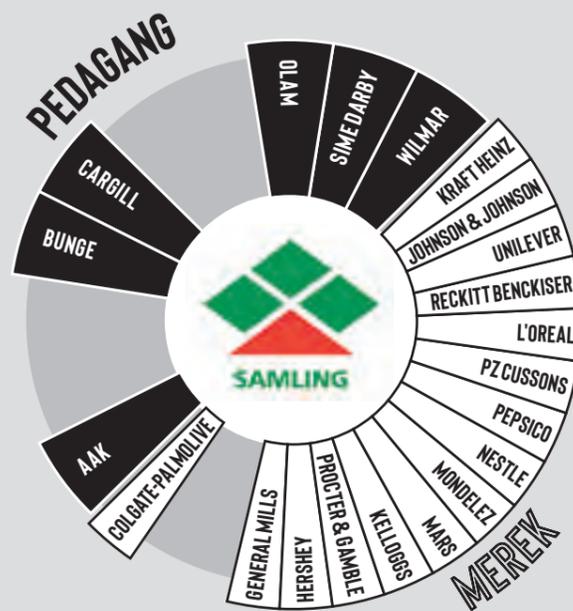
Agaknya segera setelah memperoleh izin usaha, perwakilan PT BAPP membujuk marga-marga setempat

untuk menyerahkan hak adat mereka atas tanah tersebut, yang luasnya mencapai 19.368 Ha. Wawancara dengan para pemilik tanah adat di Lembah Kebar menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengikuti proses PADIATAPA yang valid.²⁴ Dalam satu-satunya pertemuan mereka dengan perusahaan, para ketua marga diduga diperdayai agar meyakini bahwa sebagai imbalan dari sedikit kompensasi keuangan yang ditawarkan mereka memberikan izin, bukan untuk pengembangan pertanian komersial oleh perusahaan yang sama yang sebelumnya mengusulkan penanaman kelapa sawit, namun untuk sebuah uji coba dua tahun oleh dinas pertanian kabupaten yang hanya akan melibatkan area-area padang rumput kecil. Mereka tidak diperlihatkan peta apa pun, tidak diberi salinan dokumen yang dibujuk untuk ditandatangani, dan tidak diberitahu bahwa perusahaan tersebut memiliki izin yang mencakup seluruh wilayah lembah Kebar. Perusahaan kemudian berhasil memperoleh hak guna usaha (HGU; lihat Annex 1)²⁵ dan mulai membuka, tidak hanya padang rumput namun juga hutan-hutan leluhur marga-marga tersebut.

Marga-marga ini telah memrotos hilangnya hutan-hutan dan kebun-kebun sagu mereka, meskipun kehadiran Brimob bersenjata telah menciptakan suasana penuh intimidasi.²⁶ Pada tanggal 17 November 2017, warga suku Mpur mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, dan menghasilkan pernyataan bersama tentang penentangan terhadap perusahaan, yang telah menarik dukungan Sinode Gereja Kristen Evangelis di Tanah Papua dan Komisi Hak Asasi Manusia Asia.²⁷ Beberapa marga yang terdampak telah berusaha mengembalikan uang yang mereka terima, namun perusahaan menolak menerimanya.²⁸

SAMLING

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAWA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: GLENEALY PLANTATIONS SDN BHD

Samling adalah kelompok usaha milik keluarga, yang dimiliki oleh keluarga Yaw: Yaw Teck Seng adalah pendiri¹ dan Yaw Chee Ming menjabat sebagai CEO Samling dan direktur utama Glenealy Plantations.² Konsepsi yang diketahui tampaknya memiliki struktur kepemilikan formal.

Samling dan Glenealy bukan anggota RSPO dan kelompok usaha tersebut tidak memiliki kebijakan NDPE publik. Kelompok ini tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Glenealy mengklaim total 'area perkebunan' seluas 68.679 Ha di Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Papua Nugini per bulan Maret 2015, di mana 14.545 Ha di antaranya berada di Indonesia. Dari jumlah ini, 7.682 Ha telah ditanami, di Sumatra dan Kalimantan.³ Penelitian Aidenvironment telah mengidentifikasi total landbank seluas 111.600-116.600 Ha, termasuk 42.100 Ha di Indonesia.⁴

Pelacak keluhan Wilmar menyatakan bahwa 'Samling telah ... berkomitmen untuk melakukan moratorium terhadap aktivitas pembukaan lahan di operasi mereka di Malaysia dan Indonesia,'⁵ meskipun tidak ada komitmen seperti itu yang muncul di situs web kelompok ini.

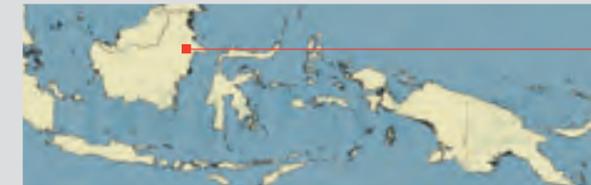
TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

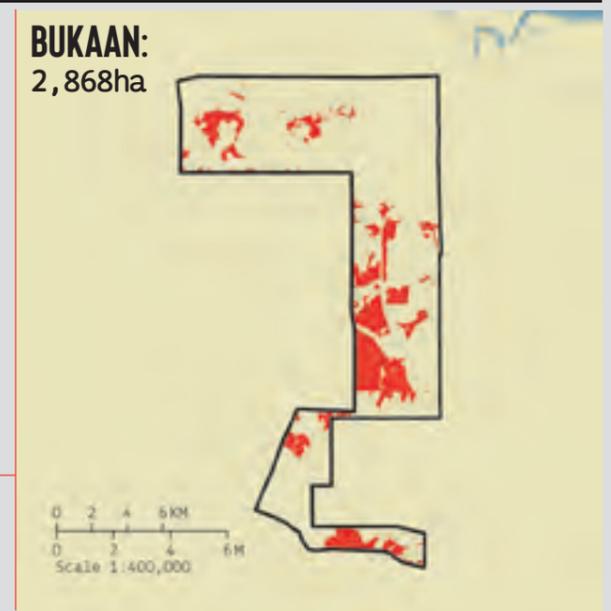
TANGGAPAN PASAR

Bunge dan Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

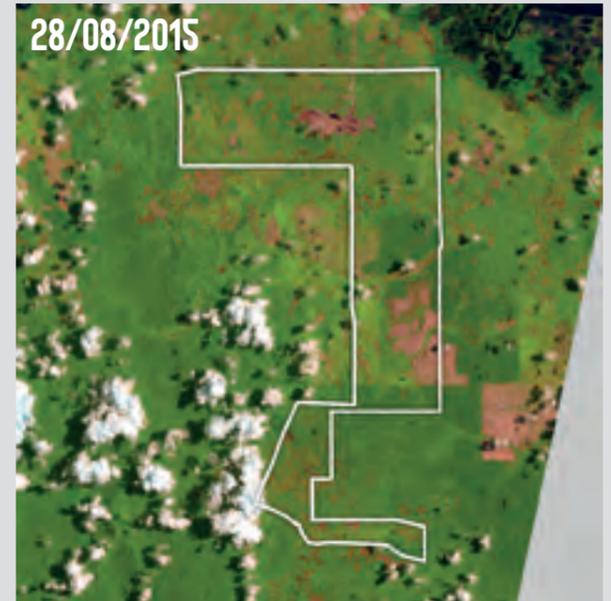
KONSESI: PT TUNAS BORNEO PLANTATION (PT TBP), KALIMANTAN UTARA



BUKAAN:
2,868ha



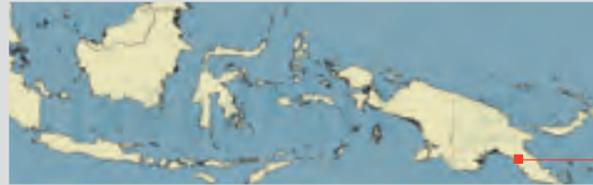
Sekitar 2.867 Ha hutan telah dibuka di dalam konsesi PT TBP antara tahun 2015 dan bulan Juni 2017, termasuk hutan lahan gambut potensial.



Batas konsesi berdasarkan peta dari Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (2012).

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KONSESI: PROJEK OME OME, PAPUA NUGINI, PROVINSI CENTRAL



Antara tanggal 19 April 2015 dan 22 Februari 2018, sekitar 1.625 Ha hutan dibuka dalam Proyek Ome Ome.

Analisis satelit terhadap data titik api kebakaran menunjukkan korelasi yang kuat antara pembukaan hutan di konsesi ini dan merebaknya kebakaran. Antara tahun 2014 dan 2017, tercatat keberadaan 74 titik api di dalam konsesi, yang hampir semuanya berada dalam area yang telah dibuka sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin telah menggunakan api secara sengaja selama proses pembukaan lahannya.

Pelacak keluhan (grievance tracker) Wilmar mencatat bahwa 'Samling tengah dalam proses mendivestasi konsesi PNG mereka pada tahun 2017, dan proses divestasi secara resmi telah selesai pada awal tahun 2018'.⁷ Dengan kata lain, setelah menggunduli banyak lahan - dan mungkin mengambil untung dari penjualan kayunya - Samling telah menjual operasinya.

Penjualan yang dilaporkan ini tidak menghapus tanggung jawab Samling atas deforestasi yang ditimbulkannya. Jika ada, penjualan tersebut bahkan membuat situasi menjadi lebih buruk: kelompok usaha ini sekarang memiliki sedikit ruang untuk memperbaiki pelanggaran NDPE-nya. Mengizinkan Samling untuk terus memasok minyak sawit ke perusahaan-perusahaan yang memiliki kebijakan NDPE tanpa mengatasi deforestasi yang dilakukannya di Proyek Ome Ome akan mendorong kelompok produsen lain untuk juga menghindari tanggung jawab mereka dengan menjual konsesinya yang kontroversial.

BUKAAN:
1,623ha



Data batas konsesi tidak tersedia - lokasi didasarkan pada artikel penelitian⁸ dan lokasi pembukaan lahan

Sumber gambar satelit:
Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

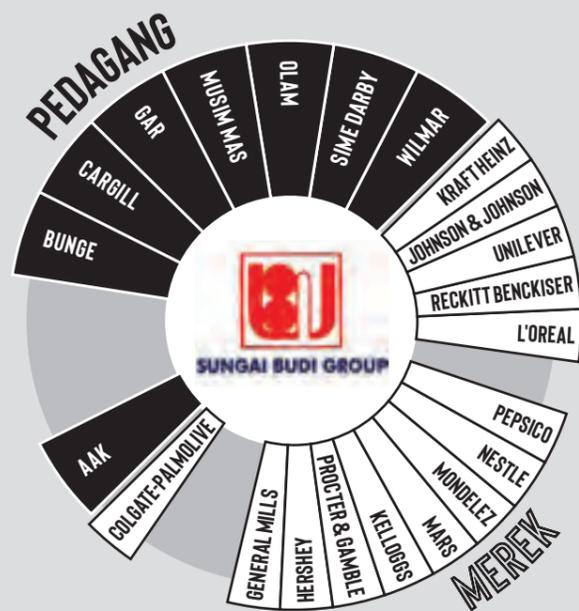


SUNGAI BUDI GROUP



18 November 2017, PT Samora Usaha Jaya (Sungai Budi), Sumatra, 3°21'41.06"S 105°27'8.47"E © Aidenvironment

HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAWA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK

Sungai Budi adalah grup milik keluarga, yang dikendalikan oleh keluarga Widarto Oey. Koneksi yang diketahui tampaknya memiliki struktur kepemilikan formal.

Anak perusahaan Sungai Budi, PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBL) adalah anggota RSPO. perusahaan ini tidak memiliki kebijakan publik NDPE dan tidak menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

Situs web TBL menunjukkan total landbank seluas 95.393 Ha untuk kelapa sawit, yang terletak di Sumatra Selatan, Lampung dan Kalimantan Barat.¹ Penyerahan ACOP 2016 perusahaan ke RSPO hanya mencantumkan 23.375 Ha dan tidak menyebutkan lahan di Kalimantan Barat,² ini menunjukkan bahwa TBL melaporkan landbank yang telah dipangkas kepada RSPO.

Pada bulan November 2016, perusahaan perkebunan PT Dinamika Graha Sarana (PT DGS, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemegang saham pengendali TBL) dan PT Samora Usaha Jaya (PT SUJ, 99% dimiliki oleh TBL) menjadi subyek investigasi KLHK (yang tertunda).³ PT DGS memperoleh izin pelepasan Kawasan hutan pada bulan Mei 2012 untuk mengembangkan perkebunan tebu.⁴ Namun, hutan yang dibebaskan ini dipecah ke PT DGS dan PT SUJ, dan PT SUJ mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit (lihat studi kasus di bawah). PT SUJ memiliki landbank seluas 27.553 Ha menurut situs TBL.⁵

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberi kesempatan bagi kelompok ini untuk memberi tanggapan sebelum laporan ini dipublikasi. Tidak ada tanggapan dari kelompok tersebut.

TANGGAPAN PASAR

Bunge, Johnson & Johnson, Mars, Reckitt Benckiser and Wilmar memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI: PT SAMORA USAHA JAYA (PT SUJ), KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, SUMATRA SELATAN



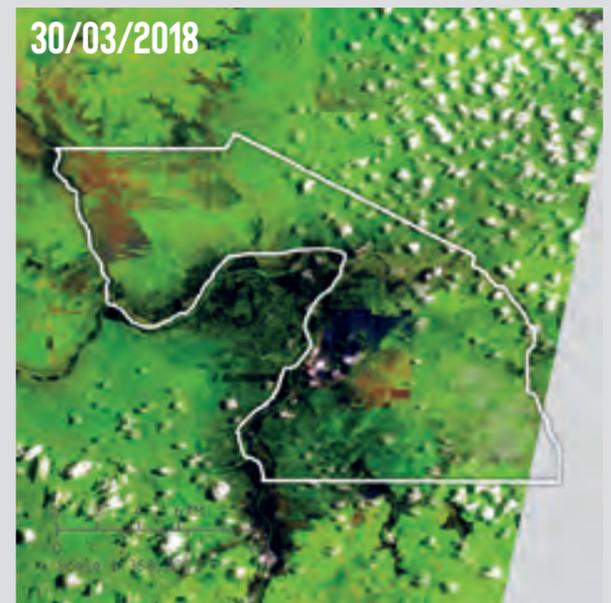
BUKAAN: 5,535ha



Scale 1:350,000

Antara tanggal 26 Juni 2015 dan 30 Maret 2018, PT SUJ membuka sekitar 5.535 Ha hutan, yang banyak di antaranya merupakan hutan lahan gambut termasuk yang terletak dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

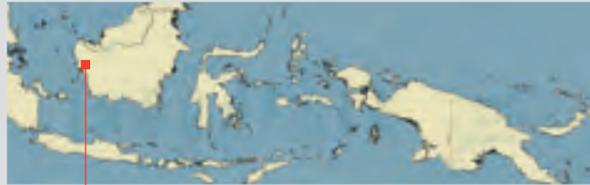
Meskipun TBL mencantumkan PT SUJ sebagai perusahaan kelapa sawit di situs webnya,⁶ perusahaan rupanya juga menanam tebu, seperti yang ditunjukkan oleh foto di bawah ini.



Batas konsesi berdasarkan Surat Pelepasan Kawasan Hutan Negara SK. 249/MENHUT-II/2012 (untuk PT Dinamika Graha Sarana).

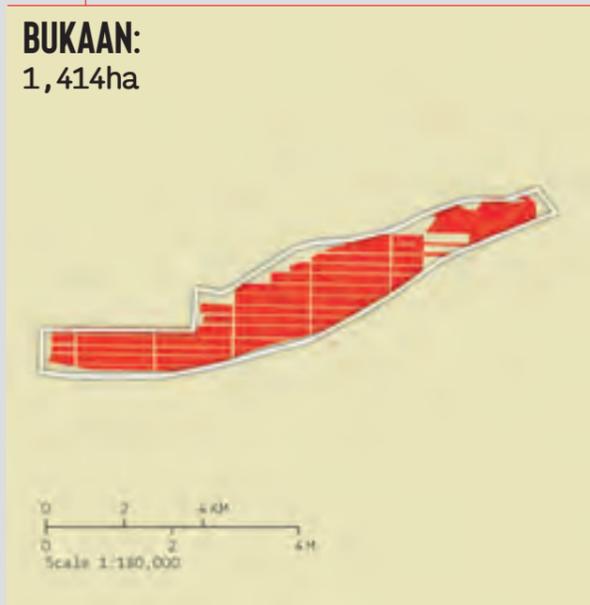
Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.

KONSESI:
**PT SOLUSI JAYA
 PERKASA (PT SJP),
 KABUPATEN KUBU RAYA,
 KALIMANTAN BARAT**



Antara tanggal 4 Mei 2015 dan 10 April 2018, PT SJP membuka sekitar 1.415 Ha hutan lahan gambut, termasuk yang terletak dalam zona perlindungan gambut pemerintah.

BUKAAN:
 1,414ha



Batas konsesi berdasarkan informasi yang diberikan perusahaan kepada RSP0.

Satellite image sources: Landsat 8 courtesy of the U.S. Geological Survey.



10 November 2017, PT Solusi Jaya Perkasa (Sungai Budi), Kalimantan, 0°16'26.77"S; 109°54'41.17"E © Aidenvironment

KELUARGA TEE



HUBUNGAN PASAR ANTARA PENJUAL DAN MEREK-MEREK TERNAMA



PERUSAHAAN MINYAK SAWIT UTAMA: BEWANI OIL PALM PLANTATIONS LTD, FAR EAST HOLDINGS BHD DAN PROSPER GROUP

Ini adalah kelompok usaha keluarga di mana perusahaan-perusahaan milik anggota keluarga yang secara formal terpisah berbagi kendali operasional atau manajerial.

Keluarga Tee memegang saham minoritas yang signifikan dari Far East Holdings Berhad (FEHB),¹ yang terdaftar di Bursa Malaysia. Prosper Trading Sdn Bhd, salah satu dari dua pemegang saham utama di FEHB,² mayoritas dimiliki oleh anggota-anggota keluarga Tee,³ yang sepuluh di antaranya juga memiliki saham perorangan di FEHB. Anggota keluarga Tee yang merupakan pemegang saham di FEHB juga memegang jabatan direktur di FEHB: Tee Cheng Hua adalah Direktur Eksekutif, Perkebunan, sementara saudara laki-lakinya Tee Kim Tee dan putranya Tee Lip Teng adalah direktur non-eksekutif.⁴

Menurut laporan tahunan FEHB, operasinya mencakup 13 perkebunan kelapa sawit seluas 21.167 hektar,⁵ enam pabrik kelapa sawit dan satu pabrik biodiesel di Semenanjung Malaysia.⁶ Keluarga ini juga memiliki usaha di dua pabrik minyak sawit Malaysia yang tidak diakui oleh FEHB: Tagar Properties Sdn Bhd (yang mayoritas dimiliki oleh Prosper Trading Sdn Bhd dan yang tentunya terkait dengan FEHB melalui perusahaan itu dan Prosper Palm Oil Mill Sdn Bhd, salah satu perusahaan pengolahan yang diakui FEHB) dan Cheekah-Kemayan Plantations Sdn Bhd (di mana Tee Lip Sin - salah satu pemegang saham FEHB lainnya - memiliki saham minoritas yang signifikan). Meskipun penunjukan jabatannya tampaknya tidak memiliki dasar formal, usaha bisnis ini tampil secara kolektif sebagai 'Prosper Group': laporan tahunan FEHB menggambarkan Tee Cheng Hua sebagai Direktur Eksekutif Senior dan Tee Lip Teng sebagai direktur 'Prosper Group',⁷ sementara Greenpeace telah menerima korespondensi dari seseorang yang mengaku sebagai manajer hukum kelompok usaha ini. Mills (termasuk Tagar Properties Sdn Bhd dan Cheekah-Kemayan Plantations Sdn Bhd⁸) sering disebut-sebut sebagai milik Prosper Group dalam daftar pedagang dan pasokan merek.

Sembilan dari anggota keluarga Tee yang sama yang memiliki saham di FEHB bersama-sama memiliki 100% saham dari perusahaan Papua Nugini, Bewani Oil Palm Plantations Ltd (BOPPL).⁹ Tee Kim Tee menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut.¹⁰ Perusahaan ini menyewakan kembali ke pihak lain konsesi kelapa sawit seluas 139.909 Ha di provinsi Sandaun, Papua Nugini.¹¹ Pada bulan Juni 2018, BOPPL membenarkan bahwa pabriknya Vanimo Green Palm Oil Ltd akan mulai beroperasi;¹² pengiriman pertama dijadwalkan pada bulan Juli.¹³ Seorang wakil dari 'Prosper Group' telah menyangkal kepada Greenpeace bahwa kelompok tersebut memiliki koneksi ke BOPPL, meskipun terdapat hubungan keluarga yang dekat antara usaha-usaha tersebut dan bukti-bukti tidak langsung seperti peluncuran proyek minyak sawit Bewani lewat upacara penandatanganan resmi antara Prosper Palm Oil Products Pemasaran Sdn Bhd (sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Prosper Palm Oil Mill Sdn Bhd dan perusahaan induknya Winners Acres, dan di mana Tee Lip Teng menjabat sebagai salah satu direktornya¹⁴) dan orang-orang dari Bewani (dengan perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama dari 'Prosper Grup', Tee Kim Tee). Yang mencolok, sebuah artikel tentang

6 April 2016,
Bewani Oil Palm Plantations (Tee),
Sandaun, Papua New Guinea



upacara tersebut di situs web Komisi Tinggi Malaysia di Papua Nugini¹⁵ tampaknya telah dipalsukan bertahun-tahun setelah publikasi aslinya¹⁶ untuk menghapus semua referensi ke arah Prosper Group dan Prosper Palm Oil Products Marketing Sdn Bhd, termasuk foto-foto dari liputan pers, dengan kata-kata 'Prosper Palm Oil Products Marketing Sdn Bhd, Kelana Jaya, Selangor' diganti oleh 'Bewani Oil Palm Plantations Limited'.

Bertentangan dengan aturan RSPO mengenai keanggotaan kelompok¹⁷, hanya satu perusahaan yang terkait dengan keluarga Tee menjadi anggota RSPO: Future Prelude Sdn Bhd, operator dari pabrik biodiesel yang disebut di atas yang dimiliki FEHB.¹⁸ Tidak ada perusahaan terkait keluarga Tee yang diketahui memiliki kebijakan NDPE publik. Tak satu pun dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarga Tee menyediakan peta batas-batas konsesinya untuk umum dalam format yang dapat digunakan.

TANGGAPAN KELOMPOK

Greenpeace memberikan kesempatan kepada kelompok perusahaan ini untuk memberi komentar sebelum publikasi laporan ini. Pada 13 September, setelah berakhirnya jendela

waktu untuk berkomentar, Jennifer Lam, manajer hukum untuk Prosper Group, menjawab dan menyatakan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan balasan lengkap tetapi itu 'kami rasa Anda tidak akan melanjutkan dengan publikasi tuduhan tersebut [...] karena mereka secara faktual dan secara hukum tidak benar, jelas mencemarkan nama baik', tanpa merinci. Dia tidak menyediakan peta konsesi untuk operasi grup tersebut.

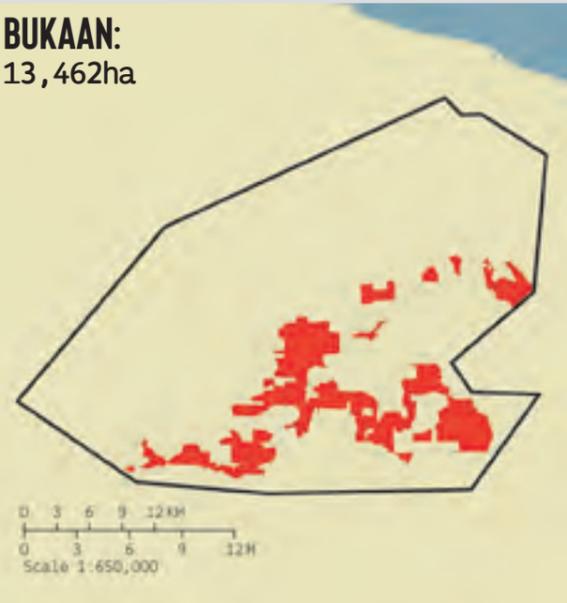
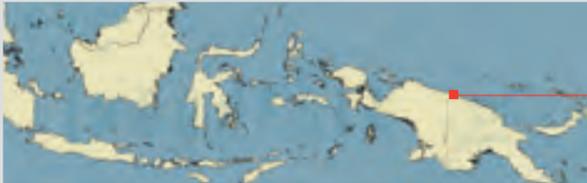
Greenpeace mengambil posisi jelas pada temuan ini didalam laporan ini.

TANGGAPAN PASAR

Mars memberitahu Greenpeace bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengeluarkan kelompok ini dari rantai pasok mereka.

KONSESI:
BEWANI OIL PALM PLANTATIONS LTD (BOPPL), PAPUA NUGINI, PROVINSI SANDAUN

BUKAAN:
 13,462ha



Antara bulan Agustus 2015 dan Oktober 2017, BOPPL membuka 8.100 Ha hutan. Menurut Chain Reaction Research, lebih dari 1.500 Ha mengalami deforestasi pada tahun 2018.²⁰

Konsesi ini dimiliki berdasarkan SABL, sejenis perizinan yang dibatalkan pada bulan Maret 2017 oleh pemerintah Papua Nugini,²¹ meskipun pembatalan ini belum diberlakukan sepenuhnya. Sebuah Komisi Penyelidikan pada tahun 2013 mendapati bahwa dalam kasus BOPPL 'persetujuan atas dasar informasi dari pemilik tanah ... tidak diperoleh sebelum penerbitan (hak) SABL²² dan bahwa 'Area perkebunan, kebun sagu dan tempat berburu serta area-area lain yang penting bagi mayoritas penduduk di area SABL ... tidak dilindungi.'²³ Tanah tersebut digambarkan sebagai '139.909 hektar hutan hujan tropis perawan'²⁴ dan bagaimana izin ini diperoleh dijelaskan secara diplomatik oleh Komisi

Penyelidikan sebagai 'nyaris seperti tindakan kriminal'.²⁵ Komisi ini merekomendasikan agar izin BOPPL tersebut 'dicabut dan ditinjau kembali'.²⁶

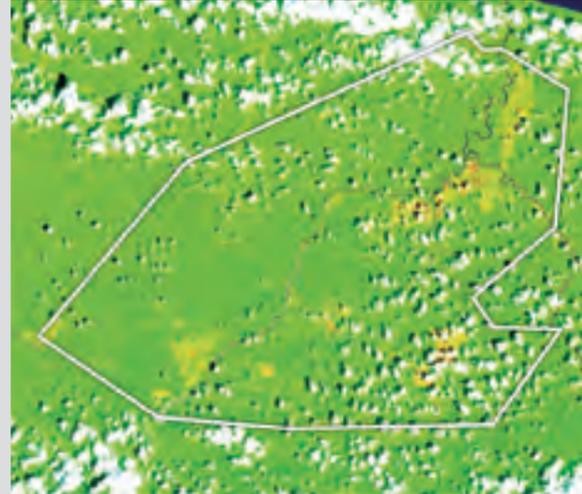
LSM setempat ActNow PNG melaporkan bahwa perusahaan menggunakan kekerasan untuk mendorong masyarakat setempat mengalihkan hak atas tanah mereka,²⁷ dan telah mempublikasikan tuduhan oleh para pemimpin regional bahwa polisi dan tentara telah memberikan dukungan kepada perusahaan.²⁸

Pada tahun 2017, InfoSawit melaporkan bahwa BOPPL mengirim TBS sejauh 76 km melintasi perbatasan internasional dari PNG ke Provinsi Papua di Indonesia ke pabrik milik PT Perkebunan Nusantara II²⁹ - perusahaan perkebunan milik pemerintah Indonesia. Seperti disebutkan di atas, pabrik BOPPL sendiri mungkin sekarang telah diberi kuasa untuk berproduksi, dengan minyak sawit dikirim langsung ke pasar global.



6 April 2016, Bewani Oil Palm Plantations (Tee), Sandaun, Papua New Guinea

25/01/2015



28/07/2018



Batas konsesi berdasarkan Special Agriculture Business Lease (SABL), seperti yang dijelaskan dalam laporan Global Witness 'Stained trade'¹⁹

Sumber gambar satelit: Landsat 8 milik Survei Geologi AS.



7 April 2016, Bewani Oil Palm Plantations (Tee), Sandaun, Papua New Guinea 3°6'19.548"S 141°23'8.892"E



31 Maret 2018, Papua
©Ifansasti/Greenpeace

LAMPIRAN DAN APENDIKS

IZIN HUKUM YANG DIPERLUKAN UNTUK MENDIRIKAN DAN MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PROSES PERIZINAN

Perkebunan kelapa sawit skala industri di Indonesia memerlukan beberapa izin baik izin untuk menetapkan hak atas tanah dan izin untuk mengembangkan lahan. Proses ini mencakup izin, panduan, dan serta dokumen-dokumen hukum berikut:

1. Biasanya, sebuah perseroan terbatas yang bertempat di Indonesia (PT) harus didirikan. Peraturan membatasi area perkebunan kelapa sawit yang dipegang setiap perusahaan atau kelompok perusahaan hingga 20.000 Ha per provinsi,¹ dan sampai 100.000 Ha secara nasional. Luas total maksimum ini dinaikkan dua kali lipat menjadi 40.000 Ha untuk operasi yang berlokasi di provinsi Papua dan Papua Barat. Ada pengecualian untuk koperasi, perusahaan milik negara dan perusahaan publik yang mayoritas sahamnya dipegang oleh publik.²
2. Pemerintah kabupaten dapat menerbitkan dokumen awal dengan dalam beberapa bentuk seperti Izin Prinsip, Izin Info Lahan atau Persetujuan Prinsip Arahan Lokasi yang menunjukkan bahwa perusahaan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan survey di lahan tersebut dan berkonsultasi dengan pemilik tanah.
3. Izin Lokasi diterbitkan oleh bupati atau oleh gubernur di tingkat provinsi jika area di bawah perizinan terletak di dua kabupaten.³ Peraturan menyatakan bahwa baik izin lokasi maupun izin prinsip tidak boleh diterbitkan di luar area di mana izin pembangunan perkebunan diberikan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten.⁴ Izin lokasi sendiri tidak memberikan hak kepemilikan tanah kepada perusahaan;⁵ izin tersebut memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk mendapatkan hak-hak tersebut dari negara atau dari pemilik lahan pribadi, sebagaimana yang mungkin terjadi, melalui pembayaran kompensasi yang sesuai setelah didapatkan kesepakatan dengan pemilik lahan.⁶ Akuisisi (alih kepemilikan) lahan harus didasarkan pada konsultasi dengan pemilik tanah saat ini, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perusahaan perkebunan lain dan masyarakat setempat. Berdasarkan peraturan yang berlaku sejak tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2015, izin lokasi berlaku selama tiga tahun⁷ dengan kemungkinan perpanjangan satu tahun jika pada kasus di mana perusahaan telah memperoleh hak atas lebih dari

50% lahan di dalam area izin lokasinya.⁸ Sebelumnya, menurut peraturan tahun 1993, izin lokasi dibatasi hingga satu tahun, dengan perpanjangan maksimal satu tahun.⁹

Ketika sebuah perusahaan mendapatkan hak atas lebih dari setengah area izin lokasi sebelum periode izin (dan periode perpanjangan) berakhir, maka area izin lokasi akan dikurangi seperlunya dan langkah selanjutnya dalam proses perizinan perkebunan dapat berlanjut. Ketika hak-hak belum didapat atau telah didapat pada area kurang dari setengah area izin, perizinan konsesi tersebut dibatalkan secara perizinan.¹⁰

4. Kawasan Hutan Negara adalah sebuah istilah hukum dan tidak serta merta menunjukkan keberadaan hutan alam di suatu daerah. Jika area sasaran yang ditetapkan di bawah izin lokasi mencakup Kawasan Hutan Negara, KLHK harus menyetujui terlebih dahulu dulu pelepasan Kawasan hutannya melalui Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dan area tersebut harus ditandai dan statusnya diubah menjadi 'Areal Penggunaan Lain' (APL).¹¹ Melakukan pembukaan lahan dan operasi kegiatan lain di dalam Hutan Negara sebelum penyelesaian proses pelepasan kawasan hutan adalah sebuah tindak pidana menurut undang-undang kehutanan.¹² Hanya 'hutan produksi yang dapat dikonversi' (HPK) yang boleh dilepaskan.¹³
5. Izin Lingkungan diterbitkan apabila Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Daerah puas dengan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Analisis dampak lingkungan terdiri dari dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan yang asli (UU Perkebunan Tahun 2004¹⁴), dan dilanjutkan oleh UU Perkebunan Tahun 2014 saat ini,¹⁵ izin usaha perkebunan tidak boleh diberikan kepada perusahaan, sebelum perusahaan tersebut menyelesaikan analisis dampak lingkungan. Sejak tahun 2009 beroperasi kegiatan tanpa izin merupakan sebuah tindak kriminal menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup.¹⁶ UU Perkebunan mewajibkan adanya kegiatan pemantauan lingkungan, analisis risiko dan kepatuhan terhadap rencana kelola lingkungan hidup.¹⁷ UU ini juga mewajibkan pemerintah melibatkan masyarakat dalam

memantau perusahaan,¹⁸ dan mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan menyusun pelaporannya sendiri. UU tersebut menyatakan bahwa pelaporan tersebut 'merupakan informasi publik yang harus dipublikasikan dan dibuat terbuka untuk umum'.¹⁹ Pada UU Lingkungan tahun 2009 juga mencantumkan hak publik untuk mengakses informasi lingkungan hidup, termasuk analisis dampak lingkungan, pemantauan lingkungan dan pemantauan pemerintah terhadap kepatuhan hukum perusahaan.²⁰

6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diterbitkan oleh bupati atau oleh gubernur, apabila area di bawah perizinan terletak di lebih dari satu kabupaten. Izin ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan pembibitan dan melakukan persiapan lahan serta pembukaan lahan di tanah bebas sengketa di area yang dicakup dalam izin lokasi. Izin ini tidak memberikan hak atas tanah namun hanya sekadar izin operasi; beroperasi tanpa izin ini adalah tindak pidana.²¹ Izin usaha perkebunan hanya boleh diterbitkan di atas area yang diizinkan sesuai rencana tata ruang kabupaten,²² dan tidak dapat diterbitkan mendahului izin lingkungan.²³ IUP tidak boleh diterbitkan di atas tanah adat, kecuali apabila persetujuan dari pemilik adatnya telah diperoleh;²⁴ melanggar kebijakan ini dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun.²⁵
7. Plasma adalah nama untuk kebun masyarakat yang harus difasilitasi oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar perkebunannya. Plasma harus mencakup setidaknya 20% dari total luas konsesi perusahaan dan harus didirikan dalam kurun waktu tiga tahun setelah izin usaha perkebunan diperoleh.²⁶ Bantuan pendanaan harus disediakan dalam bentuk kredit, pembagian keuntungan atau skema serupa.
8. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, semua tanah pada akhirnya adalah milik negara.²⁷ Setelah mendapatkan izin lokasi dan menyelesaikan negosiasi akuisisi atas tanah yang akan digunakan untuk membangun perkebunan, perusahaan harus mengajukan permohonan izin penggunaan lahan, yang dikenal sebagai Hak Guna Usaha (HGU).²⁸ HGU adalah hak atas tanah sementara dalam bentuk sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)²⁹ dan berlaku hingga 35

tahun, dan dapat diperpanjang hingga 25 tahun ke depan.³⁰ HGU dapat digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman dan dapat dialihtangankan ke perusahaan lain. HGU hanya dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan perusahaan yang didirikan di Indonesia, termasuk perusahaan investasi asing.

Secara hukum, HGU hanya diberikan di atas lahan yang bukan termasuk kawasan hutan negara (APL; lihat [4] di atas). Ada batasan waktu: perusahaan diharuskan untuk mendapatkan HGU dalam jangka waktu dua tahun setelah mendapatkan izin usaha perkebunan³¹ dan apabila perusahaan telah diwajibkan untuk mendapatkan SK Pelepasan Kawasan Hutan; lihat nomor [4] di atas),³² pembebasan kawasan hutan dapat dibatalkan jika perusahaan gagal memperoleh sertifikat HGU dalam jangka waktu satu tahun.³³

Hak guna usaha harus diperoleh sebelum perusahaan dapat memulai operasi perkebunan.³⁴ Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), yang diperkenalkan oleh pemerintah pada tahun 2011, wajib dipatuhi oleh semua perusahaan perkebunan besar. Standar ini, sebagian besarnya berupaya memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang ada, secara khusus mewajibkan perusahaan untuk mendapatkan sertifikat HGU (kriteria 1.4) dan memuat ketentuan yang jelas tentang persyaratan hukum mengenai tanah dan izin.³⁵

9. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) harus diperoleh perusahaan perkebunan atau kontraktornya sebelum membuka hutan yang masih memiliki tegakan kayu yang layak secara komersial.³⁶ IPK tidak berkaitan langsung dengan Izin Akuisisi Lahan dan Izin Usaha Perkebunan. Untuk mendapatkan IPK, harus dilakukan survei tegakan kayu untuk memperkirakan jumlah iuran yang harus dibayar. Ini termasuk Penggantian Nilai Tegakan dan Dana Reboisasi.³⁷ Berdasarkan survei, perusahaan harus menyetor jaminan bank sebesar 100% dari hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, jika izin lingkungan dan (jika ada) Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang telah diajukan, maka IPK akan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan setempat.



22 September 2017,
Gunung Palung National Park,
Kalimantan
©Sukarno/Greenpeace

LAMPIRAN 2:

IDENTIFIKASI GRUP PRODUSEN DAN PEMILIHAN STUDI KASUS

Profil grup-grup produsen minyak sawit dan studi-studi kasus yang disajikan di sini difokuskan pada keterlibatan grup perusahaan dalam deforestasi dan pembukaan lahan gambut. Analisis spasial menyingkap pelanggaran kebijakan NDPE ini dapat dilakukan dengan cepat dan dari jarak jauh. Perusahaan yang bertanggung jawab dapat memilih untuk segera mengakhiri kegiatan pembukaan lahan. Pelanggaran terhadap komponen sosial dari kebijakan NDPE (termasuk kegagalan untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat yang terkena dampak; pengerahan satuan keamanan untuk memaksa masyarakat; dan penggunaan pekerja anak atau kerja paksa) sama pentingnya dengan deforestasi dan perusakan lahan gambut namun jauh lebih sulit untuk dipantau dan seringkali lebih lambat untuk diperbaiki. Dalam laporan ini disebutkan beberapa masalah sosial di mana informasinya tersedia (misalnya berkaitan dengan PT Austindo Nusantara Jaya); namun, mengidentifikasi menggambarkan pelanggaran semacam itu bukan menjadi tujuan utama dari laporan ini.

Grup-grup produsen yang dibahas dalam laporan ini biasanya dicantumkan di bawah nama grup pedagang yang dikenal, meskipun ini kadang-kadang muncul di bawah tajuk 'Perusahaan minyak sawit utama' dalam kasus di mana grup-grup tersebut juga memiliki kepentingan lain (misalnya, Lembaga Tabung Haji/TH Plantations) atau di mana struktur grup bersangkutan bersifat informal dan keluarga atau individu kunci memiliki kendali atas lebih dari satu perusahaan minyak sawit besar (misalnya Salim/IndoAgri). Daftar grup ini bukanlah daftar yang menyeluruh, dan studi-studi kasus untuk setiap grup perusahaan juga bukanlah tinjauan yang menyeluruh atas pelanggaran-pelanggaran mereka.

Analisis yang mendasari profil dan studi kasus dalam laporan ini terutama berdasarkan pada tinjauan atas informasi yang tersedia untuk publik. Sumber informasi utama yang digunakan termasuk komunikasi kemajuan tahunan milik RSPO (RSPO's Annual Communications of Progress/ACOPs) dan laporan tahunan produsen dan informasi dari pasar saham, serta profil pendirian/pendaftaran perusahaan di Indonesia, Malaysia atau Singapura, yang berisi informasi terkait pemegang saham, komisaris dan direksi saat ini dan sebelumnya juga alamat terdaftar perusahaan. Profil media sosial (misalnya Facebook, Instagram, LinkedIn), laporan media, transkrip dari proses di pengadilan dan sumber domain publik lainnya turut serta digunakan, sementara foto dan kesaksian dari pekerja, warga masyarakat yang terkena dampak dan laporan dari LSM lain turut memberikan bukti-bukti pendukung.

Meskipun telah dilakukan upaya untuk memberikan informasi terkini dan yang mencerminkan struktur kepemilikan saat ini, banyak grup perusahaan produsen yang dibahas di sini seringkali merestrukturisasi kepemilikan atau manajemen perusahaan perkebunan mereka - sebagian mungkin untuk mengaburkan informasi kepemilikan asli dari perusahaan tersebut. Oleh karena itu cakupan kepemilikan penuh grup atas perusahaan perkebunan dan pabrik pengolahannya mungkin berkurang lengkap dari faktanya.

Sebelum laporan ini dipublikasi, Greenpeace menghubungi semua kelompok produsen yang dibahas dalam laporan ini untuk menawarkan kepada mereka kesempatan untuk menanggapi temuan. Tanggapan yang diterima dapat dilihat secara penuh di lokasi berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1GOCTrTgu-LVZsSLm8ToLBBydSHL3uZI?usp=sharing>

LAMPIRAN 3: METODOLOGI PEMETAAN UNTUK LAPORAN INI

Ketersediaan informasi tentang mengenai konsesi untuk publik merupakan salah satu sarana penting untuk menekan korupsi yang dapat memicu deforestasi, memastikan penegakkan prinsip dan penerapan PADIATAPA dan memastikan akuntabilitas di seluruh sektor industri minyak sawit. Peta yang akurat dan tersedia untuk umum yang dapat menunjukkan konsesi milik masing-masing grup perusahaan produsen agar dapat menunjukkan pihak-pihak yang mengelola area hutan - memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi aktor yang bertanggung jawab atas deforestasi, pengembangan pembukaan lahan gambut dan serta konflik sosial. Menggabungkan peta-peta tersebut dengan citra satelit memungkinkan dilakukannya analisis dan pemantauan yang lebih baik terhadap pembukaan lahan, penanaman dan kegiatan lain dalam sektor perkebunan. Namun demikian, baik pemerintah Indonesia maupun Malaysia, maupun kelompok produsen minyak sawit besar lainnya saat ini tidak mempublikasikan dalam format yang dapat digunakan untuk memperbarui semua batas dan kepemilikan konsesi kelapa sawit mereka.

Sebelum laporan ini dipublikasi, Greenpeace telah menghubungi semua kelompok produsen yang dibahas dalam laporan ini untuk meminta daftar dan peta komprehensif dan terkini mengenai kilang dan konsesi kelompok. Sebagian besar tidak menanggapi permintaan ini. Kecuali POSCO, yang hanya memegang satu konsesi, dan IOI yang baru-baru ini menerbitkan batas-batas konsesinya di Indonesia tetapi dalam sebuah surat kepada Greenpeace mereka mengklaim bahwa untuk konsesinya di Malaysia hal tersebut tidak di perkenankan oleh hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, baik Pemerintah Indonesia maupun grup besar perusahaan produsen minyak sawit saat ini tidak mempublikasikan peta-peta terkini yang menunjukkan batas-batas dan kepemilikan konsesi kelapa sawit dalam format yang dapat digunakan. Selain itu, banyak kelompok produsen, bahkan tidak mengungkapkan luasan, lokasi dan jumlah konsesi atau jumlah pabrik yang mereka miliki.

Sebelum publikasi mengeluarkan laporan, Greenpeace telah menghubungi seluruh grup produsen yang dibahas dalam laporan ini untuk meminta daftar dan peta lengkap dan terkini dari pabrik pengolahan dan konsesi mereka. Tidak satu pun dari grup-grup produsen ini menanggapi permintaan Greenpeace.

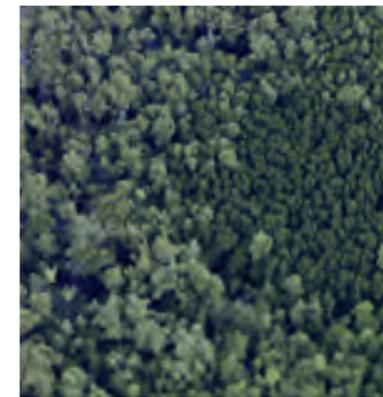
Oleh karena itu, saat ini informasi tentang batas-batas konsesi (serta tentang kepemilikan konsesi dan pabrik - lihat di atas) harus dijalin dari berbagai sumber, yang mungkin tidak lengkap, ketinggalan zaman atau tidak akurat. Studi-studi kasus dalam laporan ini didasarkan pada peta

konsesi terbaik yang tersedia, yang biasanya diperoleh dengan meminta dokumen dari lembaga perizinan dan melakukan digitalisasi terhadap peta-peta dari seluruh dokumen perizinan konsesi. (Lihat Annex Lampiran 1 untuk penjelasan tentang mengenai proses perizinan perkebunan). Dalam menentukan batas-batas untuk studi kasus, jika tersedia penggunaan izin-izin dari proses lanjutan lebih diutamakan untuk digunakan (misalnya batas-batas HGU lebih diutamakan jika tersedia (misalnya batas-batas HGU lebih dipilih daripada batas-batas Izin Lokasi). Batas-batas tersebut telah diperiksa menggunakan (atau, jika tidak mempunyai sumber-sumber lainnya diambil dari) dokumen Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure/NPP) RSPO yang tersedia.

Dalam beberapa kasus, di mana informasi izin yang resmi atau dokumen NPP tidak tersedia, kepemilikan konsesi dan lokasi hanya dapat disimpulkan dari sumber-sumber media lokal atau dengan mengamati pembukaan lahan dan pengembangan perkebunan melalui citra satelit. Citra satelit yang digunakan untuk studi kasus dalam laporan ini berasal dari USGS, ESA dan Planet Inc. (Landsat 5, 7, dan 8 dan Sentinel 2, Planet) yang diakses melalui Google Earth Engine, Landviewer dan www.planet.com. Dalam beberapa kasus, citra satelit dikompilasi dari tanggal-tanggal yang berbeda (misalnya dalam kurun waktu lebih dari satu bulan) untuk memberikan tampilan yang relatif bebas dari awan. Analisis citra satelit digunakan untuk mengidentifikasi deforestasi, pembangunan dan penanaman dilakukan oleh Aidenvironment dan Greenpeace.

Untuk mengidentifikasi pembangunan dalam konsesi perkebunan yang diketahui berada di dalam area hutan, menggunakan digunakan citra satelit dari tahun 2015, 2017, dan 2018 yang ditumpang susun (overlay) dengan batas-batas konsesi dan peta-peta tutupan lahan resmi dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak GIS (Geographical Information System). Ada atau tidaknya adanya hutan dibuktikan secara visual, kemudian melakukan dilakukan pengukuran luasan area hutan yang hilang. Untuk mengidentifikasi adanya deforestasi di lahan gambut dan hilangnya habitat orang utan, area-area yang hutannya hilang kemudian ditumpang susun dengan peta-peta habitat dan gambut, kecuali pada satu studi kasus (PT LAIK), menggunakan digunakan hanya peta lahan gambut untuk mengkonfirmasi keberadaan gambut. Dalam kasus PT LAIK, hanya peta Wetlands International yang menunjukkan gambut. Analisis-analisis yang disajikan di sini tidak termasuk penilaian hilangnya hutan stok karbon tinggi (HCS), yang membutuhkan kerja lapangan lebih rinci.

LAMPIRAN 3: SUMBER



IDENTIFIKASI AWAL TUTUPAN LAHAN:

KLHK (2015) Sistem Pemantauan Hutan Nasional http://nfms.dephut.go.id/ArcGIS/rest/services/LandcoverRC_Upd/LandcoverRC_2013_Upd/MapServer diakses bulan September 2015



PETA GAMBUS:

KLHK (2017) 'Fungsi ekologis gambut' http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Peat_Ecological_Function/MapServer
Ritung S et al (2011) 'Peta lahan gambut Indonesia skala 1:250.000'
Wahyunto dkk. (2003-2006) 'Peta-peta sebaran lahan gambut, luas dan kandungan karbon di Sumatera (2003), Kalimantan (2004) dan Papua (2006)' Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC)



HABITAT ORANGUTAN:

IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group (2017) 'Final report: Orangutan population and habitat viability assessment' <http://forina.or.id/orangutan-population-and-habitat-viability-assessment-2016/>

Atas dari kiri

26 Maret 2018, Papua,
8°10'47.495"S 138°42'45.509"E
©Ifansasti/Greenpeace

26 Maret 2018, Papua,
8°20'10.433"S 138°44'54.545"E
©Ifansasti/Greenpeace

8 Oktober 2007,
Kalimantan
©Behring/Greenpeace

LAMPIRAN 4:

CATATAN ATAS DASBOR ANALISIS PEDAGANG DAN IDENTIFIKASI KAITAN LACAK BALAK GRUP USAHA



1 April 2018, PT Inocin Abadi (Korindo), Papua, 6°51'37.374"S 140°41'23.483"E ©Ifansasti/Greenpeace

Dalam dua tahun terakhir, banyak perusahaan pedagang Kelapa Sawit telah mengambil langkah yang menggembirakan dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi dan pelaksanaan komitmen NDPE dengan mempublikasikan rincian pabrik-pabrik yang memasok perusahaan tersebut, biasanya sebagai bagian dari platform online 'dasbor keberlanjutan' daring dimana mereka menerbitkan data-data yang berkaitan dengan pelaporan kemajuan perusahaan tersebut menuju perwujudan komitmen NDPE. Karena industri kelapa sawit terintegrasi secara vertikal, dengan sebagian besar pedagang yang melakukan penyulingan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dan memproduksi oleochemicals dan lemak khusus, informasi ini sering disajikan dalam bentuk laporan ringkasan untuk masing-masing unit pemrosesan pedagang di tahap hilir, yang menunjukkan asal pabrik untuk semua minyak sawit atau PKO yang memasuki unit tersebut. Mengidentifikasi informasi untuk setiap pabrik mungkin mencakup koordinat GPS, nama perusahaan perkebunan yang memiliki pabrik tersebut (yang disebut sebagai pemasok pihak ketiga) dan/atau pemilik grup paling atas (perusahaan induk).

Untuk laporan ini kami menganalisis data pabrik dari perusahaan-perusahaan pedagang minyak sawit, yang mencakup periode paling baru yang tersedia pada bulan Mei 2018, seperti tercatat: AAK (tidak bertanggal, diterbitkan bulan Mei 2018),³⁸ Apical (Q4 2017 – Q1 2018),³⁹ Cargill (Q4 2017),⁴⁰ Bunge Loders Crocklaan (Jan – Des 2017, dimana pada saat itu merupakan unit pemrosesan hilir bagi IOI Loders Crocklaan),⁴¹ GAR (Jan – Des 2017),⁴² Musim Mas (Q4 2017 – Q1 2018),⁴³ Olam (2017),⁴⁴ Sime Darby (Jan – Sep 2018)⁴⁵ dan Wilmar

(Jan – Des 2017).⁴⁶ (Beberapa dasbor mungkin saat ini memiliki data yang lebih baru.) Daftar pabrik IOI Group⁴⁷ untuk kilang-kilangnya yang tidak diakuisisi oleh Bunge kini telah tersedia untuk umum, begitu juga dengan daftar pabrik dalam rantai pasok Fuji Oil,⁴⁸ Louis Dreyfus⁴⁹ Corporation dan Mewah,⁵⁰ namun semua ini tidak tersedia pada saat analisis dan karenanya tidak dimasukkan dalam laporan ini.

Pedagang yang tidak menyediakan rincian basis pasokan pabrik mereka untuk umum termasuk Astra Agro Lestari, dan KLK.

Meskipun banyak perusahaan pedagang yang telah menyediakan data pabrik mereka untuk umum, dan meskipun perusahaan konsumen seolah-olah memiliki akses ke data pabrik pemasok mereka, sebelum 2018 tidak ada perusahaan konsumen dengan merek ternama yang menerbitkan rincian lengkap dari pabrik dan perusahaan grup produsen pemasoknya. Oleh karena itu pada bulan Januari 2018, Greenpeace menantang sejumlah merek konsumen yang berkomitmen terhadap NDPE untuk menerbitkan daftar pabrik dalam rantai pasok minyak sawit mereka, serta grup produsen yang mengendalikan pabrik-pabrik tersebut.⁵¹ Beberapa perusahaan konsumen menyambut tantangan ini, dan semakin banyak perusahaan konsumen lain yang mengikuti jejak mereka, meskipun – seperti yang disebutkan di bawah – kualitas informasinya bervariasi dan secara umum perusahaan konsumen tidak menyingkap secara penuh hubungan mereka dengan perusahaan grup produsen.

Untuk laporan ini, kami menganalisis informasi pabrik yang dipublikasikan oleh perusahaan konsumen



©Hamilton/Greenpeace

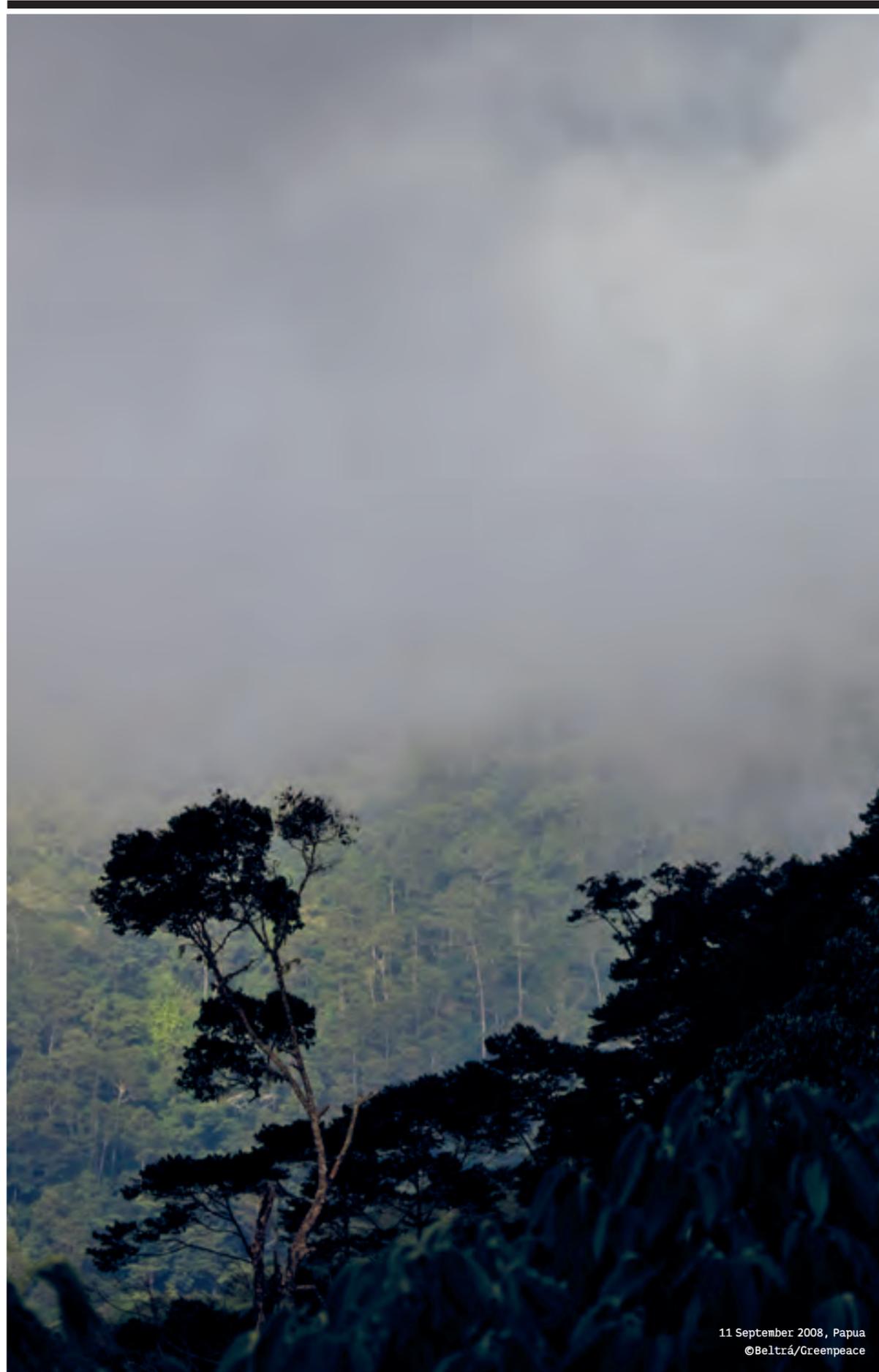
berikut, dengan mencakup periode waktu tercantum sebagai berikut: Colgate-Palmolive (2017),⁵² Danone (2017),⁵³ Ferrero (Januari – Juni 2017),⁵⁴ General Mills (tanpa tanggal, diterbitkan bulan Maret 2018),⁵⁵ The Hershey Company (Januari – Juni 2017),⁵⁶ Johnson & Johnson (2017),⁵⁷ Kellogg Company (2017),⁵⁸ L'Oréal (2017),⁵⁹ Mars (2016),⁶⁰ Mondelez International ('potret' tanpa tanggal, diterbitkan Maret 2018),⁶¹ Nestlé ('potret' bulan November 2017),⁶² PepsiCo (2017),⁶³ P&G (2017),⁶⁴ PZ Cussons (tidak bertanggal, diterbitkan bulan Maret 2018),⁶⁵ Reckitt Benckiser (2017)⁶⁶ dan Unilever (2017).⁶⁷ Kraft Heinz mempublikasikan tautan ke daftar pabrik terbaru dari pemasok minyak sawit utama mereka (AAK, Adm dan Sime Darby), yang kami anggap sebagai mereka dengan informasi pabrik paling baru.⁶⁸

Perusahaan konsumen yang tidak menanggapi permintaan kami untuk mempublikasikan daftar pabrik-pabrik dalam rantai pasok mereka adalah Kraft Heinz dan Smuckers. Smuckers tidak menanggapi permintaan kami untuk mempublikasikan daftar pabrik-pabrik dalam rantai pasok mereka.

Pengungkapan oleh pedagang dan perusahaan konsumen tidak terstandarisasi, dengan ruang lingkup dan kualitas telusur data yang sangat bervariasi. Analisis Greenpeace mengungkap berbagai kelalaian, ketidaktepatan, dan ketidaksesuaian. Secara khusus, informasi tentang kelompok produsen yang memiliki pabrik-pabrik ini seringkali tidak mutakhir, tidak lengkap atau tidak ada sama sekali. Pengejaan nama pabrik tidak

konsisten dan koordinat GPS tidak disediakan secara umumnya. Banyak dari grup perusahaan produsen yang diidentifikasi dalam laporan ini memasukkan beberapa subgroup kelompok terpisah; ketika ditanya tentang hubungan mereka terhadap grup produsen initersebut, beberapa pedagang atau merek menjawab bahwa mereka tidak berhubungan dengan subgroup tertentu, dan membusu tentang hubungan mereka dengan grup produsen secara keseluruhan, meskipun data pabrik yang diungkapkan mengungkapkan adanya pasokan dari bagian lain dari grup yang gagal mereka identifikasi.

Mengingat adanya kekurangan dalam data yang disediakan oleh perusahaan konsumen, pedagang dan produsen, analisis Greenpeace tentang hubungan perdagangan antara 25 kelompok produsen bermasalah yang ditinjau ditampilkan dalam laporan ini dan serta tentang pasar global didasarkan pada kumpulan data yang lebih luas menggunakan mengandalkan hasil kerja kami sendiri, yang dengan mengidentifikasi konsesi, pabrik dan kilang yang diketahui menjadi milik grup. Sumber data termasuk laporan tahunan dan situs web perusahaan, profil registri perusahaan, izin dan dokumentasi RSPO/ISPO, serta pemetaan konsesi tersedia sebagaimana diuraikan dalam Annex Lampiran 3. Dalam menempatkan kemungkinan kepemilikan tingkat grup saat ini ke pabrik-pabrik yang diungkapkan dalam hasil telusur data merek dan pedagang, kami telah menetapkan dan menerapkan sebuah hirarki sumber untuk menentukan sumber mana yang paling akurat, terpercaya dan terkini, pada kasus ketika dimana tersedia banyak sumber.⁶⁹



11 September 2008, Papua
©Beltrá/Greenpeace

APENDIKS 1: 52 KEBOCORAN KILANG YANG DIUNGKAP CHAIN REACTION



Sebagai bagian dari penelitian untuk laporan November 2017 terhadap perusahaan pengilangan yang tidak patuh terhadap persyaratan NDPE ini,⁷⁰ Chain Reaction Research telah mengidentifikasi menggambarkan 52 kebocoran dalam perusahaan pengilangan:⁷¹

12 November 2007, Dumai, Riau
©Åslund/Greenpeace

- 3F Group (India)
- Agri Asia Group (Indonesia)
- Agro Jaya Perdana (Indonesia)
- Almarbaee Holding Company (Saudi Arabia)
- BCL Industries & Infrastructure (India)
- BEST Group (Indonesia)
- Bina Karya Prima (Indonesia)
- Bintang Tenera (Indonesia)
- BL Agro Oils (India)
- BLD Plantation (Malaysia)
- Camela (Nigeria)
- Chinatex Corporation (China)
- Deli Muda (Indonesia)
- Dutapalma/Darmex (Indonesia)
- Edible Group (India)
- EFKO Group (Russia)
- Emami Group (India)
- Felda IFFCO (Malaysia)
- Gokul Group (India)
- Great Wall Enterprise (Taiwan)
- Green Ocean (Malaysia)
- Hasil Karsa Group (Indonesia)
- Incasi Raya (Indonesia)
- Keck Seng Group (Malaysia)
- Kretam Holdings (Malaysia)
- Kurnia Tunggal (Indonesia)
- Kwantas Corporation (Malaysia)
- Lam Soon Group (Malaysia)
- Muridke Refine Oil Mills (Pakistan)
- MVO (Malaysia)
- Nisshin Oil (China)
- Pacific Inter-Link (PIL)/HSA Group (Malaysia/Yemen)
- Pamina Adolina (Indonesia)
- Royal Industries/Royal Group (Indonesia)
- Ruchi Soya Industries (India)
- Sangsook Industry (Thailand)
- Sarawak Oil Palms (Malaysia)
- Sarimas (Indonesia)
- SARL Group (India)
- Sawit Asahan Tetap Utuh (Indonesia)
- Sawit Kinabalu SDN BHD (Malaysia)
- Sawit Raya (Malaysia)
- Senari Synergy (Malaysia)
- Sheel Chand Agroils (India)
- Siat (Nigeria)
- Soon Soon (Malaysia)
- Southern Group (Malaysia)
- SSD Oil Mills Company (India)
- Syarikat Kion Hoong Cooking Oil Mills (Malaysia)
- Tunas Baru Lampung (Indonesia)
- Uni-President Enterprises (China)
- Yee Lee Group (Malaysia)

CATATAN KAKI

BAGIAN 1

1. Consumer Goods Forum (2010)
2. Wilmar International Ltd (2013b) p8
3. Chain Reaction Research (2017c)
4. Greenpeace mapping analysis
5. Wilmar International Ltd (2013b)
6. Unilever (2018)
7. Cartwright J (2016)
8. Greenpeace mapping analysis. See also Wijaya A et al (2017) and Gaveau DFL et al (2016).
9. Figures cover loss of natural forest. Sources: 1990–2012: MoEF (2016b) Table Annex 5.1, pp90–1 – gross deforestation 21,339,301ha 2012–2013: MoEF (2014) Lampiran 1, Tabel 1.1 – gross deforestation 953,977ha 2013–2014: MoEF (2015) Lampiran 1, Tabel 1.1 – gross deforestation 567,997ha 2014–2015: MoEF (2016a) Lampiran 1, Tabel 1.1 – gross deforestation 1,223,553ha
10. UK total area: 24,249,500ha (source: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom)
11. Greenpeace mapping analysis
12. Greenpeace mapping analysis
13. GFED website '2015 fire season' and Harris N et al (2015)
14. Koplitz SN et al (2016)
15. World Bank Group (2016)
16. Luskin MS, Albert WR & Tobler MW (2017)
17. Voigt M et al (2018)
18. Greenpeace mapping analysis
19. IUCN Red List of Threatened Species website 'Elephas maximus ssp. sumatranus'
20. Briggs H (2017)
21. International Rhino Foundation website 'Sumatran rhino (*Dicerorhinus sumatrensis*)'
22. Meijaard E et al (2018) p75
23. Mongabay.com (2016)
24. Jong HN (2018)
25. Several examples are detailed in the case studies in Greenpeace International (2017a). See also RSPO website 'Case tracker: PT Nabire Baru' (Goodhope), Environmental Investigation Agency & Telepak (2012) (Noble), RSPO website 'Case tracker: PT Henrison Inti Persada subsidiary of RSPO member Noble Plantation Pte Ltd' (Noble), Langowuyo Y (2014) (Rajawali) and Thoumi G (2017) (Salim).
26. Amnesty International (2016b)
27. OPPUK, Rainforest Action Network & International Labor Rights Forum (2017)
28. See eg TNS (2015).
29. See eg Bellantonio M et al (2017), Mighty Earth (2017b) and Harvey F (2017).
30. Delegation of the European Union to Malaysia (2018)
31. SPAR (2018)
32. Iceland website 'Palm oil'
33. Consumer Goods Forum (2010)
34. Forest Trends (2017) p3
35. Greenpeace International (2018a)
36. Greenpeace International (2017c)
37. Greenpeace International (2018a)
38. Ling LS (2016)
39. RSPO website 'GeoRSPO – RSPO mapbuilder app'
40. Kuok KH (2018b)
41. Greenpeace analysis; see also eg Gore-Langton L (2017)
42. Wilmar International Ltd (2018a) p4
43. RSPO website 'Wilmar International Limited'
44. Wilmar International Ltd (2013a)
45. Steering Group on No Deforestation and the High Carbon Stock Approach (2015) p5
46. Greenpeace International (2018c)
47. Greenpeace International (2018c)
48. Wilmar International Ltd (2018a) p24
49. Daubach T (2018)
50. Wilmar International website 'Tropical oils: Plantations'
51. Wilmar International website 'Oil palm plantation Mar 2017'
52. Frazer S (2015)
53. First Pacific Company Ltd (2017) p239
54. RSPO website 'Case tracker: PT Permata Hijau Pasaman 1 (Wilmar International Ltd)'
55. RSPO website 'Case tracker: PT Bumi Sawit Kencana II'
56. Forest Peoples Programme (2018)
57. Amnesty International (2016a)
58. Kiezebrink V (2017)
59. Greenpeace analysis of Wilmar refinery summary reports and mill lists (source: Wilmar International website 'Supply chain map')
60. Wilmar International Ltd (2013a)
61. Kuok KH (2018a)
62. George P (2018)
63. Wilmar International Ltd (2018d)
64. Greenpeace analysis of Wilmar refinery summary reports and mill lists (source: Wilmar International website 'Supply chain map')
65. Unofficial translation. The original reads 'Kelompok (group) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan'. Source: Minister of Agriculture (2013) p4.
66. RSPO (2013a)
67. Minister of Agriculture (2013) p4 (unofficial translation)
68. Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015b) p1
69. RSPO (2017) pp6–7, clause 5.2
70. Wilmar International Ltd (2013a)
71. Bumitama Agri Ltd (2015b) p7
72. President of the Republic of Indonesia (2018)
73. ABNR (2018)
74. Defined in the regulation as 'an individual who enjoys the power to appoint and remove the directors, commissioners, managers, trustees, or supervisors of a corporation, who has control over the corporation, who is entitled to receive, and/or actually receives, direct or indirect benefit from the corporation, who is the true owner of the assets or share capital of the corporation, and/ or who satisfies the other criteria set out in this Presidential Regulation' (source: ABNR (2018)).
75. ABNR (2018)
76. Chain Reaction Research (2017c) p1
77. Chain Reaction Research (2017c) p7
78. Chain Reaction Research (2017c) p2
79. Chain Reaction Research (2018c) pp8–9
80. Chain Reaction Research (2017c) pp7–8
81. TFT Transparency Hub website 'Palm oil Indonesia update: December 13, 2016'
82. Pearce F (2014)
83. TFT website 'Members' and 'Clients'
84. Proforest website 'About us – Implementing responsible practices'
85. TFT (2017b) p2
86. TFT (2017a)
87. Brandeis L (1914) p92
88. Tempo.co (2014) and Greenpeace International (2014)
89. High Carbon Stock Approach website 'The HCS Approach toolkit'
90. HCVRN & HCSA (2017)
91. Conversion cut-off dates are common practice in certification schemes; when properly enforced they discourage deforestation by ensuring that producers know they will be unable to sell their products if they continue to clear forest. Trade with producers that have cleared forest or developed peatlands after the cut-off date should be suspended unless the producer commits to restoring the relevant areas (and to obtaining independent third-party verification that all its plantations are now NDPE-compliant).
92. Using the Palm Oil Innovation Group (POIG) Verification Indicators or equivalent; see POIG (2016).

CATATAN KAKI

STUDI KASUS

ANGLO-EASTERN PLANTATIONS

1. Anglo-Eastern Plantations PLC (2017) p37
2. Anglo-Eastern Plantations PLC (2017) p27

AUSTINDO NUSANTARA JAYA

1. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2017) p32
2. The Nature Conservancy Indonesia (2017)
3. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016b)
4. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2018) pp28
5. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016a) p7
6. Sudaka S (2016)
7. PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2017) pp132, 136
8. RSPO website 'New planting procedures public notification'
9. See for instance the Peat Ecological Function map (http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK_EN/Peat_Ecological_Function/MapServer).
10. Moran S (2017)
11. Yaacob S (2018)
12. Yaacob S (2018)
13. RSPO website 'New planting procedures public notification: PT Austindo Nusantara Jaya – PT Permata Putera Mandiri' and 'New planting procedures public notification: ANJA – PT Putera Manunggal Perkasa'
14. HCV Resource Network website 'Ongoing and historical evaluations of assessment reports' accessed 22 November 2017. At the time of writing the assessment is under appeal.
15. Google Earth Engine, Landsat 7 and 8 imagery
16. awasMIFEE (2017a)
17. Suara Pusaka (2015c)
18. Suara Pusaka (2015a) and Suara Pusaka (2015b)

19. Mucholik I (2016) The judges accepted ANJ's argument that the case should also have included the individuals who had accepted money from the company.
20. awasMIFEE (2017d)
21. Yayasan Pusaka et al (2017)
22. awasMIFEE (2017d)

BUMITAMA

1. To aid comprehension, the term 'Bumitama' is used throughout this section when referring to companies owned, controlled or managed by the officially recognised parent company, ie Bumitama Agri Ltd (BAL) and its subsidiaries. When describing explicit ownership links between companies, the term 'BAL' is used.
2. Held through Wellpoint Pacific Holdings Ltd, a wholly owned subsidiary of Fortune Holdings Ltd. Source: Bumitama Agri Ltd (2018a) p142.
3. Held through Oakridge Investments Pte Ltd and Lynwood Capital Resources Pte Ltd, both wholly owned subsidiaries of IOI Corporation Berhad. Source: Bumitama Agri Ltd (2018a) p142.
4. Castle J et al (2007) p82
5. IOI Group website 'Dato' Lee Yeow Chor'
6. Bumitama Agri Ltd website 'Dato' Lee Yeow Chor'
7. Bumitama Agri Ltd (2018a) pp2, 154
8. Bumitama Agri Ltd (2013) p101; Bumitama Agri Ltd (2018a) p97
9. For example, the PT Gunajaya Harapan Lestari (PT GHL) and PT Golden Youth Plantation Indonesia (PT GYP) concessions were managed by Bumitama under the GHL Cooperation Agreement and the GY Cooperation Agreement for several years from 2011 while they continued to be owned by members of the Lim Hariyanto family. Source:

- Bumitama Agri Ltd (2012) p33; see also Bumitama Agri Ltd (2014b).
10. Corporate registry profiles; see case studies for details.
11. RSPO website 'Bumitama Agri Ltd'
12. Bumitama Agri Ltd (2015b)
13. Bumitama Agri Ltd (2018a) pp98–9
14. Bumitama Agri Ltd (2018a) p3
15. Bumitama Agri Ltd (2012) p25
16. Bumitama Agri Ltd (2012) p32
17. Bumitama Agri Ltd (2012) p47. 'Title' here refers to HGU and/or freehold (Hak Milik).
18. Bumitama Agri Ltd (2012) p45: '(a) Ijin Prinsip of 11,104 hectares, of which 8,684 hectares have expired Ijin Prinsip; (b) Ijin Lokasi of 136,320 hectares, of which 111,820 hectares have expired Ijin Lokasi'.
19. Bumitama Agri Ltd (2012) p175
20. Bumitama Agri Ltd (2012) p46: '(c) Hak Guna Usaha of 32,729 hectares; and (d) Plasma Programme of 11,795 hectares where the plasma holders have obtained their own Ijin Lokasi and/or Hak Milik'.
21. See, for example, RSPO (2013a)
22. RSPO website 'Complaints'
23. Bumitama Agri Ltd (2016d) p100 regarding the acquisition of PT Nabati Agro Subur
24. Bumitama Agri Ltd (2016b) p1 regarding the acquisition of PT Langgeng Makmur Sejahtera
25. Bumitama Agri Ltd (2016a) p4 regarding the acquisition of PT Damai Agro Sejahtera
26. Mach M (2017a)
27. Corporate registry profiles
28. Corporate registry profile for PT GHL; Bumitama Agri Ltd website 'Contact us'
29. 'Pursuant to the GY Cooperation Agreement and GHL Cooperation Agreement, the Group will (i) manage and operate the plantations of GMS and GHL in return for a management fee; (ii) have the exclusive right to purchase any FFB produced from

- the plantations of GMS and GHL; and (iii) have a call option over up to 95% and 80% of the total issued shares in GMS and GHL (i.e. the GY Call Option and the GMS Call Option), respectively.' Source: Bumitama Agri Ltd (2014b) p1.
30. Bumitama Agri Ltd (2016c) p2
31. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999) Article 5(3). See Annex 1 on legal permits.
32. Bumitama Agri Ltd (2014b)
33. In Bumitama Agri Ltd (2016c) the company states that 'the approval of the Minister of Marine and Fishery [is] now no longer being required'; however, there was no relevant legal revision.
34. Janta Winata Halim and Nita Gartika: Mr Janta Winata Halim was co-director with Lim Gunawan Hariyanto in Lim Hariyanto family nickel mining company PT Trimegah Bangun Persada in 2013, while Ms Nita Gartika sat on its board of commissioners beside Lim Gunardi Hariyanto. Gartika was also an employee of Lim Hariyanto family plywood company Tirta Mahakam Resources in 2009.
35. Bumitama Agri Ltd (2016c). Corporate registry profiles show that during the nine-month period 30/9/14–10/6/2015, PT GHL was owned by Selaras Hijau Sentosa (235 shares) and Tommy Santoso (15 shares). Immediately prior and subsequent to these dates, it was owned by PT Karya Manunggal Sawitindo (PT KMS; 50 shares) and PT Sukses Manunggal Sawitindo (PT SMS; 200 shares rising to 950 shares on 10/6/2015). PT SMS was directly controlled by the Lim Hariyanto family until February 2016, when BSL bought 95% of shareholdings, with PT KMS holding the remainder.
36. Bumitama Agri Ltd (2016c) p2
37. This is the spelling used by the company and which appears on its corporate registry profile; however, most government correspondence uses the conventional three-word company name form, ie Hati Prima Agro.
38. Corporate registry profile
39. Corporate registry profile

40. See RSPO website 'Case tracker: PT Hati Prima Agro' and Minister of Forestry (2008).
41. Orders 3(1) and 3(2) in Minister of Forestry (2008)
42. Chain Reaction Research (2014) pp14–5. In court documents the company stated it had planted areas of PT HPA during 2010–2012 (source: Palangkaraya High Court, Central Kalimantan (2015) p6).
43. Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2012a) and Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2012b)
44. RSPO website 'Case tracker: PT Hati Prima Agro'
45. Krishnan R (2012)
46. Supreme Court of Indonesia (2013)
47. Corporate registry profile. Djoni Rusmin was Commissioner and 10% shareholder; Tommy Santoso was Managing Director and 90% shareholder.
48. Bumitama Agri Ltd (2014a)
49. Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2014a)
50. Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2014b). The letter serves to issue plantation business permit (IUP) no. 009/IUP-B/PT.LMS/Kec. Antang Kalang-1 Kec - Kab. Kotim/2014.
51. Bumitama Agri Ltd (2015a). The sale involved PT HPA's 'plantation (biological assets) and other fixed assets over the Land, inventories and plasma receivables (collectively, the "Assets")'.
52. RSPO website 'Case tracker: PT Hati Prima Agro'
53. PT Karya Manunggal Sawitindo – also owned by the Lim Hariyanto family – was the minority shareholder. Source: Bumitama Agri Ltd (2016b).
54. Bumitama Agri Ltd (2017c)
55. Bumitama Agri Ltd (2017b) p23
56. As evidenced by Greenpeace field investigations and by a criminal case instigated by 'PT. HPA BGA Group' in late 2014 claiming theft of FFB from the company's plantation on 15 October 2014, a point in time after PT LMS had begun applying for plantation permits and was already holding

- a location permit over the area. Source: Palangkaraya High Court, Central Kalimantan (2015).
57. RSPO website 'Case tracker: PT Hati Prima Agro'
58. Email from RSPO to complainants, 22 June 2018
59. Mach M (2017b)
60. Corporate registry profiles
61. Location permit no. 27/PEM/2016, granted 8 January 2016
62. In 2011, PT GYP was acquired by members of the Lim Hariyanto family. The sale included extensive plantation areas previously developed with neither forest release nor environmental permit. Bumitama entered into an explicit agreement from November 2011 until August 2014 with other Lim Hariyanto interests to manage the plantations, which also gave it exclusive rights to purchase PT GYP's palm fruit, although such trade would be illegal. (Bumitama Agri Ltd (2014b))
63. Bumitama Agri Ltd (2014b)
64. GPS coordinates:
 - Marker stakes (10 34' 56.02"S 1100 20' 6.33"E)
 - Security post (010 35' 44.06"S 1100 19' 55.26"E)
 - Welcoming sign of PT LSM-BTJE (010 35' 11.91"S 1100 20' 17.10"E)
65. Bumitama Agri Ltd (2016a) p3
66. Bumitama Agri Ltd (2017a)
67. See Bumitama Agri Ltd (2016a) p1 and p4, which states that 'none of the directors or controlling shareholders of the Company has any direct or indirect interest in the Acquisition'. As recently as 2018 Bumitama was declaring it had no prior connection to PT DAS; see Bumitama Agri Ltd (2018b).
68. Bumitama Agri Ltd (2016a) pp1–2

CENTRAL CIPTA MURDAYA (MURDAYA FAMILY)

1. Corporate registry profile of plantation company Hardaya Plantations Group. See also <http://www.hartatimurdaya.com> and Alexander H (2015).
2. Firdaus E (2013)
3. Analysis by Aidenvironment (2017), held internally

CITRA BORNEO INDAH (ABDUL RASYID—ASSOCIATED)

1. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018) pp2, 5, 35
2. Environmental Investigation Agency (2015)
3. REDD-Monitor (2016); see also Forbes website 'Profile: Abdul Rasyid'
4. Baskoro NB (2017)
5. RSP0 (2017) pp6-7, clauses 5.2 and 5.3
6. PT Sawit Sumbermas Sarana (2017)
7. PT Sawit Sumbermas Sarana (2016b) p2
8. PT Sawit Sumbermas Sarana (2016a) pp64-5
9. Palm Oil Magazine (2016)
10. RSP0 website 'Case tracker: PT Sawit Sumbermas Sarana subsidiary of PT Sawit Mandiri Lestari'
11. Through PT Metro Jaya Lestari and PT Agro Jaya Gemilang. Source: corporate registry profiles.
12. See Blog Souvenir123.com (2014) and Citra Borneo Indah job advertisements, eg <http://jobmediaonline.blogspot.com/2010/02/vacancy-vacancy-at-cbi-group.html>
13. House of Representatives of the Republic of Indonesia website 'Members of Parliament: Period 2014-2019'
14. Gedung Palma One, Lantai 6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2, Nomor 4, Jakarta. Sources: PT Sawit Sumbermas Sarana (2016a) pp47, 57 and corporate registry profile for PT Sawit Mandiri Lestari.
15. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018a)
16. foresthints.news (2018b)
17. See Wright S & Karmini N (2017).
18. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018) p12
19. foresthints.news (2018b)
20. foresthints.news (2018b)
21. PT Sawit Sumbermas Sarana (2017)
22. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018b)
23. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018b)
24. PT Sawit Sumbermas Sarana (2018b)
25. foresthints.news (2018c)
26. RSP0 website 'New planting procedures public notification: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk - PT Sawit Mandiri Lestari'

DJARUM

1. Dolan K (2016). See also <https://www.forbes.com/profile/t-budi-michael-hartono/>.

2. Aidenvironment (2017) p14
3. Aidenvironment (2017) p28
4. Auriga et al (2018) pp2-3citing corporate registry profiles and mapping analysis based on Hansen MC et al (2013)
5. Auriga et al (2018) p2 citing BMJ Performance Board website (www.bmjperformanceboard.com), Tribun Kaltim (2015) and Pro Kaltim (2015)
6. Ministry of Forestry (2010). This map shows the concession as PT Global Sawit Kencana. At some point the name was changed to PT Gemilang Sawit Kencana; this name appears in, for example, BCA's 2014 annual report (see BCA (2015) p477).

DTK OPPORTUNITY

1. Incorporation forms of Hong Kong companies, available from <https://www.icris.cr.gov.hk/csci/>
2. Analysis by Aidenvironment (2017), held internally
3. Palangkaraya District Court, Central Kalimantan (2013)
4. PT Musim Mas (2011)
5. Letter from Apical to PT Karya Dewi Putra (PT KDP), 27 January 2017

FANGIONO FAMILY

1. Indonesian sources usually refer to Martias by a single name; sources from elsewhere often refer to 'Martias Fangiono'.
2. Source: First Resources annual reports since 2010, available at <http://www.first-resources.com/annualreports.php>.
3. First Resources (2018a) p142
4. First Resources (2018c)
5. Corporate registry profile for PT Ciliandry Anky Abadi. Beyond corporate registry profiles, an in memoriam page for Martias's father provides some evidence of the extent of the Fangiono family (see <http://meninggaldunia.blogspot.com/2011/02/bapak-hertanto.html>). Details of Martias's and Silvia Caroline's silver wedding anniversary are found at <http://www.lightworks.id/2015/02/silver-wedding-a-moment-to-remember>. Assumptions about the parentage of the younger

Fangiono family members are based on their dates of birth.

6. First Resources (2007) p142
7. Corporate registry profiles
8. Corporate registry profile
9. First Resources (2007) p155
10. CIFOR (nd)
11. First Resources (2015)
12. First Resources (2017cb)
13. First Resources (2017a) p4
14. In a statement of 12 July 2018, in response to a report by Chain Reaction Research, First Resources claims:
 - a) PT Ciliandry Anky Abadi is not a subsidiary, an associated company, or a related party of First Resources.
 - b) First Resources does not have any financial or operational relationship with PT Ciliandry Anky Abadi.
 - c) The controlling shareholders of First Resources, Mr. Ciliandra Fangiono and his siblings, do not have any ownership, nor hold any management roles in PT Ciliandry Anky Abadi.
 - d) First Resources has not purchased any palm oil products from PT Ciliandry Anky Abadi, and will not buy from any company that cannot prove that they are in compliance with First Resources' sustainability policy.
15. First Resources (2017b)
16. First Resources (2007) p5
17. <https://www.facebook.com/pages/Ciliandra-Perkasa-PT/965160946897952>
18. Note that here and elsewhere the corporate registry profiles conflict. PT FPS's own registry profile, obtained in January 2017, has its registered address at the Surya Dumai building, Jl Jend. Sudirman No. 395 with no change in registered address since its incorporation. Other corporate registry profiles place it at APL Tower.
19. First Resources (2012) p1
20. First Resources website 'Contact us'
21. PT Setia Agrindo Jaya, which in turn holds PT Citra Palma Kencana, PT Indo Manis Lestari, PT Indogreen Jaya Abadi, PT Setia Agrindo Lestari and PT Setia Agrindo Mandiri

22. First Resources (2018b)
23. Chain Reaction Research (2018a)
24. Sulaidy and his partner each own 50% of PT PPAM, which held 51% of the JV.
25. As of 29 July 2018. See Bloomberg website 'Executive profile: Lau Cong Kiong'.

FELDA / FELDA GLOBAL VENTURES

1. Tan CK (2017)
2. FGV (2016b)
3. RSP0 website 'Board of governors'
4. RSP0 website 'Principles & Criteria review'
5. FGV (2017) pp4, 33
6. FGV (2017) p11
7. Jakarta Post (2014)
8. FGV (2017) p34
9. Rainforest Action Network et al (2016)
10. Al-Mahmood SZ (2015)
11. FGV (2016a)
12. RSP0 website 'New planting procedures public notification: FELDA - PT Temila Agro Abadi'
13. Aziz A (2017)
14. Bursa Malaysia website 'Company announcements [announcement dated 26 May 2017]'
15. FGV (2016b)
16. Khairil AA (2017)

GAMA

1. Wilmar International Ltd (2018b)
2. Greenpeace International (2018c)
3. Compliance Advisor/Ombudsman (2009) p17
4. Wilmar International Ltd (2018a) p24
5. Wilmar International Ltd (2018c)
6. InfoSawit (2017); see also Singapore Exchange (2015)
7. Daubach T (2018)
8. Greenpeace International (2018c)
9. Greenpeace International (2018c)
10. PT Agro Alam Nusantara, PT Alam Jaya Persada, PT Berkas Sawit Utama, PT Bumi Alam Sentosa, PT Citra Mahkota, PT Citra Riau Sarana, PT Ganda Sawit Utama, PT Graha Agro Nusantara, PT Intitama Berlian Perkebunan, PT Jatimjaya Perkasa, PT Karya Agung Megah Utama, PT Nusa Jaya Perkasa, PT Patiware, PT Perkebunan Anak Negeri Pasaman, PT Putralirik Domas, PT Sentosa Asih Makmur, PT Sumatera Unggul Makmur, PT

- Swadaya Indopalma, PT TH Indo Plantations, PT Wahana Karya Sejahtera Mandiri and PT Wawasan Kebun Nusantara. The letter also acknowledges Gama shareholdings in PT Gandaerah Hendana and PT Inecda. Source: Indigo A (2018).
11. Greenpeace International (2018c)
12. Corporate registry profiles of PT Gandaerah Hendana and PT Inecda and their parent companies, and Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) p23
13. RSP0 website 'S&G Biofuel Pte. Ltd'
14. Indigo A (2018a)
15. Indigo A & Adriani (2018), copy held by Greenpeace
16. Indigo A (2018b), copy held by Greenpeace
17. Krisno O (2017)
18. Corporate registry profiles
19. Irawan Y (2015) and Arlinus Z (2015)
20. foresthints.news (2018a)
21. awasMIFEE (2018b)
22. foresthints.news (2018a)
23. Wright S & Karmini N (2017)
24. Tribun Pontianak (2018)
25. Benny Djuarsa is described on this site as management of PT Wilmar Cahaya: <http://pupukmahkota.co.id/news/temu-tani-brebes-092017.html>. Johannes (his full name) is described on this site as management: <http://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-ceka/>. Ownership information was found in corporate registry profiles.
26. Redaksi (2009)
27. SK No. 42, tgl 22-02-2010
28. Corporate registry profiles
29. Corporate registry profiles
30. Corporate registry profiles
31. Greenpeace mapping analysis based on official MoEF landcover data show an area of 3,190ha was cleared
32. Asrida E (2018)
33. Greenpeace mapping analysis; see also Suara Pusaka (2018)
34. Suara Pusaka (2018)
35. Basik-Basik M (2016)
36. Ngelia Y (2016)
37. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (2016)
38. awasMIFEE (2017b)
39. Indigo A & Adriani (2018), copy held by Greenpeace, and Indigo (2018b)

40. Benny Djuarsa and Johannes. Source: corporate registry profiles.
41. Corporate registry profiles
42. Greenpeace mapping analysis of satellite imagery; see also Suara Pusaka (2018)
43. Interview with a community leader from Bupul village (name withheld for security reasons), August 2017
44. Paino C (2017)
45. Government of Indonesia (2001)
46. Indigo A & Adriani (2018), copy held by Greenpeace, and Indigo (2018b)

GENTING

1. Genting Group website 'Stock information'
2. Genting Group website 'Directors & management' and Genting Plantations website 'Directors & management'
3. Genting Group website 'Home'
4. RSP0 website 'Genting Plantations Berhad'
5. Genting Plantations Berhad (2017) pp28-9
6. RSP0 website 'Genting Plantations Berhad'
7. Genting Plantations Berhad (2016) p2
8. Genting Plantations Berhad (2017) p32
9. Genting Berhad (2018) p148
10. RSP0 website 'Case tracker: PT Susantri Permai'
11. RSP0 website 'Case tracker: Genting Plantation Berhad (PT Susantri Permai, PT Kapuas Maju Jaya and PT Dwie Warna Karya)'
12. PT Permata Sawit Mandiri (2014)
13. PT Permata Sawit Mandiri (2014) pp2, 7-8
14. Greenomics Indonesia (2014) p5
15. Wilmar International Ltd (2018d) p24
16. Greenomics Indonesia (2015)
17. Genting Plantations Berhad (2018)
18. Corporate registry profiles
19. See also Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017b).
20. Corporate registry profiles
21. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group (2017)

HAYEL SAIED ANAM

1. HSA Group website 'Group leadership'
2. PIL website 'Message from management'
3. HSA Group website 'Group leadership'

4. HSA Group website 'Malaysian companies' and HSA Group website 'Indonesian companies'
5. Corporate registry profiles. The link between Commodities House Investment and PIL was documented in 2005 as part of the US Congressional Investigation mentioned elsewhere. See United States House of Representatives (2005).
6. RSP0 (2017) pp6-7, clauses 5.2 and 5.3
7. PIL website 'About'
8. PIL website 'Sustainability'
9. Corporate registry profiles and Chain Reaction Research (2017a) pp10-1
10. Greenpeace International (2018b)
11. HSA Group website 'Commodities'. The page has since been deleted, but an archive is available at <https://web.archive.org/web/20171218223219/http://www.hsagroup.com/business-activities/core-business/commodities.aspx>.
12. HSA Group website 'Environmental statement'
13. Hagen C (2018)
14. PIL (2018)
15. Mohamed Hamid Abdullah Al-Sarari has been a director of PT Pacific Palmindo Industri, PT Pacific Indopalm Industries, PT Pacific Medan Industri and PT Pacific Indomas since November or December 2016, and was the President Director of PT ESK. Nakul Rastogi, another director of PT GKM and PT KCP, is a long-term director at PIL. Rami Mohammed Abdo Saeed, who was a commissioner of PT GKM and PT KCP, was also a director of PIL from 22 May 2014 until 12 January 2018. He was also a director of PIL's Indonesian processing and trading companies from October 2012 to November or December 2016.
16. Corporate registry profiles
17. Corporate registry profiles
18. METCO website 'Sister companies -> Pacific Inter-Link representative office V'
19. PT Pacific Palmindo Industri. See RSP0 (2013b) p3.
20. Corporate registry profiles
21. Tadmax Resources Bhd (2012)
22. See corporate registry profiles and Chain Reaction Research (2017a) pp10-1.

IJM CORPORATION

1. IJM Plantations website 'Director profile'
2. SPOTT website 'IJM Plantations Bhd'
3. Norges Bank (2015)
4. IJM Plantations (2017) p25
5. IJM Plantations (2017) p26

INDONUSA

1. Notes on group structure: of the concessions described in this profile, Rosna Tjuatja owns 99.875% of the shares of PT Internusa Jaya Sejahtera directly. PT Indonusa Agromulia is 90% owned by another Indonesian company, PT Radiant Internusa Utama, which in turn is 90% owned by the Singapore-registered company Paramount Royale Pte Ltd, whose owner is not known. Rosna Tjuatja owns the remaining 10% of both PT Internusa Agromulia and PT Radiant Internusa Utama. Source: corporate registry profiles.
2. Profindo website 'Board of commissioner' and Britama.com (2015)
3. Beritasatu.com (2012)
4. Concessions are listed on the group website, <http://www.indonusaagromulia.com/index.php>.
5. PT Internusa Jaya Sejahtera, PT Anugerah Sakti Internusa and PT Persada Utama Agromulia were given in-principle State Forest Release Letters by former Forestry Minister Zulkifli Hasan on 13 August 2014, two weeks before his term in office ended. PT Persada Utama Agromulia has now been granted a definitive State Forest Release Letter by his successor.
6. Insider Stories (2012). The corporate registry profile shows that the board changed at the time of this news, with Rosna Tjuatja and other company leaders Risna Tjuatja, Djawi Santoso and Ardian appointed as directors and commissioners; however, the two shareholders Ripin and Sumadi continued to hold the same stake.
7. Hadinaryanto SE (2014) and Beritabatavia.com (2012)
8. Indonusa Group website 'Lowongan'
9. According to corporate registry

profiles, the shareholders of PT Persada Utama Agromulia since April 2014 are Agus Frenando Gurning and Andi Nurmanshah Pramono, whilst PT Anugerah Sakti Internusa is owned by Togap Gurning and Herry Sen.

IOI

1. Strictly speaking IOI Corporation Berhad is one of two arms of the group, which also encompasses the separate IOI Properties Group Berhad. Source: IOI Group website 'Group structure'.
2. Held through Oakridge Investments Pte Ltd and Lynwood Capital Resources Pte Ltd, both wholly owned subsidiaries of IOI Corporation Berhad. Source: Bumitama Agri Ltd (2018a) p142.
3. IOI Group website 'Dato' Lee Yeow Chor'
4. RSP0 website 'IOI Corporation Berhad'
5. IOI Group (2017b)
6. See IOI Group (2017a) pp228-9 and Bumitama Agri Ltd (2018a) p105.
7. IOI Group website 'Estates and mills'
8. See Greenpeace International (2017a) pp28-9 and RSP0 (2013a).
9. Bunge (2018)
10. IOI Group website 'Refinery'
11. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp240-1
12. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp237, 239
13. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp239-40
14. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp241-2
15. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp240, 244
16. Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) pp243-4
17. RSP0 website 'Case tracker: IOI - IOI Pelita Sdn Bhd'
18. See Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) p246 and RSP0 website 'Case tracker: IOI - IOI Pelita Sdn Bhd'. The suspension of new certifications by IOI was lifted in February 2013, with the exception of IOI-Pelita.
19. RSP0 website 'Status of current disputes'

20. RSP0 website 'Case tracker: IOI - IOI Pelita Sdn Bhd'
21. RSP0 website 'Status of current disputes'
22. IOI Group (2017c); see also Rainforest Action Network & Forest Peoples Programme (2017)
23. IOI Group (2018a)
24. IOI Group (2018b); see also Bunge Loders Croklaan (2018b) pp10-3

KORINDO

1. Korindo website 'Group profile: At a glance'
2. Aidenvironment (2016) p13
3. Aidenvironment (2016) p15
4. Musim Mas (2016)
5. Mighty Earth (2017a) p10
6. Mighty Earth (2017a) p11
7. HCV Resource Network website 'Ongoing and historical evaluations of assessment reports'
8. Mongabay Indonesia (2017)
9. awasMIFEE (2017c)
10. Mapping analysis from Kepo Hutan and Global Forest Watch
11. Aidenvironment (2016) p15
12. Mighty Earth (2016)
13. Mighty Earth (2017a) pp10-1
14. Korindo (2016), copy held by Greenpeace

LEMBAGA TABUNG HAJI

1. Tabung Haji website 'About us'
2. Tabung Haji website 'Plantation'
3. TH Plantations Bhd (2018) p104
4. Information from East Kalimantan Plantation Agency (2012)
5. Chain Reaction Research (2017b)
6. RSP0 website 'PT. Synergy Oil Nusantara'
7. FGV (2018)

NOBLE

1. As inferred from Noble Group (2017) pp17, 149 and Noble Group (2018) p153. Noble Group's palm oil business is acknowledged in its annual reports among subsidiaries classified as held for sale (see most recently Noble Group (2018) p139). Noble Plantations Pte Ltd is the company listed on the RSP0 website as responsible for the business (see RSP0 website 'Noble Plantations Pte Ltd'), but it is not acknowledged as

a subsidiary of Noble Group in the annual reports.

2. Noble Group (2018) inside front cover
3. Noble Group (2018) p159
4. Noble Group (2018) pp25, 17
5. Noble Group (2018) p159
6. RSP0 website 'Noble Plantations Pte Ltd'
7. For example, the policy refers to the government's national peat map as proof that there is no peatland in PT PAL, rather than any actual peat survey. The HCS commitment is only a commitment to 'applying HCSA as defined by HCSA toolkit' and mentions discredited HCS surveys conducted by Nyoto Santoso in 2013 and 2014 - before significant deforestation in the concession. No new assessments are registered on the HCSA website (<http://highcarbonstock.org/registered-hcs-assessments/>). See Noble Plantations Pte Ltd (2017).

8. Noble Plantations Pte Ltd (2016) p2
9. Yun M & Humber Y (2014)
10. Noble Group (2016b)
11. Noble Group (2015a) p118 and Noble Group (2018) pp121, 139
12. Noble Group (2015a) p118
13. Noble Group (2016a) p188, Noble Group (2017) p149 and Noble Group (2018) p139
14. In 2013 the Council on Ethics that advises the Norwegian Government Pension Fund Global (GPF) recommended against any future investment in Noble Group, on the grounds that HCV assessments for the two concessions were inadequate to ensure the conservation of important habitats (source: Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015a) pp137-8); in June 2015 Norwegian life insurance and pensions company KLP also announced its intention to exclude Noble as a result of this decision (source: KLP (2015)).
15. Channel News Asia (2010)
16. Noble Plantations Pte Ltd (2017) p2
17. Environmental Investigation Agency & Telepak (2012)
18. Testimony of Bernadus Gilik at 'Profil Kasus, Temu Rakyat

- Korban Investasi Kehutanan dan Perkebunan Besar', an event organised by Yayasan Pusaka and other organisations in Waena, Jayapura, 4-7 November 2014.
19. Radar Sorong (2015)
20. Noble Group (2012)
21. Noble Plantations Pte Ltd (2017) p2
22. The concept of an Intact Forest Landscape (IFL), as mapped by WRI, Greenpeace and Transparent World in 2000 and 2013, refers to 'an unbroken expanse of natural ecosystems within the zone of current forest extent, showing no signs of significant human activity, and large enough that all native biodiversity, including viable populations of wide-ranging species, could be maintained'. See <http://www.intactforests.org/index.html>.
23. Based on peat survey data published in Wetlands International (2006). In January 2017 Noble Group stated that no new development on peat would take place (source: email to Greenpeace from Bell Pottinger, 11 January 2017).
24. RSP0 website 'Case tracker: PT Pusaka Agro Lestari'
25. Tabloid Jubi (2014)
26. Suara Papua (2014)
27. Antara Papua (2014)
28. Noble Group (2015b)
29. Tabloid Jubi (2015)
30. Salam Papua (2016)

NPC RESOURCES

1. NPC Resources (2017) pp37-8
2. NPC Resources website 'Company overview'
3. Analysis by Aidenvironment (2017), held internally

POSCO (POSCO DAEWOO CORPORATION)

1. POSCO Daewoo website 'Trade'
2. RSP0 website 'PT. Bio Inti Agrindo'
3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017a)
4. Aidenvironment (2016) pp35-7
5. awasMIFEE (2015)

RIMBUNAN HIJAU

1. Teng LJ (2017)
2. Jaya Tiasa (2017) pp6-7

3. Rimbunan Sawit Bhd (2017) p8
4. Subur Tiasa (2017) p12
5. Mafrica Corporation website <https://www.mafrica.com.my>
6. Analysis by Aidenvironment (2017), held internally
7. Rimbunan Hijau website 'Home'
8. Greenpeace analysis of trader dashboards
9. Global Witness (2017)
10. Global Forest Watch website 'Sarawak oil palm concessions'

SALIM

1. First Pacific Company Ltd (2018) p116
2. First Pacific Company Ltd (2018) p252
3. See IndoAgri (2017) and Greenpeace International (2017b).
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2016b) p2
5. IndoAgri (2018) p14 and PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2018) p39
6. Corporate registry profiles. PT DRM is owned by several companies including PT Adi Mulya and PT Mulia Abadi Lestari; a 50% stake is held by PT Citra Kencana Kasita. Two companies hold a 50% stake each in PT Citra Kencana Kasita: PT Zamrud Indahpersada and PT Wahanamulia Wiranusa. Anthoni Salim holds a 99% stake in both companies.
7. First Pacific Company Ltd (2018) pp86-7
8. PT Agro Mulia Lestari, PT Anekareksa Internasional, PT Berau Sawit Sejahtera, PT Bintuni Agro Prima Perkasa, PT Citra Palma Sejati, PT Duta Rendra Mulya, PT Duta Sejahtera Utama, PT Ekolindo Palm Lestari, PT Ekolindo Palm Nusantara, PT Gunta Samba Jaya, PT Menara Wasior, PT Perdana Sawit Plantation, PT Permata Nusa Mandiri, PT Putra Palma Cemerlang, PT Remboken Sawit, PT Rimbun Sawit Papua, PT Sawit Berkat Sejahtera, PT Sawit Golden Prima PT Sawit Khatulistiwa Lestari, PT Sawitindo Plantation,, PT Subur Karunia Raya, PT Tunas Agung Sejahtera, PT Wahana Murni Plantation, PT Wahana Tritunggal Cemerlang and PT Wira Inova Nusantara.
9. Corporate registry profiles
10. Greenpeace International (2017a) p49

11. PT Gunta Samba (2015)
12. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2016a) p111
13. Fakultas Pertanian Universitas Lampung (2017). Note other online job sites give the office address as elsewhere within the same complex, eg Blok A no 34 and Blok C no 56-57 - see, for example, <http://www.loker.id/profile/indo-gunta-group>.
14. Duta Merlin Blok B no 22-23. Source: Corporate registry profile.
15. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2016a) p111, PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015) p127 and PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2014) p125
16. Corporate registry profiles
17. In violation of government regulation 57/2016.
18. PT Ekolindo Palm Nusantara, PT Ekolindo Palm Lestari, PT Putra Palma Cemerlang and PT Remboken Sawit.
19. awasMIFEE (2018b)
20. PT Bintuni Agro Prima Perkasa, Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan
21. SK Bupati Tambrauw 521/297/2015
22. See Minister of Forestry Regulations 33/2010 and 28/2014.
23. The relevant legislation for Food Crops Business Licences is Minister of Agriculture Regulation 39/2010.
24. awasMIFEE (2018a)
25. The HGU area does not yet include the whole 19,368ha concession area. It is shown on the National Land Agency Map: <http://peta.bpn.go.id/>.
26. awasMIFEE (2018a)
27. Asian Human Rights Commission (2018)
28. awasMIFEE (2018a)

SAMLING

1. Samling Group website 'Our milestones: Corporate'
2. Bloomberg website 'Executive profile: Yaw Chee Ming'
3. Samling Group website 'Oil palm plantations'
4. Analysis by Aidenvironment (2017), held internally
5. Wilmar International Ltd (2018d)
6. Nelson PN et al (2014)
7. Wilmar International Ltd (2018d)

SUNGAI BUDI

1. PT Tunas Baru Lampung Tbk

2. PT Tunas Baru Lampung Tbk (2016) p2
3. See Redaksi (2016), foresthints.news (2016a) and foresthints.news (2016b).
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017a)
5. PT Tunas Baru Lampung Tbk website 'Plantation profile'
6. PT Tunas Baru Lampung Tbk website 'Plantation profile'

TEE FAMILY

1. Corporate registry profiles
2. Far East Holdings Bhd (2017) p112
3. Corporate registry profile
4. Far East Holdings Bhd (2018) pp16, 17, 19
5. Far East Holdings Bhd (2018) pp7, 29
6. Endau Palm Oil Mill Sdn Bhd, Future Prelude Sdn Bhd, Kilang Kosfarm Sdn Bhd, Kilang Sawira Makmur Sdn Bhd, Prosper Palm Oil Mill Sdn Bhd, Rompin Palm Oil Mill Sdn Bhd and Wujud Wawasan Sdn Bhd. Source: Far East Holdings Bhd (2018) p7.
7. Far East Holdings Bhd (2018) pp17, 19
8. See eg Bunge Loders Croklaan (2018a).
9. Corporate registry profile
10. Corporate registry profile
11. Numapo J (2013) pp125-30
12. Patjole C (2018)
13. The National (2018)
14. Far East Holdings Bhd (2018) p19
15. Ministry of Foreign Affairs, Malaysia (2010a)
16. Ministry of Foreign Affairs, Malaysia (2010b)
17. RSP0 (2017) pp6-7, clauses 5.2 and 5.3
18. RSP0 website 'Future Prelude Sdn Bhd'
19. Global Witness (2017)
20. Chain Reaction Research (2018b)
21. Orere B (2017)
22. Numapo J (2013) p141
23. 'Not preserved' in this context appears to mean 'not excluded from development plans'. See Numapo J (2013) p139.
24. Numapo J (2013) p127
25. Numapo J (2013) p128
26. Numapo J (2013) p141
27. ActNow PNG (2017a)
28. ActNow PNG (2017b)
29. InfoSawit (2017b)



1. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999) Article 4(1) (c) prescribes a plantation limit of 20,000ha per province for companies or corporate groups. This limit was retained when the location permit regulations were updated in Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (2015).
2. See Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (2015) Article 4 and Minister of Agriculture (2013), which updates Minister of Agriculture (2007).
3. The process is set out in two regulations: Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1993) and Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999).
4. President of the Republic of Indonesia (2010) Articles 160, 163 and 165 require Izin Prinsip and Izin Lokasi to be allocated based on district spatial plans.
5. As emphasised in the explanatory text accompanying Section 5 of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999).
6. This process is often abbreviated GRTT (ganti rugi tanah dan tanam tumbuh; compensation for land and plantings). It requires payment for land acquired from private titled landowners and compensation for landholders (such as local communities) who use state land. Source: President of the Republic of Indonesia (1996) Article 4.
7. This is for location permits of over 50ha. For smaller areas, shorter periods of one year (<25ha) or two years (25–50ha) apply. See Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999) Article 5(1); retained in Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (2015) Article 5(1).
8. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999) Article 5(3)
9. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1993) Article 3(5)
10. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (2015) Article 5(7)
11. Minister of Environment and Forestry (2016)
12. Forestry Law 1999 Article 50. The Prevention and Eradication of Forest Destruction Law 2013 Article 82(3) provides additional penalties for corporations of up to IDR 15 billion (US\$1m) and/or 15 years' imprisonment.
13. Under the latest (Minister of Environment and Forestry (2016)) regulations, only 'unproductive' production forest may be released, meaning unforested land dominated by shrublands, empty land or mixed gardens, except in provinces where no such unproductive land is found ('yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lain semak belukar, lahan kosong, dan kebun campur'). This represents an intention to preserve remaining forest areas, and was not present in the 2010 regulation it supersedes (No. P.33/MENHUT-II/2010).
14. Plantation Law 2004 Article 25
15. Plantation Law 2014 Article 67
16. Environment Law 2009 Article 109
17. The requirement is found in Plantation Law 2014 Article 68, and Article 109 states that failure to comply is a criminal offence carrying a penalty of up to three years' imprisonment for company staff or an IDR 3 billion (approximately US\$222,000) fine.
18. Plantation Law 2014 Article 98(2). Article 70 of the Environment Law 2009 similarly empowers the community to be actively involved in environmental monitoring.
19. Plantation Law 2014 Article 99(3). Article 100 also states that plantations must be developed in a participatory manner, including the public in planning and monitoring and enabling them to make suggestions and complaints.
20. Environment Law 2009 Article 65(2), with scope and examples of documents provided in the official explanatory note
21. Plantation Law 2014 Article 105
22. Plantation Law 2014 Article 45(1)(b)
23. Plantation Law 2014 Article 45(1)(a). Environment Law 2009 Article 111 also makes it a criminal offence for a government official to issue the plantation business permit in the absence of an environmental permit. This legal requirement has been in place since at least 2002, via Minister of Agriculture (2002) Article 10(k).
24. Plantation Law 2014 Article 17
25. Plantation Law 2014 Article 103
26. Minister of Agriculture (2013) Article 15; see also Plantation Law 2014 Article 58
27. Basic Agrarian Law 1960 Article 2(1)
28. Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1993) Article 7(1)
29. For plantation areas of less than 200ha, the land cultivation right certificate is issued by the provincial office of the BPN.
30. An expired HGU can be reissued to the same company if the land is still being put to the same use.
31. Minister of Agriculture (2007) Article 34(a)
32. Additionally, land cultivation right may not be issued over any State Forest area before that status is changed. See President of the Republic of Indonesia (1996) Article 4(2).
33. Minister of Forestry (2003) Article 15(1)(c)
34. The Constitutional Court (2015) ruled (see p294 point 1.8) that the correct and valid formulation of Article 42 of the Plantation Law 2014 is that for a company to legally carry out plantation operations it must have secured both land rights AND a plantation business permit. The original wording of that article in the Plantation Law 2014 was land rights AND/OR a plantation business permit.
35. Minister of Agriculture (2015) p41, criterion 1.4, and SawitIndonesia.com (2015)
36. Minister of Environment and Forestry (2016) Article 22
37. Minister of Environment and Forestry (2015)
38. AAK (2018)
39. Apical website 'Supply chain map'
40. Cargill (2018)
41. Bunge Lodders Croklaan website 'List of mills'
42. GAR website 'Supply chain map'
43. Musim Mas website 'Supply chain map'
44. Olam (2018)
45. Sime Darby website 'Open palm traceability dashboard'. More recent lists have been made available since our analysis.
46. Wilmar International website 'Supply chain map'
47. IOI Group website 'List of mills'
48. Fuji Oil Holdings (2018)
49. Louis Dreyfus Co (2018)
50. Mewah (2018)
51. See Greenpeace International (2018a).
52. Colgate-Palmolive (2018)
53. The mill list was published in July 2018 as an annex to Danone's 2015 NDPE commitment; see Danone (2015) pp11–13.
54. Ferrero (2017)
55. General Mills (2018) and AAK (nd); see General Mills website 'Statement on responsible palm oil sourcing'
56. The Hershey Company (2017)
57. Johnson & Johnson (nd)
58. Kellogg Company (2018)
59. L'Oréal (nd)
60. Mars (2018)
61. Mondelēz International (2018)
62. Nestlé (2018)
63. PepsiCo (2018)
64. P&G website 'P&G's direct palm suppliers – 2017'
65. PZ Cussons (nd)
66. Reckitt Benckiser (nd)
67. Unilever (nd)
68. Kraft Heinz (2018)
69. In a few cases, a concession or a mill is currently defined as 'linked' to a particular producer group rather than as an outright group member. Some concessions or mills are defined as 'potentially' belonging to a group – for example where unofficial evidence such as LinkedIn profiles or social media indicates ownership but there is no other evidence to establish it, or in some cases where a mill name is generic, shared with one or more other mills, or otherwise not unique to a producer group and where GPS coordinates (which would potentially locate the mill in a known concession) are not disclosed.
70. Chain Reaction Research (2017c)
71. Chain Reaction Research (2018c) pp8–9

BIBLIOGRAFI

AAK (2018) 'Public mill list' May 2018 <https://aak.com/sites-assets/sustainable-growth/aak-public-mill-list-may-2018.pdf>

AAK (nd) 'Public mill list' <http://www.generalmills.com/~media/Files/Issues/aak-public-mill-list.pdf?la=en>

ABNR (2018) 'Businesses now required to provide government with information on beneficial ownership' 13 March 2018 http://www.abnrilaw.com/news_detail.php?send_news_id=308&year=2018

ActNow PNG (2017a) 'Bewani ILG Chairmen "assaulted and forced to sign SABL agreements"' 6 October 2017 <http://actnowpng.org/blog/blog-entry-bewani-ilg-chairmen-assaulted-and-forced-sign-sabl-agreements>

ActNow PNG (2017b) 'Police and army accused of serving SABL loggers' 7 September 2017 <http://actnowpng.org/blog/blog-entry-police-and-army-accused-serving-sabl-loggers>

Aidenvironment (2016) 'Burning paradise: The oil palm practices of Korindo in Papua and North Maluku' 1 September 2016, commissioned by Mighty, the Korea Federation for Environmental Movements, SKP-KAMe Merauke and PUSAKA <http://www.aidenvironment.org/wp-content/uploads/2016/09/2016-08-25-FINAL-Korindo-report-English.pdf>

Aidenvironment (2017) 'Nordic investment in banks financing Indonesian palm oil' <http://www.aidenvironment.org/publication/nordic-investments-in-banks-financing-indonesian-palm-oil/>

Al-Mahmood SZ (2015) 'Palm-oil migrant workers tell of labor abuses on Malaysian plantations' 26 July 2015 *The Wall Street Journal* <https://www.wsj.com/articles/palm-oil-migrant-workers-tell-of-abuses-on-malaysian-plantations-1437933321>

Alexander H (2015) 'Aset lahan Central Cipta Murdaya di Jakarta 150 hektar' 4 September 2015 Kompas.com <http://properti.kompas.com/read/2015/09/04/112741521/Aset.Lahan.Centra.Cipta.Murdaya.di.Jakarta.150.Hektar>

Amnesty International (2016a) 'The great palm oil scandal: Labour abuses behind big brand names' <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2151842016ENGLISH.PDF>

Amnesty International (2016b) 'Palm oil: Global brands profiting from child and forced labour' 30 November 2016 <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/palm-oil-global-brands-profiting-from-child-and-forced-labour/>

Anglo-Eastern Plantations PLC (2017) '2016 annual report' <http://www.angloeastern.co.uk/~media/Files/A/Anglo-Eastern/reports-and-documents/annual-report-and-accounts-2016-v2.pdf>

Antara Papua (2014) 'Bupati Mimika resmi hentikan operasional perkebunan sawit PT PAL' 17 December 2014 (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1113>)

Apical website 'Supply chain map' <https://www.sustainability.apicalgroup.com/supply-chain-map/>

Arlinus Z (2015) 'Sad, scared, and alone: The baby orangutan orphaned by palm oil' 18 November 2015 Greenpeace <http://www.greenpeace.org/usa/sad-scared-and-alone-the-baby-orangutan-orphaned-by-palm-oil/>

Asian Human Rights Commission (2018) 'Urgent appeal case: AHRC-UAC-035-2018' 5 June 2018 <http://www.ahrchk.org/ruleofflawasia.net/news.php?id=AHRC-UAC-035-2018>

Asrida E (2018) 'Catatan dari Papua: Konflik agraria belum usai, bagi-bagi hutan kepada pemodal jalan terus' 1 January 2018 <http://www.mongabay.co.id/2018/01/01/catatan-dari-papua-konflik-agraria-belum-usai-bagi-bagi-hutan-kepada-pemodal-jalan-terus/>

Auriga et al (2018) 'APP and APRIL violate zero-deforestation policies with wood purchases from Djarum Group concessions in East Kalimantan' 15 August 2018 <http://auriga.or.id/app-and-april-violate-zero-deforestation-policies-with-wood-purchases-from-djarum-group-concessions-in-east-kalimantan/>

awasmiffee (2014) 'PT Papua Agro Sakti pays 3.6 billion rupiah in land

compensation to 8 clan chiefs in Merauke' 12 September 2014 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1068>

awasmiffee (2015) 'Merauke burns - but were the plantations to blame?' 20 November 2015 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1346>

awasmiffee (2017a) 'ANJ's response to criticism of its recent forest clearance' 9 November 2017 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1569>

awasmiffee (2017b) 'Gama Plantation: Building on deforestation and conflict' 13 September 2017 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1538>

awasmiffee (2017c) 'Korindo strikes back against NGO campaign' 28 August 2017 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1527>

awasmiffee (2017d) 'Kronologis kasus kekerasan aparat BRIMOB PT. PPM terhadap masyarakat pemilik tanah adat di Sorong Selatan' 23 November 2017 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1577>

awasmiffee (2018a) 'Mpur people return 100 million rupiah to PT Bintuni Agro Prima Perkasa, attempt to take their land back' 12 August 2018 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1640>

awasmiffee (2018b) 'September 29th 2014, a terrible day for Papua's forests' 7 January 2018 <https://awasmiffee.potager.org/?p=1600>

Aziz A (2017) 'Peat forest clearance in Indonesia approved by authorities, says FGV' 28 April 2017 *TheEdgeMarkets.com* <http://www.theedgemarkets.com/article/peat-forest-clearance-indonesia-approved-authorities-says-fgv>

Basic Agrarian Law 1960 (UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-5-tahun-1960-920>

Basik-Basik M (2016) 'Muting dulu dan kini, sebuah profil kampung' in ELSAM (2016) 'Pembela HAM menulis bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua seri 1' <http://elsam.or.id/2016/11/pembela-ham-menulis-bunga-rampai-pendokumentasian-situ>

asi-ham-di-tanah-papua-seri-1/

Baskoro NB (2017) 'Dilantik, Bupati Kotawaringin Barat jadi bupati perempuan pertama di Kalteng' 22 May 2017 Kompas.com <http://regional.kompas.com/read/2017/05/22/16192851/dilantik.bupati.kotawaringin.barat.jadi.bupati.perempuan.pertama.di.kalteng>

BCA (2015) '2014 annual report' <https://www.bca.co.id/en/Tentang-BCA/Hubungan-Investor/Laporan-Tahunan>

Bellantonio M et al (2017) 'The ultimate mystery meat: Exposing the secrets behind Burger King and global meat production' *Mighty Earth* <http://www.mightyearth.org/mysterymeat/>

Beritabatavia.com (2012) 'Dipolisikan, PT Sawit Mas Perkasa Jambi tipu petani sawit' 15 February 2012 <http://beritabatavia.com/detail/10756/dipolisikan-pt-sawit-mas-perkasa-jambi-tipu-petani-sawit>

Beritasatu.com (2012) 'Indonusa Group mulai rambah bidang properti' 30 September 2012 <http://www.beritasatu.com/hunian/74815-indonusa-group-mulai-rambah-bidangproperti.html>

Blog Souvenir123.com (2014) 'Souvenir kantor pen metal dualtip PB5116 untuk PT Citra Borneo Indah di Jakarta' 28 February 2014 <http://kadowedding.blogspot.com/2014/02/souvenir-kantor-pen-metal-dualtip.html>

Bloomberg website 'Executive profile: Lau Cong Kiong' <https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=135037848&privcapId=32429002&previousCapId=32429002&previousTitle=Pt%2520Ciliandra%2520Perkasa> accessed 29 July 2018

Bloomberg website 'Executive profile: Yaw Chee Ming' <https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/person.asp?personId=42409076&privcapId=9870435> accessed 16 July 2018

bondet_phe (2017) 'PT. SKR [Subur Karunia Raya] - Meyado Estate, Distrik Meyado - Bintuni - West Papua' 2 February 2017 Instagram <https://www.instagram.com/p/BQAalXRgqJI/>

Brandeis L (1914) *Other People's Money and How the Bankers Use It* (Frederick A Stokes Company: New York)

Briggs H (2017) 'Sumatran rhino "hanging on by a thread"' 15 December 2017 BBC News <http://www.bbc.com/news/science-environment-42352256>

Britama.com (2015) 'Sejarah dan profil singkat Broker RG (PT Profindo International Securities)' 10 October 2015 <http://britama.com/index.php/2015/10/sejarah-dan-profil-singkat-broker-rg/>

Bumitama Agri Ltd (2012) 'Prospectus dated 3 April 2012' http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-WWON6/0x0x663207/8E4A2D0B-7C80-4B7E-BD70-43C682510F24/Bumitama_Agri_Ltd_Prospectus.pdf

Bumitama Agri Ltd (2013) 'Annual report 2012' http://files.shareholder.com/downloads/AMDA-WWON6/6293224656x0x663208/EA43D02F-435D-4AF8-B37F-4B3A8E6AFE14/Bumitama_Agri_Ltd_Annual_Report_2012.pdf

Bumitama Agri Ltd (2014a) 'Matter relating to Ijin Lokasi in respect of the plantation land of PT. Hatiprima Agro' 7 August 2014 <https://www.rspo.org/file/Bumitama-HPA%20Announcement%20of%20Notice%20of%20Appeal.pdf>

Bumitama Agri Ltd (2014b) 'Termination of GY Cooperation Agreement and GHJ Cooperation Agreement' 7 August 2014 <http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/Bumitama-Termination-of-GY-GHL-Agreements.pdf>

Bumitama Agri Ltd (2015a) 'Asset acquisitions and disposals: Matter relating to Ijin Lokasi in respect of the plantation land of PT. Hatiprima Agro' 9 January 2015 <http://www.rspo.org/files/download/430e1889b058b4e>

Bumitama Agri Ltd (2015b) 'Sustainability policy' 13 August 2015 http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/Bumitama_Sustainability_Policy.pdf

Bumitama Agri Ltd (2016a) 'Acquisition and capitalisation of PT Damai Agro Sejahtera' announcement to Singapore Exchange 20 December 2016 <http://infopub.sgx.com/FileOpen/Bumitama%20-%20DAS%20Acquisition%20201216.ashx?App=Announcement&FileID=433594>

Bumitama Agri Ltd (2016b) 'Acquisition and capitalisation of PT Langgeng Makmur Sejahtera' announcement to Singapore Exchange 7 June 2016 <http://infopub.sgx.com/FileOpen/Bumitama%20-%20LMS%20Acquisition%20070616.ashx?App=Announcement&FileID=408159>

Bumitama Agri Ltd (2016c) 'Proposed acquisition of 95% of the issued share capital of PT. Sukses Manunggal Sawitindo' 3 February

2016 http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/Bumitama_-_SMS_Acquisition_030216.pdf

Bumitama Agri Ltd (2016d) 'Annual report 2015' http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/BAL_Annual_Report_2015.pdf

Bumitama Agri Ltd (2017a) 'Further clarification on the acquisition of PT DAS in Ketapang district' 6 June 2017 <http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/News%20Release%20-%20PT%20DAS%20clarification.pdf>

Bumitama Agri Ltd (2017b) 'Growing sustainably: Sustainability report 2016' <http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/Bumitama%20-%20Sustainability%20Report%202016.pdf>

Bumitama Agri Ltd (2017c) Letter to RSP0 Grievance Manager, 7 November 2017, signed by Martin Mach

Bumitama Agri Ltd (2018a) 'Annual report 2017' <http://ir.bumitama-agri.com/annuals-proxies.cfm>

Bumitama Agri Ltd (2018b) 'Bumitama refers to the article: "Moment of truth"' news release 12 April 2018 <http://www.bumitama-agri.com/asset/upload/storage/report/Bumitama%20updates%20on%20LSM%20and%20DAS%20conservation%20120418.pdf>

Bumitama Agri Ltd website 'Contact us' <http://www.bumitama-agri.com/page/layout/38/contact-us> accessed 14 July 2018

Bumitama Agri Ltd website 'Dato' Lee Yeow Chor' <http://www.bumitama-agri.com/page/layout/5/1/board-of-director>

Bunge (2018) 'Bunge completes acquisition of IOI Lodders Croklaan' 1 March 2018 <https://www.bunge.com/news/bunge-completes-acquisition-ioi-lodders-croklaan>

Bunge Lodders Croklaan (2018a) 'Global full mill list' http://europe.bungelodders.com/images/applications/Bunge_Total_Mill_List_2017Q2_-_2018Q1.pdf

Bunge Lodders Croklaan (2018b) 'Grievance list update May 2018' http://europe.bungelodders.com/images/applications/Bunge_Lodders_Croklaan_Grievance_List_May_2018.pdf

Bunge Lodders Croklaan website 'List of mills' <http://europe.bungelodders.com/taking-responsibility/list-of-mills/>

Bursa Malaysia website 'Company announcements [announcement dated 26 May 2017]' <http://www.bursamalaya>

sia.com/market/listed-companies/company-announcements/5440513

Cargill (2018) 'Cargill global mill list - 2017Q4' <https://secure1.foodreg.net/ksportal/documents/32972/233173/Cargill+Global+Mill+List+-+2017Q4%2C+v180409a.pdf/e04f7526-15fd-5bfd-2837-ecc50a5c190c>

Cartwright J (2016) 'The private life of planet Earth: David Attenborough on the world's greatest challenge' 2 August 2016 <http://sea-globe.com/david-attenborough-interview-issue/>

Castle J et al (2007) *Indonesian Business: The Year in Review 2007* (Jakarta: Equinox Publishing)

Chain Reaction Research (2014) 'Comprehensive risk analysis: Bumitama Agri Ltd' <https://chainreactionresearch.com/reports/bumitama-agri-ltd/>

Chain Reaction Research (2017a) 'Indonesian palm oil's stranded assets: 10 million football fields of undevelopable land' 8 February 2017 <https://chainreactionresearch.files.wordpress.com/2017/02/palm-oil-stranded-land-size-equals-ten-million-football-fields-crr-170407.pdf>

Chain Reaction Research (2017b) 'TH Plantations and PT Synergy Oil Nusantara: Leakage risks at plantation and refinery' 17 April 2017 <https://chainreactionresearch.com/report/th-plantations-and-pt-synergy-oil-nusantara-leakage-risks-at-plantation-and-refinery/>

Chain Reaction Research (2017c) 'Unsustainable palm oil faces increasing market access risks: NDPE sourcing policies cover 74 percent of Southeast Asia's refining capacity' 1 November 2017 <https://chainreaction-research.files.wordpress.com/2017/10/unsustainable-palm-oil-faces-increasing-market-access-risks-final-1.pdf>

Chain Reaction Research (2018a) 'Shadow companies present palm oil investor risks and undermine NDPE efforts' 21 June 2018 <https://chain-reactionresearch.com/report/shadow-companies-present-palm-oil-investor-risks-and-undermine-ndpe-efforts/>

Chain Reaction Research (2018b) 'The chain: Bewani oil palm mill in PNG may supply palm oil leakage market' 9 August 2018 <https://chainreactionresearch.com/the-chain-bewani-oil-palm-mill-in-png-may-supply-the-palm-oil-leakage-market/>

Chain Reaction Research (2018c) 'The financing of leakage refiners: Shareholders and loan issuers include international financial institutions with palm oil policies' 2 May 2018 <https://chainreactionresearch.com/wp-content/uploads/2018/05/Leakage-Refiners-CRR-020518-Final.pdf>

Channel News Asia (2010) 'Noble Group invests in Indonesian palm oil producer' 15 June 2010 <http://www.thisisnoble.com/in-the-press/285-noble-group-invests-in-indonesian-palm-oil-producer.html>

CIFOR (nd) 'Position case of Martias' http://www.cifor.org/ilea/home/ilea_ref/indicators/cases/decision/Martias.htm

Colchester M, Jalong T & Chuo WM (2013) 'Sarawak: IOI-Pelita and the community of Long Teran Kanan' in Colchester M and Chao S (eds) 'Conflict or consent? The oil palm sector at a crossroads' FPP, Sawit Watch and Tuk Indonesia <https://www.forestpeoples.org/en/topics/palm-oil-rspo/publication/2013/conflict-or-consent-chapter-9-sarawak-ioi-pelita-and-community>

Colgate-Palmolive (2018) 'Statement of palm oil mills disclosure' https://www.colgatepalmolive.com/content/dam/cp-sites/corporate/corporate/en_us/corp/locale-assets/pdf/Statement_Palm_Oil_Mills_Disclosure_Feb_12_2018.pdf

Compliance Advisor/Ombudsman (2009) 'Audit report: CAO audit of IFC CAO compliance' 19 June 2009 http://www.cao-ombudsman.org/uploads/case_documents/Combined%20Document%201_2_3_4_5_6_7.pdf

Constitutional Court (2015) 'Putusan no. 138/PUU-XIII/2015' Re: Challenge to various clauses of Plantation Law 2014 by Oil Palm Farmers' Union (Serikat Petani Kelapa Sawit), Sawit Watch et al http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/138_PUU-XIII_2015.pdf

Consumer Goods Forum (2010) 'Consumer goods industry announces initiatives on climate protection' 29 November 2010 https://www.theconsumergoodsforum.com/press_releases/consumer-goods-industry-announces-initiatives-on-climate-protection/

Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015a) 'Annual

report 2014 (unofficial English translation)' <http://nettsteder.regjeringen.no/etikkradet3/files/2017/02/Council-on-Ethics-2014-Annual-Report-1.pdf>

Council on Ethics for the Government Pension Fund Global (2015b) 'Recommendation to exclude Daewoo International Corporation and POSCO from the Government Pension Fund Global' 27 March 2015 (unofficial English translation) <http://etikkradet.no/files/2015/08/Recommendation-Daewoo-270315.pdf>

Danone (2015) 'Palm oil policy' November 2015, annex added July 2018 http://danone-danonecom-prod.s3.amazonaws.com/PUBLICATIONS/Palm_Oil_Policy/2015_Palm_Oil_Policy_Updated2018.pdf

Daubach T (2018) 'Executives of palm oil giant Wilmar resign a week after Greenpeace report' 5 July 2018 *Eco-Business* <http://www.eco-business.com/news/executives-of-palm-oil-giant-wilmar-resign-a-week-after-greenpeace-report/>

Delegation of the European Union to Malaysia (2018) 'EU's revised Renewable Energy Directive and its impact on palm oil' 18 January 2018 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/press_release_ep_vote_on_palm_oil_18.01.2018.pdf

Dolan K (2016) 'Hartono brothers are Indonesia's richest for 8th consecutive year' 30 November 2016 *Forbes* <https://www.forbes.com/sites/kerryadolan/2016/11/30/indonesia-50-richest-people-2016-hartono-number-one/#3fe6d82471f9>

Environment Law 2009 (UU No. 32/2009 Tentang Lingkungan Hidup) <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/1t4b2885d00d163/node/1t4b2885a7bc5ad>

Environmental Investigation Agency (2015) 'Ex timber crook's palm oil firm threatens orangutan habitat' 8 June 2015 <https://eia-international.org/dirty-tricks-of-ex-timber-crooks-palm-oil-firm-threatens-orangutan-habitat>

Environmental Investigation Agency & Telepak (2012) 'Clear-cut exploitation' May 2012 <https://eia-international.org/wp-content/uploads/EIA-Clear-Cut-Exploitation-FINAL-v2.pdf>

Fakultas Pertanian Universitas Lampung (2017) 'Indo Gunta Group "Lowongan Kerja" 2017' 5 September 2017 <http://fp.unila.ac.id/indo-gunta-group-lowongan-kerja-2017/>

Far East Holdings Bhd (2017)

'Annual report 2016' http://www.fehb.com.my/images/annual_report/2016.pdf

Far East Holdings Bhd (2018)

'Annual report 2017' http://www.fehb.com.my/images/annual_report/2017.pdf

Ferrero (2017) '2017 January-June 2017 palm oil supplier mill list' <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ferrero-static/globalcms/documenti/2904.pdf>

FGV (2016a) 'FELDA Group withdraws the Roundtable Sustainable Palm Oil Principles and Criteria certificates on 3 May 2016' <http://www.feldaglobal.com/wp-content/uploads/2016/05/RSP0-Certificate-Withdrawal-1.pdf>

FGV (2016b) 'Group sustainability policy' <http://www.feldaglobal.com/wp-content/uploads/2016/10/Group-Sustainability-Policy-edited-external.pdf>

FGV (2017) 'Annual integrated report 2016' <http://ir.chartnexus.com/fgv/docs/ar/FGV%20AIR2016.pdf>

FGV (2018) 'FGV's response to Mongabay article "Major Islamic financier singled out for deforestation in Indonesia" dated 1st May 2018' 4 May 2018 <http://www.feldaglobal.com/fgvs-response-to-mongabay-article-major-islamic-financier-singled-out-for-deforestation-in-indonesia-dated-1st-may-2018/>

Firdaus E (2013) 'Ketua KPK Berang dengan Vonis Hartarti Murydaya' 4 February 2013 *TribunNews.com* <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/02/04/ketua-kpk-berang-dengan-vonis-hartarti-murydaya>

First Pacific Company Ltd (2017) 'Annual report 2016' <http://www.firstpacific.com/wp-content/uploads/2015/08/ew0142.pdf>

First Pacific Company Ltd (2018) 'Annual report 2017' http://www.firstpacific.com/wp-content/uploads/2018/06/ar2017_2.pdf

First Resources (2007) '[IPO] Prospectus dated December 3, 2007' <http://infopub.sgx.com/FileOpen/First%20Resources.ashx?App=IPO&FileID=3472>

First Resources (2012) 'RSP0 annual communication of progress 2011-2012' https://www.rspo.org/sites/default/files/ACOP2012_GRW_1-0047-08-000-00-2.pdf

First Resources (2015) 'Policy on sustainable palm oil' 1 July 2015 <http://www.first-resources.com/sustainability.php?pc=policy>

First Resources (2017a) 'Annual report 2016' http://www.first-resources.com/upload/file/20170404/20170404034409_56677.pdf

First Resources (2017b) 'Fangiono Agro Plantation Group ("FAP Agri")' 30 June 2017 http://www.first-resources.com/upload/file/20170706/20170706102449_30499.pdf

First Resources (2017c) 'Grievance case briefs: Fangiono Agro Plantation Group ("FAP Agri")' http://www.first-resources.com/upload/file/20170106/20170106104746_38546.pdf

First Resources (2018a) 'Annual report 2017' http://www.first-resources.com/upload/file/20180406/20180406003825_13847.pdf

First Resources (2018b) 'Changes in shareholding in subsidiaries' 25 June 2018 http://www.first-resources.com/upload/file/20180625/20180625091430_28970.pdf

First Resources (2018c) 'Response to report released by Chain Reaction Research on "Shadow companies present palm oil investor risks and undermine NDPE efforts"' 12 July 2018 http://www.first-resources.com/upload/file/20180712/20180712034900_73317.pdf

First Resources website 'Contact us' <http://www.first-resources.com/contact.php>

Forbes website 'Profile: Abdul Rasyid' <https://www.forbes.com/profile/abdul-rasyid/> accessed 14 July 2018

Forest Peoples Programme (2018) 'Wilmar International implicated in police shooting of two farmers on oil palm estate' 9 January 2018 <http://www.forestpeoples.org/en/responsible-finance-private-sector-palm-oil-rspo/news-article/2018/wilmar-international-implicated>

Forest Trends (2017) 'Supply change: Tracking corporate commitments to deforestation-free supply chains, 2017' http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_5521.pdf

foresthints.news (2016a) 'Listed company develops new palm oil plantation in last year's burned peatlands' 24 November 2016 <http://foresthints.news/listed-company-develops-new-palm-oil-plantation-in-last-year-burned-peatlands>

foresthints.news (2016b) 'Top officials investigate extent of

palm oil company's peatland violations' 28 November 2016 <http://foresthints.news/top-officials-investigate-extent-of-palm-oil-company-peatland-violations>

foresthints.news (2018a) 'GAMA operations exemplify irresponsible company' 12 April 2018 <http://foresthints.news/gama-operations-exemplify-irresponsible-company-says-rfn>

foresthints.news (2018b) 'Palm oil expansion in LiDAR-mapped peat still undetected' 23 April 2018 <http://www.foresthints.news/palm-oil-expansion-in-lidar-mapped-peat-still-undetected>

foresthints.news (2018c) 'Public response by palm oil company raises further legal questions' 23 May 2018 www.foresthints.news/public-response-by-palm-oil-company-raises-further-legal-questions

Forestry Law 1999 (UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan) <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/1t4f196a25e3d3c/node/254>

Frazer S (2015) 'Goodman Fielder: Shareholders of iconic Australasian food company vote in favour of foreign takeover' 26 February 2015 *ABC News* <http://www.abc.net.au/news/2015-02-26/goodman-fielder-shareholders-vote-in-favour-of-foreign-take-over/6267042>

Friedrich J, Ge M & Pickens A (2017) 'This interactive chart explains world's top 10 emitters, and how they've changed' 11 April 2017 *World Resources Institute* <http://www.wri.org/blog/2017/04/interactive-chart-explains-worlds-top-10-emitters-and-how-theyve-changed>

Fuji Oil Holdings (2018) 'Fuji Oil Group palm oil mill list (July - December 2017)' https://www.fujioilholdings.com/pdf/en/csr/supplychain_database/fuji_oil_group_h2_2017_mill_list_publish.pdf

GAR website 'Supply chain map' <https://goldenagri.com.sg/sustainability-dashboard/supply-chain-map>

Gaveau DFL et al (2016) 'Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo' *Scientific Reports* <https://www.cifor.org/library/6227/rapid-conversions-and-avoided-deforestation-examining-four-decades-of-industrial-plantation-expansion-in-borneo/>

General Mills (2018) 'Palm oil

- master list' March 2018 <http://www.generalmills.com/~media/Files/Issues/PalmOil%20MasterList%20318.pdf?la=en>
- General Mills website 'Statement on responsible palm oil sourcing' <http://www.generalmills.com/en/News/Issues/palm-oil-statement>
- Genting Berhad (2018) 'Annual Report 2017' <http://www.genting.com/wp-content/uploads/2018/04/Genting-Berhad-Annual-Report-2017.pdf>
- Genting Group website 'Home' <http://www.genting.com/> accessed 14 July 2018
- Genting Group website 'Stock information' <http://www.genting.com/stock-information/> accessed 14 July 2018
- Genting Plantations Berhad (2016) 'RSPO annual communications of progress 2016' <https://www.rspo.org/members/2/Genting-Plantations-Berhad>
- Genting Plantations Berhad (2017) 'Update on proposed joint venture for oil palm cultivation in kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat, Republic of Indonesia ("JV") Bursa Malaysia company announcement, 25 January 2017' http://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download?id=77509&name=EA_GA_ATTACHMENTS
- Genting Plantations Berhad (2018) 'Annual Report 2017' http://www.gentingplantations.com/wp-content/uploads/2018/04/GENP_AR17.pdf
- Genting Plantations website 'Directors & management' http://www.gentingplantations.com/corporate_profile/director-management/ accessed 14 July 2018
- George P (2018) Email from Perpetua George, General Manager for Group Sustainability, Wilmar International, to Greenpeace International, 25 May 2018
- GFED website '2015 fire season' <http://www.globalfiredata.org/updates.html#2015>
- Global Forest Watch website 'Sarawak oil palm concessions' http://data.globalforestwatch.org/datasets/ff96c17423404ac6951ad77c-8cf3f743_7 accessed 16 July 2018
- Global Witness (2017) 'Stained trade' 1 August 2017 <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/forests/stained-trade/>
- Gore-Langton L (2017) 'Nestlé "very concerned" over deforestation links to Wilmar palm oil' 26 March 2017 <https://www.foodnavigator.com/Article/2017/03/27/>
- Nestle-very-concerned-over-deforestation-links-to-Wilmar-palm-oil Government of Indonesia (2001) 'Law no. 21 of 2001, on special autonomy for the Papua Province' 22 October 2001 <http://www.refworld.org/docid/46af542e.html>
- Greenomics Indonesia (2014) 'Wilmar's suppliers deforestation' [http://www.greenomics.org/docs/Wilmar's-suppliers_deforestation_\(LowRes\).pdf](http://www.greenomics.org/docs/Wilmar's-suppliers_deforestation_(LowRes).pdf)
- Greenomics Indonesia (2015) 'Wilmar's palm oil products continue to be associated with deforestation' http://www.greenomics.org/docs/IPOP_Implementation_Report-09_Greenomics.pdf
- Greenpeace International (2014) 'Indonesian President dams canal, vows to protect peatlands' 27 November 2014 <http://www.greenpeace.org/archive-international/en/press/releases/2014/Indonesian-President-dams-canal-vows-to-protect-peatlands/>
- Greenpeace International (2017a) 'Dirty bankers: How HSBC is financing forest destruction for palm oil' January 2017 <https://www.greenpeace.org/archive-international/en/publications/Campaign-reports/Forests-Reports/Dirty-Bankers/>
- Greenpeace International (2017b) 'IndoAgri's new palm oil policy wholly inadequate, also leaves out many Salim Group companies' 14 March 2017 <http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/2017/IndoAgri-new-palm-oil-policy-wholly-inadequate-also-leaves-out-many-Salim-Group-companies/>
- Greenpeace International (2017c) 'Still cooking the climate: How the palm oil industry continues to drive deforestation' November 2017 <http://www.greenpeace.org/seasia/Press-Centre/publications/Still-Cooking-the-Climate/#a0>
- Greenpeace International (2018a) 'Moment of truth' 19 March 2018 <https://www.greenpeace.org/international/publication/15395/moment-of-truth/>
- Greenpeace International (2018b) 'New deforestation revealed as Indonesian minister arrives in EU to defend palm oil industry' 27 April 2018 <https://www.greenpeace.org/international/press-release/16194/new-deforestation-revealed-as-indonesian-minister-arrives-in-eu-to-defend-palm-oil-industry/>
- Greenpeace International (2018c) 'Rogue trader: Keeping deforestation in the family' 25 June 2018 <https://www.greenpeace.org/international/publication/17241/rogue-trader-indonesia-deforestation-wilmar-gama/>
- Hadinaryanto SE (2014) 'Special report: Palm oil, politics, and land use in Sumatra (part ii)' 26 April 2014 Mongabay <https://news.mongabay.com/2014/04/special-report-palm-oil-politics-and-land-use-in-sumatra-part-ii/>
- Hagen C (2018) Email from Courtney Hagen to *Asia Times*, 13 June 2018
- Hansen MC et al (2013) 'High-resolution global maps of 21st-century forest cover change' *Science* 342: 850-53; with updates through 2017, available at https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest/download_v1.5.html
- Harris N et al (2015) 'With latest fires crisis, Indonesia surpasses Russia as world's fourth-largest emitter' 29 October 2015 World Resources Institute <https://www.wri.org/blog/2015/10/latest-fires-crisis-indonesia-surpasses-russia-world%E2%80%99s-fourth-largest-emitter>
- Harvey F (2017) 'Prince Charles: Companies chased away from Amazonian rainforests now destroying plains' 25 October 2017 *The Guardian* <https://www.theguardian.com/environment/2017/oct/25/amazon-rainforests-prince-charles-cerrado-manifesto>
- HCV Resource Network website 'Ongoing and historical evaluations of assessment reports' <https://www.hcvnetwork.org/als/public-summaries>
- HCVRN & HCSA (2017) 'HCV-HCSA assessment manual' prepared by Proforest and Daemeter for the HCV Resource Network Assessor Licensing Scheme and the High Carbon Stock Approach <https://www.hcvnetwork.org/resources/hcv-hcsa-assessment-manual>
- High Carbon Stock Approach website 'The HCS Approach toolkit' <http://highcarbonstock.org/the-hcs-approach-toolkit/>
- House of Representatives of the Republic of Indonesia website 'Members of Parliament: Period 2014-2019' <http://www.dpr.go.id/en/anggota>
- HSA Group website 'Commodities' <http://www.hsagroup.com/business-activities/core-business/commodities.aspx> accessed 5 June 2018; archive available at <https://web.archive.org/web/20171218223219/http://www.hsagroup.com/business-activities/core-business/commodities.aspx>
- HSA Group website 'Environmental statement' <http://www.hsagroup.com/statement/environmental-statement.aspx> accessed 14 July 2018
- HSA Group website 'Group leadership' <http://www.hsagroup.com/explore-hsa/group-leadership.aspx> accessed 14 July 2018
- HSA Group website 'Indonesian companies' <http://www.hsagroup.com/our-companies/indonesia.aspx?p=0> accessed 14 July 2018
- HSA Group website 'Malaysian companies' <http://www.hsagroup.com/our-companies/malaysia.aspx> accessed 14 July 2018
- Iceland website 'Palm oil' <https://www.iceland.co.uk/environment>
- IJM Plantations (2017) '2017 annual report' http://www.ijm.com/plantation/media/ijmp_ar2017.pdf
- IJM Plantations website 'Director profile' http://www.ijm.com/web/ijmplt/ir_structure_ijmplt_dirs_joseph.htm accessed 15 July 2018
- Indigo A (2018a) Fax from Andy Indigo to Greenpeace International, 20 June 2018, reproduced in Greenpeace International (2018c)
- Indigo A (2018b) 'GAMA Plantations to include 2 Papua's entities into Collaborative Agreement with Aidenvironment Asia to Develop and Implement NDPE Policy' 31 August 2018
- Indigo A & Adriani (2018) 'GAMA Plantations and Aidenvironment Asia enter into collaborative agreement to develop and implement NDPE policy' GAMA and Aidenvironment Asia joint statement 10 August 2018
- IndoAgri (2018) 'Annual report 2017' <http://indofoodagri.listedcompany.com/misc/ar2017.pdf>
- Indonusa Group website 'Lowongan Karir' <http://www.indonusaagromulia.com/karir.php> accessed 15 July 2018
- InfoSawit (2017a) 'Darwin Indigo - Generasi kedua penerus dampun Sawit Wilmar' 28 December 2015 <https://www.infosawit.com/news/7444/darwin-indigo-generasi-kedua-penerus-kampiun-sawit-wilmar>
- InfoSawit (2017b) 'PT Perkebunan Nusantara II membeli TBS ke Papua Nugini' 15 June 2017 <https://www.infosawit.com/news/6558/pt-perkebunan-nusantara-ii-membeli-tbs-ke-papua-nugini>
- Insider Stories (2012) 'Indonusa Agromulia buys Sawit Mas' 12 February 2012 <http://www.wisnuwijaya.com/2012/02/indonusa-agromulia-buys-sawit-mas.html>
- International Rhino Foundation website 'Sumatran rhino (*Dicerorhinus sumatrensis*)' <https://rhinos.org/species/sumatran-rhino/>
- IOI Group (2017a) 'Annual report 2017' http://www.ioigroup.com/Content/IR/PDF/AnnualReport/Corp/2017_AR.pdf
- IOI Group (2017b) 'Sustainable palm oil policy' <http://www.ioigroup.com/Content/S/PDF/Sustainable%20Palm%20Oil%20Policy.pdf>
- IOI Group (2017c) 'Update statement on IOI Pelita' 18 December 2017 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=866>
- IOI Group (2018a) 'Update statement on IOI Pelita' 12 January 2018 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=869>
- IOI Group (2018b) 'Update statement on IOI Pelita' 31 May 2018 <http://www.ioigroup.com/Content/NEWS/NewsroomDetails?intNewsID=881>
- IOI Group website 'Dato' Lee Yeow Chor' <http://www.ioigroup.com/Content/CI/D2>
- IOI Group website 'Estates and mills' http://www.ioigroup.com/Content/BUSINESS/B_Estates accessed 14 July 2018
- IOI Group website 'Group structure' http://www.ioigroup.com/Content/CI/Corp_Structure
- IOI Group website 'List of mills' http://www.ioigroup.com/Content/BUSINESS/B_Mills
- IOI Group website 'Refinery' http://www.ioigroup.com/Content/BUSINESS/B_Refinery accessed 14 July 2018
- Irawan Y (2015) 'Terpisah dari induknya, bayi orangutan diselamatkan pekerja perkebunan sawit' 18 September 2015 Kompas.com <http://regional.kompas.com/read/2015/09/18/20381181/Terpisah.dari.Induknya.Bayi.Orangutan.Diselamatkan.Pekerja.Perkebunan.Sawit>
- IUCN Red List of Threatened Species website 'Elephas maximus ssp. sumatranus' <http://www.iucn.org/details/199856/0>
- IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group (2017) 'Final report: Orangutan population and habitat viability assessment' <https://www.dropbox.com/sh/f3lycq9swiadjqh/AADVajgmKtx9fU6ZPLORoMda?dl=0>
- Jakarta Post (2014) 'Indonesia beckons for FelDa Global Ventures' 28 August 2014 <http://www.thejakartapost.com/news/2014/08/28/indonesia-beckons-felda-global-ventures.html>
- Jaya Tiasa (2017) 'Annual report 2017' <http://jayatiasa.listedcompany.com/misc/ar2017.pdf>
- Johnson & Johnson (nd) 'List of potential mills in palm-based derivatives supply chains provided by Johnson & Johnson direct suppliers in 2017' https://www.jnj.com/_document?id=00000164-ed97-d1a7-a9e7-ff9f7d0f0001
- Jong HN (2018) 'Indonesian oil palm smallholders sue state over subsidy to biofuel producers' 24 April 2018 Mongabay <https://news.mongabay.com/2018/04/indonesian-farmers-file-judicial-review-on-palm-oil-fund-as-big-companies-dominate-the-fund/>
- Kaltim Karir (2017) 'Lowongan Kerja Samarinda September 2017 Indogunta Group' 21 September 2017 <http://kaltimkarir.com/Lowongan-kerja-samarinda-september-2017-indogunta-group.html>
- Kellogg Company (2018) 'Kellogg extended supply chain mill list' http://www.kelloggcompany.com/content/dam/kelloggcompany/corporate_responsibility/pdf/2018/KelloggExtendedSupplyChainMill_List.pdf
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017a) 'Data pelepasan kawasan hutan' <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/02/Data-Pelepasan-Kawasan-Hutan.pdf>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017b) 'Perjanjian kerjasama kemitraan antara Balai KSDA Kalimantan Barat dengan PT. Permata Sawit Mandiri (PSM)' 30 November 2017 [http://ksdae.menlhk.go.id/info/2175/perjanjian-kerjasama-kemitraan-antara-balai-ksda-kalimantan-barat-dengan-pt.-permata-sawit-mandiri-\(psm\).html](http://ksdae.menlhk.go.id/info/2175/perjanjian-kerjasama-kemitraan-antara-balai-ksda-kalimantan-barat-dengan-pt.-permata-sawit-mandiri-(psm).html)
- Khairil AA (2017) Letter from Khairil Anuar Aziz, Officer-in-Charge/ Acting Group President, FelDa Global Ventures, to 'Valued Business Partners', 28 August 2017 <http://www.feldaglobal.com>

com/wp-content/uploads/2017/08/Letter-To-Business-Partners.pdf
Kiezebrink V (2017) 'Palming off responsibility: Labour rights violations in the Indonesian palm oil sector' Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen and CNV International https://www.cnvinternationaal.nl/_Resources/Persistent/494a6d41ea4525468b46072a02e-31f21e85a59c6/CNVI-0118%20Palmolie%20Indonesie-rapport-Low%20Res.pdf

KLP (2015) 'Decision to exclude from investment' 1 June 2015 http://english.klp.no/polopoly_fs/1.31196.1434009821!/menu/standard/file/Noble%20Group%20Ltd%20%20beslutning%20om%20ut-trekk%201062015%20ENG.pdf

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (2016) 'Hentikan bisnis militer dan hormati hak masyarakat adat Papua' 22 July 2016 <https://awasmifee.potager.org/?p=1440&lang=id>

Koplitz SN et al (2016) 'Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September–October 2015: Demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure' *Environmental Research Letters* 11(9) <http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094023>

Korindo (2016) 'Clarification against the misinformation about Korindo' v.1.0 23 September 2016

Korindo website 'Group profile: At a glance' <https://www.korindo.co.id/group-profile/#at-a-glance>

Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2012a) 'Re: Cancellation of concession location referral and location permit for PT HPA / Pencabutan persetujuan Prinsip Arahan Lokasi maupun Ijin Lokasi An. PT. Hati Prima Agro' (Letter No. 525.26/228/Ek.SDA/IV/2012) 19 April 2012 <https://greenpeace.box.com/s/mc7f99z7hlyg8wzexh7i8bqv593tj510>

Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2012b) 'Re: Cancellation of concession location referral, location permit and plantation business permit for PT HPA / Pencabutan persetujuan Prinsip Arahan Lokasi, Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Hati Prima Agro' (Letter No. 525.26/342/Ek.SDA/VI 2012) 21 June 2012 <https://greenpeace.box.com/s/plhy1faudw1cvuy1zdm3cy12xp4z2mj8>

Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2014a) 'Keputusan bupati Kotawaringin Timur no. 188.45/330/Huk-BPN/2014' 23 September 2014 <https://greenpeace.box.com/s/0sb-v8ywhadt5t3f443o4wr5y59oh7z7>

Kotawaringin Timur District Head Supian Hadi (2014b) 'Re: Plantation business permit (IUP) for PT Langgeng Makmur Sejahtera / Tentang Izin Usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) A.N. PT. Langgeng Makmur Sejahtera' (Letter No. 188.45/490/Huk-Ek.SDA/2014) 19 December 2014 <https://greenpeace.box.com/s/x3qq4ozcpj2ktxwhknvb8vbmaj81s0u>

Kraft Heinz (2018) 'Policy on palm oil usage and procurement' http://kraftheinzcompany.com/pdf/Kraft_Heinz_Sustainable_Palm_Policy.pdf

Krishnan R (2012) Letter from Ravin Krishnan, Grievance Coordinator, RSP0, to Michael Raben, PT Bumitama Gunajaya Agro, 13 December 2012 [http://www.rspo.org/file/Complaint%20PT%20Hati%20Prima%20Agro\(1\).pdf](http://www.rspo.org/file/Complaint%20PT%20Hati%20Prima%20Agro(1).pdf)

Krisno O (2017) 'Warga Ambawang protes perusahaan sawit' 25 August 2017 <https://daerah.sindonews.com/read/1233847/174/warga-ambawang-protes-perusahaan-sawit-1503658356>

Kuok KH (2018a) Fax from Kuok Khoo Hong to Greenpeace International, 20 June 2018, reproduced in Greenpeace International (2018c)

Kuok KH (2018b) Letter from Kuok Khoo Hong to Kiki Taufik, Greenpeace Southeast Asia, 4 July 2018 <http://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/07/WIL-letter-dtd-04-July-2018-to-Greenpeace.pdf>

Languwuyo Y (2014) 'Women and oil palm in an investment region' October 2014 Down to Earth <http://www.downtoearth-indonesia.org/story/women-and-oil-palm-investment-region>

Ling LS (2016) 'In the trenches with our suppliers to create a sustainable supply chain' 30 September 2016 GAR blog <https://goldenagri.com.sg/suppliers-create-sustainable-supply-chain/>

L'Oréal (nd) 'List of mills potentially connected to L'Oréal palm-based oleoderivatives supply-chain in 2017' https://sharingbeautywithall.loreal.com/sites/default/files/cms/list_of_mills_potentially_connected_to_lo-real_palm_palm_derivatives_s_1.pdf

Louis Dreyfus Co (2018) 'H2 2017

Palm traceability to mill' https://www.ldc.com/files/8115/3241/9840/LDC_Palm_Traceability_to_Mill_H2_2017.pdf

Luskin MS, Albert WR & Tobler MW (2017) 'Sumatran tiger survival threatened by deforestation despite increasing densities in parks' *Nature Communications* 8 <https://www.nature.com/articles/s41467-017-01656-4.pdf>

Mach M (2017a) Letter from Martin Mach, on behalf of Bumitama Agri Ltd, to Greenpeace, 30 January 2017 (copy held by Greenpeace)

Mach M (2017b) Letter from Martin Mach, on behalf of Bumitama Agri Ltd, to G Naidu Wathshlah, RSP0 Grievance Manager, 7 November 2017 (copy held by Greenpeace)

Mafrica Corporation website <https://www.mafrica.com.my> (under construction) accessed 14 July 2018

Mars (2018) 'Mill list full year 2016' <https://www.mars.com/docs/default-source/default-document-library/mars-suppliers---2016-full-mill-list.pdf?sfvrsn=2>

Meijaard E et al (2018) 'Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force' <https://portals.iucn.org/library/node/47753>

METCO website 'Sister companies -> Pacific Inter-Link representative office V' <http://en.metcotrading.com/Companies/10539>

Mewah (2018) 'Mewaholeo Industries, Pasir Gudang, January – June 2018 CPO traceability to mill declaration document' http://www.mewah-group.com/upload/Sustainability/MOIPG_CPO%20Traceability%20to%20Mill%20Declaration%20Document.pdf

Mighty Earth (2016) 'Korindo subsidiary's new "sustainability" commitments fail to deliver meaningful change' 18 November 2016 (update, 16 December 2016) <http://www.mightyearth.org/korindo-subsidiarys-new-sustainability-commitments-fail-to-deliver-meaningful-change/>

Mighty Earth (2017a) 'Policy for Association complaint against Korindo Group' 14 May 2017 <http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2017/05/17-5-14-FSC-Complaint-Korindo.pdf>

Mighty Earth (2017b) 'Still at it: Cargill and Bunge caught destroying the equivalent of 10,000 football fields

for the global meat trade' 18 May 2017 <http://www.mightyearth.org/still-at-it/>
Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1993) 'Ministerial regulation on procedures for obtaining location permits and land rights for companies involved in investment / Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 2 tahun 1993 tentang tata cara memperoleh Izin Lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal' 23 October 1993 <http://www.bpn.go.id/DesktopModules/EasyDNNNews/DocumentDownload.ashx?portalid=0&moduleid=1678&articleid=1540&documentid=1690>

Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (1999) 'Ministerial regulation on procedures for granting location permits for foreign investment companies and domestic investment companies / Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 2 tahun 1999 tentang tata cara pemberian Izin Lokasi PMA/PMDN' 10 February 1999 <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-Negara/peraturan-menteri-negara-agraria-2fkepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-2-tahun-1999-787>

Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency (2015) 'Ministerial regulation on location permits / Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional no. 5 tahun 2015 tentang Izin Lokasi' 28 April 2015 <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Menteri-ATR-Kepala-BPN/peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangkepala-bpn-nomor-5-tahun-2015-58154>

Minister of Agriculture (2002) 'Ministerial decree on plantation business permitting / Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 357/KPTS/HK.350/5/2002 tahun 2002 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan' 23 May 2002 <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/SK-357-02.pdf>

Minister of Agriculture (2007) 'Ministerial regulation on plantation business permitting procedures / Peraturan Menteri Pertanian no. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan' 28 February 2007

<http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan-26-07.pdf> (English translation available at <http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins72955.pdf>)

Minister of Agriculture (2013) 'Ministerial regulation on plantation business permitting procedures / Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan' 30 September 2013 <https://goo.gl/UWqNEV>; amended in 2016 by 'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 29/Permentan/Kb.410/5/2016' <https://goo.gl/ZP26tp> and further amended in 2017 by 'Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 21/Permentan/Kb.410/6/2017' <https://goo.gl/VyemhP>

Minister of Agriculture (2015) 'Ministerial regulation on Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system / Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia no. 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang sistem sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia' <http://perundangan.pertanian.go.id/admin/file/Permentan%2011-2015%20ISPO.pdf>

Minister of Environment and Forestry (2015) 'Ministerial regulation on procedures for the imposition, collection and deposit of forestry fees, reforestation funds, stumpage fees, stumpage compensation and IUPH fees / Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.44/Menlhk-setjen/2015 tentang tata cara pengenaan, pemungutan dan penyetoran provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, penggantian nilai tegakan, ganti rugi tegakan dan iuran izin usaha pemanfaatan hutan' 12 August 2015 <http://peraturan.go.id/permen/kemenvlhk-nomor-p.44-menlhk-setjen-2015-tahun-2015.html>

Minister of Environment and Forestry (2016) 'Ministerial regulation on procedures for release of convertible production forest / Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi' 15 June 2016 <http://lpp.dephut.go.id/download.php?file=65c4a.P.51-HPK.pdf>

Minister of Forestry (2003) 'Ministerial decree on evaluation of forest area use / Keputusan Menteri Kehutanan no. 146/Kpts-ii/2003 tahun 2003 tentang

pedoman evaluasi penggunaan kawasan hutan/ex kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan' http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4cd3c2da825cf/node/1t5108bee238c79/keputusan-menteri-kehutanan-no-146_kpts-ii_2003-tahun-2003-pedoman-evaluasi-penggunaan-kawasan-hutan_-ex-kawasan-hutan-untuk-pengembangan-usaha-budidaya-perkebunan

Minister of Forestry (2008) 'Decision no. SK51/Menhut-II/2008 revoking State Forest Release covering 5369ha for PT HPA / Keputusan Menteri Kehutanan tentang pencabutan keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan nomor 186/KPTS-II/2000' 11 March 2008 <https://greenpeace.box.com/s/kw4zivp1xzajzk7m30dmk2tsn81sa71f>

Ministry of Foreign Affairs, Malaysia (2010a) 'Official signing ceremony between Bewani Oil Palm Plantations Limited and the Bewani landowners' 28 October 2010 <https://bit.ly/2o21UT1>

Ministry of Foreign Affairs, Malaysia (2010b) 'Official signing ceremony between Bewani Oil Palm Plantations Limited and the Bewani landowners' (original version) 28 October 2010 https://web.archive.org/web/20170110112821/http://www.kln.gov.my/web/png_port-moresby/home/-/asset_publisher/8pPT/blog/official-signing-ceremony-between-prosper-palm-oil-products-marketing-sdn-bhd-and-the-bewani-landowners

Ministry of Forestry (2010) Agriculture plantations, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, downloaded as Google Earth files (.kml) from <http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx>

MoEF (2014) 'Deforestasi Indonesia tahun 2012-2013'

MoEF (2015) 'Deforestasi Indonesia tahun 2013-2014'

MoEF (2016a) 'Deforestasi Indonesia tahun 2014-2015'

MoEF (2016b) 'National forest reference emission level for deforestation and forest degradation' http://redd.unfccc.int/files/frel_submission_by_indonesia_final.pdf

Mondelēz International (2018) 'Mills data' https://www.mondelez-international.com/impact/sustainable-resources-and-agriculture/-/media/mondelezcorporate/uploads/downloads/Mills_Data.pdf

Mongabay.com (2016) 'Indonesia's rich list stacked with palm oil billionaires' 27 December 2016 <http://www.eco-business.com/news/indonesias-rich-list-stacked-with-palm-oil-billionaires/>

Mongabay Indonesia (2017) 'Cerita warga minta plasma kala Korindo moratorium buka lahan sawit di Papua' 10 August 2017 <http://www.mongabay.co.id/2017/08/10/cerita-warga-minta-plasma-kala-korindo-moratorium-buka-lahan-sawit-di-papua/>

Moran S (2017) Letter from Selwyn Moran to RSP0 Sekretariat, 12 December 2017

Mucholik I (2016) 'Gugatan NO, suku Iwaro siap gugat PT PPM kembali' 27 July 2016 Teropong News <http://www.teropongnews.com/berita/gugatan-no-suku-iwarosiap-gugat-ppm-kembali/>

Musim Mas (2016) 'Tunas Sawa Erma: A moratorium on development with immediate effect' 9 August 2016 <http://www.musimmas.com/news/general-news/2016/tunas-sawaerma-a-moratorium-on-development-with-immediate-effect>

Musim Mas website 'Supply chain map' <http://www.musimmas.com/sustainability/traceable-supply-chain/supply-chain-map>

Nelson PN et al (2014) 'Oil palm and deforestation in Papua New Guinea' *Conservation Letters* May/June 2014 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/conl.12058/epdf>

Nestlé (2018) 'Palm mill list: Snapshot: November 2017' <https://www.nestle.com/asset-library/documents/creating-shared-value/responsible-sourcing/list-mills-february-2018.pdf>

Ngelia Y (2016) 'Campur tangan militer dan polisi dalam kasus sengketa tanah pada mega industri pertanian di Muting Merauke' in ELSAM (2016) 'Pembela HAM menulis bunga rampai pendokumentasian situasi HAM di tanah Papua seri 1' <http://elsam.or.id/2016/11/pembela-ham-menulis-bunga-rampai-pendokumentasian-situasi-ham-di-tanah-papua-seri-1/>

Noble Group (2012) 'Non-material acquisitions and disposal' 26 March 2012 http://www.finanznachrichten.de/pdf/20120326_222152_N21_24B97E-4F5838B0A8482579CD0034CB18.1.pdf

Noble Group (2015a) 'Annual report 2014' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2014.pdf>

Noble Group (2015b) 'SGX announcement by Noble Group' 17 February 2015 <http://www.thisisnoble.com/newsroom/939-sgx-announcement-by-noble-group.html>

Noble Group (2016a) 'Annual report 2015' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2015.pdf>

Noble Group (2016b) 'SGX announcement by Noble Group - Disposal of Noble Agri' 3 March 2016 <http://www.thisisnoble.com/newsroom/1096-sgx-announcement-by-noble-group-disposal-of-noble-agri.html>

Noble Group (2017) 'Annual report 2016' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2016.pdf>

Noble Group (2018) 'Annual report 2017' <http://www.thisisnoble.com/images/investors/financialInformation/annualReport/ar2017.pdf>

Noble Plantations Pte Ltd (2016) 'RSP0 annual communications of progress 2016' <https://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/noble%20plantations%20pte%20Ltd-ACOP2016.pdf>

Noble Plantations Pte Ltd (2017) 'Sustainability information document' <http://www.thisisnoble.com/images/responsibility/NoblePlantationsOct2017.pdf>

Norges Bank (2015) 'Decision on exclusion of companies from the Government Pension Fund Global' 17 August 2015 <https://www.nbim.no/en/transparency/news-list/2015/decision-on-exclusion-of-companies-from-the-government-pension-fund-global/>

NPC Resources (2017) 'Annual report 2016' https://www.npc.com.my/NPC_Annual_Report_2016.pdf

NPC Resources website 'Company overview' <http://npc.com.my/index.htm> accessed 16 July 2018

Numapo J (2013) 'Commission of inquiry into the Special Agriculture and Business Lease (SABL): Final report' 24 June 2013 <http://www.coi.gov.pg/documents/COI%20SABL/Numapo%20SABL%20Final%20Report.pdf>

Olam (2018) 'Olam mill list (2017)' <http://49tmko49h46b4e0c-z3rlqaye1b.wpengengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2018/05/2017-Mill-List-April-2018.pdf>

OPPUK, Rainforest Action Network & International Labor Rights Forum (2017) 'The human cost of conflict palm oil revisited' November 2017 https://www.ran.org/new_report_finds_ongoing_worker_exploitation_poverty_wages_toxic_conditions_on_palm_oil_plantations_linked_to_pepsico_nestle

Orere B (2017) 'PNG PM confirms cancellation of all special agriculture and business leases' 13 March 2017 Pacific Islands Report <http://www.pireport.org/articles/2017/03/13/png-pm-confirms-cancellation-all-special-agriculture-and-business-leases>

Paino C (2017) 'Polemik tanah marga di Kampung Bupul, saat hutan berubah jadi kebun sawit' 30 November 2017 <http://www.mongabay.co.id/2017/11/30/polemik-tanah-marga-di-kampung-bupul-saat-hutan-berubah-jadi-kebun-sawit/> (English translation available at <https://awasmifee.potager.org/?p=1585>)

Palangkaraya District Court, Central Kalimantan (2013) 'Putusan PN PALANGKARAYA nomor 448/Pid. Sus/2013/PN.PL.R tahun 2014' register date 17 December 2013 <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1ef3fb00b5f3b06bbd18e23e99f3d94b>

Palangkaraya High Court, Central Kalimantan (2015) 'Putusan PT PALANGKARAYA nomor 25/PID/25/2015/PT.PLK tahun 2015' register date 30 March 2015 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/bd1ed91bd34fa21d0eb38216ca40ed83>

Palm Oil Magazine (2016) 'SSMS sold two sub industries' 5 January 2016 <http://palmoilmagazine.com/index.php/news/detail/ssms-sold-two-sub-industries>

Patjole C (2017) 'Wharf to complement projects' 12 June 2018 Loop PNG <http://www.looppng.com/business/wharf-complement-projects-77304>

Pearce F (2014) 'The Forest Trust: Greening or greenwashing?' 11 February 2014 GreenBiz <https://www.greenbiz.com/blog/2014/02/11/forest-trust-greening-merely-greenwash>

PepsiCo (2018) 'PepsiCo palm oil mill list 2017' https://www.pepsico.com/docs/album/policies-doc/pepsico-2017-palm-oil-mill-list.pdf?sfvrsn=ca59d041_2

P&G website 'P&G's direct palm suppliers - 2017' <https://us.pg.com/sustainability/environmental-sustainability/policies-practices/palm-oil/pandg-direct-palm-suppliers-2017>

PIL (2018) 'Pacific Inter-link (PIL) statement on sustainability commitments' 6 June 2018 http://www.pilgroup.com/news_gallery

PIL website 'About' <http://www.pilgroup.com/about>

PIL website 'Message from management' <http://www.pilgroup.com/about#msg>

PIL website 'Sustainability' <http://www.pilgroup.com/sustainability>

Plantation Law 2004 (UU No. 18/2004 Tentang Perkebunan) <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download-file/lt4c4d3fa1acb21/parent/19805>

Plantation Law 2014 (UU No. 39/2014 Tentang Perkebunan) <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5460697e66f86/node/lt52e62798ccafa/uu-no-39-tahun-2014-perkebunan>

POIG (2016) 'Verification Indicators March 2016' http://poig.org/wp-content/uploads/2014/09/Def-POIG-Indicators_English_311017.pdf

POSCO Daewoo website 'Trade' <http://www.posco.com/homepage/docs/eng5/jsp/Family/daewoo.jsp?mdex=posco6DA> accessed 16 July 2018

President of the Republic of Indonesia (1996) 'Government regulation 40/1996 on land cultivation right, building use right and land use right' / Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah' <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-40-tahun-1996-1087>

President of the Republic of Indonesia (2010) 'Government regulation 15/2010 on implementation of spatial planning' / Peraturan pemerintah Republik Indonesia no. 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang' <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan/Peraturan-Pemerintah/peraturan-pemerintah-nomor-15-tahun-2010-2160>

President of the Republic of Indonesia (2018) 'Presidential Regulation 13/2018 on the application of principles to introduce beneficial ownership of corporations in the framework for the prevention and eradication of the crimes

of money laundering and the financing of terrorism' / Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme' <http://eiti.ekon.go.id/perpres-13-2018/?aid=2348&sa=1>

Prevention and Eradication of Forest Destruction Law 2013 (UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan) <http://peraturan.go.id/uu/nomor-18-tahun-2013.html>

Pro Kaltim (2015) 'Investasi pabrik hingga rel kereta' 9 October 2015 <http://kaltim.prokal.co/read/news/246002-investasi-pabrik-hingga-rel-kereta>

Profindo website 'Board of commissioner' http://profindo.com/?page_id=57 accessed 15 July 2018

Proforest website 'About us - Implementing responsible practices' <https://www.proforest.net/en/about-us/our-expertise/implementing-responsible-production-and-sourcing-practices> accessed 15 July 2018

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016a) 'Annual report 2015' https://anj-group.com/en/annual-report/download/78/ANJ%20AR%202015%20English%20Version_9MC3ED20170327152322.pdf

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2016b) 'Sustainability policy' 28 November 2016 <https://anj-group.com/en/news-events/index/sustainability-policy>

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2017) 'Annual report 2016' https://anj-group.com/en/annual-report/download/481/ANJ%20AR%202016%20English_65JmET20170505153254.pdf

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (2018) 'Annual report 2017' https://anj-group.com/en/annual-report/download/755/ANJ%20AR%2017%20English%20Hires%20compressed_HoWSH120180423165151.pdf

PT Guntara Samba (2015) 'Lowongan kerja' 15 August 2015 <http://me.unram.ac.id/en/2015/08/Lowongan-pt-guntara-samba/>

PT Musim Mas (2011) 'RSP0 notification of proposed new planting' 28 July 2011 https://www.rspo.org/file/RSP0%20NOTIFICATION%20PT%20Musim%20Mas_28%20July%202011.pdf

PT Permata Sawit Mandiri (2014) 'RSP0 notification of proposed new

planting' 23 May 2014 <https://rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/genting-pt-permata-sawit-mandiri-pt-psm>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2014) 'Annual report 2013' <http://www.simp.co.id/Investor-Relation/AnnualReport.aspx>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2015) 'Annual report 2014' <http://www.simp.co.id/Investor-Relation/AnnualReport.aspx>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2016a) 'Annual report 2015' <http://www.simp.co.id/Investor-Relation/AnnualReport.aspx>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2016b) 'RSP0 annual communications of progress 2016' <https://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/pt.%20salim%20ivomas%20pratama%20tbk-ACOP2016.pdf>

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (2018) 'Annual report 2017' <http://www.simp.co.id/Investor-Relation/AnnualReport.aspx>

PT Sawit Mandiri Lestari (2014) 'Summary report of SEIA and HCV assessments' <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/pt-sawit-sumbermas-sarana-tbk-pt-sawit-mandiri-lestari>

PT Sawit Sumbermas Sarana (2016a) 'Annual report 2016' https://ssms.co.id/uploads/2017/10/SSMS_Annual-Report-20161507179613.pdf

PT Sawit Sumbermas Sarana (2016b) 'RSP0 annual communications of progress 2016' <http://www.rspo.org/file/acop2016/submissions/pt.%20sawit%20sumbermas%20sarana-ACOP2016.pdf>

PT Sawit Sumbermas Sarana (2017) 'Sustainability policy' 13 September 2017 <https://ssms.co.id/wp-content/uploads/2017/11/New-Sustainability-Policy-SSMS.pdf>

PT Sawit Sumbermas Sarana (2018a) 'Investor update January 2018' <https://ssms.co.id/uploads/2018/01/201801-SSMS-Investor-Update-v631515565142.pdf>

PT Sawit Sumbermas Sarana (2018b) 'SSMS response to foresthints.news article on PT BSG' 18 May 2018 <https://ssms.co.id/en/media/detail/ssms-response-to-foresthintsnews-article-on-pt-bsg>

PT Tunas Baru Lampung Tbk (2016) 'RSP0 annual communications of progress (2016)' <https://www.rspo.org/file/>

- acop2016/submissions/pt.%20tunas%20baru%20lampung%20tbk-ACOP2016.pdf
PT Tunas Baru Lampung Tbk website 'Plantation profile' <http://www.tunasbarulampung.com/en/plantation-profile/> accessed 16 July 2018
- PZ Cussons (nd) 'Palm oil supplier mill list' https://www.pzcussons.com/en_int/csr/palm-oil
- Radar Sorong (2015) '9 marga tuntutan ganti rugi tanaman dan sewa lahan' 8 September 2015 <http://www.radarsorong.com/read/2015/09/08/39997/9-Marga-Tuntut-Ganti-Rugi-Tanaman-dan-Sewa-Lahan>
- Rainforest Action Network & Forest Peoples Programme (2017) 'International NGOs condemn IOI Group's plan to divest from conflict palm oil plantation' 14 December 2017 https://www.ran.org/international_ngos_condemn_ioi_group_s_plan_to_divest_from_conflict_palm_oil_plantation
- Rainforest Action Network et al (2016) 'Second FELDA customer and financier letter' 23 September 2016 https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/16936/attachments/original/1475190418/Second_FELDA_Customer_Letter_FINAL.pdf?1475190418
- Reckitt Benckiser (nd) 'RB 2017 palm oil mills' http://www.rb.com/media/3314/rb-palm-oil-mill-list_2017.pdf
- Redaksi (2009) 'Tanjabtim akan membangun pelabuhan internasional' 11 April 2009 Berita Sore Online <http://beritasore.com/2009/04/11/tanjabtim-akan-membangun-pelabuhan-internasional/>
- Redaksi (2016) 'Praktik "Nakal" Sungai Budi' 21 December 2016 AgroIndonesia <http://agroindonesia.co.id/2016/12/praktik-nakal-sungai-budi/>
- REDD-Monitor (2016) 'Illegal logging, palm oil and politics in Central Kalimantan' 20 May 2016 <http://www.redd-monitor.org/2016/05/20/illegal-logging-palm-oil-and-politics-in-central-kalimantan/>
- Rimbunan Hijau website 'Home' <http://www.rhpng.com.pg> accessed 16 July 2018
- Rimbunan Sawit Bhd (2017) 'Annual report 2016' <http://rsb.listedcompany.com/misc/ar/ar2016.pdf>
- RSPO (2013a) 'Principles and criteria for the production of sustainable palm oil' <http://www.rspo.org/resources/key-documents/certification/rspo-principles-and-criteria>
- RSPO (2013b) 'RT11 participants list (updated as at 9 November 2013)' https://rt11.rspo.org/ckfinder/userfiles/files/RT11%20PARTICIPANTS%20LIST_131109.pdf
- RSPO (2017) 'RSPO membership rules 2016' <https://www.rspo.org/publications/download/638ae27c7f6b004>
- RSPO website 'Board of governors' <https://www.rspo.org/about/who-we-are/board-of-governors> accessed 14 July 2018
- RSPO website 'Bumitama Agri Ltd' <https://rsपो.org/members/2551/BUMITAMA-AGRI-LTD>
- RSPO website 'Case tracker: Genting Plantation Berhad (PT Susantri Permai, PT Kapuas Maju Jaya and PT Dwie Warna Karya)' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/104> accessed 14 July 2018
- RSPO website 'Case tracker: IOI - IOI Pelita Sdn Bhd' <https://rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/4>
- RSPO website 'Case tracker: PT Bumi Sawit Kencana II' <https://rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/99>
- RSPO website 'Case tracker: PT Hati Prima Agro' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/23>
- RSPO website 'Case tracker: PT Henrison Inti Persada subsidiary of RSPO member Noble Plantation Pte Ltd' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/73>
- RSPO website 'Case tracker: PT Nabire Baru' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/94>
- RSPO website 'Case tracker: PT Permata Hijau Pasaman 1 (Wilmar International Ltd)' <https://rsपो.org/members/complaints/status-of-complaints/view/76>
- RSPO website 'Case tracker: PT Pusaka Agro Lestari' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/110>
- RSPO website 'Case tracker: PT Sumbermas Sarana subsidiary of PT Sawit Mandiri Lestari' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/82> accessed 14 July 2018
- RSPO website 'Case tracker: PT Susantri Permai' <https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/102> accessed 14 July 2018
- RSPO website 'Complaints' <https://rsपो.org/members/complaints>
- RSPO website 'Future Prelude Sdn Bhd' <https://www.rspo.org/members/3912/Future-Prelude-Sdn.-Bhd>
- RSPO website 'Genting Plantations Berhad' <https://www.rspo.org/members/2/Genting-Plantations-Berhad> accessed 14 July 2018
- RSPO website 'GeoRSPO - RSPO map-builder app' <https://rsपो.org/geo-rspo>
- RSPO website 'IOI Corporation Berhad' <https://www.rspo.org/members/62/IOI-Corporation-Berhad>
- RSPO website 'New planting procedures public notification' <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/> accessed 16 July 2018
- RSPO website 'New planting procedures public notification: ANJA - PT Putera Manunggal Perkasa' 6 August 2014 <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/anja-pt-putera-manunggal-perkasa>
- RSPO website 'New planting procedures public notification: FELDA - PT Temila Agro Abadi' 15 August 2014 <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/felda-pt-temila-agro-abadi>
- RSPO website 'New planting procedures public notification: PT Austindo Nusantara Jaya - PT Permata Putera Mandiri' 23 October 2014 <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/pt-austindo-nusantara-jaya-agri-pt-permata-putera-mandiri>
- RSPO website 'New planting procedures public notification: PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk - PT Sawit Mandiri Lestari' 12 March 2015 <https://www.rspo.org/certification/new-planting-procedures/public-consultations/pt-sawit-sumbermas-sarana-tbk-pt-sawit-mandiri-lestari>
- RSPO website 'Noble Plantations Pte Ltd' <https://www.rspo.org/members/830/Noble-Plantations-Pte-Ltd>
- RSPO website 'Principles & Criteria review' <https://www.rspo.org/principles-and-criteria-review#tfm> accessed 16 July 2018
- RSPO website 'PT. Bio Inti Agrindo' <https://www.rspo.org/members/7189/PT.-Bio-Inti-Agrindo>
- RSPO website 'PT. Synergy Oil Nusantara' <https://rsपो.org/members/6488/PT.-Synergy-Oil-Nusantara>
- RSPO website 'S&G Biofuel Pte. Ltd' <https://www.rspo.org/members/6654/SG-BIOFUEL-PTE.-LTD>
- RSPO website 'Status of current disputes' <https://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility/status-of-disputes#004>
- RSPO website 'Wilmar International Limited' <https://www.rspo.org/members/88/Wilmar-International-Limited>
- Salam Papua (2016) 'PT PAL paparkan kinerja kepada pemkab Mimika' 14 July 2016 <http://www.salamapua.com/2016/07/pt-pal-paparkan-kinerjanya-kepada.html>
- Samling Group website 'Oil palm plantations' <http://www.samling.com/oilpalm.php> accessed 6 June 2018
- Samling Group website 'Our milestones: Corporate' http://www.samling.com/milestones_corporate.php accessed 16 July 2018
- Samsung C&T Corporation and Subsidiaries (2017) 'Consolidated interim financial statements June 30, 2017 and 2016' <http://www.samsungcnt.com/downloadFile.do?fileSeqNum=rkqaliicmbfy>
- Sime Darby website 'Open palm traceability dashboard' <http://www.simedarbyplantation.com/sustainability/open-palm-traceability-dashboard>
- Singapore Exchange (2015) 'General announcement: Disclosure pursuant to rule 704(10) of the SGX-ST listing manual' 28 December 2015 http://infopub.sgx.com/Apps?A=COW_CorpAnnouncement_Content&B=AnnouncementToday&F=V84SS-G2YV040SME1&H=81316f49e6515b-54f772ba5d3768f830fbfcca-2c134a69d4f5e06ccda84df8d6
- SPAR (2018) 'SPAR verzichtet auf Palmöl' 20 March 2018 http://presse.spar.at/News_Detail.aspx?id=63379&menueid=123
- SPOTT website 'IJM Plantations Bhd' <https://www.spott.org/palm-oil/ijm-plantations-bhd/date/may-2016/> accessed 16 July 2018
- Steering Group on No Deforestation and the High Carbon Stock Approach (2015) 'Terms of Reference' <http://highcarbonstock.org/wp-content/uploads/2014/12/Terms-of-Reference-HCS-Approach-SG-V1-Final.pdf>
- Suara Papua (2014) 'Uskup Timika - Perkebunan kelapa sawit di Timika ancaman bagi masyarakat pesisir' 25 November 2014 <http://suarapapua.com/2012/11/06/uskup-timika-perkebunan-kelapa-sawit-di-timika-ancaman-bagi-masyarakat-pesisir/> (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1105>)
- Suara Pusaka (2015a) 'Dalam waktu 9 bulan, 4 warga jadi korban kriminalisasi dari lahan perkebunan sawit ANJ' 3 October 2015 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/2015/10/dalam-waktu-9-bulan-4-warga-jadi-korban-kriminalisasi-dari-lahan-perkebunan-sawit-anj/> (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1321>)
- Suara Pusaka (2015b) 'Demo PT. PPM: Warga menuntut keadilan ditahan Polresta Sorong' 17 May 2015 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/2015/05/demo-pt-ppm-warga-menuntut-keadilan-ditahan-polresta-sorong/> (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1220>)
- Suara Pusaka (2015c) 'Marga Gue menggugat perusahaan kelapa sawit PT. PPM' 4 October 2015 Yayasan Pusaka <http://pusaka.or.id/marga-gue-menggugatperusahaan-kelapa-sawit-pt-ppm/> (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1321>)
- Suara Pusaka (2018) 'Deforestasi di Papua, APM diduga merambah hutan cagar alam' 18 March 2018 <http://pusaka.or.id/2018/03/deforestasi-di-papua-apa-diduga-merambah-hutan-cagar-alam/>
- Subur Tiasa (2017) 'Annual report 2016' <https://www.suburtiasa.com/wp-content/uploads/2016/11/SUBUR-TIASA-AR-2016.pdf>
- Sudaka S (2016) Letter from Sonny Sukada, ANJ Director of Sustainability, to Greenpeace Southeast Asia, 20 October 2016
- Supreme Court of Indonesia (2013) 'Putusan Mahkamah Agung nomor 435 K/TUN/2013 tahun 2013 Menteri Kehutanan Republik Indonesia vs. PT. Hati Prima Agro, DK' <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/70933748da2a2f2d7b4bafd733f186d6>
- Tabloid Jubi (2014) 'Korban banjir di Mimika Tengah butuh bantuan' 7 October 2014 <http://tabloidjubi.com/16/2014/10/07/korban-banjir-di-mimikatengah-butuh-bantuan/>
- Tabloid Jubi (2015) 'Dishut Mimika siapkan aturan pengawasan perusahaan sawit' 7 April 2015 <http://tabloidjubi.com/16/2015/04/07/dishut-mimika-siapkan-aturan-pengawasan-perusahaan-sawit/> (English translation available at <https://awasmiffee.potager.org/?p=1186>)
- Tabung Haji website 'About us' <https://www.tabunghaji.gov.my/en/corporate/corporate-information/about-us>
- Tabung Haji website 'Plantation' <https://www.tabunghaji.gov.my/en/investment/strategic-investment/plantation>
- Tadmax Resources Bhd (2012) 'Proposed establishment of joint venture with Bumimas Raya Sdn Bhd, Pacific Inter-Link Sdn Bhd, Yakin Dijaya Sdn Bhd and Al Salam Bank Bahrain via Tulen Jayamas Sdn Bhd as the joint venture company ("proposed JV")' 3 August 2012 http://disclosure.bursamalaysia.com/FileAccess/apbursaweb/download/?name=EA_GA_Attachments&id=49218
- Tan CK (2017) 'Malaysia tries to nip the FGV scandal in the bud' 29 June 2017 Nikkei <https://asia.nikkei.com/magazine/20170629/Business/Malaysia-tries-to-nip-the-FGV-scandal-in-the-bud>
- Tempo.co (2014) 'Jokowi tinjau izin HTI bermasalah di Riau' 27 November 2014 <https://nasional.tempo.co/read/624879/jokowi-tinjau-izin-hti-bermasalah-di-riau>
- Teng LJ (2017) 'Cover story: Succession concerns loom over Tiong's empire' 4 May 2017 The Edge Malaysia <http://www.theedgemarkets.com/article/cover-story-succession-concerns-loom-over-tiongs-empire>
- TH Plantations Bhd (2018) 'Annual report 2017' <http://ir.chartnexus.com/thplantation/doc/ar/ar2017.pdf>
- The Hershey Company (2017) 'January through June 2017 palm oil traceability - Mill listing' <https://www.thehersheycompany.com/content/dam/corporate-us/documents/information/hershey-h1-2017-traceability-data.pdf>
- The National (2018) 'Bewani oil palm project all set for first shipment' 15 June 2018 <https://www.thenational.com.pg/bewani-oil-palm-project-all-set-for-first-shipment/>
- The Nature Conservancy Indonesia (2017) 'Annual report 2016' <https://www.nature.or.id/en/publication/annual-report-and-general-conserva->

tion-issues/annual-report-2016.pdf

TFT (2017a) 'How brands can drive palm oil change' 21 September 2017 <http://www.tft-earth.org/stories/blog/brands-can-drive-change-palm-oil-supply-chains/>

TFT (2017b) 'Starling FAQs – Version 1.1' 10 July 2017 http://www.intelligence-airbusds.com/files/pmedia/public/r49273_9_2017_-_08_-_29_starling_faqs.pdf

TFT Transparency Hub website 'Palm oil Indonesia update: December 13, 2016' <http://www.tft-transparency.org/2016/12/13/palm-oil-indonesia-update/>

TFT website 'Clients' <http://www.tft-earth.org/who-we-work-with/partners/> accessed 15 July 2018

TFT website 'Members' <http://www.tft-earth.org/who-we-work-with/members/> accessed 15 July 2018

Thoumi G (2017) 'Indofood Agri Resources: Material risks from 42 percent contested landbank and labor issues' 7 March 2017 *Seeking Alpha* <https://seekingalpha.com/article/4052463-indofood-agri-resources-material-risks-42-percent-contested-landbank-labor-issues>

TNS (2015) 'Palm oil perception – TNS 5th report' May 2015 <https://www.palmoilandfood.eu/sites/default/files/4%20-%202015%2006%2001%20olivier%20charrier%20%20Presentatoin%20to%20EPOA%202nd-%20jun%20-%202015%20final.pdf>

Tribun Kaltim (2015) 'Agra Bareksa bangun pabrik pulp dan rel kereta api di PPU' 3 March 2015 <http://kaltim.tribunnews.com/2015/03/03/agra-bareksa-bangun-pabrik-pulp-dan-rel-kereta-api-di-ppu>

Tribun Pontianak (2018) 'Peresmian pabrik minyak kelapa sawit PT GAN di Kubu Raya' 20 March 2018 <http://pontianak.tribunnews.com/2018/03/20/peresmian-pabrik-minyak-kelapa-sawit-pt-gan-di-kuburaya>

Unilever (2018) 'We take a radical step on palm oil supply chain transparency' 16 February 2018 <https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2018/we-take-a-radical-step-on-palm-oil-supply-chain-transparency.html>

Unilever (nd) '2017 palm oil mills' <https://www.unilever.com/Images/unilever-palm-oil-mill->

[list_tcm244-515895_en.pdf](#)

United States House of Representatives (2005) 'The role of BNP-Paribas SA in the United Nations Oil-for-Food Program', Hearing before the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on International Relations, 28 April 2005 http://commdocs.house.gov/committees/intlrel/hfa20921.000/hfa20921_0.HTM

Voigt M et al (2018) 'Global demand for natural resources eliminated more than 100,000 Bornean orangutans' *Current Biology* <https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.01.053>

Wetlands International (2006) 'Peta-peta sebaran lahan gambut, luas dan kandungan karbon di Papua / Maps of peatland distribution area and carbon content in Papua, 2000–2001' Wetlands International – Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) <http://wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Papua.pdf>

Wijaya A et al (2017) 'Drivers of deforestation in Indonesia, inside and outside concessions areas' 19 July 2017 World Resources Institute <http://www.wri.org/blog/2017/07/drivers-deforestation-indonesia-inside-and-outside-concessions-areas>

Wilmar International Ltd (2013a) 'No deforestation, no peat, no exploitation policy' 5 December 2013 <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy.pdf>

Wilmar International Ltd (2013b) 'Wilmar International announces policy to protect forests and communities' 5 December 2013 <http://www.tft-earth.org/wp-content/uploads/2015/01/WIL-Announces-No-Deforestation-No-Peat-No-Exploitation-Policy-5-Dec-2013.pdf>

Wilmar International Ltd (2018a) 'Annual report 2017' http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/Wilmar-Annual-Report-2017-final.pdf

Wilmar International Ltd (2018b) 'General announcement: Resignation of Non-Independent Non-Executive Director and Country Head of Indonesia' 3 July 2018 http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/SGX%20Announcement%20-%20Resignation%20of%20nonindependent%20non%20exec%20director%20and%20country%20head%20indonesia.pdf

Wilmar International Ltd (2018c)

'General announcement: Resignation of Non-Independent Non-Executive Director and Country Head of Indonesia' 3 July 2018 http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/SGX%20Announcement%20-%20Resignation%20of%20nonindependent%20non%20exec%20director%20and%20country%20head%20indonesia.pdf

Wilmar International Ltd (2018d) 'Grievance list with progress updates – Updated: 14 June 2018' http://www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2018/06/18614_Grievance-update.pdf

Wilmar International website 'Oil palm plantation Mar 2017' <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/Oil-Palm-Plantation-Mar-2017-web.jpg>

Wilmar International website 'Supply chain map' <http://www.wilmar-international.com/sustainability/supply-chainmap/>

Wilmar International website 'Tropical oils: Plantations' <http://www.wilmar-international.com/our-business/tropical-oils/plantations/>

World Bank Group (2016) 'The cost of fire: An economic analysis of Indonesia's 2015 fire crisis' Indonesia Sustainable Landscapes Knowledge Note 1 February 2016 <http://pubdocs.worldbank.org/en/643781465442350600/Indonesia-forest-fire-notes.pdf>

Wright S & Karmini N (2017) 'Indonesia forest threatened by development despite new rules' 23 August 2017 AP News <https://www.apnews.com/0a54eebd250146baa82a8e4565a7499f>

Yaacob S (2018) Letter from Sala-hudin Yaacob, RSPO Technical Director, to Selwyn Moran, FPP, Greenpeace and Yayasan Pusaka, 21 March 2018

Yayasan Pusaka et al (2017) 'Press release: Condemn the violence against indigenous people of Iwaro, West Papua' 20 November 2017 <http://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/PRESS%20RELEASE%20on%20Iwaro%20Nov%202017.pdf>

Yun M & Humber Y (2014) 'Cofco buys Noble Agri unit stake as China seeks food supply' 2 April 2014 Bloomberg Business <http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-04-01/cofco-to-pay-1-5-billion-for-stake-in-noble-s-agriculture-unit>



1 April 2018,
PT Inocin Abadi (Korindo), Papua,
6°52'0.018"S 140°42'20.861"E



23 Oktober 2011, Pomio, Papua New Guinea
©Hilton/Greenpeace

Sampul depan:
11 Desember 2016, PT Damai Agro Sejahtera
(Bumitama),
Kalimantan, 1°30' 28"S 110°16' 27"E
©Ifansasti/Greenpeace

GREENPEACE HITUNG * MUNDUR TERAKHIR

September 2018
Published by Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands

www.greenpeace.org/finalcountdown